



Merencanakan Dari Desa
**Pembelajaran
dari Program
PLBPM**

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan

Daftar Isi

Daftar Isi	i	Kab. Kep. Seribu	125	Kab. Pontianak	263
Sekapur Sirih (MenKP)	ii	Kodya Jakarta Utara	131	Kab. Bengkayang	269
Gambaran Umum	iv	Kab. Batang	137	Kab. Katingan	273
		Kab. Brebes	145	Kab. Pulang Pisau	279
<i>Pulau Sumatera</i>		Kab. Pekalongan	151	Kab. Kotawaringin Barat	285
Kab. Serdang Bedagai	3	Kab. Demak	157	Kab. Tanah Bumbu	293
Kab. Tapanuli Tengah	9	Kab. Tegal	163	Kab. Nunukan	299
Kab. Labuhan Batu	15	Kab. Jepara	169	Kab. Penajam Paser Utara	305
Kota Pariaman	21	Kab. Pacitan	175		
Kab. Pesisir Selatan	27	Kab. Malang	181	<i>Pulau Sulawesi</i>	
Kab. Padang Pariaman	33	Kab. Pasuruan	189	Kota Bitung	311
Kab. Pasaman Barat	41	Kab. Trenggalek	195	Kab. Selayar	315
Kab. Bengkalis	49	Kab. Gresik	203	Kab. Banggai Kepulauan	319
Kab. Tanjung Jabung Barat	57	Kab. Surabaya	209	Kab. Tojo Una - Una	325
Kab. Musi Banyuasin	63	Kab. Sampang	215	Kab. Boul	333
Kota Palembang	69	Kab. Sumenep	221		
Kab. Lampung Barat	73	Kab. Pamekasan	225	<i>Kepulauan Maluku</i>	
Kab. Lampung Selatan	79			Kab. Maluku Tenggara Barat	341
Kab. Bengkulu Utara	85	<i>Pulau Bali</i>		Kab. Halmahera Selatan	347
Kab. Bangka Barat	89	Kab. Tabanan	235	Kab. Halmahera Utara	353
				Kota Ternate	357
<i>Pulau Jawa</i>		<i>Kepulauan Nusa Tenggara</i>		Kab. Kep. Sula	363
Kab. Tangerang	97	Kota Bima	243		
Kab. Pandeglang	103	Kab. Ende	249	<i>Pulau Papua</i>	
Kab. Ciamis	107	Kab. Nagekeo	255	Kab. Merauke	371
Kab. Cirebon	113			Kab. Sorong	377
Kab. Indramayu	119	<i>Pulau Kalimantan</i>		Kab. Manokwari	381
				Ucapan Terima Kasih	386





Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar. Pemberdayaan potensi sumberdaya hayati dan non hayati pada sektor ini, dapat mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik pada masa mendatang. Dengan luas wilayah laut hingga 2/3 dari total keseluruhan wilayah kedaulatannya, serta meningkatnya peranan laut dalam mengurangi dampak kenaikan paras air laut dan mendukung ketahanan pangan, kontribusi Indonesia terhadap kelestarian lingkungan dan kesinambungan penyediaan pangan di dunia menjadi sangat vital. Budaya maritim yang kental yang dimiliki oleh suku-suku yang mendiami kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti memberikan nuansa berbeda bagi bangsa kita. Potensi ekonomi, ekologi dan sosial ini jika dikelola secara bijaksana tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi upaya-upaya mendukung “Pro-Growth”, “Pro-Job” dan “Pro-Poor” yang merupakan landasan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Di masa mendatang, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi sektor unggulan dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi nasional.

Departemen Kelautan dan Perikanan terus berjuang dan berupaya sekuat tenaga mewujudkan amanat tersebut melalui penerapan berbagai strategi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Upaya-upaya ini dilakukan dengan bertumpu pada peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pemangku kepentingan lainnya di sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap menjaga kualitas dan kesinam-

Sekapur Sirih

bugan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mensinergiskan hubungan lintas sektor di Tingkat Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) merupakan salah satu *pilot project* untuk merealisasikan hal tersebut dan mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan salah satu kegiatan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan.

Buku Profil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini ditulis dengan harapan dapat menjadi materi pembelajaran dan contoh nyata bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Informasi yang terlingkup dalam buku ini, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan sensitifitas dalam memformulasi strategi pembangunan di daerah pada masa

yang akan datang.

Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dalam mengawal program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan sejak dari awal diinisiasi program ini hingga saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini. Kiranya kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Desember 2009
Menteri Kelautan dan Perikanan

Fadel Muhammad

Merencanakan Dari Desa Pembelajaran dari Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kemiskinan adalah absennya seluruh hak azasi manusia. Frustrasi, permusuhan, dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun. Untuk membangun perdamaian yang stabil kita harus mencari cara-cara menyediakan peluang bagi rakyat untuk bisa hidup secara layak (Yunus, 2006)

Bukan cerita baru bahwa nelayan kecil dikenal sebagai masyarakat termiskin di Indonesia yang tidak pernah tercatat di Museum Rekor Indonesia. Kondisi pemukiman yang buruk dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang, menjadi pemandangan yang kerap dijumpai saat mencoba menjenguk desa-desa dimana mereka bermukim dan melakukan aktivitas kesehariannya. Ketidaknyamanan yang dialami oleh mereka, perlu mendapat perhatian khusus. Upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup mereka, tentunya akan berdampak nyata pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pada beberapa periode belakangan ini, timbul pandangan bahwa untuk memacu perekonomian daerah diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan lokal. Desa sebagai pemerintah terendah merupakan basis utama yang perlu mendapat perhatian dalam rangka membangun perekonomian lingkup kecamatan bahkan kabupaten. Tercetuslah sejumlah program yang dijalankan oleh beberapa departemen teknis yang ditujukan untuk pengaplikasian pandangan ini.

Pada tahun 2006, Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mencoba untuk memperkenalkan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Keberadaan

program ini diharapkan dapat berperan sebagai pondasi bagi pengembangan ekonomi kawasan. Melalui pelibatan pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, program ini diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan dengan muara pengembangan ekonomi di wilayah pesisir.

Pada awal program ini diinisiasi, *pilot project* dilaksanakan di 20 kabupaten /kota. Melihat peningkatan animo Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program ini, pada Tahun Anggaran 2007, PLBPM kembali dilaksanakan di 23 kabupaten yang terdiri atas 15 kabupaten/kota tindaklanjut dari tahun sebelumnya dan 8 kabupaten / kota merupakan penerima baru. Melihat dampak kemanfaatan yang ditimbulkan semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, maka pada Tahun Anggaran 2008, program ini kembali dilaksanakan di 28 Kabupaten/Kota, pada 15 Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan program ini pada Tahun 2006 dan 2007 ditambah dengan 13 Kabupaten/kota baru. Pada tahun anggaran 2009, program kembali dilaksanakan di 55 kabupaten, pada 34 Kabupaten / kota tindaklanjut ditambah dengan 21 Kabupaten / kota penerima baru. Secara ringkas, dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, program ini telah dilaksanakan pada 62 Kabupaten/Kota.

Secara garis besar, mekanisme kerja yang dilaksanakan dalam program ini tidak berbeda dengan kegiatan tugas pembantuan yang pendanaannya bersumber dari APBN. Yang membedakan program ini adalah penitikberatan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir melalui sistem pembelajaran sederhana dalam membuat perencanaan dan menata sendiri permukiman dan lingkungannya. Proses pembelajaran ini dimulai dari proses perencanaan ruang kawasan permukiman oleh masyarakat sendiri dengan pendampingan oleh pemerintah daerah

dan tenaga pendamping. Produk rencana ini ke depan akan berperan sebagai landasan pembangunan desa pesisir, disusun melalui proses perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dengan tetap mempertimbangkan sinergisitasnya dengan perencanaan pembangunan pada lingkup yang lebih makro. Produk perencanaan ini kelak akan menjadi panduan bagi masyarakat desa dalam menggunakan ruang kawasan permukiman dan lingkungan perairan disekitarnya. Masyarakat juga didorong untuk memilih dan menentukan prioritas kebutuhan dan selanjutnya direalisasikan melalui pembangunan fasilitas fisik dasar. Pembangunan fisik merupakan perwujudan fisik dari model penataan ruang / zonasi pada skala desa tersebut dan stimulan untuk menumbuhkan peran aktif masyarakat.

Kabupaten/Kota yang baru pertama kali menerima program ini biasanya melakukan kegiatan penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir; perbaikan atau pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman; perbaikan atau pembangunan beberapa bangunan rumah untuk memperbaiki nuansa tata ruang; dan perbaikan lingkungan pesisir. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang telah menerima program ini pada tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisirnya serta melanjutkan komponen kegiatan fisik yang masih belum berfungsi secara optimal pemanfaatannya. Upaya tindak lanjut lainnya yang dilaksanakan oleh kabupaten / kota ini adalah meningkatkan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan non fisik seperti penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan, penyusunan Peraturan Desa dan kegiatan lainnya.

Konsep yang diterapkan dalam program PLBPM diharapkan akan dicontoh dan

mampu memberikan dampak bagi penataan kawasan-kawasan permukiman masyarakat pesisir lain. Program ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah formulasi kebijakan pembangunan desa yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat mampu menghasilkan keluaran fisik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan mereka.

Pada saat pelaksanaan kunjungan lapangan, pada hampir kebanyakan lokasi pelaksanaan kegiatan, sambutan masyarakat dan PEMDA sangat hangat. Beberapa warga penerima bantuan langsung, berkali-kali mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Rumiyin daleme kulo sering keno rob...sak baripun wonten PLBPM, kulo angsal omah anyar ingkang boten keno rob malih...saiki turu wengi saged angler boten mikirke omah kebanjiran...(dulu rumah saya sering kena rob...setelah ada PLBPM, saya dapat rumah baru yang tidak kena rob lagi...sekarang tidur malam nyenyak, tidak mikir rumah kebanjiran)”, komentar salah satu penerima bantuan. Di beberapa lokasi yang mata pencaharian mayoritas masyarakatnya hanya nelayan, pekerjaan fisik yang dilaksanakan bermanfaat sebagai mata pencaharian alternatif. Dampak langsung yang dapat dilihat secara kasat mata saat berkunjung di lokasi pelaksanaan adalah kondisi pemukiman dan lingkungan pesisirnya yang lebih teratur dan harapannya dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di lokasi tersebut. Pada lokasi yang mengalami degradasi lingkungan, bangunan fisik yang dibangun untuk mengatasi problem ini mampu memberikan dampak segera. Untuk menjaga kesinambungan bangun fisik yang telah terbangun dan konsistensi penerapan produk rencana yang dihasilkan, program ini ternyata mampu mendorong terbentuknya komitmen internal dari

para pemangku kepentingan di desa.

Pemerintah desa mencoba melegalkan komitmen tersebut dalam bentuk aturan-aturan desa yang menaungi keberlanjutan program pembangunan desa pada masa yang akan datang.

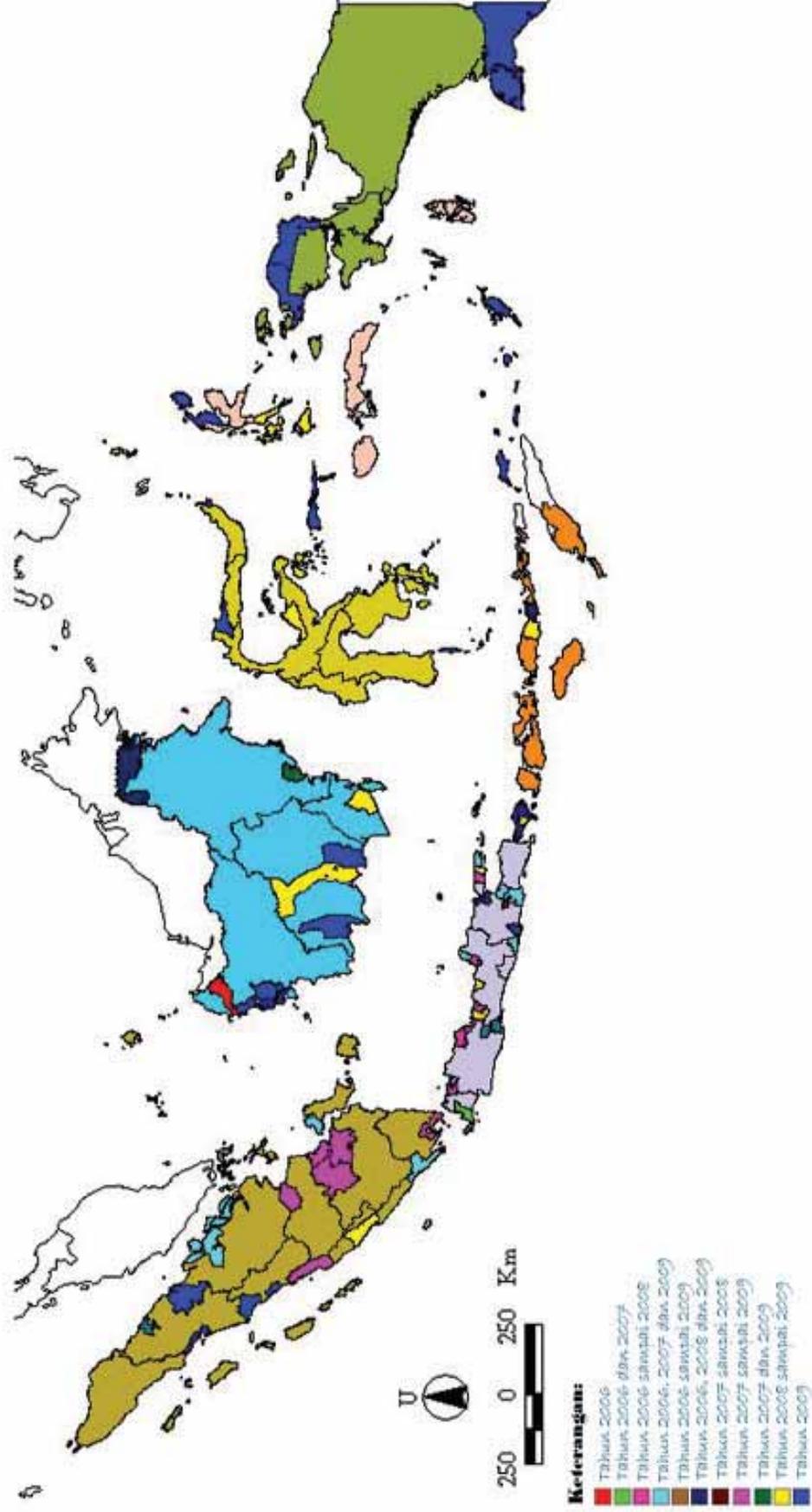
Pelaksanaan program ini ternyata mampu memberikan dampak lanjutan pada beberapa daerah. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya setelah program ini terlaksana. Pada beberapa daerah, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan tumbuhnya kegiatan ekonomi lainnya, sebagai akibat dampak lanjutan dari keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sederhana yang dibangun. Pembelajaran yang dilaksanakan melalui program PLBPM secara perlahan tapi pasti membangun pemahaman, kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungannya. Representasi kepedulian Pemerintah melalui program ini, mendorong pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan di wilayahnya. Representasi ini terlihat dalam bentuk bantuan tenaga, pendanaan dan integrasi program.

Sangat disadari, konsep yang diterapkan dalam PLBPM bukanlah merupakan konsep yang sempurna dan terdapat kekurangan di seluruh lininya. Seturut dengan keberlanjutan pelaksanaannya, sangat dimungkinkan program menjadi konsep yang lebih baik, adaptif dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Keberlanjutan konsep ini tentunya dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan tentunya akan berdampak pada pembangunan ekonomi perikanan. Sangat disayangkan jika program ini harus diakhir. Semoga harapan tersebut dapat terwujud. ●

Jenis Kegiatan dan Fasilitas Fisik Terbangun Melalui Kegiatan PLBPM (2006-2009)

No.	Provinsi	Rencana Tata Ruang & Zonasi & Produk Peraturan Lainnya		A. Pelembagaan/Perbaikan Bioskem Restorasi		B. Pelembagaan/Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Permukiman		C. Pembangunan/Rehab. Rumah													
		Vegetasi Pantai	Hb	Sarpras Informasi Masyarakat	Kegiatan Bersih Pantai	Rehabilitasi Terumbu Karang	Bangunan Pengaman Pantai	Jalan Lingslungan	Jembatan	Salurkanan Gorong2	Penataan Lingslungan	Sarpras MCK	Sarpras Penerangan	Sarpras Air Bersih	Sarpras Kegiatan Nelayan	Tambatan Perahu	Rambu Laut	Balai Nelayan	Pembangunan Rumah	Rehab Rumah	Tempat Badah
		Bq		Unit	Unit	Unit	M	Unit	M	Unit	Unit	Unit	m	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	SUMATERA UTARA	3	5.001	-	-	1	1.231	4	210	1	7	6	8	4	-	3	-	13	54	-	-
2	SUMATERA BARAT	10	17.454	-	-	91	10.307	-	749	3	17	36	2	2.000	44	1	-	3	81	170	-
3	RIAU	3	10.782	-	-	5	304	-	90	1	-	2	-	15	8	-	-	3	8	5	-
4	JAWA	2	-	-	-	16	803	-	-	-	12	-	4	14	3	-	-	-	265	-	-
5	SUMATERA SELATAN	1	7.950	-	-	43	740	3	3.250	25	1	20	13	-	4	-	-	2	25	283	-
6	JAMPUNG	1	7.950	-	-	43	4.088	1	637	6	-	257	45	-	18	-	-	2	74	74	1
7	BENGKULU	1	20	-	-	-	675	-	70	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BEKASI-BEJUDING	1	24.865	-	-	8	5.301	-	3	70	-	13	-	-	-	-	-	-	-	38	-
9	BANTEN	1	36.777	-	-	15	5.301	-	3	2.017	6	38	11	23.873	16	-	-	1	16	171	3
10	JAWA BARAT	7	36.777	-	-	15	9.662	1	5.985	6	138	26	-	1.559	7	-	-	6	163	-	-
11	DIYAKARTA	1	124.800	-	-	-	4.640	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
12	JAWA TENGAH	5	116.721	-	-	14	19.199	10	5.863	79	4.209	9	-	2	4	-	-	12	252	-	-
13	JAWA TIMUR	16	90.403	-	-	24	43.513	4	8.140	123	47	59	33	1.440	1.857	3	4	2	77	265	-
14	BALI	1	8.430	-	-	7	169	3	76	1	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NUSA TENGGARA BARAT	1	4.000	-	-	10	2.998	4	885	4	62	5	-	-	-	-	-	-	50	-	-
16	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2.500	-	-	2	503	-	917	9	2	5	-	-	15	-	-	-	-	-	-
17	KALIMANTAN BARAT	2	13.000	-	-	-	3.327	2	295	30	2	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-
18	KALIMANTAN TENGAH	6	16.000	-	-	-	6.620	3	-	-	41	8	-	-	62	-	-	1	34	-	-
19	KALIMANTAN SELATAN	1	44.000	-	-	54	2.765	-	1	622	-	4	10	-	9	-	-	6	94	-	-
20	KALIMANTAN TIMUR	2	44.000	17	-	-	2.765	-	1	622	-	4	10	-	9	-	-	15	97	-	-
21	SLAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SLAWESI SELATAN	1	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SLAWESI TENGAH	4	7.500	-	-	-	860	3	175	1	1	19	4	10	-	-	5	37	39	-	-
24	MALUKU	2	4.050	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	800	-	-	-	-	-	-
25	MALUKU UTARA	7	4.050	4.050	-	-	2.471	1	2.036	-	2	7	-	4	-	-	-	-	224	-	-
26	PAPUA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
27	PAPUA BARAT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		89	545.730	4.067	-	297	123.430	44	32.918	301	4.937	399	24.557	4.242	3.664	29	4	25	312	2.138	11

Lokasi Pelaksanaan PLPBM di Indonesia



PLBPM

di Pulau Sumatera



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Serdang Bedagai





Penataan dan Pembangunan Desa Pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai

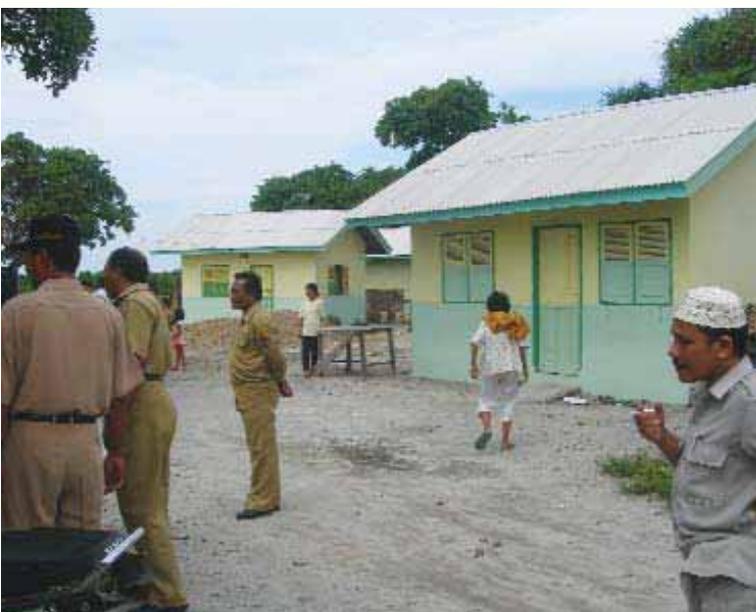
Oleh: Herri Suryadi Samosir



Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah sebesar 1.900,22 km², dengan ketinggian wilayah 0-500 meter dari permukaan laut. Kabupaten ini merupakan kabupaten pesisir yang memiliki panjang garis pantai sekitar 91 km dan mempunyai 23 desa pesisir. Potensi unggulannya adalah hasil tambak, kerajinan tikar pandan, ikan segar, ikan hasil olahan dan pariwisata (Pantai Therm Park, Pulau Berhala dan Pantai-Pantai Lainnya). Akses menuju ke Kabupaten Serdang Bedagai dari Jakarta menggunakan pesawat menuju Bandara Polonia Medan. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 3 jam dari kota tersebut.



Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Serdang Bedagai telah mendapatkan kesempatan untuk ke-4 (empat) kalinya melaksanakan penataan dan pembangunan desa pesisir melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun ini merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya yang akan dilaksanakan di desa yang pernah menerima kegiatan PLBPM pada tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten khususnya tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) tidak terlalu sulit untuk menetapkan desa pelaksana yaitu Desa Kuala Lama dan difokuskan di Dusun VI. Topografi desa ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 0.00 - 2.00 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 20 km dari ibu kota kabupaten atau dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Bangunan rumah masyarakat di desa ini masih sangat sederhana, mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini terdiri dari dinding tepas bambu/bilik dengan atap daun rumbia/nipah yang tidak layak huni. Kondisi permukiman sangat memprihatinkan. Pemandangan desa tampak kumuh karena sanitasi lingkungan yang kurang baik. Masyarakat yang tinggal di desa ini berjumlah 3.977 jiwa atau terdiri dari 994 KK. Mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai nelayan, dan sisanya bekerja sebagai pengrajin.



Masyarakat yang hadir pada acara rebug desa mempercayakan kegiatan PLBPM ini kepada LK yang telah ada. Pada kesempatan ini kami juga melakukan pemilihan motivator desa dari sejumlah masyarakat yang hadir. Prioritas untuk kegiatan tahun ini adalah perbaikan permukiman, pembangunan infrastruktur desa, pembangunan balai pertemuan, pembangunan MCK 2 unit, pembangunan Plat Duiker 1 unit, pembangunan Tangkahan 1 unit, penanaman pohon cemara 250 btg, pembangunan jalan lingkungan 150 m dan pembangunan dinding penahan tanah 36 m. Setelah semua kegiatan ini disepakati oleh masyarakat, kami melakukan pendampingan dalam penyusunan

RAB untuk pembangunan fisik. Kami selaku TAP juga menyusun suatu rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir sebagai cita-cita dan impian masyarakat desa dalam upaya membangun desanya selama 5 tahun kedepan yang telah disepakati oleh masyarakat. Visi desa adalah mewujudkan desa pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih upayanya sendiri sehingga dengan adanya kegiatan ini masyarakat sadar betapa pentingnya penataan lingkungan permukiman yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rebug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kembali keber-

samaan masyarakat desa. Dengan terbangunnya jalan lingkungan dan plat duiker dapat memudahkan masyarakat dalam mobilitas ekonomi dalam memasarkan hasil tangkapan. Kehidupan masyarakat juga lebih sehat dengan adanya penyediaan air bersih dan MCK. Masyarakat juga dalam melaksanakan pertemuan-pertemuan dapat dilaksanakan pada suatu tempat yang layak setelah Balai Pertemuan selesai dibangun. Adanya pemasangan dinding penahan tanah berangsur-angsur mengurangi degradasi pesisir. Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM, masyarakat dengan wadah kelompok membuat suatu kesepakatan dan menyisihkan sebahagian hasil tangkapan untuk iuran/modal pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang dibangun dalam Program PLBPM dan modal dasar untuk pembentukan koperasi serta untuk membangun fasilitas penunjang desa lainnya. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



HERRI SURYADI SAMOSIR, dilahirkan di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tanggal 29 September 1967, dibesarkan di Sei Rampah hingga lulus SMU. Pada tahun 2002 meraih gelar sarjana Teknik Sipil pada Universitas Kertanegara. Tahun 2002 s/d 2004 bekerja di perusahaan konsultan PT. Menara Karunia Pertama, dan pada Tahun 2005 penulis berkesempatan bekerja sebagai Planner and Supervision Consultant Renovation for Wisma Duta Indonesian Embassy

Tanzania Dar es Salaam, Tanzania – West Africa, General Project Planning and Designing Proposed Coffee Factory for KDCU Karagwe Plant Kayanga Karagwe Distric Kagera Region Tanzania – West Africa dan Project Planning on Construction of a Borhole Pumped Scheme (Pump House, Pipe Network, Water Tanks, Water Points) for Mtawanya Village in Rufiji Distric Tanzania – West Africa, pada Tahun 2006 hingga 2009, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) di Kabupaten Serdang Bedagai. Penulis tertarik menjadi TAP PLBPM Kabupaten Serdang Bedagai karena saya sebagai putra daerah ingin memberi sumbangsih kepada daerah sendiri dan sekaligus bersama-sama masyarakat menata pesisir dan lingkungannya sendiri dimana masyarakat terlibat langsung baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga merasakan manfaat hasil dari kegiatan PLBPM. ●



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tapanuli Tengah



 Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM



Kondisi Kelurahan Pesisir di Kabupaten Tapanuli Tengah

Oleh: Sahala Simanungkalit, Gontina Situmorang dan Eka Putra Tambunan



K

abupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di wilayah bagian barat Propinsi Sumatera Utara dengan luas mencapai 21.800 Km², yang terdiri dari 20 kecamatan dan dihuni oleh 286.124 jiwa.

Pada tahun 2009 ini Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan kesempatan untuk menata desa pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan masyarakat (PLBPM). Survey langsung dilakukan ke beberapa kelurahan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah. Survey tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data kelurahan yang ada, seperti jumlah penduduk, keadaan infrastrukturnya, sarana dan prasarana yang ada. Dari hasil survet tersebut, kami laporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan. Sehingga ditentukanlah dua kelurahan, yaitu Kelurahan Lubuk Tukko dan Kelurahan Kalangan. Dua kelurahan ini cukup berpotensi dalam hal perikanan, pariwisata dan perdagangan. Oleh sebab itu perlu diadakannya rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan terutama infrastrukturnya

Tabel. Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kegiatan	Kelurahan Lubuk Tukko	Kelurahan Kalangan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembangunan Jalan Lingkungan	419 m	212 m
Penanaman Cemara	88 btg	405 btg
Penanaman Mangrove	87 btg	-
Penanaman Bambu	860 btg	-
Pembangunan Drainase	175 m	35 m

untuk menunjang potensi yang ada di kedua kawasan tersebut.

Kelurahan Lubuk Tukko merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 4,63 km². Jumlah penduduknya sekitar 4.052 jiwa yang terdiri dari 346 KK. Topografi kelurahan ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 1,266 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju kelurahan ini dapat menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 0,5 km dari ibukota kabupaten dengan waktu tempuh kurang dari 10 menit. Pusat pemukiman nelayan berada di tepi pantai dan di tepi jalan raya. Bangunan rumah masyarakat di kelurahan ini masih sederhana, meskipun banyak juga rumah-rumah yang semi permanen yang terletak di pinggir pantai. Jika kita berjalan di sepanjang pemukiman masyarakat, akan terlihat jalan lingkungan yang rusak, serta terjadi degradasi dan abrasi di sekitar bibir pantai.

Kelurahan Kalangan juga merupakan salah satu kelurahan pesisir yang ada di Kabupaten

Tapanuli Tengah dengan luas 1,88 km². Jarak antara Kelurahan Kalangan dengan Kelurahan Lubuk Tukko cukup dekat sekitar 1 km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten sekitar 2 km yang dapat ditempuh melalui transportasi darat dalam waktu 15 menit. Kondisi jalan di lingkungan IV dan V masih sangat buruk. Bila musim hujan tiba, akan terjadi banjir di sepanjang jalan lingkungan dan itu sangat mengganggu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Selain itu, masih banyak terlihat sampah yang berserakan dan genangan air di sekitar lingkungan. Hampir 80% rumah-rumah masyarakat terbuat dari kayu dan beratap rumbia (non permanen), tidak memiliki MCK pribadi, serta sulit untuk mendapatkan air minum yang layak konsumsi. Untuk mendapatkan air minum mereka harus membelinya dengan harga Rp.3000 per jerigen.

Pada saat sosialisasi program PLBPM kepada masyarakat tanggapan masyarakat terhadap program ini biasa saja. Namun setelah kegiatan





ini berjalan, lambat laun masyarakat mulai menerima dan mengerti tujuan dari program PLBPM ini. Pada saat melakukan rembug desa untuk pemilihan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan motivator di Kelurahan Kalangan dihadiri oleh tim Teknis Pengendali Daerah (TPD), FKTD dan Lurah. Permasalahan yang terjadi adalah sedikit perselisihan pendapat antar masyarakat, tapi hal ini dapat dipecahkan dengan melakukan sistim voting dalam pemilihan LK dan motivator.

Pada Kelurahan Lubuk Tukko masyarakat setempat cukup antusias dan hadir tepat waktu pada saat rembug desa. Pemilihan LK dan Motivator dipilih secara musyawarah dan mufakat, di mana kandidatnya dipilih secara langsung oleh masyarakat dan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Pada saat rembug desa untuk penentuan kegiatan prioritas di kelurahan ini, LK dan Motivator memberikan sedikit motivasi kepada masyarakat akan pentingnya program PLBPM bagi masyarakat. Melalui PLBPM masyarakat diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk

merencanakan, memperbaiki dan menata sendiri kawasan lingkungannya. Adapun lokasi target group untuk Kelurahan Lubuk Tukko adalah lingkungan I dan lingkungan V.

Berdasarkan keputusan pada saat rembug desa ditetapkanlah beberapa prioritas kegiatan antara lain: perbaikan sarana air minum, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan parit dan vegetasi dalam bentuk penanaman mangrove, cemara dan bambu. Selain kegiatan fisik, juga dilakukan penyusunan rencana tata ruang dan zonasi, yang berguna dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / kelurahan dengan memanfaatkan potensi pesisirnya secara berkesinambungan. Diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan fisik dilakukan di lingkungan I dan lingkungan V Kelurahan Lubuk Tukko. Untuk lingkungan I berupa pembangunan jalan lingkungan sepanjang 307 m dengan lebar 2 m serta vegetasi dalam bentuk penanaman mangrove dan cemara sepanjang 451 m. Sedangkan untuk lingkungan V, berupa



pembangunan jalan lingkungan sepanjang 112 m dengan lebar 2 m, kemudian pembangunan parit sepanjang 35 m, dan vegetasi dalam bentuk penanaman bambu sepanjang 430 m.

Sedangkan di Kelurahan Kalangan masyarakat cukup antusias menyuarakan aspirasi mereka mengenai jenis kegiatan fisik yang akan dilakukan. Akhirnya dengan melakukan voting, maka masyarakat setuju prioritas kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan IV dan V. Prioritas kegiatan di kelurahan ini antara lain: pembangunan jalan lingkungan dan vegetasi dalam bentuk penanaman cemara. Rencana fisik yang akan dilakukan untuk Kelurahan Kalangan adalah: untuk Lingkungan IV berupa pembangunan jalan lingkungan sepanjang 112 m dengan lebar 3 m dan vegetasi dalam bentuk penanaman cemara sepanjang 275 m dengan lebar 50 m, serta drainase sepanjang 175 m. Untuk lingkungan V adalah pembangunan jalan lingkungan sepanjang 100 m, tinggi 1,90

m, lebar 3,30 m, serta vegetasi dalam bentuk penanaman cemara sepanjang 515 m.

Melalui kegiatan PLBPM ini, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan kegiatan dengan rembug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan gotong royong dapat menumbuhkan semangat kebersamaan antar masyarakat. Diharapkan juga apabila bangunan fisik ini nantinya telah selesai di bangun, harus ada perawatan dari masyarakat setempat. Dan tidak terlepas juga peran dari pihak kelurahan untuk turut serta dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun, dengan cara mengawasinya. Oleh sebab itu masyarakat sepakat membentuk tim yang bertugas mengawasi dan merawat fasilitas fisik yang telah dibangun, serta mengumpulkan dana sukarela untuk biaya perawatan. Akhirnya pembangunan yang datangnya dari masyarakat sendiri dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Harapan kedepannya, dapat terbangun fasilitas penunjang lainnya. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



SAHALA SIMANUNGKALIT, S.Pi, dilahirkan di Desa Hutanabolon tanggal 25 Mei 1982. Pendidikan terakhir kemudian pada D1 Komputer Jurusan Teknik Informati Komputer di Medan dan lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan kembali ke Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dan lulus pada tahun 2008. Pernah menjadi tenaga administrasi pada Kantor Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2002 hingga 2003. Mitra pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Tapanuli Tengah tahun 2003 hingga 2008. Pada tahun 2009 menjadi Tenaga Ahli Pendamping kegiatan PLBPM. Penulis tertarik menjadi anggota TAP PLBPM karena kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam menata daerah pemukiman tempat tinggalnya.



Gontina Situmorang, SE., lahir pada tanggal 21 juni 1985 di Sibolga. Menghabiskan masa SD, SMP dan SMU di Gunungsitoli – Nias. Kemudian kuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2003 dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2009 menjadi TAP PLBPM yang diadakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Penulis tertarik menjadi TAP, karena memberikan tantangan tersendiri untuk bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat yang

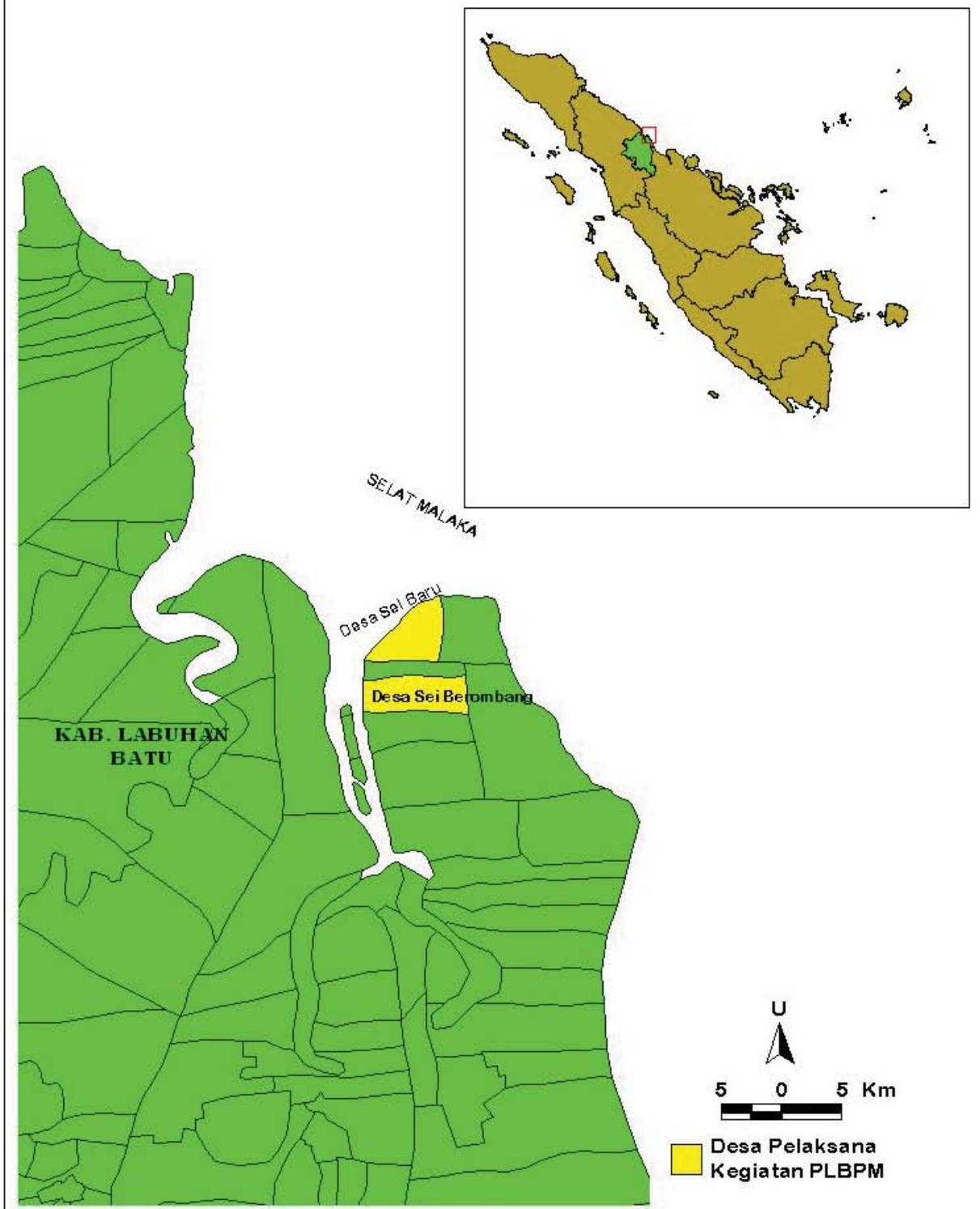
sebelumnya tidak dikenal dengan berbagai macam tingkah laku dan bisa mendampingi masyarakat untuk menata sendiri lingkungannya.



Eka Putra Tambunan, ST., dilahirkan di Kota Sibolga pada tanggal 30 Juni 1979. Pada tahun 1998 diterima di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2005 berhak menyandang gelar Sarjana Teknik. Pada tahun yang sama diterima bekerja di PT. Eskapindo Matra. Consultan Engginering with Ass, sebagai Inspector I pada Paket Pekerjaan ABD Kandui – Muara Teweh hingga bulan Oktober 2006. Pada Bulan Februari

2007 kembali ke Sumatera Utara dan bekerja di PT. Fuji Elevator Medan sebagai karyawan di bidang teknik sipil pada bulan Maret 2008, tiga bulan kemudian keluar dari perusahaan tersebut, karena di terima di PT. Romero General Contractor Group Sumbul-Sidikalang sebagai pelaksana lapangan pada paket pekerjaan di Kabupaten Phak-pak Bharat. Tertarik menjadi TAP karena ingin mendampingi masyarakat, agar bisa menata sendiri ruang kawasan pemukiman tempat tinggalnya. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Labuhan Batu





Pofil PLBPM Kabupaten Labuhanbatu



Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Pantai Timur dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2009 Kabupaten Labuhanbatu dipecah menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu sendiri, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk mencapai kabupaten ini bisa dilakukan melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 7 jam dari kota Medan.

Wilayah administrasi kabupaten ini berbatasan dengan Tapanuli Utara

Tabel Kegiatan PLBPM 2009 di Kabupaten Labuhanbatu

Kegiatan PLBPM	Kel. Sei Berombang	Desa Sei Baru
Penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir	Dalam Proses	Dalam Proses
Peningkatan / perbaikan / pembangunan infrastruktur pemukiman	Dalam Proses	Dalam Proses
Peningkatan nuansa tata ruang beberapa bangunan rumah	Dalam Proses	Dalam Proses
Peningkatan / perbaikan lingkungan pesisir	Dalam Proses	Dalam Proses



di sebelah utara, Propinsi Riau dan Selat Malaka di sebelah timur, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di sebelah selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebelah utara. Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan dengan 4 kecamatan pesisir dan 31 desa. Diapit oleh 2 sungai yaitu sungai Barumon dan sungai Bilah serta panjang garis pantai 56 km sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup bagus baik itu perikanan laut maupun perikanan umum. Disamping itu juga Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi dibidang pertanian dan perkebunan yaitu kelapa sawit, karet dan padi.

Pada tahun 2009 Kabupaten Labuhanbatu mendapat kesempatan mendapatkan program PLBPM untuk pertama kalinya. Untuk penentuan desa target group, Tim Teknis Penganalisis Daerah dan tokoh masyarakat melakukan rembug desa dengan terlebih dahulu

melakukan survey dan konsultasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Tentunya akan banyak pilihan yang mana akan dijadikan desa target group yang pantas dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam pedoman umum PLBPM 2009.

Dengan melakukan rembug desa dan kearifan semua pihak maka berhasil ditentukan 2 desa target group yaitu Kelurahan Sei Berombang dan Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir.

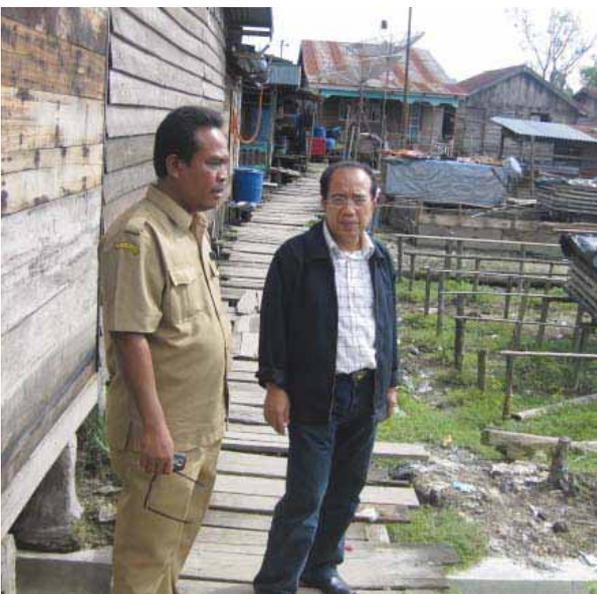
Kecepatan Panai Hilir menempati area seluas 342,03 Km² yang terdiri dari 8 kelurahan/definitive. Dua diantaranya adalah desa target group kegiatan PLBPM 2009. Kecamatan ini berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur, Kecamatan Panai Tengah di sebelah selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebelah barat.

Kelurahan Sei Berombang dengan luas 29,42 km² dapat dapat ditempuh dari Rantauprapat menggunakan jalan darat selama 2 jam sampai Kec. Panai Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan boat selama 1 jam untuk sampai ke lokasi. Sedangkan untuk mencapai Desa Sei Baru hanya berjarak 2 Km dari Kel. Sei Berombang

Jumlah penduduk di Kelurahan Sei Berombang sebanyak 12.312 jiwa dan Desa Sei Baru sebanyak 3.304 jiwa. Pemukiman penduduk pada umumnya terpusat di daerah pesisir dan pinggir muara sungai. Bangunan rumah terbuat dari kayu dengan beratapkan seng dan nipah. Infrastruktur di kedua desa

masih kurang dimana jalan masih jalan tanah, jembatan yang kurang bagus, drainase yang kurang baik, sarana air bersih dan MCK yang tidak memadai.

Untuk melakukan sosialisasi kegiatan PLBPM ini dilakukan rembug desa dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dan dilakukan juga pemilihan LK dan Motivator desa dengan atas kesepakatan bersama. Permasalahan yang ada adalah masyarakat masih belum begitu paham dan mengerti mengenai kegiatan PLBPM ini dan beranggapan ini adalah proyek pemerintah. Akan tetapi hal ini bisa dijelaskan bahwa ini adalah kegiatan pembelajaran untuk menata



lingkungan yang direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat sendiri.

Dalam penentuan kegiatan prioritas dilakukan rembug desa dengan didampingi dan disupervisi oleh motivator desa bersama TAP dan Tim Teknis Daerah. Adapun rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat adalah :

- Perbaikan jalan
- Perbaikan drainase
- Pembangunan jembatan penghubung
- Air bersih dan MCK
- Perumahan
- Lingkungan

Pemerintah daerah juga tidak luput untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain melakukan pendampingan dan pengawasan, pemerintah daerah juga memberikan dana pendamping dari APBD serta merealisasikan kegiatan PNPM Mandiri yang berkolaborasi dengan kegiatan PLBPM ini. Disamping itu juga peran masyarakat cukup besar dengan berpartisipasi dalam setiap rembug desa dengan memberikan pendapat dan masukan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik masyarakat sudah siap dengan bantuan tenaga dan pikiran.

Manfaat yang dirasakan langsung adalah masyarakat dapat berperan aktif dalam menata desa dengan tidak terlalu bergantung kepada peran pemerintah saja, dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan fisik ini sehingga lingkungan lebih rapi, bersih dan sehat. Disamping itu juga masyarakat dapat menjalin kembali semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang sudah mulai pudar.

Untuk menjaga lingkungan fisik yang sudah terbangun masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan memeliharanya, serta berperan aktif untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Karena proses pembangunan ini masih berjalan maka komitmen masyarakat sangat diperlukan. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis

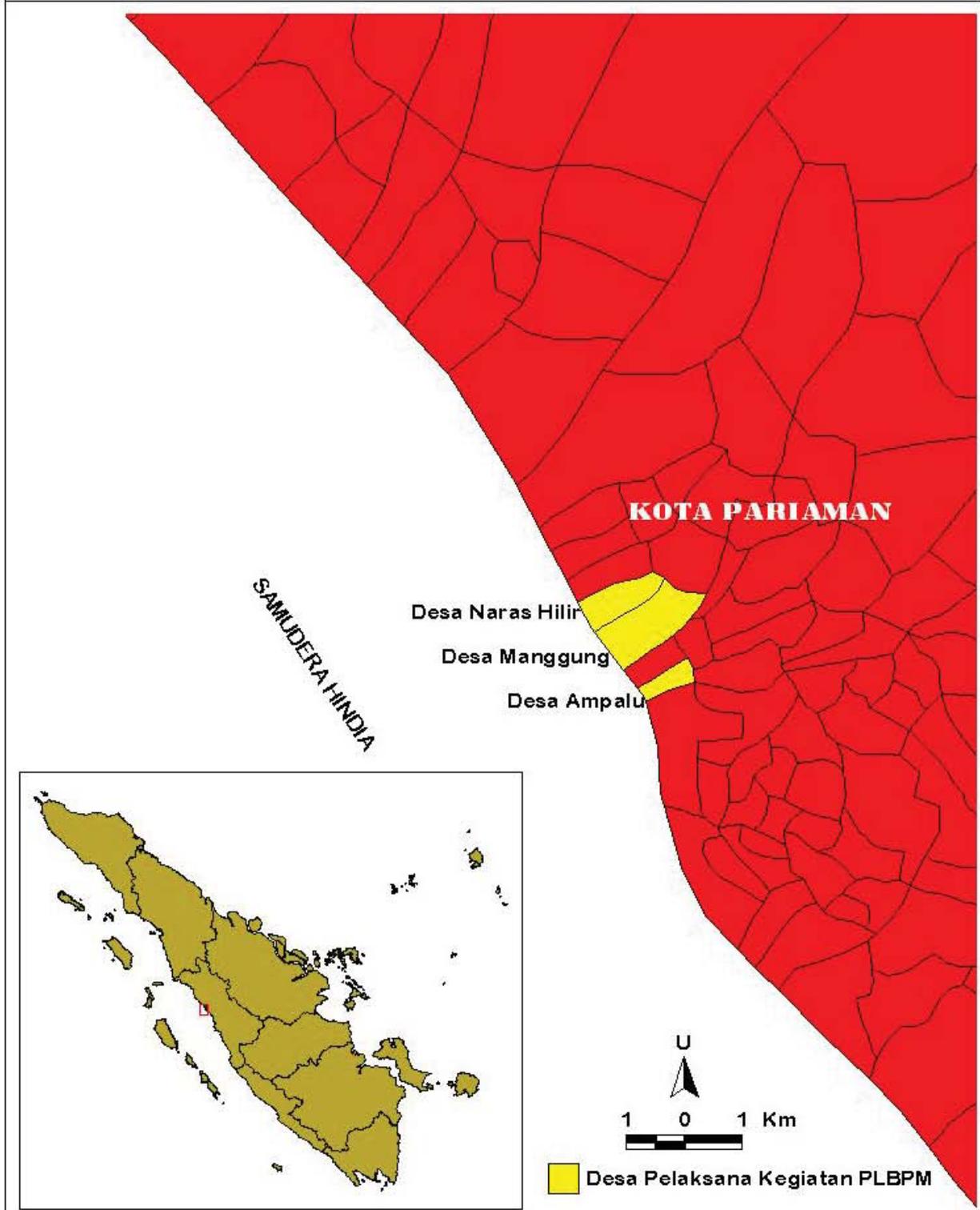
Nama : **Legiman, SP**
Tempat/tanggal lahir : Kp. Baru / 27 November 1976.
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pertanian
Alasan/motivasi menjadi TAP : untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam membangun desa.
Kesan menjadi TAP : suka duka menghadapi masyarakat pesisir.
Alamat : Kp. Baru Dua Sei Kasih
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu

Nama : **Dedy Irwansyah Putra, SP**
Tempat/tanggal lahir : Membang Muda, 01 Oktober 1975
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pertanian
Pengalaman Kerja : Pemeliharaan Tanaman Sawit/ Karet Di PT PN 3 Membang Muda
Alasan/motivasi menjadi TAP : untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir
Kesan menjadi TAP : melihat kondisi kehidupan masyarakat pesisir
Alamat : Desa Perkebunan Mambang Muda
M. plasmen Kec. Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama : **Heri Ismanto, SP**
Tempat/tanggal lahir : Membang Muda/ 14 September 1981
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pertanian
Pengalaman Kerja : 1. Sebagai CMO PT. ADIRA FINANCE
Alasan/motivasi menjadi TAP : untuk membangun perekonomian daerah pesisir
Kesan menjadi TAP : sulitnya menjangkau desa/kel target group
Alamat : Jl. Jend Sudirman Ujung Lk I
Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhan Batu



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kota Pariaman





Profil Pelaksanaan PLBPM di Kota Pariaman

Oleh: Rahayu Permata, Harpel Um dan Gogo Kamargo



Kota Pariaman berdiri sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 dimana sebelumnya Kota Pariaman berstatus Kota Administratif dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai daerah yang terletak dipinggir pantai, Kota Pariaman memiliki panjang garis pantai 12,7 km. Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat 14 desa pesisir. Kota ini dikenal dengan wisata pantai yang ditambah dengan wisata kuliner dan yang terkenal adalah nasi sek (santai, enak, kenyang) berupa nasi yang disajikan dengan lauk dari berbagai jenis ikan, udang dan gulai kepala ikan laut yang segar. Selain itu Kota Pariaman juga dike-

Tabel Kegiatan PLBPM di Kota Pariaman Tahun 2008 s/d 2009

Kegiatan PLBPM	2008		2009
	Desa Ampalu	Desa Manggung	Desa Naras Hilir
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	3 desa (Ampalu, Manggung, Naras Hilir)
Pembangunan jalan lingkungan	532 m	307 m	471,97 m
Pembangunan MCK	4 unit	1 unit	2 unit
Pembangunan balai pertemuan	-	-	1 unit
Pembangunan bak sampah	-	4 unit	4 unit
Rehab rumah	14 unit	7 unit	7 unit
Penanaman batang katapiang	-	-	1010 batang
Pembuatan plang kegiatan dan papan sosialisasi kelestarian lingkungan	-	-	Ls
Penanaman cemara laut dan batang katapiang	500 & 300 batang	-	-
Pembangunan Tempat Penjualan Ikan Mini	1 unit	-	-
Pembangunan pagar & pemasangan paving block musholla	100 m	-	-
Penanaman bakau dan kelapa	-	4000 & 200 batang	-
Rehab MCK	-	1 unit	-

nal dengan kerajinan berupa sulaman. Jika Anda mau berkunjung ke Kota Pariaman anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Padang yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 1 jam.

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kota Pariaman telah dilakukan sejak tahun 2008 yang dilaksanakan di Desa Ampalu dan Desa Manggung. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan PLBPM Tahun 2009 untuk Kabupaten/Kota tindak lanjut dipilih salah satu desa lokasi pelaksanaan tahun 2008 dengan mempertimbangkan bobot permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan akan perlunya tindak lanjut pembangunan karena belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kedua desa lokasi pelaksanaan tahun 2008 tidak ditemukan lagi permasalahan dan tindak lanjut pembangunan fisik sehingga pada tahun 2009 ini tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD)

memutuskan untuk memilih lokasi yang baru.

Untuk itu Tenaga Ahli Pendamping (TAP) melakukan skoring terhadap desa lokasi pelaksanaan tahun 2008 dan dua desa calon lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2009 yaitu Desa Naras Hilir dan Kelurahan Karan Aur yang menurut kami sesuai dengan kriteria pada pedoman PLBPM Tahun 2009. Kondisi lingkungan kedua desa tersebut belum begitu baik dan masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana lingkungan. Dari hasil skoring, Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) melakukan survey lokasi ke desa lokasi pelaksanaan. Selanjutnya hasil skoring dan pengamatan lokasi disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bahan pertimbangan bagi FKTD dalam memutuskan lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2009. Sebelumnya salah satu desa lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2008 bersikeras bahwa kegiatan PLBPM tahun 2009 tetap dilanjutkan di desa mereka. Setelah diberi



pemahaman oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman bahwa kegiatan ini tidak mungkin lagi dilaksanakan pada desa tersebut karena anggaran yang terbatas dan pertimbangan prioritas yang lebih membutuhkan

Desa Naras Hilir merupakan bagian dari kecamatan Pariaman Utara yang luasnya sekitar 17,80 ha. Topografi desa berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 5 meter dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat selama 2 menit dari kantor kecamatan dan 15 menit dari ibukota Pariaman. Permukiman masyarakat di desa ini menyebar di darat dan pinggiran pantai. Bangunan rumah masyarakat di wilayah daratan sudah banyak yang permanen, namun di daerah pinggiran pantai masih ada beberapa rumah yang sederhana bahkan ada yang tidak layak huni.

Kondisi permukiman di pinggir pantai Desa Naras Hilir kurang teratur dan masih banyak jalan yang tidak diaspal. Tempat pembuangan sampah belum ada, sehingga sampah berserakan di sekitar lingkungan pantai, balai pertemuan belum tersedia dan MCK umum yang ada belum memadai. Jalan desa masih berupa tanah dan banyak tumpukan sampah di sepanjang pesisir desa. Masyarakat yang tinggal di desa ini berjumlah 1.280 jiwa dan terdiri dari 285 KK. Sebanyak 31,7% masyarakat desa ini bekerja sebagai pengrajin dan 6,6% bekerja sebagai nelayan.

Pemasaran hasil kerajinan berupa sulaman dari Desa Naras Hilir sudah sampai keluar negeri yaitu Malaysia. Hasil tangkapan nelayan desa ini berupa ikan pelagis seperti *tongkol*, *gambolo*, *kase sinagih*, dan *bada*.

Tanggapan masyarakat Desa Naras Hilir terhadap Program PLBPM ini sangat baik, Walaupun sebelumnya pada saat sosialisasi pertama masyarakat yang hadir tidak begitu banyak. Kemudian dilakukan sosialisasi yang kedua dan kehadiran masyarakat cukup banyak sehingga bisa juga dilakukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator Desa (MD). LK dan Motivator ini dipilih oleh masyarakat secara musyawarah.

Pada saat penentuan kegiatan prioritas, masyarakat cukup aktif memberikan usulan. Dalam kegiatan ini tidak ada permasalahan yang begitu rumit, namun ada beberapa masyarakat mengusulkan agar masing-masing rumah penduduk yang belum mempunyai MCK difasilitasi dan rehab rumah yang tidak layak huni. Setelah diberikan penjelasan dan penekanan kepada masyarakat bahwa sesuai pedoman pelaksanaan PLBPM, pembangunan infrastruktur yang boleh hanya bersifat umum atau berguna untuk kepentingan orang banyak dan beberapa rumah saja karena keterbatasan anggaran.

Akhirnya pada rembug desa selanjutnya masyarakat memutuskan prioritas kegiatan di desa mereka adalah pembangunan 2 unit MCK, 7 unit rumah penduduk yang layak diperbaiki, pembangunan jalan lingkungan 471,97 meter, pembangunan bak sampah 4 unit, pembangunan balai pertemuan 1 unit, penanaman 1010 batang katapiang dan pembuatan papan sosialisasi kelestarian lingkungan. Selanjutnya TAP melakukan pendampingan dalam menyusun rencana anggaran biaya dan rencana kerja. Selain kegiatan fisik, TAP juga menyusun suatu rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir Desa Naras Hilir sebagai upaya dalam menata Desa Naras Hilir dan menyusun rencana pengembangan desa selanjutnya yang disepakati oleh masyarakat Desa naras Hilir.

Dalam pelaksanaan PLBPM ini Pemerintah Daerah Kota Pariaman turut serta dalam



melakukan pendampingan dan memberi pengarahan kepada masyarakat. Pada awal pelaksanaan kegiatan, Walikota Pariaman meresmikan kegiatan PLBPM dan menghimbau agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan ini. Masyarakat cukup aktif dalam rembuk-rembug desa dengan memberikan usulan kegiatan dan menyumbangkan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Motivator dan LK terus berperan memacu dan menumbuhkan semangat kegotongroyongan untuk berhasilnya kegiatan ini

Program PLBPM di Desa Naras Hilir sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka merasakan sendiri secara langsung proses perencanaan penataan dan peningkatan sarana dan prasarana desa, sehingga mengerti proses perencanaan suatu kegiatan. Mereka sangat bersyukur dengan adanya pembangunan infrastruktur desa melalui kegiatan ini. Jalan desa yang sebelumnya masih berupa tanah sudah di beton sehingga memperlancar

transportasi masyarakat. Tersedianya bak sampah dan MCK menjadikan lingkungan masyarakat lebih sehat dan bersih. Dengan dibangunnya balai pertemuan, masyarakat juga memiliki tempat bermusyawarah dan tempat berkumpul para nelayan untuk bertukar informasi. Penanaman batang katapiang di sepanjang pantai menjaga masyarakat dari ancaman abrasi. Pemasangan papan sosialisasi kelestarian di lingkungan masyarakat akan membuat masyarakat selalu ingat untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka. Kesejahteraan beberapa orang penduduk pun meningkat karena sekarang mereka mempunyai rumah yang layak huni, sehingga kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya.

Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun masyarakat berjanji akan memelihara dan merawat semua fasilitas yang sudah mereka bangun bersama. Selain itu pemerintah desa juga akan menyediakan dana untuk perawatan batang katapiang yang telah ditanam. ●

Biografi

Sekilas Penulis



RAHAYU PERMATA, S.Pt, dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 11 April 1984. Walaupun bertempat tinggal dan hidup di Padang namun mempunyai kampung halaman di Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2002 penulis diterima di Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang dan meraih gelar sarjana tahun 2006. Pada tahun 2008 bekerja sebagai TAP kegiatan PLBPM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman. Penulis mempunyai motivasi ingin menambah pengalaman dan memperoleh pendapatan sendiri dan dengan bekerja di desa pesisir

menjadi bahagia karena memang menyukai pantai.



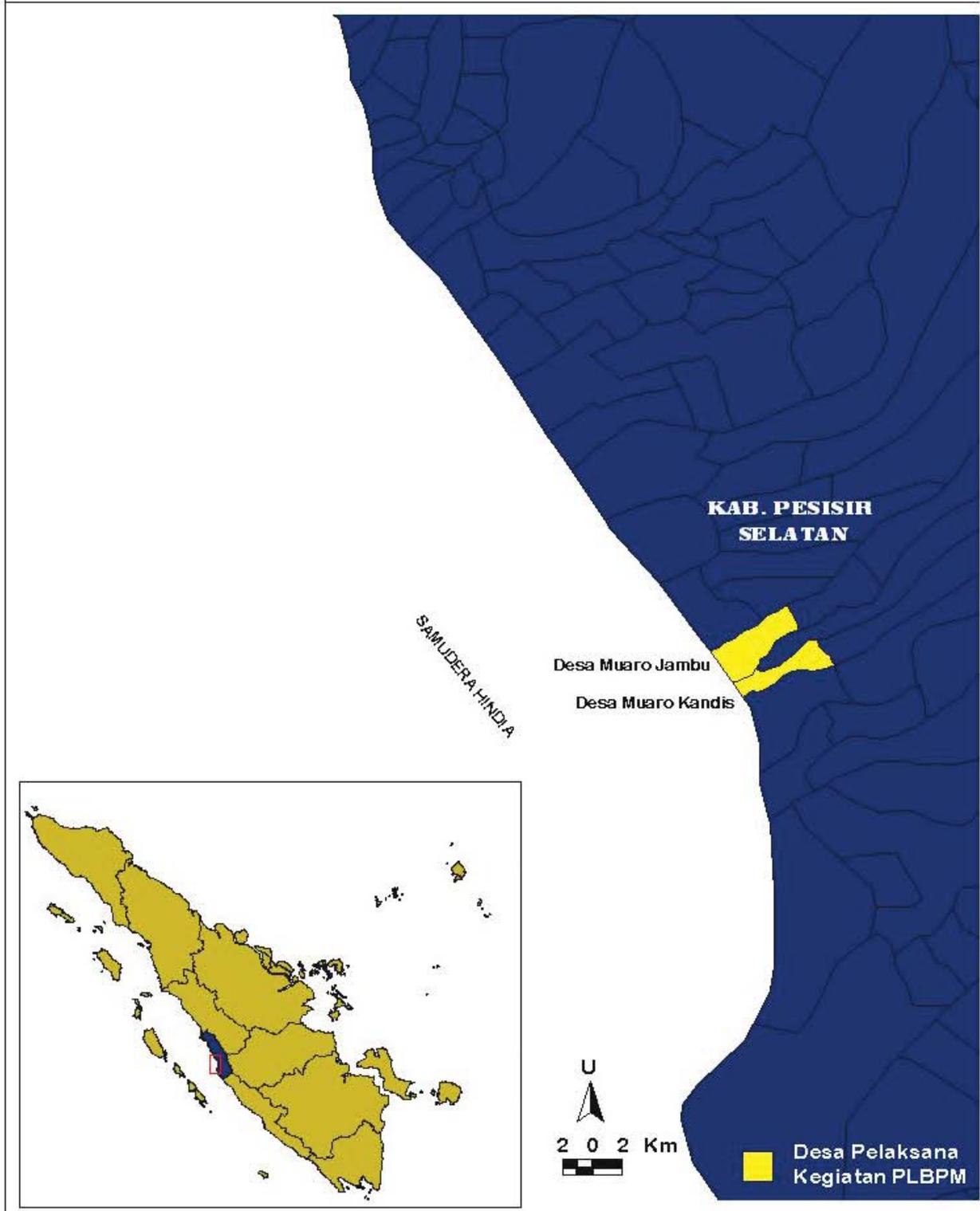
HARPEL UM, ST dilahirkan Padang pada tanggal 4 Mei 1982. Tahun 2001 diterima di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Andalas Padang dan meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 2007. Pada tahun 2003 sampai 2005 bekerja di Event Organizer Polos Production pada Kegiatan Liga Indonesia. Tahun 2007 bekerja sebagai perencana Gedung STIKES Mercu Bakti Buana. Pada tahun yang sama terlibat dalam Perencanaan dan Pengawasan Rumah Ibu Marifa Tanjung. Pada tahun 2008 bekerja sebagai TAP kegiatan PLBPM di Kota Pariaman karena ingin menambah wawasan tentang masyarakat dan mengetahui kemampuan dalam memecahkan

masalah- masalah yang ada dalam masyarakat.



GOGO KAMARGO, S.Pi, dilahirkan di Curup Bengkulu. Dari SD sampai SMU dilewati di Curup Bengkulu. Tahun 2001 melanjutkan sekolah di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta Padang pada Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan meraih gelar Sarjana Perikanan (S.Pi) pada tahun 2007. Pada tahun yang sama diterima bekerja pada Proyek Rumpon Laut Dangkal CV. Gelandang Pesisir Selatan. Sebelumnya Tahun 2004 bekerja pada PT. Waindo Jakarta pada proyek MCMRP. Pada tahun 2008 bekerja sebagai TAP kegiatan PLBPM di Kota Pariaman karena ingin menambah pengalaman pekerjaan dan mengaplikasikan disiplin ilmu telah peroleh di bangku kuliah. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pesisir Selatan



Selatan

Pesisir

K A B U P A T E N



Indahnya Kampung Nelayan di Pungasan



Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dengan Painan sebagai ibu kota kabupatennya. Kabupaten yang memiliki garis pantai sepanjang 234,2 km memiliki banyak potensi sumberdaya alam. Untuk dapat mengunjungi daerah ini dapat menempuh melalui jalan darat yang ditempuh sekitar 120 menit dari Kota Padang. Sepanjang perjalanan, anda akan dapat melihat panorama wilayah pesisir Kota Padang yang indah dengan kombinasi antara bukit dan kawasan pesisir. Hal ini mencerminkan kekayaan dan keindahan bumi Minangkabau yang memberikan irama bagi kehidupan sosial budaya maupun perekonomian masyarakat yang merupakan aset berharga bagi peningkatan pariwisata di Minangkabau.

Pada sisi lain, dibalik keragaman potensi sumberdaya pesisir terdapat suatu kenyataan bahwa masyarakat pesisir yang sebagian besar terdiri dari

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan	2007		2008	2009
	Desa Muaro Jambu	Desa Muaro Kandis	Desa Muaro Kandis	Desa Muaro Kandis
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	1 paket
Penanaman pohon pinus	418 btg	244 batang	-	-
Pengamanan tebing jalan	83 meter	-	-	-
Pembangunan Drainase jalan		219 meter	-	-
Pembangunan WC Umum	3 unit	3 unit	3 unit	-
Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	1 unit	-	-	-
Pekerjaan Perbaikan Rumah	40 unit	55 unit	14 unit	8 unit
Pekerjaan pembangunan rumah baru	3 unit	2 unit	-	-
Pembangunan baru sarana air bersih, tempat wudhuk dan WC Umum.		-	1 unit	-
Pembangunan jalan nelayan		410 m	166 meter	593 meter
Pembangunan Balai Pertemuan		-	-	1 unit



para kaum nelayan, umumnya memiliki kehidupan ekonomi yang relatif lemah dan kurang tersentuh oleh perhatian pembangunan. Namun dengan adanya program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di kabupaten ini, telah memberikan sedikit pembelajaran mengenai penataan lingkungan pesisir yang telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2009.

Untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut, maka Bupati Pesisir Selatan yang dijabat oleh Bapak H. Nasrul Abit mulai memben-

tuk Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang langsung dijabat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian KPA pun merekrut 3 (tiga) orang Tenaga Ahli Pendamping.

Penentuan desa pelaksana kegiatan PLBPM tahun 2007 dilakukan berdasarkan Rapid Rural Assesment (RRA) yaitu Desa Muaro Jambu dan Muaro Kandis yang terletak di Kanagarian Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 hanya dilaksanakan di desa Muaro



Kandis. Karakteristik desa pelaksana ini, umumnya desa pesisir yang mayoritas penduduknya adalah nelayan dengan taraf ekonominya relatif lemah atau miskin. Selain itu, mempunyai kondisi lingkungan permukiman yang buruk dan memiliki permasalahan degradasi lingkungan pesisir.

Desa Muaro Kandis memiliki panjang garis pantai 5,33 km dan luas sekitar 350 Ha. Jumlah penduduk desa ini adalah 2.425 jiwa dengan kepadatan sebesar 7 jiwa /ha. Jumlah masyarakat nelayan di desa ini sekitar 192, yang terdiri dari 24 nelayan tetap dan 168 nelayan buruh. Umumnya 80% rumah masyarakat tidak memiliki MCK. Sedangkan fasilitas listrik hanya dimiliki oleh 164 rumah dari 772 rumah.

Desa Muaro Jambu memiliki panjang garis pantai 4,75 km dan luas sekitar 525 Ha. Jumlah penduduk desa ini adalah 2.401 jiwa dan terdiri dari 595 KK, dengan kepadatan penduduk sekitar 5 jiwa / ha. Tingkat pendidikan di desa ini juga masih sangat rendah dimana 574 orang tidak tamat SD, 534 orang tamat SD, 426 orang tamat SLTP dan 289 orang tamat SMA. Nelayan di desa ini sebanyak 300 orang yang terdiri dari 60 nelayan tetap dan 240 nelayan buruh, petani dan pedagang. Untuk mencapai desa ini, dapat ditempuh selama 2 jam melalui lewat jalan darat dari ibu kota kabupaten.

Proses pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator untuk kedua desa ini dilakukan dengan rembuk desa namun terjadi persaingan antar masyarakat untuk menjadi pengurus LK. Sehingga pembentukan LK ini harus dilakukan dengan voting. Setelah itu, Kepala Kampung menyerahkan daftar kepengurusan tersebut kepada Wali Nagari dan diteruskan kepada Camat setempat, yang kemudian ditungkan dalam Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Motivator desat.



Penentuan kegiatan prioritas juga dilakukan dengan rembuk desa, keikutsertaan masyarakat di desa ini sangat aktif dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Adapun beberapa usulan kegiatan dari masyarakat berupa rehab rumah, pembangunan percontohan, pembangunan MCK dan pembangunan jalan desa. Setelah adanya kesepakatan antar warga maka dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan PLBPM. Selain itu, sharing pemerintah daerah berupa penyediaan dana untuk pembangunan pengaman tebing jalan sepanjang 52 meter dari Dinas PSDA

Partisipasi masyarakat dapat terlihat dengan adanya swadaya yang berupa penambahan volume pembangunan jalan nelayan yang semula dialokasi untuk 116 m menjadi 200 meter.

Manfaat riil yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan kualitas ekosistem pesisir, lingkungan permukiman Desa Muaro Jambu dan Desa Muaro Kandis Kanagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Karena hasil dari pemantauan yang dilakukan, kedua desa tersebut tidak hanya membutuhkan bina usaha dan bina manusia tetapi memerlukan bina lingkungan. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



RONI HENDRAWAN, S.Pi, dilahirkan di Ambacang pada tanggal 03 April 1977. Berhasil mendapatkan gelar S.Pi pada tahun 2002 dan sekarang ini sedang menikmati beasiswa dari suatu LSM Jepang yang bernama IRECO yaitu berupa pendidikan Program Pasca Sarjana Program S2 Pengelolaan Sumberdaya Perairan Pesisir dan Kelautan (PSP2K) Universitas Bung Hatta Padang, Mulai bergabung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tenaga Ahli

Pendamping (TAP) pada program PLBPM sejak tahun 2007 dan 2008.

Program PLBPM dapat mengimplementasikan ilmu antara ilmu di bangku kuliah dengan masyarakat yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan semakin membaiknya infrastruktur permukiman. Tahun 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sebagai Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Kesuksesan suatu program pemberdayaan tidak terlepas dari hubungan timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah daerah.



WINALDI, SE, dilahirkan di Air Haji pada tanggal 05 April 1974. Berhasil mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Eka Sakti di Padang. Mulai bergabung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada program PLBPM sejak tahun 2007. Sebagai putra daerah asli, bertanggung jawab secara moril untuk memajukan tanah kelahiran seperti program PLBPM.



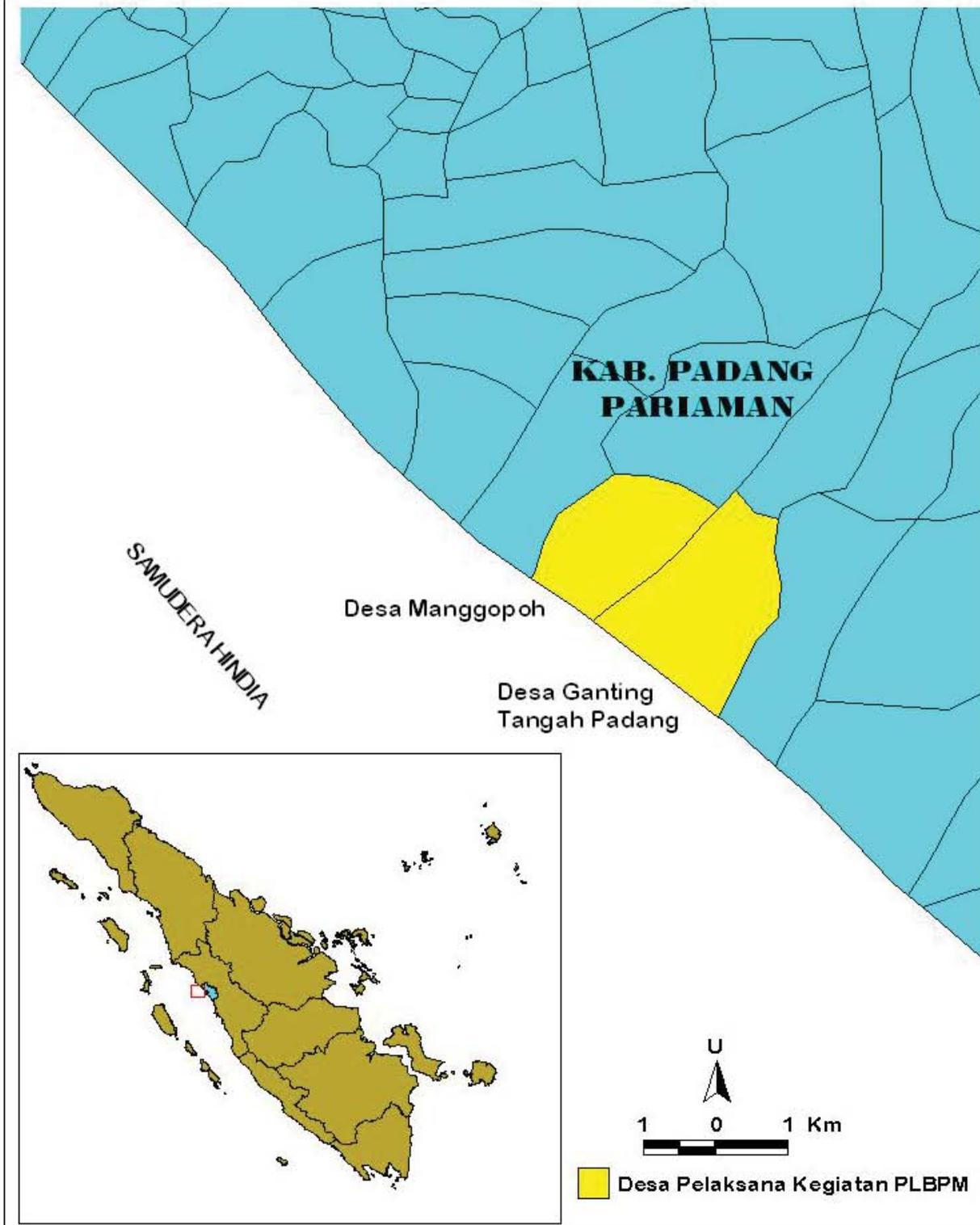
ZEN HENDRIADI, ST dilahirkan di Air Haji tepatnya Tanjung Medan pada tanggal 21 Desember 1971. Berhasil mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil pada Universitas Bung Hatta di Padang. Mulai bergabung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada program PLBPM sejak tahun 2007.

Merupakan putra daerah asli yang sangat bertanggung jawab secara moril untuk memajukan desa kelahiran, serta penerapan ilmu dalam perbaikan rumah nelayan dalam program PLBPM. ●



01.01.2005

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Padang Pariaman





Korong Pesisir Nan Elok di Kabupaten Padang Pariaman

Oleh: Lilis Suriati dan Ermayeti



Anda mungkin bisa tahu dimana lokasi Kabupaten Padang Pariaman, karena kabupaten ini adalah kabupaten lama yang telah mekar menjadi tiga bagian yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman ini juga terkenal sebagai kabupaten pesisir yang memiliki panjang garis pantai sekitar $60,50 \text{ km}^2$. Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat 6 kecamatan pesisir dan 10 nagari (pemerintahan administratif terkecil sebutan lain dari desa). Kabupaten ini terkenal sebagai pemasok ikan karang. Jika Anda ingin berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman, Anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta langsung menuju Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman setelah itu dilakukan perjalanan darat selama 1 jam. Sepanjang perjalanan Anda akan disuguhkan



pelaksanaan ini tim FKTD agak kesulitan dalam menentukannya. Kami selaku TAP mengusulkan skoring untuk setiap nagari. Dari hasil skoring tersebut kami kemudian melakukan survey lokasi ke nagari lokasi pelaksanaan bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Setelah itu kami mengajukan dua lokasi pelaksanaan yang menurut kami sesuai dengan kriteria dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Nagari Ulakan merupakan nagari pesisir yang pertama dipilih dengan melihat keterpurukan infrastruktur lingkungan dan degradasi lingkungan pesisir. Dengan cara yang sama pula dari nagari Ulakan dipilih dua korong (dulunya disebut desa) sebagai zona yang akan dilakukan

dengan pemandangan yang indah dimana Anda akan menjumpai perumahan masyarakat di sisi kiri dan kanan jalan, sawah-sawah yang membentang luas dan pohon kelapa yang melambai-lambai seakan-akan menyambut kedatangan Anda.

Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Padang Pariaman baru mendapatkan kesempatan untuk menata nagari pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Pelaksanaan kegiatan PLBPM akan dilakukan di dua wilayah pesisir. Pemerintah kabupaten khususnya tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) harus memilih dari sepuluh nagari pesisir yang akan ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan. Pada acara pemilihan lokasi



kegiatan PLBPM. Untuk zonasi pertama kami mengusulkan Korong Manggopoh Dalam sedangkan Korong Ganting Tengah Padang merupakan nagari pesisir yang akses ke lautnya masih buruk dan masih sedikit program pemerintah yang terlaksana sehingga masih terbatasnya infrastruktur serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat pesisir. Kemudian hasil skoring dan laporan pengamatan lokasi tersebut kami laporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga bahan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan nagari lokasi pelaksanaan. Dalam rapat FKTD disetujui bahwa kegiatan PLBPM 2009 diadakan dalam satu nagari yaitu



nagari Ulakan. Akhirnya tim FKTD memutuskan **Korong Manggopoh Dalam dan Korong Ganting Tengah Padang** sebagai lokasi lokasi pelaksanaan.

Korong Manggopoh Dalam dan Korong Ganting Tengah Padang merupakan bagian dari Kecamatan Ulakan Tapakis, terdapat di Nagari Ulakan yang luasnya sekitar 21 km². Topografi nagari ini berupa daratan rendah dengan ketinggian ± 7 - 100 meter dari permukaan laut. Perjalanan menuju nagari ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 7 km dari ibu kota kabupaten atau dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Permukiman masyarakat di nagari ini terpusat di sepanjang pantai. Bangunan rumah masyarakat di nagari ini masih sangat sederhana, dimana masih banyak rumah-rumah non permanen yang tidak layak huni. Kondisi permukiman Korong Manggopoh Dalam ini bisa dibilang tidak teratur, hal ini terlihat jika musim hujan tiba banyak genangan air di sekeliling jalan nagari,

serta belum tersedianya balai pertemuan dan sanitasi lingkungan yang masih buruk. Sedangkan permukiman Korong Ganting Tengah Padang menyebar sehingga sangat sulit mengumpulkan masyarakatnya untuk mengadakan rembug desa. Masyarakat yang tinggal di nagari ini berjumlah 14.150 jiwa atau terdiri dari 1.163 KK, 80% masyarakat nagari ini bekerja sebagai nelayan, dan sisanya bekerja sebagai petani padi. Hasil tangkapan nelayan di nagari ini berupa Ikan Tembang, Tenggiri dan Tongkol Krai.

Setelah mendapatkan pelatihan TAP di Jakarta bulan April lalu, kami melakukan pendampingan kepada masyarakat Korong Manggopoh Dalam dan Korong Ganting Tengah Padang. Kedua korong lokasi pelaksanaan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dimana tanggapan masyarakat Korong Ganting tengah Padang pada kegiatan PLBPM ini kurang hangat. Banyak masyarakat nagari yang tidak hadir dalam rembug korong padahal kami telah mengundang masyarakat dari rumah ke rumah den-



gan menempel pengumuman di lapau-lapau (*warung-warung*) untuk hadir dalam rembug korong ini. Untuk korong ini sudah ada Lembaga Kemasyarakatan (LK)-nya. Warga yang hadir pada acara rembug korong mempercayakan kegiatan PLBPM ini kepada LK yang telah ada. Pada kesempatan ini kami juga melakukan pemilihan motivator korong dari sejumlah masyarakat yang hadir dengan bermusyawarah. Di Korong Manggopoh Dalam, kami agak kesulitan dalam membentuk kepengurusan LK karena SDM yang ada rata-rata berpendidikan rendah. Namun sambutan hangat dari warga seakan menepis semua kesulitan yang ada. Mereka berkumpul dalam rembug korong yang kemudian kami melakukan pembentukan LK beserta penunjukan motivator korong.

Pada saat penentuan kegiatan prioritas untuk program PLBPM ini, masyarakat Korong Manggopoh Dalam cenderung aktif dan menganggap kegiatan PLBPM ini merupakan suatu proyek besar dan memberikan keuntungan besar. Wali Nagari menerangkan kepada warga bahwasanya kegiatan PLBPM ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata lingkungannya, yang pada prinsipnya kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat sendiri, sehingga diharapkan semua masyarakat nagari harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan kegiatan prioritas dapat dilakukan secara baik sehingga kegiatan PLBPM dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Setelah itu, kami melakukan rembug korong dimana rembug korong tersebut melakukan pemilihan kegiatan prioritas. Rembug korong ini didominasi oleh beberapa suara saja. Kami menekankan kepada warga agar dapat menyumbangkan aspirasinya untuk membangun korong. Akhirnya sedikit demi sedikit warga mulai mengutarakan permasalahan yang ada di nagari dan memberikan usulan kegiatan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Warga mengusulkan pembangunan 2 buah Gapura, jalan lingkung, musholla / tempat sholat, MCK, pelebaran badan jalan yang sudah ada, tempat parkir, bak

sampah dan tempat duduk santai. Kami menampung semua usulan dari warga. Pada tahap berikutnya kami mengajak warga untuk melakukan prioritas kegiatan menurut kebutuhan yang paling diperlukan. Untuk mewujudkan semua keinginan warga membutuhkan biaya yang cukup besar. Terbatasnya anggaran dana PLBPM mengharuskan warga memilih prioritas untuk pembangunan infrastruktur permukiman. Setelah semua kegiatan ini disepakati oleh masyarakat, kami melakukan pendampingan dalam penyusunan RAB untuk pembangunan fisik. Selain kegiatan fisik, kami selaku TAP telah menyusun suatu rencana tata ruang nagari dan rencana zonasi kawasan pesisir. Kegiatan ini merupakan gambaran cita-cita dan impian masyarakat nagari dalam upaya membangun nagarinya selama 5 tahun yang akan datang dan telah disepakati oleh masyarakat Korong Manggopoh Dalam. Untuk mewujudkan impian tersebut masyarakat nagari sepakat bahwa visinya mewujudkan nagari pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbeda dengan Korong Ganting Tengah Padang, semua masyarakat berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi untuk membangun nagarinya. Rembug korong ini dilakukan sangat sederhana di Surau Tengah. Meskipun demikian tidak mengurangi kemauan warga untuk ikut bernusywarah. Semua aspirasi masyarakat ini kami tampung dan untuk menentukan prioritas kegiatan yang telah diusulkan kami lakukan secara musyawarah sehingga tidak mengecewakan pihak-pihak yang telah berpartisipasi. Selaku TAP kami juga mendampingi masyarakat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun rencana kegiatan fisik yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan jalan lingkung sepanjang 350 meter, pembangunan satu rumah percontohan, perbaikan 7 unit rumah penduduk, penanaman pohon cemara laut. Korong Ganting Tengah Padang juga tidak mau kalah dengan Korong Manggopoh Dalam, dimana nagari ini telah menyusun suatu rencana tata ruang nagari dan rencana zonasi kawasan pesisir untuk dicapai dalam 5 tahun

yang akan datang . Nagari ini mempunyai impian untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang cinta keteraturan lingkungan permukiman. Keteraturan lingkungan tersebut dapat menopang mobilitas ekonomi masyarakat pesisir di Korong Ganting Tengah Padang sehingga masyarakat nagari dapat hidup lebih sejahtera. Adapun kegiatan PLBPM di Kabupaten Padang Pariaman ini dapat terlihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Manggopoh Dalam, partisipasi masyarakat di Korong Ganting Tengah Padang ini cukup tinggi, masyarakat ingin sekali membangun nagarinya akan terbebas dari belenggu keterisolan nagarinya. Masyarakat bahu membahu mengerjakan kegiatan fisik dengan bergotong royong, Motivator di kedua nagari inipun sangat gigih dalam memberikan pengarahan dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Hal ini dilakukannya agar tingkat partisipasi masyarakat

Kegiatan PLBPM	Manggopoh Dalam	Ganting Tengah Padang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Nagari dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Penanaman Cemara Laut	550 batang	-
Pohon Ketaping	-	550 batang
Pemabangunan Jalan Lingkung	257 m	350 m
Pembangunan drainase	30 m	-
Pembangunan MCK	2 Unit	-
Pembangunan Balai Pertemuan	1 Unit	-
Perbaikan Rumah	3 Unit	6 Unit
Pembangunan Rumah Percontohan	1 Unit	1 Unit
Pembuatan bak sampah	2 Unit	-

Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan ini berupa pendampingan dan pengawasan serta pengalokasian dana untuk kedua nagari lokasi pelaksanaan. Untuk menunjang penguatan ekonomi masyarakat di Korong Manggopoh Dalam dan Korong Ganting Tengah Padang, pemerintah daerah melaksanakan program PNPM-MKP 2009 di dua korong tersebut. Masyarakat di Korong Manggopoh Dalam hanya beberapa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan fisik, namun untuk pembangunan balai pertemuan ada salah seorang tokoh masyarakat menghibakan tanah disamping bangunan TPI yang telah ada. Lain hal dengan Korong

di kedua nagari ini dapat meningkat.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih usahanya sendiri. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat sadar betapa pentingnya penataan lingkungan permukiman yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat nagari. Perencanaan kegiatan dengan rebug korong serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat nagari. ●

Biografi

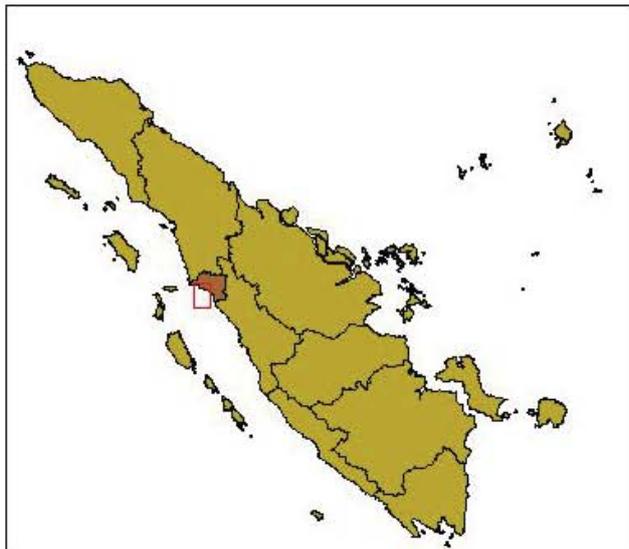
Sekilas Mengenai Penulis

LILIS SURIATI, S.Pt, dilahirkan di Pakandangan, Kec Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman pada tanggal 10 September 1981 dibesarkan ditanah kelahiran tersebut. Kemudian tahun 2000 diterima di Fakultas Peternakan UNAND Padang dan berhasil mendapat gelar Sarjana Peternakan pada tahun 2005. bekerja di PT. Karyamitra Budisentosa, sebagai supervisor selama 11 bulan. Kemudian pindah ke Jakarta dan mencoba mengelola Rumah Makan Padang milik Paman di Cimone Tangerang selama satu setengah tahun. Setelah itu pindah ke Jakarta dan bekerja di distributor ban Bridgestone sebagai Costumer Service. Kembali ke Padang setelah 2 tahun bekerja di Jakarta, kemudian di Padang bekerja di sebuah usaha rumah tangga sepatu di Sintuk Toboh Gadang, Pariaman Yoesani Shoes sebagai Staf Administrasi. Pada saat ada lowongan dari dinas Kelautan untuk menjadi TAP dalam kegiatan PLBPM tertarik untuk ikut dan ternyata saya diterima. Saya tertarik menjadi TAP PLBPM karena kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menata lingkungan tempat tinggalnya. Disini merasa tertantang untuk dapat memotivasi masyarakat dalam menata dan memajukan lingkungannya sehingga kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai daerah kumuh yang *notabene* selama ini merupakan image yang tertanam di masyarakat awam.

ERMAYETI, S.Pi dilahirkan pada tanggal 24 Mei 1979 di Tiku Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dibesarkan di Tiku, Kemudian setelah lulus SMU pada tahun 1998, melanjutkan pendidikan Di Universitas Bung Hatta Padang pada Fakultas Perikanan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Pada tahun 2001 dan meraih gelar Sarjana pada Tahun 2005. Setelah tamat sempat bekerja pada perusahaan Philips di Batam pada tahun 2006, selama lebih kurang satu tahun bekerja akhirnya kembali ke Padang. Pada tahun 2009 ini bekerja sebagai TAP pada Program PLBPM Padang Pariaman, karena tertarik bergabung dan mengabdikan diri pada Dinas Kelautan Perikanan, karena dapat bersama-sama masyarakat membangun dan menata desa yang lebih indah dan teratur, serta perlu perencanaan dan pelaksanaan yang matang. ●



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pasaman Barat



 Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM



Membangun Jorong Pesisir Melalui Kegiatan PLBPM

Oleh: Jubri Rosul, Dodi Noviardi dan Nurhusniah



Pernahkah anda berkunjung ke Kabupaten Pasaman Barat? Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38. Setelah pemekaran Kabupaten ini beribukota di Simpang Empat yang terkenal dengan lambang kelapa sawit. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Sumatera Barat dengan panjang garis pantai 152 km. Di bagian pesisir Kabupaten Pasaman Barat terdapat 12 *jorong* pesisir yang termasuk dalam 5 kecamatan. (*jorong* merupakan istilah desa di Provinsi Sumatera Barat). Dari 5 kecamatan tersebut hanya 1 kecamatan yang memiliki pulau-pulau kecil yaitu Kecamatan Sungai Beremas. Potensi unggulan dari Kabupaten Pasaman Barat berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Hasil utama sektor pertanian di kabupaten ini adalah jagung sedangkan pada sektor perkebunan berupa kelapa sawit. Selain kedua



sektor tersebut, kabupaten ini juga memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dan merupakan pemasok hasil perikanan untuk Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam. Hasil perikanan tangkap ini berupa ikan tongkol, ikan kembung, selar, udang, kepiting, cumi-cumi dan lain-lain. Sektor perikanan darat saat ini sedang dikembangkan terutama budidaya ikan lele dumbo (*Chlarias gariupenus*). Kabupaten ini juga terkenal dengan produksi lele asap. Jika Anda ingin berkunjung ke Kabupaten ini, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Padang (Bandara Internasional Minangkabau), kemudian dilanjutkan melewati jalur darat melalui Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan langsung Kabupaten Pasaman Barat dengan waktu tempuh 3 jam dengan kondisi jalan sangat baik. Disepanjang jalan anda akan dapat melihat pohon kelapa sawit seolah-olah berkata : “Welcome to Pasaman Barat...”

Sebagai Kabupaten baru, tidak semua jorong yang telah merasakan pembangunan. Alhasil pada tahun 2009, Kabupaten Pasaman Barat menjadikan salah satu penerima program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) dari 55 kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagai kabupaten yang baru menerima kegiatan PLBPM, lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM harus dilakukan pada 2 jorong pesisir yang dicirikan dengan taraf ekonomi relatif miskin, kondisi lingkungan permukiman yang buruk, berada pada kawasan yang mengalami degradasi lingkungan pesisir serta merupakan daerah yang terisolir dengan aksesibilitas yang rendah. Kabupaten Pasaman

Barat memiliki 12 jorong pesisir dan harus memilih 2 jorong yang memiliki kriteria seperti yang tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Proses penetapan lokasi ini dimulai dengan runutan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) melakukan survey lapangan di semua jorong pesisir sambil mengisi tabel skoring penilaian yang telah dipersiapkan. Tabel skoring tersebut diisi berdasarkan hasil wawancara dengan jorong dan pemangku kepentingan lainnya serta mengobservasi secara langsung kondisi pemukiman penduduk. Hasil penilaian tersebut selanjutnya didiskusikan dengan TPD, PPK dan KPA.

Dalam penentuan lokasi target kegiatan PLBPM, ditemukan permasalahan yaitu FKTD baru terbentuk sekitar bulan Juni 2009 sehingga belum sempat mengadakan pertemuan untuk membahas penetapan lokasi sementara lokasi pelaksanaan kegiatan sudah harus ditentukan secepatnya. Untuk mengatasi hal ini, TAP membuat terobosan baru dengan membuat Tela'ahan Staf kepada Bupati Pasaman Barat untuk memberikan arahan penetapan lokasi kegiatan PLBPM dengan berdasarkan data-data skoring yang diperoleh selama survei di lapangan. Bupati menyarankan Jorong Katiagan dan Jorong Pondok. Pada akhirnya, kedua jorong tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM Tahun Anggaran 2009.

Jorong Katiagan termasuk dalam Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali dengan luas sekitar 55,79 km². Topografi dari jorong ini adalah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 10 m dari permukaan laut. Untuk menjangkau

jorong ini, dapat menggunakan sepeda motor dari Simpang Empat selama 4 jam dengan akses jalan ke desa ini masih berupa tanah dan masih sulit di lalui oleh kendaraan beroda empat. Alternatif lain untuk menempuh desa ini yaitu melalui jalur sungai saat air pasang dari Desa mandiangin. Jika ditarik garis lurus dari Katiagan ke Ibu Kota Kecamatannya (Kinali), lokasi ini sebenarnya hanya berjarak 18 Km. Akan tetapi karena sulitnya akses jalan menuju desa ini, untuk mencapai lokasi ini kadang

Katiagan 2381 jiwa yang terbagi dalam 580 KK. Masyarakat yang tinggal di jorong ini 90% bekerja sebagai nelayan tangkap dan sisanya berdagang, guru dan buruh perkebunan sawit. Hasil tangkap nelayan di jorong ini adalah ikan pelagis seperti ikan selar, kembung, tongkol dan berbagai jenis udang kepiting.

Jorong Pondok termasuk Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan luas sekitar 75 km². Topografi jorong ini adalah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 3 meter



harus menempuh jarak hingga 50 - 60 Km dari Simpang Empat. Pemukiman penduduk Jorong Katiagan berpusat di pemerintahan Jorong dan dikelilingi oleh sungai. Dari segi bangunan rumah, di Jorong Katiagan mayoritas rumah permanen dan semi permanen. Di jorong tersebut juga masih ditemui rumah non permanen yang dapat dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni. Infrastruktur pemukiman tidak teratur dengan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti jalan lingkungan, sarana penerangan, MCK, TPS, sarana air bersih, tambatan perahu dan yang terpenting adalah jalan masuk menuju jorong ini. Jumlah penduduk di Jorong

dari permukaan laut. Berbeda dari Jorong Katiagan, akses jalan ke Jorong Pondok sangat baik. Dalam waktu kurang lebih 25 menit, Anda sudah bisa sampai ke Jorong Pondok dengan jarak sekitar 20 km dari ibu kota kabupaten. Permukiman di Jorong Pondok menyebar di sepanjang pantai. Bangunan rumah masyarakat di jorong ini terdiri dari rumah permanen, semi permanen dan non permanen yang tidak layak huni. Jorong ini sempat terkenal karena banyaknya bangunan rumah yang masyarakat yang hancur terkena abrasi pantai sehingga banyak dari bangunan-bangunan rumah tersebut yang tidak bisa ditempati warga. Pada tahun ini, seluruh

pemukiman tersebut di desa ini akan direlokasi ke daerah yang lebih tinggi. Kegiatan relokasi ini dilaksanakan melalui program mitigasi bencana dengan pengadaan sebanyak 64 unit rumah. Rumah nelayan ini diberikan kepada masyarakat nelayan yang rumahnya terkena abrasi pantai. Rumah nelayan ini dibangun pada lahan seluas 5 ha yang dihibahkan warga kepada PEMDA Pasaman Barat. Infrastruktur pada lokasi permukiman yang direlokasi seperti jalan, penerangan, drainase dan lain-lain belum ada, sehingga melalui kegiatan PLBPM di Jorong Pondok dibangun infrastuktur tersebut.

en Pasaman Barat dilakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (ninik mamak, alim ulama) tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, kepala jorong dan wali nagari dalam suatu pertemuan yang disebut rembug jorong. Kalau ada masyarakat yang kurang paham dengan PLBPM, TAP menjelaskan di luar pertemuan misalnya di warung kopi. Tanggapan masyarakat di dua lokasi target PLBPM tentang program berbeda-beda. Di Jorong Katiagan tanggapan masyarakat sangat antusias sekali. Pada saat pertama kali berkunjung ke jorong ini untuk mem-



Jumlah penduduk Jorong Pondok adalah 2.564 jiwa yang terdiri dari 600 KK. Dari jumlah tersebut, 80% penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan sisanya sebagai pedagang, PNS, tukang dan buruh. Hasil tangkapan nelayan di Jorong Pondok adalah ikan tongkol, kembung, selar, bawal, udang dan kepiting.

Cara yang dilakukan TAP dalam melakukan sosialisasi PLBPM kepada masyarakat mungkin berbeda-beda di setiap kabupaten. Di kabupat-

perkenalkan kegiatan PLBPM, wali nagari telah memberitahukan kepada warganya sehingga warga telah ramai menunggu kedatangan TAP. Tetapi pada waktu itu ada keterlambatan sampai di lokasi sehingga masyarakat telah pulang ke rumah masing-masing. Masyarakat Katiagan menginginkan kegiatan PLBPM ini dapat membangun infrastruktur permukiman. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PLBPM, di setiap lokasi target harus ada Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang bertugas sebagai

motor penggerak dalam setiap kegiatan PLBPM. Untuk itu dilakukan musyawarah/mufakat dalam suatu pertemuan/rembug untuk pemilihan LK beserta Motivator desa. Masyarakat mengusulkan calon-calon pengurus LK dan motivator untuk selanjutnya masyarakat sendiri yang memilih dan menyetujui berdasarkan suara terbanyak. Pada awal pelaksanaan rembug desa untuk pemilihan LK dan motivator, terpilihlah motivator yang dalam perjalanannya kurang diterima oleh masyarakat. Pada rembug desa kedua, dilakukan pemilihan kembali motivator dan terpilihlah pucuk adat (tokoh adat) di jorong ini sebagai motivator jorong (desa) dengan persetujuan masyarakat. Pada rembug desa pertama, terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi kepala desa di kabupaten ini. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat "*baliak ka nagari*" yang dijabat oleh wali nagari di bawah camat dengan cakupan wilayah cukup luas dan terdiri dari beberapa jorong-jorong besar. Timbul pertanyaan, apakah kepala desa yang dimaksudkan dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM apakah kepala jorong atau wali nagari? Perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan pada rembug desa kedua dan ditetapkan wali nagari sebagai kepala desa.

Di Jorong Pondok dan Katiagan, cara yang ditempuh untuk mensosialisasikan PLBPM kepada masyarakat melalui pertemuan (rembug jorong) dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kepala jorong, sekretaris nagari, wali nagari dan camat sasak ranah pasisie. Tanggapan masyarakat Jorong Pondok tidak seantusias seperti di Jorong Katiagan. Hal ini ditandai dengan sulitnya untuk mengadakan rembug karena masyarakat sibuk dengan urusannya masing-masing.

Mekanisme pembentukan LK dan motivator yaitu melalui musyawarah/mufakat dalam forum rembug. Permasalahan yang terjadi di Jorong Pondok adalah sulitnya mencari waktu untuk mengadakan rembug jorong karena banyak masyarakat melaut pada siang hari dan sibuk dengan pekerjaan lain. Masyarakat di di jorong ini belum menemukan orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki jabatan

bendahara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pendekatan dengan pengurus LK dan diperoleh informasi calon bendahara LK.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di Jorong Katiagan, keikutsertaan masyarakat cukup aktif. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk membangun infrastruktur permukimannya sehingga kampung mereka bisa segera keluar dari ketersoliran. Dalam penentuan kegiatan prioritas ini meskipun tidak semua masyarakat yang hadir, tetapi motivator telah dapat mewakili aspirasi masyarakat jorong. Dalam rembug jorong terangkat kegiatan prioritas adalah yang diinginkan masyarakat yaitu mengusulkan pembuatan jembatan gantung sepanjang 150 meter. Keinginan ini dirasakan sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan biaya yang melebihi anggaran ada. Selain itu ada juga usulan dari masyarakat yang sedikit melenceng dari Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Jalan keluar untuk permintaan yang ini adalah meminta saran dari PPK, TPD dan KPA. Setelah dilaksanakannya verifikasi oleh Tim Pengendali Pusat yang didampingi oleh FKTD, TPD, PPK dan KPA, usulan kegiatan prioritas pada rembug pertama harus dirombak. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang dihasilkan belum melingkupi seluruh item kegiatan PLBPM. Kegiatan prioritas yang diusulkan masyarakat pada rembug pertama adalah pembuatan jembatan gantung, DAM Sungai Batang Masang, rehab masjid, jalan lingkungan, MCK, pagar pekarangan sekolah, gedung TK, TPI dan rehab rumah. Dari hasil verifikasi tersebut, tim pengendali pusat mengusulkan untuk membangun tambatan perahu sebagai pengganti jembatan gantung. Setelah diadakan rembug kedua, maka diperoleh usulan kegiatan prioritas yang diantaranya perbaikan bantaran Sungai Batang Masang yang membahayakan permukiman masyarakat sepanjang panjang 20 meter, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.000 meter, pengadaan pompa dragon sebanyak 10 unit, pengerasan jalan masuk Katiagan sepanjang 3.700 meter, pembangunan tambat perahu 1 unit, pembuatan plang

larangan penebangan hutan dan perbaikan rumah sebanyak 7 unit pasca gempa Sumatera yang terjadi pada tanggal 30 September 2009.

Pada Jorong Pondok, masyarakat dalam penentuan kegiatan prioritas terlihat kurang aktif bila dibandingkan dengan Jorong Katiagan. Pada Jorong Pondok, kegiatan prioritas PLBPM dipadukan dengan kegiatan pembangunan rumah nelayan dari program Mitigasi Bencana. Masyarakat yang aktif umumnya yang mendapat bantuan rumah nelayan.

Permasalahan yang terangkat dalam penentuan kegiatan prioritas di jorong ini adalah sulitnya menentukan kegiatan-kegiatan prioritas karena harus dipaduserasikan dengan kegiatan rumah nelayan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dicoba untuk dikonsultasikan dengan konsultan perencana pada kegiatan rumah nelayan. Kegiatan prioritas PLBPM yang akan dibangun pada kegiatan rumah nelayan adalah pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase, pengadaan pipa air bersih ke masing-masing rumah nelayan yang telah dibangun, pengadaan listrik untuk penerangan, pengadaan *septictank*, pembuatan sumur, penanaman hutan lindung dan pengadaan TPS dan TPA.

Respon dan partisipasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kabupaten Pasaman Barat cukup besar. Di Jorong Katiagan, PEMDA berperan aktif memfasilitasi semua kegiatan mulai dari pertemuan/rembug jorong sampai penyusunan RAB, serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan. Selain itu PEMDA juga mengintegrasikan program PEMKAB ataupun PEMPROV dengan kegiatan PLBPM melalui pembangunan balai pertemuan terpadu dari BPMPPKB Kabupaten Pasaman Barat, pembangunan MCK yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan pemerataan jalan sepanjang 3.700 meter oleh PT. AMP. Untuk tahun 2010, telah dialokasikan pembangunan balai pertemuan nagari terpadu oleh PT. AMP yang merupakan lanjutan dari BPMPPKB Kabupaten Pasaman Barat, pembangunan lanjutan jembatan Katiagan - Agam dan penambahan armada penangkapan ikan. Pada tahun 2011 diren-

anakan akan dibangun pasar nagari dan penyediaan listrik oleh PLN. Tahun 2012 akan dilakukan pembangunan TPI dan tempat pengolahan ikan. Dan tahun 2013 akan direncanakan untuk pembangunan pabrik es dan penataan objek wisata.

Sedangkan di Jorong Pondok, PEMDA memfasilitasi kegiatan mulai dari rembug dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan. Integrasi kegiatan PLBPM dengan program lain adalah pembangunan rumah nelayan dari Program Mitigasi Bencana yang berasal dari Direktorat Pesisir dan Lautan, Departemen Kelautan dan Perikanan sebanyak 64 unit pada lahan \pm 5 ha yang telah dihibahkan oleh pemerintah daerah. Rumah nelayan ini diperuntukkan bagi masyarakat nelayan yang rumahnya hancur terkena abrasi pantai. Selain itu, pada lokasi ini juga terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan.

Partisipasi masyarakat Jorong Katiagan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam rembug dengan memengusulkan kegiatan prioritas dan memberi gagasan bagaimana program ini dapat berjalan dengan lancar. Sewaktu kegiatan fisik masyarakat diminta untuk bergotong royong dan pemberian upah untuk kegiatan tersebut hanya diberikan kepada sejumlah pekerja saja. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM, motivator aktif dalam setiap kegiatan PLBPM. Motivator menjelaskan kepada masyarakat bahwa program PLBPM bersifat swakelola bukan proyek sehingga masyarakatlah yang merencanakan, membangun dan menikmati hasilnya. Hal yang sama juga terjadi di Jorong Pondok. Di jorong ini masyarakatnya tidak seaktif masyarakat Jorong Katiagan. Kegiatan pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan upah harian. Upah ini merupakan mata pencaharian alternatif saat tidak melaut karena angin kencang. Dalam pelaksanaan kegiatan, motivator mengajak masyarakat terutama mereka yang mendapat bantuan rumah nelayan untuk terlibat secara aktif di setiap program PLBPM agar kegiatan ini cepat selesai dan dapat segera dinikmati hasilnya. ●

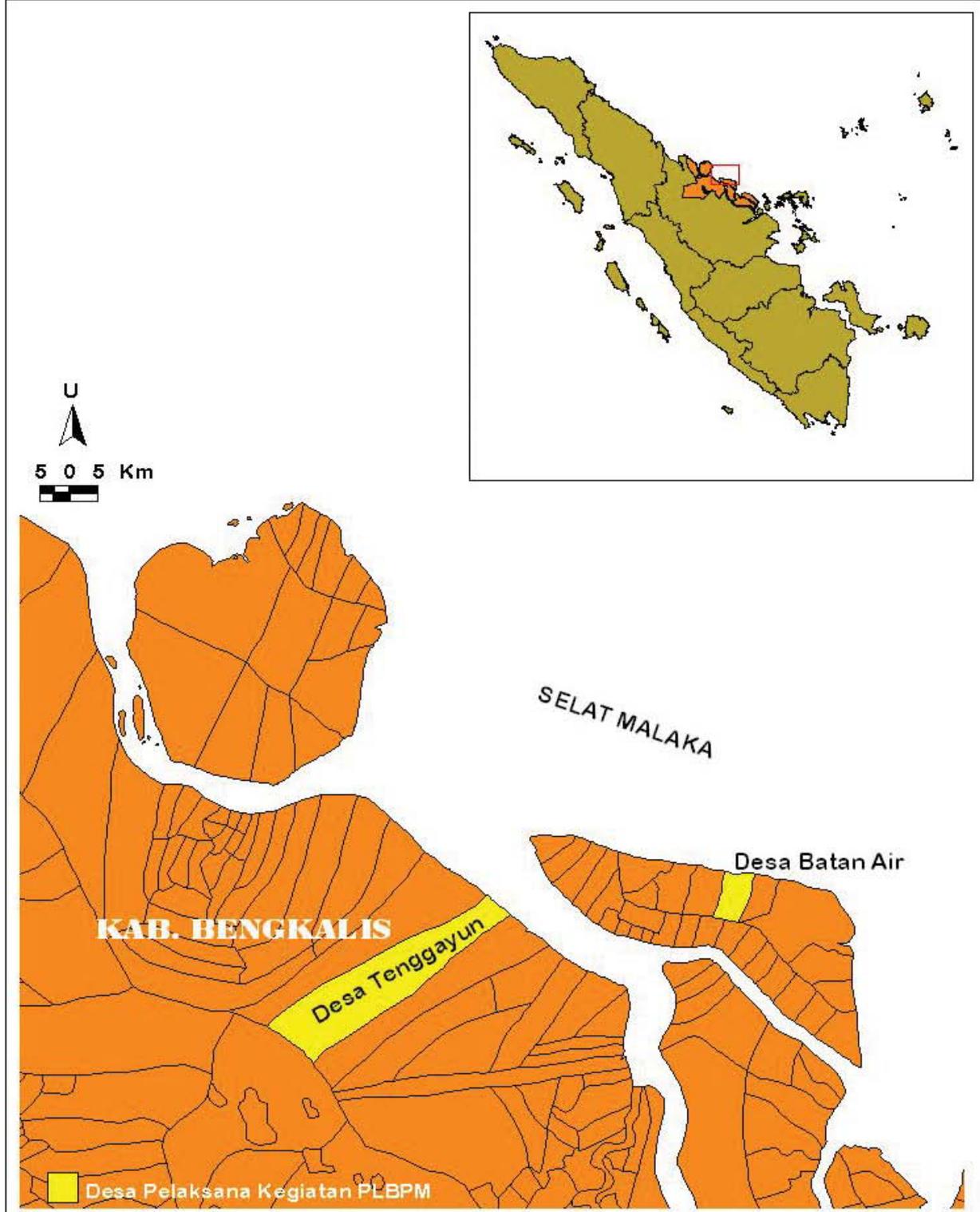
Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



JUBRI ROSUL, S.Pi. dilahirkan di Padang Gelanggang-Pasaman-Sumbar pada tanggal 18 Juni 1982,. Pada tahun 2001, penulis diterima di Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau pada Jurusan Ilmu Kelautan. Pada Februari 2006, penulis berhasil menyelesaikan kuliah. Pada September 2006, penulis diterima bekerja di PT. Dipasena Citra Darmaja, sebuah perusahaan bergerak dalam pengolahan udang kualitas ekspor sebagai Supevisor pada divisi ekspor import. Setelah setahun, perusahaan tersebut mengalami krisis. Pada tahun 2007, penulis mendapat tawaran sebagai fasilitator di DKP Kabupaten Natuna-Kepulauan Riau selama 1 tahun. Tahun 2008 bekerja sebagai tenaga pendamping program MCRMP – SNRM di Tembilahan - Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Tahun 2009, penulis mulai bergabung dalam program PLBPM sebagai TAP. Penulis merasa tertantang untuk menjadi TAP PLBPM karena baru kali ini penulis mendampingi masyarakat dalam hal menata lingkungan infrastruktur permukiman mereka. Melalui program PLBPM, penulis berbaur dengan ahli sipil dan ekonomi yang menambah pengalaman buat penulis. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Bengkalis





Penataan Kawasan Permukiman Nelayan di Kabupaten Bengkalis

oleh: Supianto dan Nursyah



Kabupaten Bengkalis terletak di Pantai Timur Pulau Sumatera, tepatnya di Propinsi Riau. Kabupaten ini letaknya berhadapan langsung dengan Malaysia dan dipisahkan oleh Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan Internasional. Luas wilayah kabupaten ini sekitar 11.481,77 km² dan memiliki 26 pulau besar dan kecil, yang terdiri dari 13 kecamatan dan 175 desa/kelurahan. Panjang garis pantainya sekitar 1.335 km. Jika akan berkunjung ke Kota Bengkalis, kita dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Pekanbaru setelah itu dapat dilanjutkan perjalanan melalui sungai selama 3,5 jam atau melalui jalur transportasi darat selama 8 jam. Kota Bengkalis terletak di pulau yang dikenal dengan nama pulau Bengkalis karena posisinya yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera.

Pada tahun 2006, Kabupaten Bengkalis mendapatkan kesempatan untuk menata kawasan permukiman nelayannya melalui kegiatan PLBPM. Pelaksanaan kegiatan PLBPM dilakukan di dua desa pesisir yang ditetapkan

Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Bengkalis

Kegiatan PLBPM	2006		2007		2009
	Desa Tenggayun	Desa Bantan Air	Desa Tenggayun	Desa Bantan Air	Desa Bantan Air
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi kawasan Pesisir	-	-	-	-	1 Paket
Pembangunan Rumah Nelayan	2 Unit	1 Unit	-	-	4 Unit
Pembangunan Pengolahan Air Minum	1 Unit	1 Unit	-	-	-
Pembuatan Rumah Pengolahan Air	1 Unit	1 Unit	-	-	-
Pembangunan MCK	1 Unit	1 Unit	-	-	-
Penanam Mangrove	6919 btg	482 btg	363 btg	1400 btg	-
Pemasangan Instalasi listrik	1 Unit	-	-	-	-
Pembuatan jalan beton	-	600 m2	-	-	-
Pembangunan Gedung serbaguna + TPI	-	1 Unit	-	1 Unit	-
Normalisasi drainase primer	-	1 Unit	-	-	-
Penggalian drainase lingkungan nonkonstruksi	-	300 m	-	-	-
Pembuatan drainase sekunder dan Gorong-Gorong	-	-	1 Unit	-	-
Pembuatan los tempat berjualan	-	-	1 Unit	-	-
Pembangunan gazebo	-	-	3 Unit	-	-
Lanjut. Pemb. Rumah pengolahan air minum	-	-	1 Unit	1 Unit	-
Pengurusan izin air minum	-	-	1 Paket	1 Paket	-
Pembuatan billboard pelestarian lingkungan	-	-	1 Unit	1 Unit	-
Penyuluhan masy. ttg pelestarian lingkungan	-	-	1 Paket	1 Paket	-
Perumusan + sosialisasi peraturan desa	-	-	1 Paket	1 Paket	-
Jaringan instalasi air bersih	-	-	-	1 Unit	-
Pembangunan Tempat Pengolahan Hasil Tangkapan	-	-	-	-	4 Unit

menjadi desa pelaksana kegiatan. Pada kegiatan pemilihan desa tersebut didasari oleh keputusan tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dibantu oleh dinas terkait serta hasil survey yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dan tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Dalam penentuan lokasi, TAP menggunakan metode skoring untuk menentukan lokasi yang akan dipilih. Metode skoring ini didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: kondisi lingkungan pesisir, kondisi permukiman, kondisi ekonomi, kelembagaan masyarakat, keaktifan kelembagaan kemasyarakatan, aksesibilitas, kebijakan pemerintah, mata pencaharian penduduk dan komitmen para pemangku kepentingan. Setelah itu, diajukan dua lokasi target group yang sesuai dengan kriteria dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM.

Desa Tenggayun merupakan desa pesisir yang mengalami degradasi lingkungan pesisir yang sangat parah, kondisi perumahan yang sangat memprihatinkan dan masih minimnya prasarana lingkungan di lokasi permukiman. Desa Bantan Air merupakan desa pesisir yang kondisi lingkungan permukiman yang buruk

dan tidak sesuai dengan standar kesehatan, serta abrasi pantai yang parah ditambah lagi dengan minimnya prasarana lingkungan. Dalam rapat FKTD, Pejabat Pembuat Komitmen memberikan bahan pertimbangan yang diperoleh dari hasil survey di lapangan. Pada akhirnya, tim FKTD memutuskan Desa Tenggayun dan Desa Bantan Air sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2007, program PLBPM kembali dilaksanakan di Desa Tenggayun dan Desa Bantan Air. Ada beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang dianggap masih kurang dan belum berfungsi optimal pada tahun 2006, seperti pembangunan gedung serba guna nelayan dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).

Desa Tenggayun merupakan bagian dari desa yang ada di Kecamatan Bukit Batu yang terletak di daratan Sumatera. Topografi desa ini berupa daratan rendah. Perjalanan menuju desa ini dari Ibu Kota Bengkalis dapat ditempuh dengan menggunakan jalur laut dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam, atau dapat juga dengan menggunakan jalur darat dengan terlebih dahulu menyeberang dari kota Bengkalis den-

gan menggunakan kapal RoRo. Waktu tempuh dengan menggunakan kapal RoRo sampai ke daratan Sumatera kurang lebih 30 menit dan untuk menuju desa Tenggayun kurang lebih 1 jam perjalanan. Pemukiman masyarakat di desa ini terpusat di pinggiran pantai. Bangunan rumah di daerah ini masih banyak yang terbuat dari kayu (non permanen) dan semi permanen. Di sekitar pusat desa masih banyak rumah non permanen yang tidak layak huni serta ada beberapa nelayan yang bahkan tidak mempunyai rumah tempat tinggal (masih menumpang). Masyarakat yang tinggal di desa ini berjumlah

dan petani sawah. Hasil lautnya didominasi oleh ikan kecil dan udang. Potensi unggulan desa ini adalah hasil laut dan perkebunan karet.

Pada tahun 2009 ini, program PLBPM yang hanya dilaksanakan di desa Bantan Air pada dusun yang berbeda dengan sebelumnya. Karakteristik masyarakat dan kondisi lingkungannya sama dengan dusun sebelumnya. Pemilihan dusun ini diharapkan dapat diselaraskan dengan Program Penataan Kawasan Permukiman Nelayan yang merupakan program Pemerintah Daerah Bengkalis yang merupakan salah satu program hasil replikasi program PLBPM.



1.643 jiwa atau terdiri dari 455 KK. Mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah 20% sebagai nelayan, serta sisanya bekerja sebagai petani karet, pedagang kecil dan PNS. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa ikan kecil dan udang. Potensi unggulan desa ini adalah hasil laut yang berupa udang kering, sedangkan dari hasil darat yaitu kelapa sawit.

Desa Bantan Air termasuk dalam wilayah Kecamatan Bantan dan terletak di pulau Bengkalis, dengan kondisi topografi berupa dataran rendah. Jika akan berkunjung ke desa ini, kita bisa menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 1 jam dari ibu kota kabupaten, dengan kondisi jalan perlintasan kurang bagus. Pemukiman di desa ini masih menyebar dengan kondisi jalan berupa jalan tanah dan jalan aspal yang rusak, Di desa ini sudah tersedia jaringan listrik. Jumlah penduduk di desa ini adalah 2.190 jiwa. Sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan tangkap, petani karet, kelapa

Berbekal dari hasil pelatihan TAP, dilakukan pendampingan kepada masyarakat desa Tenggayun dan Bantan Air. Kedua desa target group ini memiliki karakteristik masyarakat yang hampir sama yaitu pada umumnya orang melayu. Pada acara rembuk desa masih sedikit masyarakat yang turut hadir. Namun demikian, LK dan masyarakat yang hadir pada acara rembuk desa mendapat kepercayaan untuk mewakili dalam kegiatan PLBPM. Pada rembuk desa juga dilakukan pemilihan motivator desa dari sejumlah masyarakat yang hadir melalui musyawarah.

Di desa Bantan Air, diperoleh kesulitan terutama pada saat mengumpulkan masyarakat untuk melakukan rembuk desa karena pemukiman masyarakat yang menyebar. Namun begitu, sambutan dari masyarakat setempat begitu semangat. Masyarakat di desa ini terdiri dari suku asli atau masyarakat nelayan yang masih terbelakang. Akan tetapi masyarakat di sini sangat antusias saat mendengar ada program pem-



bangunan desanya. Hal ini dibuktikan melalui keterlibatan mereka dalam bentuk menghibahkan tanahnya untuk kegiatan PLBPM. Desa ini telah dipilih Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan melalui forum rembug desa dilakukanlah pemilihan motivator desa dari sejumlah masyarakat yang hadir dengan bermusyawarah.

Dalam penentuan kegiatan prioritas untuk program PLBPM 2009 di desa Bantan Air, pada awalnya masyarakat menganggap bahwa kegiatan ini adalah proyek yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Untuk itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim TPD menerangkan kepada masyarakat bahwa kegiatan PLBPM ini bukan proyek tapi suatu kegiatan dari pemerintah yang langsung diberikan kepada masyarakat, dimana masyarakatlah yang mengusulkan kegiatan atau merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan memeliharanya nanti. Pada saat rembug desa, semua masyarakat yang hadir mengusulkan beberapa program yang mereka

inginkan, sehingga sulit untuk menentukan prioritas kegiatan. Akan tetapi semua usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat ditampung, untuk kemudian dilakukan verifikasi lagi sesuai aturan-aturan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Selanjutnya mulailah disusun *site plan* kegiatan bersama kelompok terutama mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan harap kawasan ini dapat menjadi kawasan percontohan untuk permukiman nelayan. Ada beberapa usulan masyarakat yang menarik yaitu pembangunan pengolahan air bersih, karena daerah ini sangat sulit untuk mendapat kebutuhan air bersih. Pelaksanaan kegiatan fisik dapat dijadikan pekerjaan alternatif saat mereka tidak melaut. Dalam satu bulan nelayan di daerah ini melaut hanya 15 hari.

Sama dengan desa Tenggayun, dalam penentuan kegiatan prioritas diusulkan semua yang menjadi keinginan masyarakat desa ini. Akan tetapi mayoritas penduduk sangat mengharapkan pembangunan penggantian pondok tempat mereka berusaha yaitu pondok pengerih. Sebelumnya pondok/rumah tempat tinggal mereka terbuat dari kayu sehingga setiap 3 bulan harus diganti karena kayu yang digunakan lapuk. Berkaitan dengan hal inilah, penduduk desa ini mengusul pembuatan rumah tersebut dari beton. Dengan adanya rumah seperti yang diharapkan ini, penduduk dapat merasa tenang dan nyaman saat angin dan gelombang besar datang. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemilihan motivator. Konsep pengelolaan lingkungan di Desa Tenggayun ini adalah dengan pendekatan wisata bahari dan lokasi peristirahatan (*rest area*).

Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan ini adalah berupa pendampingan dan pengawasan serta pengalokasian dana pendamping untuk kedua desa pelaksana kegiatan. Untuk menunjang infrastruktur penataan kawasan permukiman masyarakat di desa Tenggayun dan Bantan Air, pemerintah daerah juga menyediakan program dengan sebagai pengembangan PLBPM yang dimulai pada tahun 2007. Program ini bergerak dalam pembangunan rumah nelayan dan infrastruktur penunjang kegiatan nelayan, seperti tempat pengolahan hasil tangkapan, pembangunan drainase lingkungan, jalan

lingkungan, pemasangan instalasi listrik, pembangunan turap beton serta pembangunan pengolahan air minum bagi masyarakat.

Mayoritas masyarakat desa Tenggayun ikut berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Selain itu, untuk lokasi pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan nelayan, ada salah satu warga setempat dengan sukarela menghibahkan tanahnya seluas 17x25 m. Di desa Bantan Air, partisipasi masyarakat di desa diberikan oleh beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia mahir mengenai pembangunan fisik. Kondisi mendorong masyarakat di desa ini untuk mencari bantuan kepala tukang dari luar kelompok maupun daerah dalam pengerjaan fisik dan mereka ikut membantu melalui gotong-royong. Salah satu warga bahkan menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung serba guna, MCK dan pembangunan rumah nelayan seluas 35 x75 m, dan pembangunan tempat pengolahan air minum seluas 8x12 m. Kaum Ibu di desa Bantan Air juga tidak mau ketinggalan dalam berpartisipasi membangun desanya. Mereka membantu dalam kegiatan fisik melalui pembibitan mangrove serta menyiapkan makanan dan minuman ala kadarnya. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM, motivator di kedua desa gigih dalam memberikan pengarahan dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan PLBPM ini sangat besar. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih upayanya sendiri sehingga apa yang terbangun selama ini mereka rasakan sebagai milik mereka sendiri. Masyarakat termotivasi untuk menjaga dan memeliharanya apa yang telah dibangunnya. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sadar betapa pentingnya penataan kawasan lingkungan permukiman bagi mereka dan dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan. Perencanaan kegiatan dengan rembug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat desa. Seperti dengan dibangunnya rumah nelayan bagi mereka sangat

bersyukur karena mereka menganggap dan berpikiran kalau mereka sendiri yang membangun rumah tersebut entah kapan bisa terbangun. Mereka dapat menjemur hasil tangkapan lebih baik dengan adanya tempat pengolahan hasil tangkapan. Kehidupan masyarakat juga lebih sehat dengan adanya drainase, penyediaan sumur bor, MCK. Masyarakat dapat bermusyawarah dengan santai dan nyaman di Gedung serba guna yang telah terbangun, mereka juga dapat bersantai-santai menunggu para nelayan pulang dari melaut dengan memanfaatkan gazebo/selter yang ada, akses jalan lingkungan permukiman nelayan yang sudah dapat dinikmati, serta mereka sekarang sudah dapat mengkonsumsi air minum yang sehat dengan dibangunnya pengolahan air minum dimana selama ini sumber air mimunnya berasal



dari menampung air hujan dengan tempat seadanya. Adanya pembangunan turap beton penanaman mangrove telah berangsur-angsur mengurangi degradasi pesisir ditempat mereka.

Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun, masyarakat di kedua desa ini sepakat untuk membuat peraturan desa. Masyarakat juga sanggup bergotong royong setiap bulan untuk membersihkan dan menjaga sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang telah dibangun. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



SUPIANTO, S.Pi dilahirkan di sebuah desa kecil dengan nama Desa Jangkang - Bengkalis pada tanggal 08 Mei 1976. Pada tahun 1996 diterima di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (UNRI) dan berhasil mendapat gelar Sarjana Perikanan pada tahun 2001. Setelah lulus mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan di bidang komputer di Pekanbaru dan merupakan bidang usaha yang bertolak belakang dari latar belakang pendidikan dari penulis. Usaha ini dilakukan dengan alasan penulis suka membuka usaha sendiri dan sambil mencari informasi mengenai pekerjaan

yang cocok. Walaupun dengan perbedaan tersebut, penulis berprinsip yang penting tetap kerja dan menikmati pekerjaan tersebut karena masa ini untuk mencari pekerjaan sulit. Pada tahun 2005, penulis kembali ke Kabupaten Bengkalis dan mencari informasi dan peluang kerja. Pada tahun 2006, Dinas Kelautan Kabupaten Bengkalis Ketika membuka lowongan untuk tenaga *freelance* untuk menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dalam kegiatan PLBPM, penulis tertarik untuk ikut dan ternyata diterima. Penulis tertarik menjadi TAP karena merasa tertantang bagaimana caranya pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan lingkungannya serta memungkinkan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata kawasan permukiman nelayan.

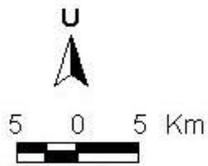
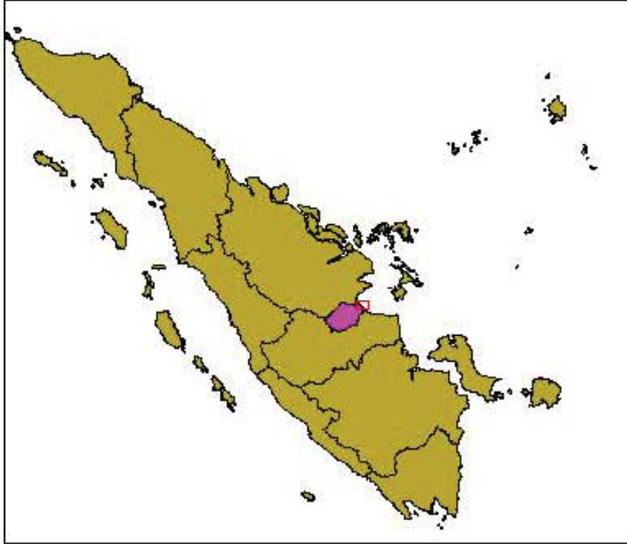


NURSYAH, S.Pi dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1969, di Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan terlahir sebagai anak keenam dari sepuluh orang bersaudara. Pada tahun 1989, diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Perikanan Universitas Riau Pekanbaru pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan dan selesai pada tahun 1994. Setelah lulus, penulis bekerja di perusahaan pelabuhan Bengkalis. Pada tahun 2004, penulis mencari suasana baru dengan menjadi guru kontrak di sebuah SMK di Bengkalis

dan mengajar pada bidang Perikanan. Tahun 2006 penulis tertarik untuk menjadi TAP kegiatan PLBPM Kabupaten Bengkalis karena kegiatan ini langsung terjun ke lapangan berhadapan dengan berbagai karakteristik masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan, kegiatan. Penulis melakukan pendampingan dalam perencanaan, desain konstruksi dan pengawasan kegiatan fisik di lapangan. ●



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat





Menata Wilayah Pesisir Desa Sungai Dualap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Oleh: Yuda Rilantono, Eka Setyawati dan Azman



Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian dari Provinsi Jambi yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera dengan letak geografis pada $102^{\circ}52''$ sampai $103^{\circ}40''$ BT dan $0^{\circ}45''$ sampai $1^{\circ}22''$ LS. Berhadapan dengan segitiga pertumbuhan Singapura, Johor dan Riau (SIJORI), Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati posisi strategis baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun hankam. Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah daratan 5.503 km^2 , wilayah laut 3.085 km^2 , jumlah penduduk 53.316 KK dan jumlah penduduk pesisir pantai 14.571 KK. Sebanyak 27,31% dari jumlah penduduknya berada di pesisir pantai dan sebesar 3.000 KK penduduknya yang tersebar dalam 3 kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai adalah nelayan miskin. Kaum nelayan miskin di pesisir Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai fenomena permasalahan sosial yang menyatu dengan permasalahan lingkungannya. Seperti mayoritas kondisi rumah tidak sehat, lingkungan pemukiman yang tidak tertata serta tidak



terdiri dari 739 KK. Di desa Sungai Dualap ini belum tersedia jaringan listrik sehingga jika malam tiba di sebagian besar desa akan terlihat tidak berpenghuni, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang memiliki fasilitas listrik di rumahnya, itupun dari mesin diesel/aki yang dijadikan sebagai sumber listriknya. Kondisi jalan di desa ini masih semi permanen, hanya terbuat dari jembatan kayu dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Di desa ini juga belum terdapat pasar, fasilitas pendidikan yang setingkat dengan SMU serta belum adanya balai pertemuan sehingga pada saat rembug desa, kami menggunakan ruangan yang terdapat di kantor desa sebagai tempat untuk pelaksanaan rembug desa. Mata pencaharian masyarakat Sungai Dualap sebagian besar adalah nelayan. Desa ini juga terkenal sebagai

didukung oleh prasarana yang mencukupi, sumber air bersih yang kurang memadai, jalan desa yang buruk, MCK yang kurang layak dan lain-lain.

Salah satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapatkan bantuan dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) adalah Desa Sungai Dualap. Dimana Desa Sungai Dualap ini sebelumnya juga sudah pernah melaksanakan kegiatan PLBPM pada tahun 2007. Karena dianggap berhasil dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM Desa Sungai Dualap kembali dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten khususnya tim FKTD untuk melaksanakan kegiatan PLBPM sebagai daerah kelanjutan.

Desa Sungai Dualap merupakan bagian dari Kecamatan Kuala Betara memiliki luas 350 km² dan memiliki garis pantai 5 km. Topografi desa ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut. Untuk saat ini akses menuju desa ini hanya dapat ditempuh dengan jalur laut yakni dengan menggunakan speed boat selama 1 jam perjalanan dari pusat ibukota. Pemandangan menuju Desa Sungai Dualap sangat indah, karena di sepanjang garis pantai dipenuhi hutan mangrove. Masyarakat yang tinggal di desa ini berjumlah 2.768 jiwa yang



pemasok udang untuk Kecamatan Kuala Betara.

Pada bulan Mei kami melakukan sosialisasi di kantor desa Sungai Dualap. Dimana tanggapan masyarakat cukup baik dikarenakan desa ini sudah pernah mendapatkan bantuan dari PLBPM tahun 2007. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Jabung Barat, Dinas Kesehatan, Dinas Bapemdalda, dan Camat Kuala Betara. Dari hasil pelatihan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) di Jakarta pada bulan April lalu, kami melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Sungai Dualap dalam melaksanakan PLBPM. Tanggapan masyarakat pada kegiatan ini cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang hadir dalam

rembug desa. Pada pelaksanaan rembug desa, masyarakat desa sangatlah antusias dalam berdiskusi mengenai perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada rembug desa yang pertama kalinya kami memperkenalkan diri kepada masyarakat, serta melihat potensi desa serta permasalahan yang ada di desa baik infrastruktur maupun sosial. Hal ini berguna untuk penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) zonasi. Untuk penyusunan rencana tata ruang desa dan kawasan zonasi kami sedikit mengalami kesulitan dalam pemetaan dan menentukan batas-batas zona kawasan pemanfaatan, tapi dengan dibantu masyarakat, penyusunan

karena adanya sebagian masyarakat yang ingin kegiatan ini tetap harus dilaksanakan, namun pelaksanaannya harus merata artinya rata-rata masyarakat ingin rumahnya di renovasi. Setelah kami data ternyata ternyata sebanyak 173 rumah yang harus direnovasi. Setelah kurang lebih satu jam rembug desa berjalan, maka tercapai kesepakatan baru dari masyarakat dan terdapat sedikit perubahan dari kesepakatan sebelumnya, diantaranya yaitu perbaikan/rehabilitasi jalan lorong dari non permanen menjadi semi permanen (dari kayu menjadi beton), pembuatan pos siskamling, penambahan tangga dermaga 1 units, saluran drainase, papan himbauan (mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan kawasan



dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan dan untuk pembuatan peta desa digital masih ditunda.

Pada rembug desa selanjutnya mengenai kegiatan prioritas masyarakat juga masih antusias dalam berdiskusi Adapun masukan dari masyarakat untuk perencanaan kegiatan PLBPM tahun 2009 antara lain yaitu perbaikan jalan lorong (dari sebelumnya kayu menjadi semen/beton), pembuatan pos siskamling, pembuatan drainase, pembuatan tangga tambatan perahu. Tetapi dalam pelaksanaan rembug desa ada satu kendala yang kami hadapi selaku TAP, yakni adanya *pro dan kontra* dari masyarakat mengenai kegiatan renovasi rumah nelayan yang disebabkan

hutan mangrove) dan pembuatan taman desa. Jenis kegiatan ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah diprioritaskan oleh masyarakat. Pada rembug desa kali ini berkembanglah suatu jenis kegiatan dari masyarakat sebagai peralihan dari kegiatan renovasi rumah yakni pengadaan mesin genset desa. Sedikit informasi yang ingin kami sampaikan selaku TAP kepada pihak-pihak yang bersangkutan, bahwasanya Desa Sungai Dualap ini masih belum terdapat penerangan desa (aliran listrik-listrik desa). Hal ini mungkin dikarenakan letak Desa Sungai Dualap cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akses untuk menuju ke Desa Sungai Dualap untuk saat ini hanya

bisa ditempuh melalui jalur perairan.

Pengadaan mesin genset ditanggapi masyarakat yang hadir cukup bagus. Hal ini mengherankan kami selaku TAP karena sebagian besar masyarakat yang hadir dalam rembug ini setuju dengan kegiatan ini, padahal dalam rembug-rembug desa sebelumnya perbandingan masyarakat yang *pro dan kontra* terhadap kegiatan renovasi rumah adalah 50:50. Sementara pada rembug desa kali ini mungkin hampir seluruh masyarakat yang hadir setuju dengan adanya pengadaan mesin genset guna penerangan desa mereka. Seluruh masyarakat desa sadar bahwa kebutuhan mereka akan adanya penerangan listrik sangatlah dibutuhkan. Akhirnya tercapailah kesepakatan bersama oleh masyarakat bahwasanya

dan hal ini telah disepakati oleh masyarakat desa. Adapun kegiatan di Desa Sungai Dualap dapat tambahan sebagai berikut perbaikan 7 unit jalan lorong (non permanen menjadi semi permanen), pembangunan 4 unit pos siskamling, pengadaan penerangan desa (genset), pembuatan saluran drainase, pembuatan papan himbauan (mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan kawasan hutan mangrove), pembuatan taman desa. Setelah menetapkan prioritas kegiatan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) fisik, selanjutnya usulan tersebut di diskusikan ke Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD). Jika usulan kegiatan ini disetujui oleh Tim FKTD dan dana yang dianggarkan mencukupi, maka semua usulan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan ini berupa pendampingan dan pengawasan terhadap adanya kegiatan yang diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan agar kegiatan ini bisa terlaksana berdasarkan ketentuan yang ada.

Adapun pembelajaran singkat yang dapat diambil dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pembuatan penampungan air hujan, hal ini dikarenakan sulitnya memperoleh air bersih dan sampai sekarang masih dirawat dan digunakan oleh masyarakat desa Sungai Dualap. Selain penampungan air hujan kegiatan lainnya yaitu pembuatan jalan lorong di Desa Sungai Dualap, dimana dengan adanya pembuatan jalan ini masyarakat desa Sungai Dualap dapat lebih mudah untuk melakukan perjalanan mereka dan melakukan aktivitas masyarakat sehari – hari. Kemudian pembuatan dermaga yang bersama-sama dikerjakan oleh masyarakat desa Sungai Dualap. Sampai saat ini kondisi dermaga masih tetap baik dan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bongkar muat barang dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Dalam menjaga dan memelihara hasil fasilitas dari kegiatan-kegiatan PLBPM masyarakat secara sukarela melakukannya. Mereka merasa bahwa hasil kegiatan itu milik mereka. ●

dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan renovasi rumah dialihkan untuk pengadaan mesin genset desa. Menanggapi hal ini kami selaku TAP merasa sedikit lega, karena telah dicapainya kesepakatan.

Setelah semua kegiatan dapat disepakati oleh masyarakat, kami selaku TAP melakukan pendampingan penyusunan RAB fisik dan kami selaku TAP telah menyusun RAB untuk kegiatan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir sebagai cita-cita dan impian masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa selama 5 tahun yang akan datang



Biografi

Sekilas mengenai penulis



YUDA RILANTONO, S.Pi, dilahirkan di Kuala Tungkal, Jambi pada tanggal 26 September 1985. Menghabiskan masa kecil di Kota Kuala Tungkal dimulai dari SD sampai dengan SMU bersekolah di Kuala Tungkal. Pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Bung Hatta Padang. Setelah selesai kuliah bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni sebagai TAP kegiatan PLBPM. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan PLBPM ini. Kegiatan PLBPM ini merupakan kegiatan baru, karena melalui kegiatan ini dan menjadi TAP di

kegiatan ini mulai diperkenalkan pada dunia kerja dan semoga hasilnya bisa maksimal dan tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Sebagai sarjana perikanan berharap bisa membantu para nelayan dalam menjaga lingkungan pesisir dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.



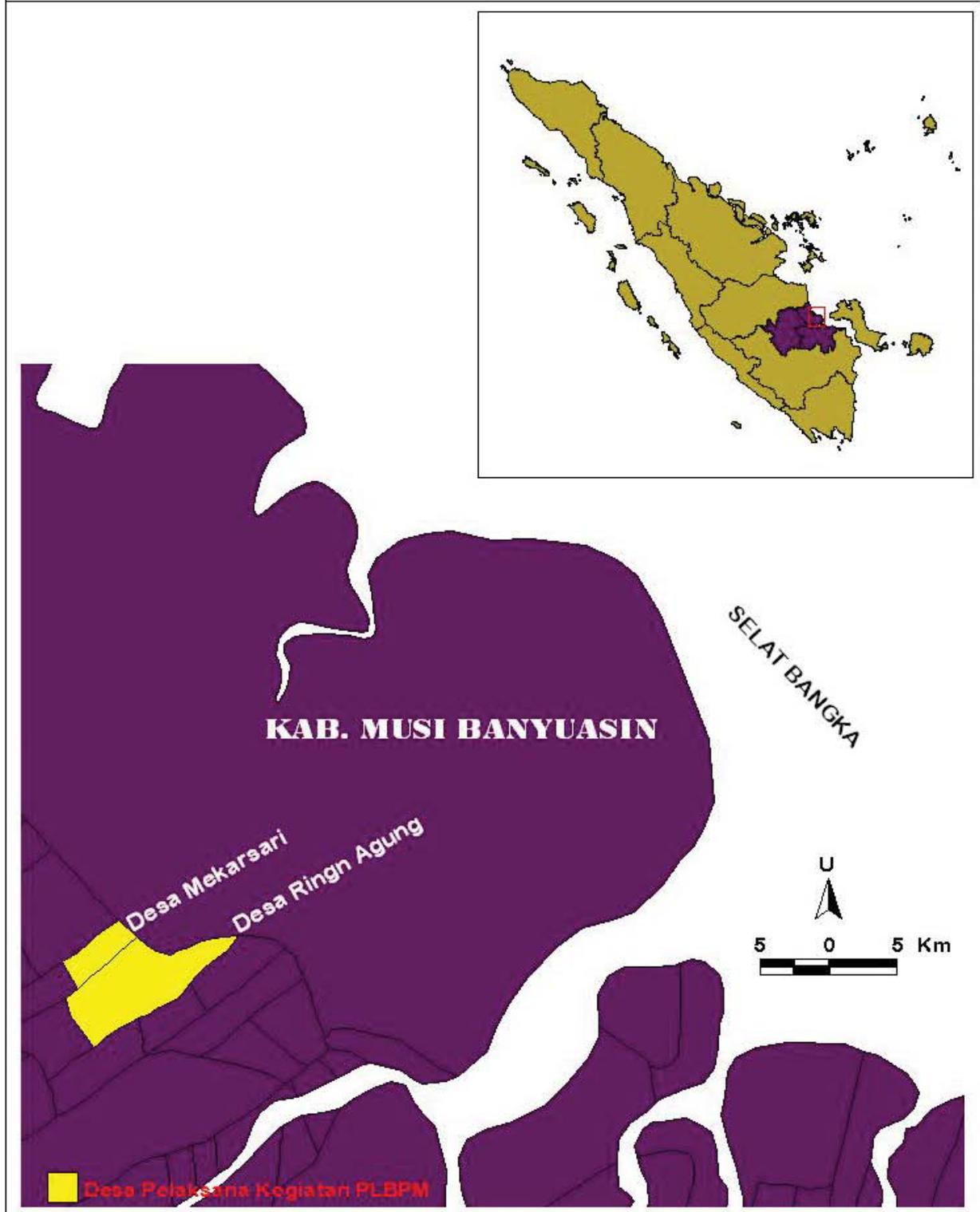
EKA SETYAWATI, SP, dilahirkan di Jambi pada tanggal 15 September 1985, walaupun dilahirkan di Jambi tetapi menghabiskan masa kecil di Kota Kuala Tungkal. Masa SD hingga SMA bersekolah di Kuala Tungkal. Setelah lulus SMA tahun 2003 saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Jambi. Diterima di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jambi. Pada tahun 2008 mendapat gelar sarjana pertanian. Setelah lulus berusaha mencari pekerjaan tetapi belum ada rezkinya. Kemudian setelah itu, ada lowongan pekerjaan sebagai TAP PLBPM dan tertarik untuk mencobanya. Penulis merasa tertantang dengan pekerjaan ini, karena sebagai

TAP diharapkan terjun ke masyarakat dan melakukan pendampingan secara langsung. Sebagai TAP berharap agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan dapat merubah pola pikir masyarakat desa, serta dapat membantu para nelayan khususnya.



AZMAN, ST, dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1977 di Kota Kuala Tungkal. Mengenyam pendidikan SD Kemala Bhayangkari di Kuala Tungkal dan melanjutkan ke SMP N 2 Kuala Tungkal. Setelah lulus SMP melanjutkan sekolah di STM Muhammadiyah Yogyakarta. Akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi dan diterima di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Teknik Sipil dan dengan usaha dan kerja keras saya berhasil mendapatkan gelar sarjana. Setelah lulus bekerja sebagai wiraswasta, kemudian pada tahun 2004 bekerja sebagai konsultan dan sekarang menjadi TAP kegiatan PLBPM. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Musi Banyuasin





Terciptanya Pola Hidup Berkelompok pada Masyarakat Desa Mekar Sari melalui Kegiatan PLBPM

Oleh: Ahmad Fanani, Ardiansyah dan Wico Antonio



Musi Banyuasin. Mendengar namanya mungkin anda akan teringat dengan salah satu sungai di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sungai Musi. Sama halnya dengan sungai tersebut Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Berpusat di kota Sekayu dengan luas daerah 14.265,96 km² dan memiliki ada 26 desa pesisir. Kabupaten ini memiliki banyak komoditi unggulan seperti bahan baku energi (minyak mentah dan batubara), pertanian, perkebunan (sawit, karet), budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air tawar, perikanan tangkap dan pariwisata.

Kegiatan Prioritas PLBPM di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Kegiatan Prioritas	Tahun 2007		Tahun 2008	Tahun 2009
	Desa Mekar Sari	Desa Ringin Agung	Desa Ringin Agung	Desa Mekar Sari
Pembangunan Rumah	-	14 unit	4 unit	1 unit
Pembangunan Los Pasar	2 unit 14 Los	-	-	-
Bak Penampungan Air	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
MCK	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Balai Pertemuan	1 unit	1 unit	-	-
Perbaikan Saluran Tambak	2,5 km	3,2 km	-	-
Gudang Pasar	1 unit	-	-	-
Gudang Es	1 unit	-	-	-
Dermaga	1 unit	1 unit	-	1 unit
Pembuatan Jembatan	2 unit	2 unit	-	-
Instalasi Listrik	-	-	1 unit 14 titik	1 unit 14 titik
Perbuatan jalan	-	-	500 m	500 m
Zonasi Desa	-	-	-	1 paket

Untuk menuju kabupaten ini, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Palembang selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 3,5 jam.

Mulai dari tahun 2007, Kabupaten Musi Banyuasin mendapat bantuan untuk menata lingkungan pesisir dengan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Lokasi pelaksanaan program ini adalah Kecamatan Lalan tepatnya Desa Mekar Sari dan Desa Ringin Agung. Dalam penentuan desa tersebut, awalnya dilakukan dengan menginventarisasi desa-desa yang sesuai kriteria dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Kemudian disesuaikan dengan rencana pembangunan kabupaten, yang dilanjutkan dengan rapat Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD). Pada tahun 2008, Kabupaten Musi Banyuasin kembali memperoleh bantuan program PLBPM untuk menindaklanjuti kegiatan pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan PLBPM pada tahun 2008 hanya dilakukan di Desa Ringin Agung. Sedangkan pada tahun 2009, dilaksanakan di Desa Mekar Sari sebagai pemerataan pembangunan.

Agar masyarakat paham dan mengerti

apa itu PLBPM maka dilakukan sosialisasi oleh Tim Pengendali Daerah (TPD) dan Tim Pengendali Pusat. Desa Mekar Sari (P 8B) dan Desa Ringin Agung (P 9B) merupakan desa terpencil yang letaknya berdampingan. Desa ini merupakan daerah eks Transmigrasi Umum sejak tahun 1991, yang masih dipengaruhi pasang surut air laut. Luas desa Mekar Sari dan Ringin Agung sama yaitu sekitar 16 km² dengan ketinggian 5-10 m dari permukaan laut. Untuk menuju kedua lokasi pelaksanaan, dapat ditempuh dari Kota Palembang dengan menggunakan speed boat 40 PK selama 4-5 jam saat kondisi air pasang. Namun pada saat air surut, hanya dapat ditempuh dengan menggunakan motor dari ibukota kecamatan (P 16) selama 1,5 - 2 jam. Kondisi permukiman penduduk di desa ini menyebar mengikuti pola tata ruang transmigrasi, yang meliputi petakan tempat tinggal beserta ¼ ha halaman dan 2 ha lahan kelola. Mayoritas penduduk masih menempati rumah eks transmigrasi berupa bangunan kayu.

Pada awal pembukaan wilayah transmigrasi, tercatat 425 KK bermukim di Desa Mekar Sari (P 8B), dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Namun pada

tahun 2007 tercatat 148 KK yang masih menempati desa ini. Hasil produksi pertanian di desa ini berupa padi, kelapa, ubi kayu, jeruk, dan sayur-sayuran. Sedangkan potensi perikananannya berupa udang, kepiting dan kerang. Potensi perikanan ini berasal Sungai Sembilang.

Desa Ringin Agung (P9B) tidak jauh berbeda dengan Desa Mekar Sari. Jumlah penduduk di desa ini tercatat sebanyak 316 KK, yang bekerja sebagai nelayan sekitar 31



KK dan 20 KK sebagai petambak. Nelayan dan petambak ini, umumnya tinggal di ujung saluran P9 dekat yang dengan Sungai Sembilang. Kondisi infrastruktur di desa ini sangat minim, seperti balai desa, gedung sekolah dasar, masjid dan air bersih yang kurang memadai. Pemmasalahan air minum menjadi kendala utama masyarakat setempat, yang mengandalkan air hujan untuk minum. Pada saat kemarau, masyarakat harus mencari air bersih hingga keluar desa.

Pada program PLBPM tahun 2007, Desa Mekar Sari melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti los pasar, balai pertemuan, MCK, gudang pasar, gudang es dan bak penampung air hujan. Dengan harapan masyarakat di desa ini dapat hidup lebih baik dengan dilengkapi dengan prasarana kebutuhan keseharian masyarakat.

Pada tahun 2009, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat desa. Pengumpulan warga ini merupakan salah satu



kendala, karena tempat tinggal warga yang menyebar dan jauh dari tempat sosialisasi. Untuk mengatasinya, sosialisasi juga dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat yang dilakukan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) kerumah-rumah atau tempat berkumpulnya masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan program terdahulu masyarakat sangat antusias menerima

PLBPM. Dampak yang terlihat, masyarakat lebih berani berinteraksi mengungkapkan pendapat dan merencanakan sesuatu. Masyarakat lebih sering melakukan kegiatan secara bersama-sama dan berorganisasi. Pada pengembangan lokasi pasar telah terdapat aktifitas baik ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Namun belum dapat berjalan maksimal karena beberapa kendala yang salah satunya adalah daya dukung ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat sendiri.

Masyarakat dikumpulkan lagi dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK). Pada saat pelaksanaan bersamaan dengan sibuk-sibuknya menyambut pemilihan kepala desa. Walaupun demikian jumlah peserta yang hadir dapat mewakili masyarakat yang ada di desa tersebut. Masyarakat menyetujui bahwa sebagian besar pengurus LK merupakan kepengurusan yang lama, namun hanya ketua saja yang diganti dengan alasan sibuk sebagai tukang bangunan. Akhirnya ketua baru dipilih secara langsung yaitu Bapak Pitoyo beserta pengurus yang lain

Pada saat yang bersamaan pula ditentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan dari masyarakat cukup banyak namun dapat disaring sebagaimana prioritas utama dan merupakan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Ada usulan masyarakat yang menginginkan program ini berupa bantuan modal usaha. Namun hal ini disampaikan kepada masyarakat bahwa program PLBPM lebih ditekankan pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan zonasi desa. Adapun hasil dari musyawarah disepakati bahwa kegiatan yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan di lokasi pasar, bak penampungan air, MCK, dermaga, instalasi listrik, rumah jaga dan zonasi desa. Hal tersebut secara garis besar untuk melengkapi sarana dan prasarana di pasar, keamanan aktifitas, perbaikan akses dari Sungai Sembilang, serta rencana tata ruang dan zonasi desa.

Partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PLBPM ini

yaitu ikut menyediakan fasilitas listrik secara menyeluruh dan bertahap, membangun jalan lintas, membangun dan memperbaiki jembatan-jembatan primer serta menyalurkan program pro masyarakat dari instansi lain di wilayah Kecamatan. Kedepan pemerintah daerah akan merencanakan pelaksanaan program pendukung di lokasi sasaran. Adapun program-program yang telah berjalan yaitu program sekolah gratis, program kesehatan gratis dan lain-lain.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM ini berupa sumbangan tenaga dengan bergotong royong ikut membangun infrastruktur, membentuk koperasi pengembangan pasar, membuat kolam percontohan, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Hal tersebut tidak terlepas dari peran motivator yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara menghimbau, memotivasi, dan memantau pelaksanaan program.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan PLBPM antara lain : tersedianya fasilitas infrastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat, terbentuknya lingkungan yang memberikan interaksi yang mengubah pola hidup masyarakat, terciptanya kegiatan-kegiatan baru bagi masyarakat akibat terbentuk dan terciptanya kawasan hasil kegiatan, serta adanya tambahan penghasilan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa upah kerja yang dapat meningkatkan taraf perekonomian warga.

Dengan demikian masyarakat Desa Mekar Sari mengalami perubahan pola hidup diantaranya : masyarakat mulai berkelompok dan berorganisasi dalam melaksanakan kegiatannya, masyarakat mulai memahami kegiatan berorganisasi dan manajemen sederhana, terciptanya kepedulian terhadap perkembangan desa, menjadi terbiasa merencanakan sesuatu secara kolektif dan memiliki pemahaman kerangka kondisi, rencana pengembangan dan pemeliharaan desa ke depan. Dari segi kualitas hidup juga semakin meningkat karena sekarang masyarakat telah mengerti pentingnya hidup bersih dan sehat. ●

Biografi

Biodata Penulis



AHMAD FANANI, ST, lahir di Palembang 29 Juni 1977, S1 Teknik Sipil Univ. Widyagama Malang, Pengalaman Kerja pernah menjadi TPD Program PEMP Kab. MUBA TA 2003, TPD Program PEMP Kab. Banyuasin TA 2004, TPD Program PEMP Kab. Banyuasin TA 2005, TAP Program PLBPM Kab. MUBA TA 2007, TAP Program PLBPM Kab. MUBA TA 2008 dan TAP Program PLBPM Kab. MUBA TA 2009. Motivasi menjadi TAP karena menganggap program PLBPM sebagai pengabdian terhadap masyarakat dan latarbelakang pengalaman

mendukung sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat. Kesan selama menjadi TAP yang menjadi pelajaran bahwa keanekaragaman adalah potensi luar-biasa, menghargai orang lain adalah pintu hubungan dan sabar dan ikhlas akan berbuah manis. Domisili Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI. Telp 0811784445 email fananixxx@yahoo.com Yahoo messenger fananixxx@yahoo.com Facebook Ahmad Fanani

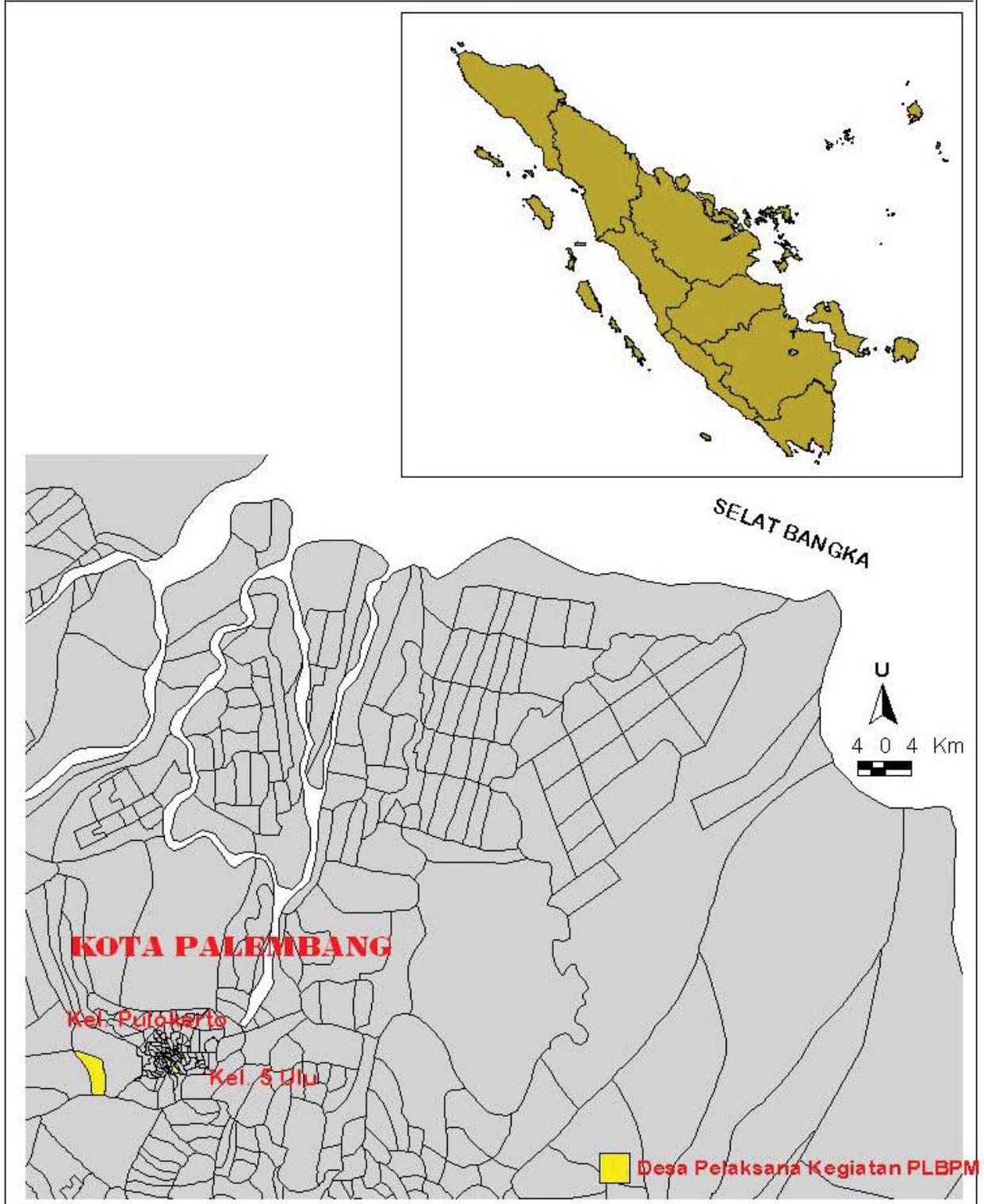
ARDIANSYAH, SP. Lahir di Ma Teladan 01 Juli 1980. Pendidikan terakhir: Sarjana Pertanian Palembang. Pengalaman Kerja Tenaga Ahli Pendamping selama 2 Tahun dan PT. SMB 2 tahun. Motivasi menjadi TAP ingin mengembangkan perikanan khususnya di daerah MUBA. Kesan selama menjadi TAP sangat tersentuh melihat nelayan/tambak mendapatkan program PLBPM khususnya di daerah MUBA. Domisili Muara Teladan RT 02 RW 03 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.



WICO ANTONIO, S.St.Pi lahir di Palembang 30 Desember 1983. Pendidikan terakhir Sarjana Perikanan Jakarta. Pengalaman Kerja sebagai pegawai kontrak di PT. Pusri dan Tenaga Ahli Pendamping. Motivasi menjadi TAP ingin membangun perikanan di daerah - daerah. Kesan selama menjadi TAP adalah sangat menyentuh dengan melihat nelayan dan petambak yang kurang mampu tapi mempunyai semangat untuk menghidupkan perikanan khususnya yang ada di daerah MUBA. Domisili Jln Jaksa Agung R Suprpto Gg Keluarga No 958 RT

003 Rw 05 Palembang 30136. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kota Palembang





Menata Bantaran Sungai Musi di Kota Pempek



Pempek kapal selam merupakan jenis makanan khas terbuat dari campuran terigu dan sagu dengan yang berisi telur utuh dan menjadi ciri khas untuk mengenal kota ini. Sungai Musi dan Jembatan Ampera menjadi ciri khas yang lain bagi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Kota ini sangat berpotensi sebagai tujuan wisata air dan wisata kuliner. Jenis makanan seperti pindang patin, pempek, tekwan, model, burgo, kerupuk dan kemplang merupakan produk olahan ikan yang banyak dicari saat mengunjungi kota ini. Untuk mencapai kota ini, Anda dapat menggunakan pesawat udara dari Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh hanya sekitar 20 menit saja. Perjalanan darat dapat digunakan untuk mencapai kota ini dari Jakarta, akan tetapi membutuhkan waktu yang lebih panjang.

PLBPM mulai dilaksanakan pada tahun 2007 di kota ini. Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan di dua kelurahan yaitu Kelurahan Pulokerto - Kecamatan Gandus dan Kelurahan 5 Ulu -Kecamatan Seberang Ulu 1.



Kedua kelurahan ini terletak di pinggir Sungai Musi sehingga untuk mencapai kedua kelurahan ini, Anda dimungkinkan untuk menempuh jalan darat ataupun sungai dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota.

Tahun 2006, penduduk Kelurahan Pulokerto berjumlah 10.699 jiwa dengan 5.206 KK sedangkan Kelurahan 5 Ulu berjumlah 27.322 jiwa dengan 6.256 KK. Sebagian besar penduduk di kedua kelurahan tersebut tergolong dalam penduduk miskin. Peralihan fungsi Sungai Musi telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan sering menyebabkan banjir yang merendam fasilitas umum dan sosial di kedua kelurahan ini. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di lokasi ini mendiami rumah panggung yang terbuat dari papan dan terletak di sepanjang Sungai Musi. Kondisi rumah ini lokasi ini dapat dikategori pada rumah yang kurang layak huni dan menyebabkan kawasan ini terlihat kumuh. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman seperti MCK, jalan dan jembatan penghubung, semakin memperburuk nuansa permukiman masyarakat di kedua kelurahan ini.

Pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program PLBPM dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat melalui rem-

bug desa. Kegiatan pembangunan pagar desa di lakukan di Kelurahan Pulokerto sepanjang 2,5 km pada sepanjang jalan yang membelah kelurahan ini. Pagar ini ditujukan menjaga masuknya hewan-hewan ternak yang sering berkeliaran ke pekarangan rumah dan memberikan kesan keteraturan. Letaknya yang berdekatan dengan Sungai Musi menyebabkan akses ke rumah peribadahan sulit dilalui terutama bila air pasang tiba. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pembuatan jalan paving block. Kondisi tempat peribadatan yang buruk mendorong masyarakat mengajukan perbaikan mushola di Kelurahan 5 Ulu dan pemasangan ris bata pada halaman Masjid yang masih berupa tanah di Kelurahan Pulokerto. Selain itu, pada kegiatan ini juga



dilakukan perbaikan rumah penduduk serta melakukan pengecatan rumah. Untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah di kedua kelurahan ini serta menyambut Visit Musi 2008, melalui kegiatan PLBPM dicoba untuk dilakukan pembangunan rumah rakit yang nantinya dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan kunjungan wisata serta melestarikan rumah rakit Palembang.

Masyarakat di kedua kelurahan sangat menyambut baik kegiatan PLBPM yang dilaksanakan di kelurahannya. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui kontribusinya memberikan masukan informasi

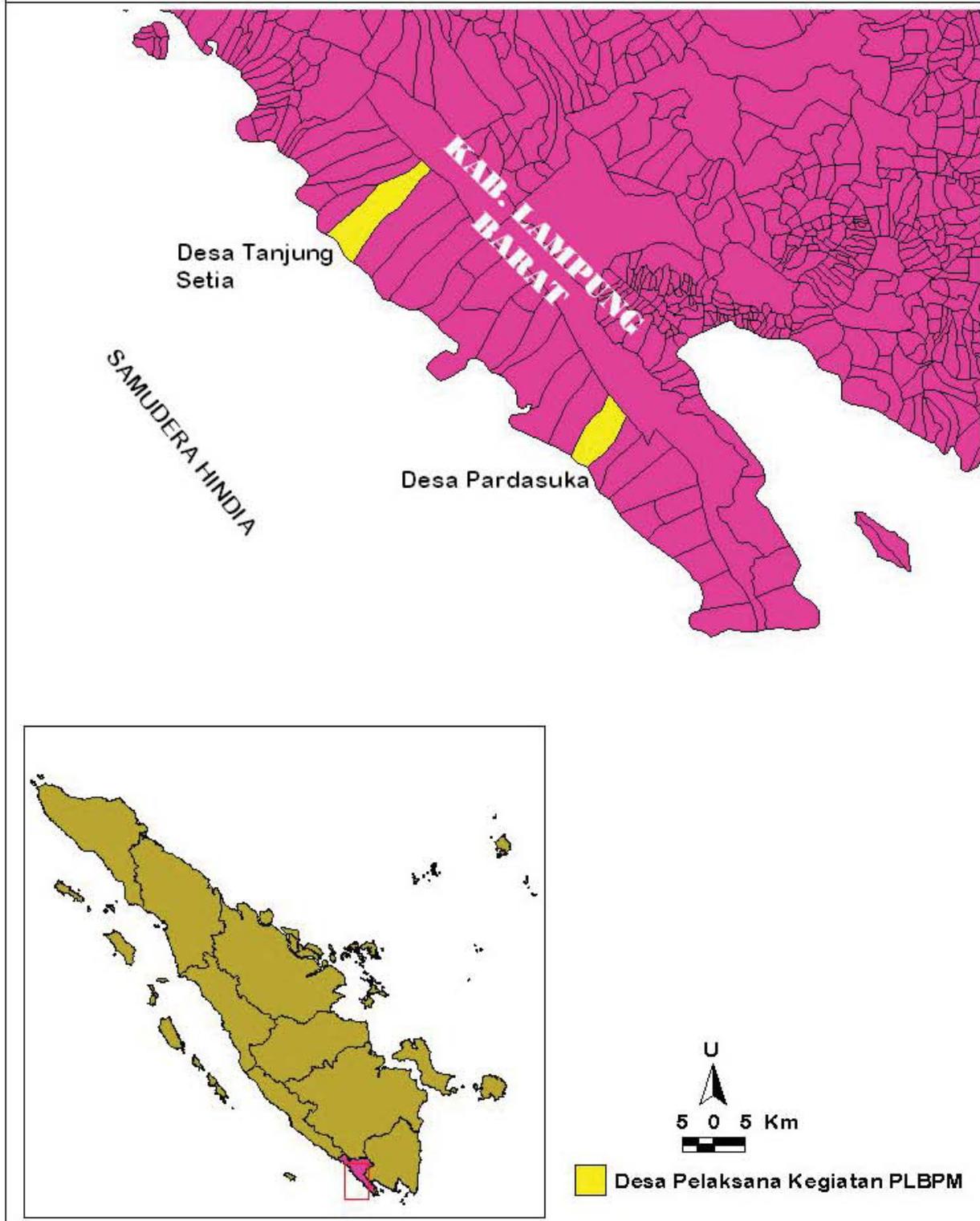
pada tahap perencanaan yang dilakukan saat rebug desa dan kegiatan gotong royong saat pelaksanaan kegiatan. Selain masyarakat, Pemerintah Daerah banyak memberi masukan serta pengarahannya kepada masyarakat tentang kegiatan ini. Ada beberapa kegiatan lain yang diintegrasikan dengan PLBPM yang dilakukan di wilayah ini diantaranya pembangunan rumah rakit oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang, pembangunan jembatan cor beton yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, serta Program Rumah Sungai Kito Cindo Nian dalam bentuk pemberian cat rumah dari Sumatera Ekspres dan Bank Sumsel.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemukiman masyarakat terlihat lebih rapi dengan adanya perbaikan pemuki-



man. Jalan paving block, jalan setapak dan jembatan yang dibuat pada kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan kesehariannya dan meningkatkan akses masuk ke kedua kelurahan tersebut. Kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian masyarakat secara tidak langsung. Keberadaan rumah rakit dan balai serba guna ternyata dapat berfungsi ganda sebagai tempat usaha dan wisata. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Lampung Barat





Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat

Oleh: Dwi Rahayu dan Fahrizal



Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sepanjang 210 km dan terdiri dari 99 desa pesisir. Kabupaten ini memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan perikanan. Hasil produksi pertanian berupa sayur mayur, coklat, kopi, lada dan hasil pertanian lainnya. Sedangkan pada sektor perikanan berupa hasil tangkapan ikan laut. Untuk mencapai Kabupaten Lampung Barat dapat menggunakan alat transportasi pesawat dari Jakarta, dan turun di Bandara Radin Intan Lampung. Setelah itu, dilanjutkan dengan perjalanan darat dan memakan waktu sekitar 7-8 jam.

Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan sejak tahun 2006, yang difokuskan di dua desa yaitu Desa Pardasuka dan Desa Tanjung Setia. Dan

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan PLBPM	2006		2009
	Desa Pardasuka	Desa Tanjung Setia	Desa Tanjung Setia
Penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir	-	-	1 Paket
Transplantasi Terumbu Karang	1 Unit	-	-
Pembuatan Talud	-	800 m	-
Penanaman Vegetasi Pantai	2.000 btg	2.000 btg	500 btg
Pembuatan Rumah Penangkaran Penyu	1 Unit	-	-
Pembuatan Papan Hibauan	10 Unit	10 Unit	-
Pembuatan WC Keluarga	25 Unit	30 Unit	19 Unit
Pembuatan Balai Nelayan	1 Unit	1 Unit	-
Perbaikan TPI	-	-	-
Pembuatan Jalan Gang (sirtu)	200 m	-	30 m
Pembuatan Pagar	160 m	100 m	-
Perbaikan Masjid	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pembuatan Bak Sampah	6 Unit	5 Unit	-
Pembangunan Rumah Percontohan	2 Unit	1 Unit	-
Perbaikan Rumah	18 Unit	10 Unit	9 Unit
Pembuatan Tempat Perbaikan Jaring	-	5 Unit	-
Pembuatan Tugu Masuk Wilayah Target	-	2 Unit	-
Pembangunan Jembatan	-	-	1 Unit
Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	-	-	2 Unit
Pembangunan Jalan Paving	-	-	100 m

pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk menata kembali desa pesisirnya hanya pada satu desa. Dalam menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan lanjutan ditentukan oleh rapat Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD). Dalam penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan dikarenakan kondisi dua desa yang hampir sama. Namun berdasarkan hasil musyawarah mufakat anggota FKTD, maka diputuskan Desa Tanjung Setia menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dengan pertimbangan masyarakat di desa ini lebih proaktif dalam menyukseskan kegiatan program PLBPM pada tahun 2009 ini.

Desa Tanjung Setia adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan, luas daerahnya berkisar ± 2500 Ha. Topografinya rendah dengan ketinggian antara 0-8 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju daerah ini dapat ditempuh dengan jalan darat dengan jarak tempuh ± 55 km dari ibukota kabupaten dan memerlukan waktu

sekitar 1 jam 30 menit. Desa ini merupakan penghubung antar provinsi di Pulau Sumatera, yaitu dikenal dengan Jalan Raya Lintas Barat, dimana disepanjang jalan raya tersebut banyak pemukiman warga desa. Jarak antara bibir pantai dengan jalan raya hanya berkisar ± 100 m. Mayoritas rumah penduduknya sudah merupakan bangunan semi permanen. Jumlah penduduk Desa Tanjung Setia adalah 1.409 jiwa dengan 345 KK, yang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan yang juga bertani. Potensi unggulan Desa ini adalah hasil tangkap berupa ikan kembung, tongkol, kakap dan lain-lain, selain hasil tangkap juga terdapat hasil olahan berupa ikan asap.

Desa Tanjung Setia memang sudah dua kali mendapatkan program PLBPM yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga desa ini sudah cukup baik dalam penataan wilayahnya, walaupun belum sepenuhnya optimal. Dalam melakukan sosialisasi PLBPM dan penentuan pengurus



kelompok masyarakat (pokmas/LK) sebagai pelaksana kegiatan, dilakukan dengan cara rembug desa. Peserta rembug desa terdiri dari aparatur dan masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi dan penunjukan pengurus dan motivator tidak terlalu mengalami hambatan, karena desa ini merupakan lokasi lanjutan, sehingga hampir sebagian peserta rapat telah berpengalaman dalam pelaksanaannya dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat.

Setelah dilakukan sosialisasi dan terbentuknya kepengurusan LK dan motivator, langkah selanjutnya adalah penentuan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam program PLBPM ini. Penentuan kegiatan didasarkan pada hasil survey dan wawancara kepada masyarakat secara langsung, serta masukan aparatur pemerintah desa yang berwenang. Selanjutnya hasil survey dibahas dalam rembug desa untuk penentuan kegiatan prioritas. Warga terkesan cukup proaktif dalam mengemukakan pendapatnya, dan pada akhirnya didapatkan rencana kegiatan prioritas seperti pada tabel dibawah.

Peran serta pemerintah daerah dalam program ini sangat besar dalam menentukan hasil pekerjaan. Karena pemerintah berfungsi sebagai penanggung jawab, penasihat serta pemantau terhadap kinerja kelompok masyarakat pelaksana program. Selain program PLBPM, terdapat beberapa program pemerintah yang juga dilaksanakan di Desa Tanjung Setia yaitu Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dan Program

Rumah Ramah Bencana (RRB).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini berupa kerjasama yang baik dalam menyelesaikan program PLBPM 2009. Kerjasama yang baik itu terlihat dengan terberdayakannya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada program ini dengan bergotong-royong dan swadaya masyarakat yang mendapatkan bantuan rehab rumah.

Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah terbantunya warga yang masih sulit untuk memenuhi standar rumah sehat. Disamping itu, manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat adalah terbangunnya fasilitas umum seperti jembatan, dan masjid serta pembelajaran dalam merencanakan kegiatan bagi pembangunan desa mereka.

Untuk menjaga hasil dari program ini, pihak aparatur desa dan kelompok masyarakat pelaksana program memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada semua warga untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



DWI RAHAYU STUDYA NINGSIH, S.Pd.T, dilahirkan di Kotabumi, 29 April 1987 dan dibesarkan di Lampung hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah itu, penulis mencoba hidup mandiri dengan meneruskan kuliah di kota pelajar Yogyakarta hingga mendapatkan gelar S.Pd.T dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2008. Menjadi TAP pada Program PLBPM merupakan pengalaman kerja pertama setelah lulus kuliah.

Menjadi kesan yang tidak terlupakan dalam program PLBPM adalah seni berkomunikasi dengan masyarakat yang begitu berbeda dengan dunia kampus. Di dunia kampus terbiasa berdialog dengan orang-orang yang memiliki idealisme tinggi dan dalam satu homogenitas cara berfikir, lalu ketika terjun ke dunia masyarakat yang sebenarnya, yang dihadapi adalah orang-orang yang terbiasa berfikir praktis. Sehingga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi penulis untuk mampu berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda.



FAHRIZAL BARUSLAN, A.Md, lahir di Liwa 15 Oktober 1981. Penulis adalah penduduk asli Lampung Barat, yang lahir dan dibesarkan di daerah ini, kemudian mendapatkan gelar Ahli Madya dari Politeknik Negeri Lampung. Penulis pernah menjadi tenaga honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat selama 1,5 tahun, yang kemudian berhenti sementara untuk mengikuti pesta demokrasi Indonesia dengan menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD TK II dari Partai Demokrat.

Karena tidak lolos menjadi anggota dewan kemudian penulis menjadi TAP pada kegiatan PLBPM. Kesan yang mendalam ketika menjadi TAP adalah mampu mengenali setiap karakter masyarakat yang khususnya ada di Lampung Barat. Dan menjadi kepuasan tersendiri ketika apa yang telah dilakukan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. ●



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Lampung Selatan



 Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM



Pelaksanaan PLBPM di Kabupaten Lampung Selatan



Lampung Selatan dengan Kota Kalianda sebagai pusat pemerintahan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Letaknya strategis di Teluk Lampung yang merupakan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Kabupaten ini berpotensi untuk mengembangkan berbagai sektor untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Letak geografis kabupaten ini. Untuk menuju Lampung Selatan dari Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, anda bisa menggunakan pesawat menuju ke Bandar Lampung, ataupun dengan fery dari Jakarta melalui Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung.

Program PLBPM di Kabupaten Lampung Selatan mulai dilaksanakan pada tahun 2006. Tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) memilih dua target group berdasarkan hasil penilaian dan survey, yaitu Desa Sumur - Kecamatan Ketapang dan Desa Rangai Tritunggal - Kecamatan Katibung. Perjalanan menuju Desa Sumur dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dan menuju Desa Rangai Tritunggal selama 1-1½ jam.

Penilaian yang mendasari terpilihnya kedua

desa tersebut menjadi desa pelaksana adalah adanya abrasi yang cukup parah akibat rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang. Kualitas kondisi permukiman yang masih buruk. Kualitas kondisi lingkungan ini dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kurangnya persediaan air bersih, tidak tersedianya MCK, tidak adanya tempat pembuangan sampah dan perhubungan akses antar desa yang masih berupa jalan tanah.

Pada tahun 2006, jumlah penduduk Desa Sumur tercatat sebanyak 5.336 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.215 KK. Sedangkan jumlah penduduk Desa Rangai

Jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui PLBPM di Kabupaten Lampung Selatan

No.	Kegiatan	Desa Sumur	Desa Rangai Tritunggal		
		2006	2006	2007	2008
1.	Transplantasi karang	-	4 Unit	-	-
2.	Penanaman mangrove	3000 btg	-	-	-
3.	Pembangunan tambatan perahu	3 unit	1 Unit	-	-
4.	Pembuatan papan himbauan	3 unit	20 Unit	-	-
5.	Rehab Kantor TPI	-	-	1 Ls	-
6.	Pembangunan Pos jaga TPI	-	-	1 Unit	-
7.	Pembangunan Bronjong/Talud	1 set	1 set	1 set	-
8.	Pembangunan Drainase	100 m	110 m	100 m	-
9.	Paving Block Jalan	203,7 m ²	500 m ²	500 m ²	-
10.	Pengerasan jalan (semen)	-	-	800 m ²	-
11.	Penyediaan MCK Umum	7 unit	5 Unit	2 Unit	-
12.	Pembuatan Sumber air Bersih	5 unit	3 Unit	1 Unit	-
13.	Perbaikan Rumah	30 unit	11 Unit	-	-
14.	Pembuatan Rumah Percontohan	1 Unit	1 Unit	-	-
15.	Pengadaan Kamar mandi umum	-	-	1 Unit	-
16.	Pembuatan Bak sampah	3 unit	10 Unit	3 Unit	-
17.	Pengadaan Tong Sampah	20 unit	200 Unit	-	-
18.	Pengadaan gerobak sampah	-	-	8 Unit	-
19.	Pembuatan gorong-gorong	2 unit	-	1 Unit	-
21.	Pembuatan Lapak Nelayan	-	-	1 Unit	-
22.	Pembangunan pengaman permukiman	-	-	-	1 unit
23.	Pembangunan kios nelayan	-	-	-	7x26 m2
24.	Pembangunan pondasi pas batu	-	-	-	50 m
25.	Pembangunan tanggul pas batu	-	-	-	40 m
26.	Pembangunan bak penampung air laut	-	-	-	1 unit
27.	Pembuatan urugan batu	-	-	-	450 m2
28.	Pembuatan jalan paving block	-	-	-	300 m2
29.	Pembuatan gapura TPI	-	-	-	1 unit
30.	Pembuatan pondasi jalan	-	-	-	30 m
31.	Pembangunan jalan rabat	-	-	-	75 m2
32.	Pengadaan mebel	-	-	-	1 set

Tritunggal tercatat 6.738 jiwa yang terbagi kedalam 1.760 KK. Sebagian besar penduduk di kedua desa ini masuk dalam kelompok keluarga prasejahtera. Berdasarkan mata pencahariannya, pekerjaan penduduk di kedua desa mayoritas adalah nelayan, yaitu mencapai 30 % di Desa Rangai Tritunggal dan 45 % di Desa Sumur.

Berdasarkan permasalahan yang ada, masyarakat bersama TAP, motivator desa serta perangkat desa melakukan rembug desa guna menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemilihan prioritas kegiatan ini cukup seru. Berbagai ide dan usulan dari masyarakat cukup banyak. Setelah melalui beberapa perdebatan maka disepakati kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pada kegiatan PLBPM ini antara lain perbaikan ekosistem pesisir, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas permukiman. Perbaikan ekosistem di lingkungan pesisir dilakukan melalui kegiatan transpalantasi

karang, penanaman mangrove, pembuatan papan himbuan dan pembuatan bronjong atau talud yang diharapkan dapat menahan runtuhnya tanah akibat dari pengikisan oleh air laut. Transpalantasi karang dibuat dengan menggunakan media cetakan beton balok yang disusun menyerupai piramida. Media cetakan beton ini diletakkan diperairan Teluk Lampung di sekitar Pulau Condong. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya dipasangkan sejumlah papan himbuan yang di letakkan di ruang publik yang sekiranya dapat dibaca oleh banyak pihak. Pembangunan bronjong dan talud di sekitar TPI di Desa Rangai Tritunggal dan di sekitar pemukiman di Desa Sumur.

Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian. Perbaikan tambatan perahu bertujuan untuk merapikan perahu yang selama ini disandarkan di sembarang tempat sehingga membuat desa keli-



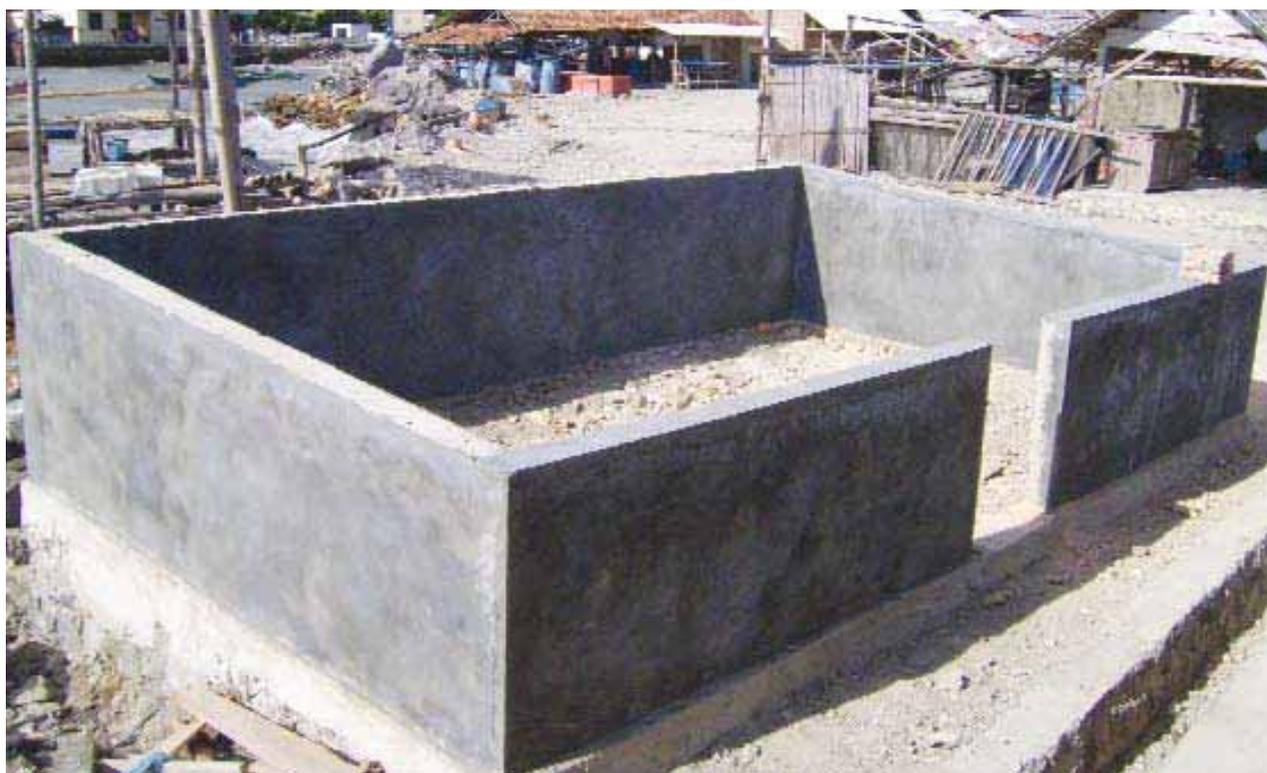
hatan *semrawut*. Tidak adanya tempat atau wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan nelayan maka pembangunan TPI juga menjadi salah satu prioritas kegiatan PLBPM. Dengan adanya TPI juga menghindarkan nelayan dari penjualan hasil tangkapan dengan harga rendah sehingga diharapkan tingkat pendapatan masyarakat nelayan meningkat.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kedua desa dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pembuatan jalan paving block pembangunan sarana drainase, pembuatan MCK, penyediaan sumber air bersih, perbaikan rumah dan pembangunan bak sampah ataupun penyediaan tong sampah. Pada awalnya, jalan lingkungan di kedua desa masih berupa jalan kampung berupa tanah sehingga pada saat hujan turun akan menjadi becek dan sangat sulit untuk dilalui. Hal tersebut menghambat akses masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pembuatan jalan dengan paving block. Dengan jalan paving diharapkan dapat memberikan akses jalan yang lebih nyaman untuk penduduk di kedua desa tersebut dan kegiatan perekonomian dapat berjalan lebih lancar lagi. Penanggulangan banjir dapat ditanggulangi dengan pembuatan drainase. Penyediaan

tempat sampah menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan. Diharapkan masyarakat menjadi biasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan atau bahkan mengelola sampah itu. Pembuatan MCK dan penyediaan sarana air bersih diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penduduk di kedua desa untuk membiasakan masyarakat untuk berperilaku bersih sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Walaupun berbagai kegiatan yang dilaksanakan merupakan inisiatif dan usulan masyarakat melalui rembug desa, namun dalam pelaksanaannya masih sering menghadapi hambatan. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan ini, faktor cuaca buruk serta kelangkaan dan mahalnya bahan bangunan juga seringkali menjadi penghambat pembangunan fisik. Maka seiring dengan berjalannya pembangunan acara-acara non formal seperti musyawarah masih dilaksanakan. Dalam musyawarah itu dilontarkan usul-usul baru, hal-hal yang menimbulkan permasalahan di lapangan serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagai salah satu program pemberdayaan, PLBPM menekankan pada partisipasi dan peran aktif masyarakat dan Pemda. Partisipasi ini dilaksanakan pada tahap perencanaan hing-



ga pelaksanaan kegiatan. Pada saat perencanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dan Pemda berupa saran-saran dan ide-ide dalam pengembangan kegiatan PLBPM, yang kemudian akan dibahas dalam rembung desa.

Pada pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah berpartisipasi dengan memberikan dana penunjang kegiatan yang berasal dari APBD pemerintah kabupaten. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dengan bergotong roy-

mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah kedua desa, membuat kualitas kehidupan masyarakat di kedua desa juga meningkat.

Program PLBPM ini juga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat di kedua wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan ekosistem pesisir. Bentuk kesadaran ini diwujudkan dengan

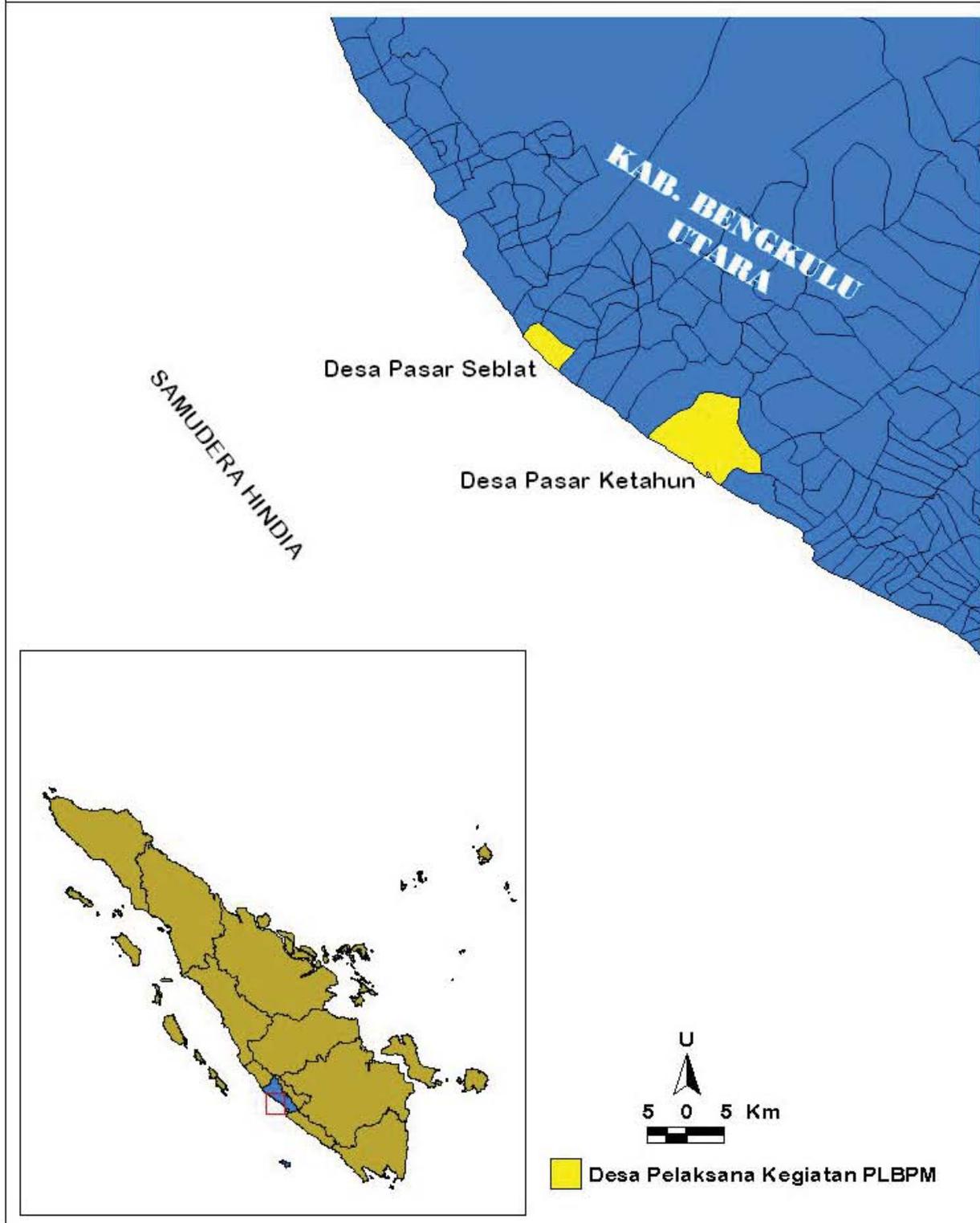


ong melaksanakan pembangunan-pembangunan fisik dengan sukarela tanpa mendapat upah. Sebagian masyarakat berkontribusi melalui pemberian secara sukarela lahannya untuk fasilitas umum. Selain bantuan yang diberikan secara fisik, masyarakat secara swadaya turut memberikan bantuan dana untuk pembuatan drainase sepanjang 150 m, dari yang direncanakan sepanjang hanya 100 m.

Keberadaan PLBPM di Desa Sumur dan Desa Rangai Tritunggal banyak memberi dampak positif bagi masyarakat. Hasil-hasil kegiatan PLBPM yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat adalah kondisi fisik lingkungan pesisir dan pemukiman yang semakin baik serta tersedianya infrastruktur yang cukup memadai sehingga

penanaman mangrove untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesadaran untuk tidak membuang sampah di pantai, serta program transplantasi karang untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang ada. Timbulnya kesadaran dari masyarakat disebabkan masyarakat melaksanakan semua kegiatan secara mandiri baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan sendirinya mereka akan memelihara dan menjaga apa yang mereka telah bangun. Selain itu, dibangunnya infrastruktur jalan dan tambat perahu yang lebih memadai, dirasakan semakin meningkatkan dan memperlancar aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam perekonomian. ●

Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Bengkulu Utara





Menata Desa Pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara

Oleh: Joni Iswanto



Bengkulu Utara terletak membentang di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera. Ibukota kabupaten ini terletak di Arga Makmur dan memiliki salah satu jenis bunga langka yaitu *Raflesia Arnoldi*. Wilayah ini memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan perikanan. Hasil perikanan tangkap yang cukup potensial di perairan laut sekitar wilayah ini yaitu ikan tuna, cakalang, tongkol, dan udang. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya yang sudah berkembang dan berpotensi untuk terus dikembangkan adalah tambak udang, ikan dan keramba.

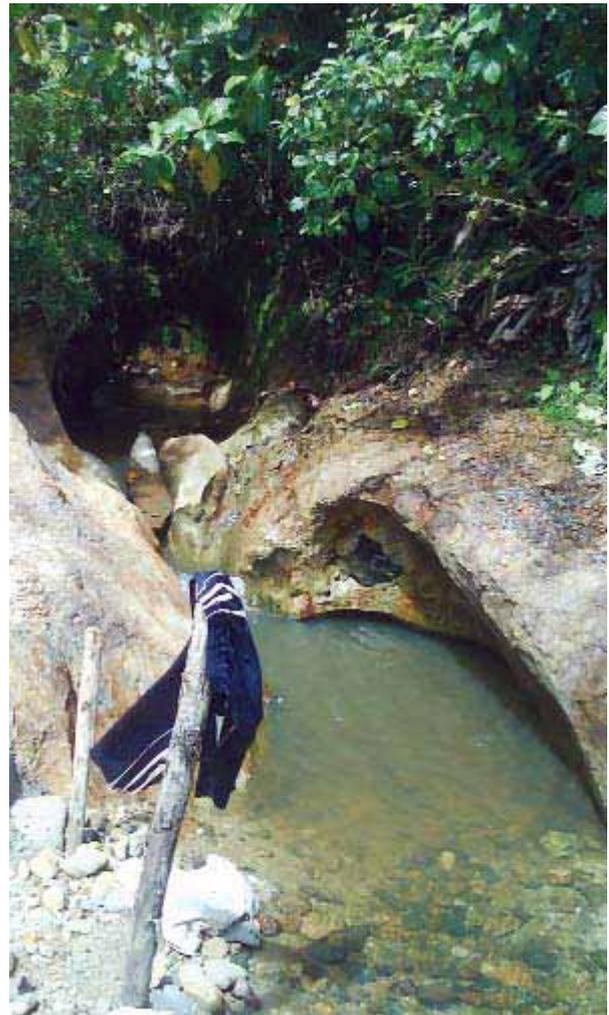
Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Bengkulu Utara kembali mendapatkan kegiatan untuk menata wilayah pesisirnya yaitu Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) untuk kedua kalinya. Ini merupakan program tindak lanjut dari program PLBPM tahun 2008. Desa yang dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2009 adalah Desa Pasar Sebelat.

Desa Pasar Sebelat merupakan salah satu desa induk di Kecamatan Putri Hijau, Wilayah ini terletak di pinggiran jalan lintas Barat Sumatera dan



berada di pesisir pantai Samudra Indonesia, dengan panjang kurang lebih 15 km. Jarak Desa dengan Kecamatan berjarak kurang lebih 2 km dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 5 menit, sedangkan jarak menuju ibu kota Kabupaten berjarak kurang lebih 128 km. Topografi lingkungan desa ini berupa daratan perbukitan yang sebagian besar tanah tegalan / ladang seluas 625 Ha, rawa-rawa \pm 7 Ha, pemukiman penduduk \pm 30 Ha, tanah perkebunan \pm 950 Ha dan selebihnya adalah lahan perusahaan perkebunan sawit milik swasta. Suku yang bermukim di desa ini mayoritas adalah Penduduk Asli atau Pribumi atau disebut juga suku " PEKAL ". Pada tahun 2008, jumlah penduduk desa adalah 185 KK dengan jumlah jiwa 495 orang yang dikelompokkan dalam keluarga prasejahtera 75 KK, keluarga sejahtera satu 70 KK, keluarga sejahtera dua 30 KK, keluarga sejahtera tiga 10 KK.

Desa Pasar Seblat memiliki permasalahan pengikisan pantai akibat gelombang laut serta minimnya sarana infrastruktur pemukiman. Kedua permasalahan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan mengapa desa ini dipilih lagi sebagai lokasi pelaksanaan PLBPM.





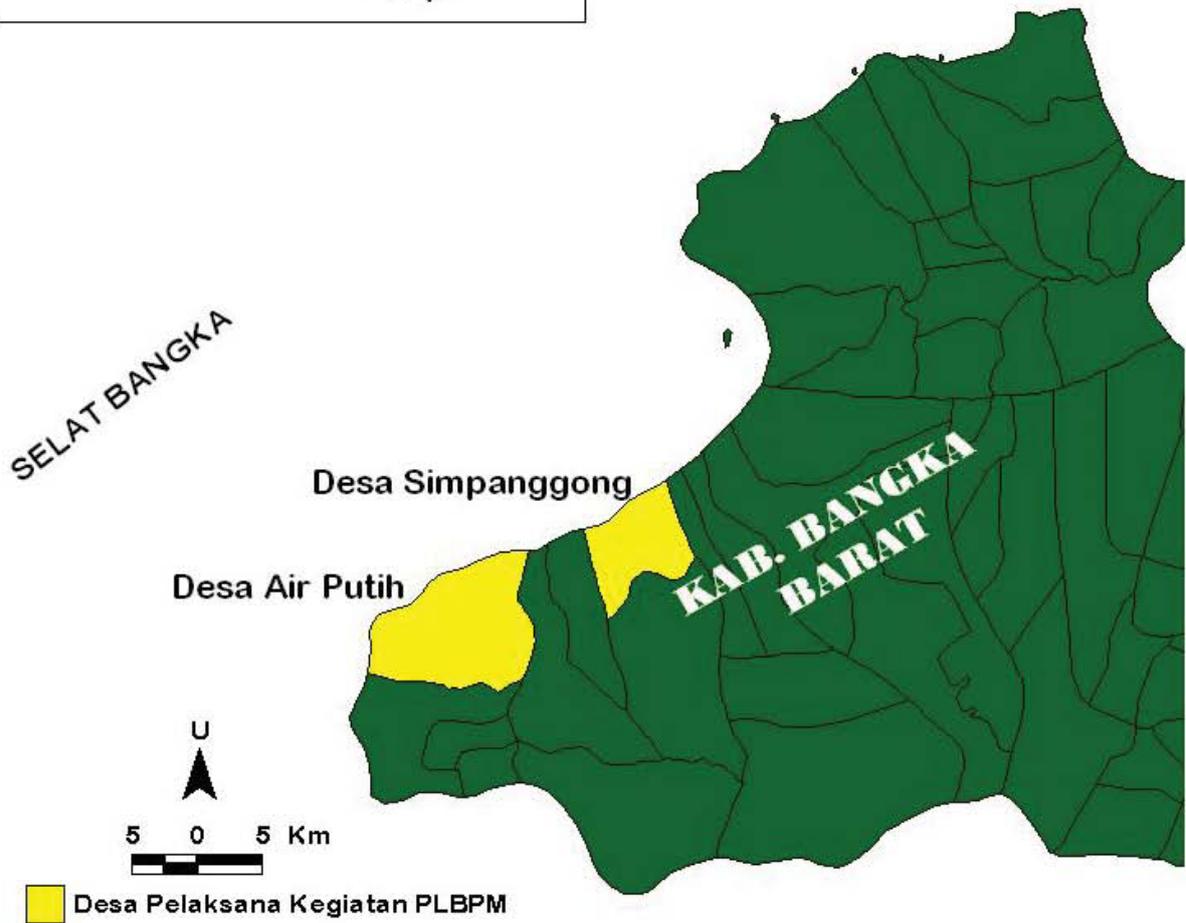
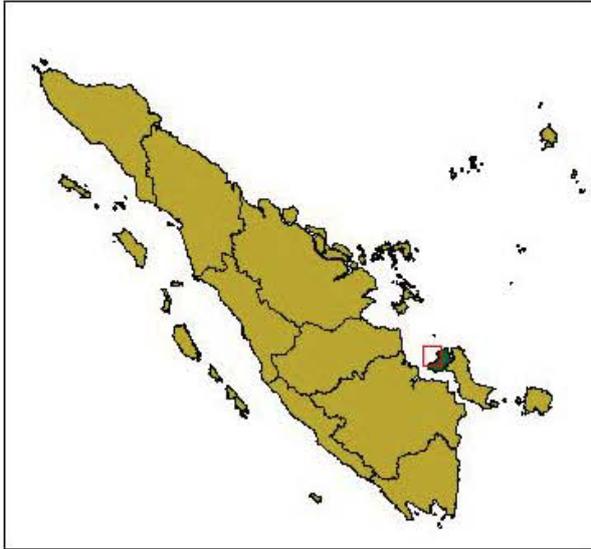
Berdasarkan hasil rembuk desa, disepakati beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan aula nelayan, pembuatan bronjong, pembangunan 1 unit gorong-gorong, pembangunan 2 unit MCK, pembangunan pengaman 2 aliran sungai, penanaman vegetasi pantai dan pembangunan 100 m jalan koral.

Pelaksanaan kegiatan PLBPM di kedua desa ini disambut baik oleh seluruh kalangan. Masyarakat mendukung kegiatan ini dengan cara ikut berpartisipasi baik dalam tahap perencanaan dalam forum rembuk desa untuk merumuskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dalam tahap pelaksanaan kegiatan melalui sumbangan tenaga dan material dalam berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan. Tidak ada hambatan yang berarti walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi dapat diselesaikan secara musyawarah

Kegiatan PLBPM ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terbangunnya beberapa fasilitas fisik lingkungan membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan berpeluang untuk menggerakkan perekonomian di kedua lokasi tersebut. Kegiatan ini juga memberikan pekerjaan alternatif bagi masyarakat pada saat tidak dapat melaut. ●



Lokasi Kegiatan PLBPM di Kabupaten Bangka Barat





Membangun Desa Pesisir di Bumi Sejiran Setason

Oleh: Dadang Destari Putra, Novalistri Astuti Regan
dan Ni Komang Suryati



Kabupaten Bangka Barat yang beribu kota di Muntok merupakan salah satu daerah wisata sejarah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana salah satu Proklamator kita yaitu Ir Soekarno pernah diasingkan di kota ini. Kabupaten yang mempunyai landmark mercusuar ini adalah pemekaran dari Kabupaten Bangka yang terbentuk pada tahun 2003. Banyak produk khas hasil perikanan yang dihasilkan di daerah ini seperti getas (kretek), otak-otak bakar, kerupuk udang, pempek udang dan masih banyak lagi panganan khas lainnya. Kabupaten ini terdiri dari 23 desa pesisir dengan garis pantai sepanjang 278,75 km. Untuk menuju Bangka Barat dapat dicapai dengan pesawat dari Jakarta menuju Kota Pangkal Pinang dan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama lebih kurang 3 jam.

Kondisi jalan yang bagus juga turut mendukung kemudahan akses ke kota ini.

Tahun 2009 Kabupaten Bangka Barat mendapat kesempatan untuk melanjutkan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Kegiatan PLBPM di Bangka Barat ini dimulail sejak tahun 2006 yang dilakukan di dua lokasi pelaksanaan yaitu Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok serta Dusun Sadar Daya, Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip. Kemudian tahun 2007 juga mendapat PLBPM yang pelaksanaannya di Dusun Sadar Daya. Jadi tahun ini merupakan tindak lanjut untuk kegiatan tahun sebelumnya. Kegiatan PLBPM yang semestinya dilakukan pada lokasi tindak lanjut dilaksanakan di lokasi yang berbeda akan tetapi masih berada pada satu desa yang sama yaitu di Dusun Selindung, Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Hal ini dikarenakan lokasi pelaksanaan kegiatan yang terdahulu yaitu Dusun Tanjung Ular dan Dusun Sadar Daya dianggap telah selesai melakukan penataan daerah pesisirnya. Mengenai pengajuan lokasi pelaksanaan kegiatan yang baru telah di usulkan pada rapat Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dengan terlebih dahulu dilakukan survey terhadap lokasi lama dan lokasi baru. Setelah itu dilakukan sistem skoring dimana lokasi dengan skor tertinggi diputuskan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dan disetujui juga oleh Tim Pengendali Pusat (TPD).

Dusun Sadar Daya adalah salah satu dusun di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip. Secara geografis dusun ini letaknya sangat terpencil di sebelah timur Desa Simpang Gong dan dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat dan laut. Jarak Dusun dari pusat desa ± 12 km dengan kondisi jalan tanah yang buruk melintasi hutan yang lebat. Sedangkan jarak dari Desa Simpang Gong ke pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Barat di muntok ± 30 km dengan kondisi jalan yang baik dengan konstruksi aspal hotmix. Jumlah penduduk Dusun Sadar Daya ± 180 jiwa dengan 27 KK

dimana 70 % dari total penduduk adalah laki-laki dan bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Sadar Daya tergolong miskin dengan penghasilan kurang dari RP 50.000,-/hari. Fasilitas umum yang ada sangat minim. Hanya terdapat sebuah masjid lingkungan dan satu buah Sekolah Dasar dengan satu lokal untuk kelas 1 sampai kelas 3, untuk kelas 4 hingga kelas 6 anak-anak terpaksa bersekolah ke Desa Simpang Gong melintasi hutan dengan jarak ± 12 km. Potensi Sumberdaya alam di daerah ini meliputi hutan tropis alami, pantai yang indah dengan pasir putih *head beach* ± 30 m sangat cocok untuk dijadikan wisata pantai. Potensi perikanan laut di Dusun Sadar Daya terdiri dari ikan bilis/teri dan cacing wakwak.

Sedangkan Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih memiliki jumlah penduduk sebanyak 547 KK yang terbagi ke dalam 50 KK. Sama halnya dengan desa sebelumnya, sebagian besar mata pencaharian penduduk di desa ini sebagai nelayan tangkap dan sisanya berkebun dan menambang timah inkonvensional atau menjadi buruh di perusahaan tambang timah.

Pada tahun 2009 ini, kegiatan PLBPM dilaksanakan di Dusun Selindung yang merupakan salah satu dari lima dusun di desa Air Putih Kecamatan Muntok. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat setempat, Dusun Selindung telah ada sejak tahun 1930. *Selindung* berarti suatu tempat perlindungan bagi siapa saja yang melarikan diri khususnya sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan hutan yang vegetasinya sangat tebal. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam hutan itu maka akan susah untuk ditemukan.

Dahulu rumah masyarakat Dusun Selindung terletak di sepanjang pantai. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya puing-puing kayu bekas rumah dan lokasi pekuburan masyarakat. Selain itu mereka juga menetapkan sistem ladang berpindah-pindah sehingga lokasi dusun ini sekarang berada sekitar 1 (satu) km dari garis pantai. Jarak dusun dari pusat desa kurang lebih 5 km dengan kondisi jalan tanah merah



melewati hutan dan perkebunan sawit. Sedangkan jarak dari Desa Air Putih menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Barat di Muntok kurang lebih 10 km dengan kondisi jalan yang baik. Pantai yang landai dengan pasir putih sepanjang \pm 1 km sangat cocok untuk dijadikan salah satu tujuan wisata pantai di Kabupaten Bangka Barat. Fasilitas umum yang ada antara lain sebuah masjid, sebuah balai desa dengan kondisi rusak ringan, 3 (tiga) buah MCK komunal+sumur dengan kondisi rusak, sebuah Sekolah Dasar, Sebuah Puskesmas Pembantu (Pustu) tetapi belum ada tenaga kesehatan, sebuah Lapangan Bola Kaki, sebuah Lapangan Bola volley.

Jumlah penduduk Dusun Selindung kurang lebih 222 jiwa dengan 60 KK. Kurang lebih 32 % dari total jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki pada usia produktif. Mata pencaharian masyarakat Dusun Selindung rata-rata sebagai nelayan bagan. Nelayan Dusun Selindung termasuk nelayan miskin dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 50.000,- perhari.

Dalam mengenalkan kegiatan PLBPM kepada masyarakat dilakukan dengan mengadakan rembug desa. Rembug desa sendiri merupakan hal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat bila ada hal atau masalah yang terjadi di desa ini.

Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti setiap acara rembug desa. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah masyarakat yang hadir lebih dari 50 orang. Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Desa Simpang Gong dan Desa Air Putih dilakukan oleh kelompok nelayan yang baru terbentuk pada kegiatan rembug desa tersebut. Ditetapkan juga motivator desa yang berperan dalam memberikan motivasi serta memberikan arahan kepada masyarakat.

Rencana umum kegiatan di Dusun Sadar Daya hasil dari rembug desa meliputi pembangunan jalan akses utama dengan panjang 12 km, jalan lingkungan dalam dusun sepanjang 550 m, MCK komunal sebanyak 3 unit, sarana air bersih, jembatan lingkungan sebanyak 2 buah, penerangan seluruh dusun, alat tangkap nelayan (bagan, perahu+mesin, jaring ikan), alat komunikasi radio, sarana olah raga, bangunan sekolah dasar, renovasi dan relokasi rumah nelayan tidak layak huni sebanyak 20 unit. Semua aspirasi serta permintaan dari seluruh masyarakat ditampung dalam rembug desa tersebut.

Sedangkan untuk rencana umum kegiatan PLBPM di Dusun Tanjung Ular meliputi peningkatan jalan lokal primer sepanjang 15 km, peningkatan jalan lingkungan sepanjang 3 km, pembangunan tambat perahu, pembangunan balai nelayan, revitalisasi MCK komunal sebanyak 1 unit, pembangunan MCK sebanyak 6 unit, penerangan pemukiman dan jalan umum, alat komunikasi radio, pembangunan jembatan lingkungan bentang 6 m berikut drainase, alat tangkap (Perahu+mesin, jaring) 20 unit, sarana olah raga, kredit lunak bagi masyarakat nelayan serta renovasi rumah nelayan tidak layak huni.

Sama seperti di Dusun Sadar Daya, semua aspirasi masyarakat Dusun Selindung ditampung di dalam kegiatan rembug desa. Sedangkan untuk realisasinya disesuaikan dengan dana yang tersedia dan kegiatan mana yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan-kegiatan PLBPM yang dilaksanakan di Bangka Barat terdapat pada tabel berikut.

Tabel kegiatan PLBPM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat

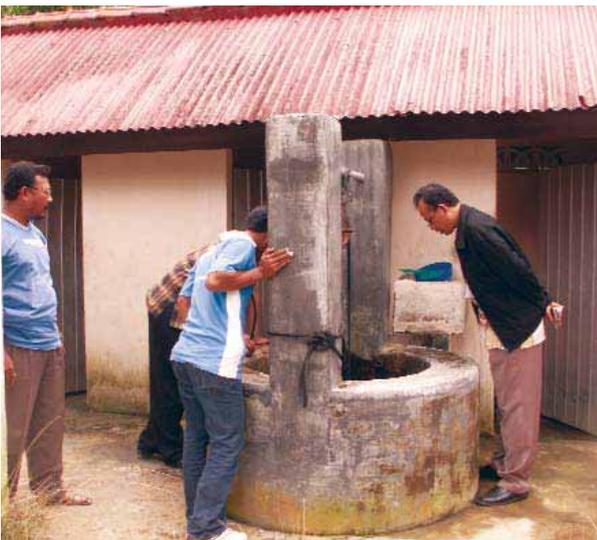
Kegiatan PLBPM	2006		2007	2009
	Dusun Sadar Daya	Dusun Tanjung Ular	Dusun Sadar Daya	Dusun Selindung
Pembangunan dan Renovasi Rumah	11 Unit	11 Unit	9 unit	-
Papan Peringatan	4 Buah	-	4 Buah	-
MCK Komunal	2 Unit	6 Unit	-	-
Jalan Lingkungan	1 Paket	-	-	-
Jembatan Lingkungan	1 Paket	1 Paket	-	-
Penerangan PLTS Solar Home System	13 Unit	2 Unit	6 unit	-
Tempat Sampah Kapasitas 2 m ³	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-
Tempat Sampah Kapasitas 0,15 m ³	-	-	40 Unit	-
Shelter	-	-	10 unit	-
Balai Nelayan	-	1 Unit	1 Unit	-
Taman desain 1	-	-	2 Buah	-
Taman desain 2	-	-	10 Buah	-
Nomor Rumah	-	-	20 Buah	-
Tangga Pantai	-	-	4 Buah	-
Jembatan Kayu	-	-	1 Unit	-
Genset 3000 watt	-	-	1 Buah	-
Pompa setara Feruno	-	-	1 Buah	-
Perbaikan Sumur Bor	-	-	1 Titik	-
Pembuatan Sumur Gali	-	-	1 Unit	-
Cetak Inventarisasi Fasilitas Umum PLBPM	-	-	1 Lusin	-
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	1 Paket



Daya Mineral dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka Barat.

Peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM ini cukup aktif seperti pembangunan/renovasi rumah dengan cara bergotong royong dan sebagian masyarakat ada yang menyediakan bahan bangunan seperti batako dan kayu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peran motivator desa sangat aktif dalam menghimbau dan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui motivasi dan arahan kepada masyarakat.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini yaitu terbukanya akses masyarakat dari dunia luar dan membuka peluang daerah tersebut menjadi salah satu tempat wisata bagi masyarakat



Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM ini yaitu melalui Tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dan Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) yang aktif melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis program di lapangan serta verifikasi hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan (LK). Terdapat *sharing program* dari Pemerintah Daerah setempat yaitu pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh Dinas Energi dan Sumber



sekitar. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan adalah dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat betapa pentingnya penataan lingkungan pemukiman untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM ini masyarakat sepakat untuk membuat peraturan desa. ●

Biografi

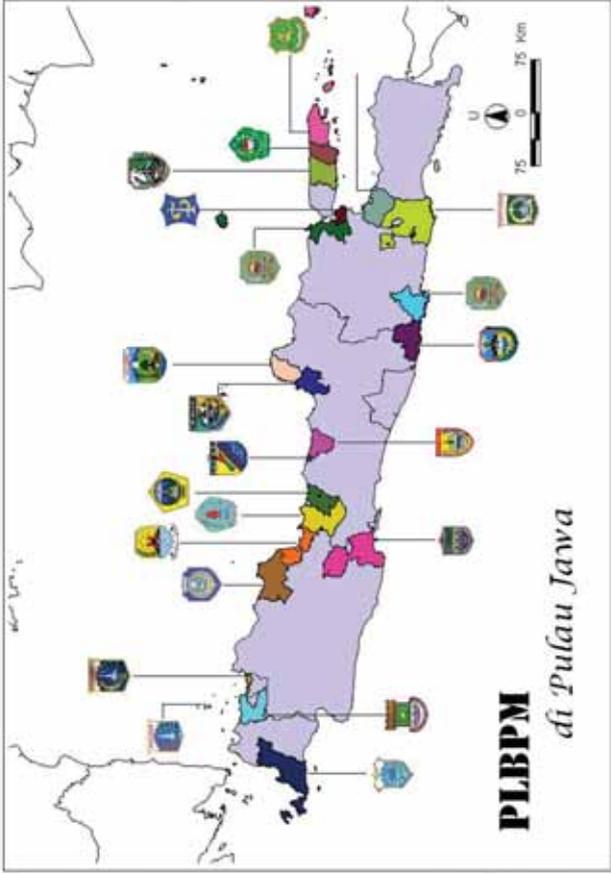
Sekilas Penulis

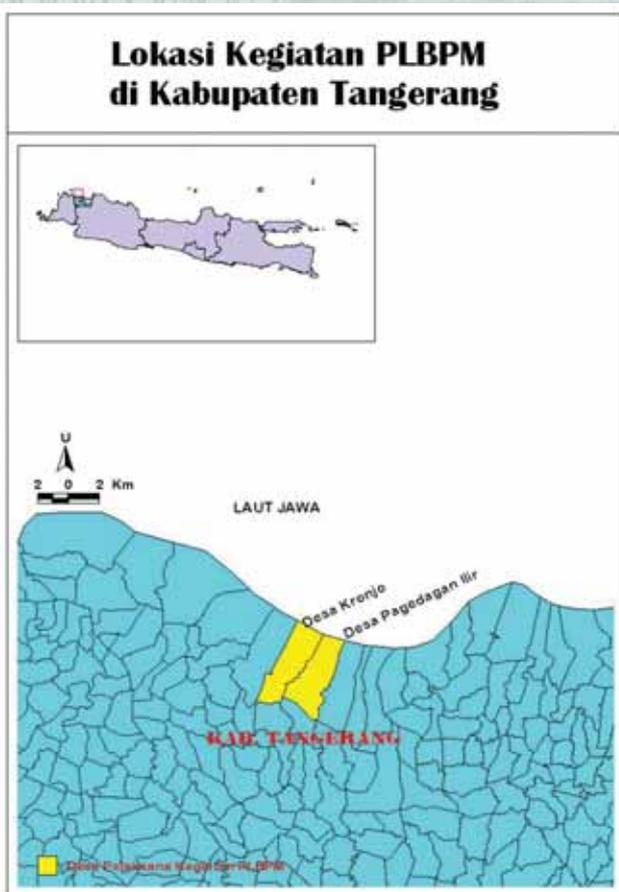


DADANG DESTARI PUTRA, ST, dilahirkan di Mutok pada tanggal 26 Desember 1978. Pengalaman kerja dalam bidang teknik yaitu Perencanaan Pembangunan Tambat Labuh se-Kabupaten Bangka Barat, Fasilitator Desa PNPM Pisew di Sungai Liat. Motivasi menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM, karena merasa tertantang untuk menata dan memajukan Kabupaten Bangka Barat.

NOVALISTRI ASTUTI REGAN, S.Kel, lahir di Lahat pada tanggal 11 November 1986. Gelar sarjana diperoleh setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Kelautan. Pernah magang sebagai Asisten GIS dan Remote Sensing, NGO Programme SSFFMP UE (South Sumatera Forest Fire Manageent Project) Palembang. Menjadi TAP PLBPM menimbulkan tantangan tersendiri serta mendapat pembelajaran dimana bisa terjun langsung bersama-sama masyarakat melakukan penataan lingkungan pesisir.

NI KOMANG SURYATI, S.Pi, Dilahirkan di Palembang, 16 September 1983. Pendidikan S1 didapatkan di Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006. Pernah bekerja sebagai salah satu staf di Laboratorium Hidrobiologi, Balai Riset Perikanan Perairan Umum, juga sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Perikanan Universitas PGRI, Palembang. Motivasi menjadi Tenaga Ahli Pendamping karena tertarik untuk ikut berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk memajukan desa. ●





Tangerang

K A B U P A T E N



Menata Lingkungan Pesisir Menuju Masyarakat Pesisir Mandiri di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

Oleh: Mulyadi, Ali Hamzah, Deni A Kesuma



Tangerang kini merupakan kabupaten yang bernaung di Provinsi Banten, yang merupakan provinsi pemekaran. Terletak pada posisi geografis yang strategis, kabupaten ini menjadi penyangga utama kota metropolitan Jakarta. Wilayah Tangerang dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan yang meliputi Serpong sebagai pusat permukiman, Balaraja dan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan industri, serta Teluknaga diarahkan untuk pengembangan sektor wisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan dan pertambakan. Sebagai wilayah pesisir, kabupaten garis pantai sepanjang 51,2 km dengan 15 desa pesisir. Untuk



mencapai kabupaten ini, anda dapat menggunakan perjalanan darat dari Jakarta dengan waktu tempuh ± 1,5 jam.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Tangerang dilaksanakan sejak tahun 2007. Penentuan lokasi pelaksanaan di kabupaten ini, melalui mekanisme survei potensi dan permasalahan yang ada di kecamatan pesisir. Kegiatan ini dilakukan oleh Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dengan bantuan Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Dengan menilai kriteria seperti desa yang memiliki sarana permukiman yang minim serta adanya abrasi pantai. Selanjutnya TAP melakukan skoring untuk setiap kecamatan. Dari hasil skoring tersebut dipilih Kecamatan Kronjo dimana ada 3 desa pesisir yaitu Desa Kronjo, Desa Pagedangan Ilir dan Desa Muncung. Pada pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2007 dilakukan di dua desa yaitu Desa Kronjo dan Desa Pagedangan Ilir. Namun permasalahan yang timbul adalah adanya pembagian yang merata terhadap dana PLBPM pada tahap I. Cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam penentuan desa lokasi pelaksanaan kita jelaskan pada program PLBPM tidak ada pembagian dana melainkan

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut sehingga dana dari PLBPM tersebut di sesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan oleh Lembaga Kemasyarakatan (LK) pada masing – masing desa. Desa yang terpilih menjadi desa lokasi pelaksanaan adalah untuk tahun 2007 yaitu Desa Kronjo dan Desa Pagedangan Ilir. Tindaklanjut kegiatan pada tahun 2008 dilaksanakan di Desa Kronjo dan untuk tahun 2009 dilakukan di Desa Pagedangan Ilir.

Desa Pagedangan Ilir merupakan bagian dari Kecamatan Kronjo dan merupakan desa pesisir yang memiliki luas wilayah 739.639 ha. Topografi desa ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. Potensi unggulan desa ini adalah perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Jumlah penduduk desa ini adalah 1.118 KK terdiri dari 2.472 jiwa pria dan 2.544 jiwa wanita. Perjalanan menuju Desa Pagedangan Ilir terutama wilayah lokasi pelaksanaan yaitu Kp. Gaga Kidurin dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh sekitar 50 km dari Ibu Kota Kabupaten Tangerang Tangerang dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam. Permukiman masyarakat Desa Pagedangan Ilir terutama wilayah lokasi pelaksanaan Kp. Gaga Kidurin ini dikelilingi oleh hamparan tambak dan lahan pertanian.

Kondisi infrastruktur di lokasi pelaksanaan Kp. Gaga Kidurin masih sangat minim dimana jalan lingkungan masih terbuat dari pergerasan pasir dan batu sehingga dalam aktivitasnya pada saat musim hujan sangat menghambat alur lalu lintas. Kondisi permukiman rumah nelayan di Kp. Gaga Kidurin sangat tidak layak huni dengan kata lain tidak memenuhi kriteria rumah sehat. Pada saat musim hujan datang banyak ditemui genangan – genangan air yang mengganggu pemandangan disebabkan minimnya sarana infrastruktur dalam hal ini tidak tersedianya SPAL yang memadai sehingga dapat menyebabkan banjir.

Kegiatan PLBPM tahun 2009 merupakan kegiatan tindak lanjut dari PLBPM tahun 2007



sehingga FKTD, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang serta TAP dalam mengadakan sosialisasi tidak mengalami hambatan yang berarti. Pada saat sosialisasi kita mencoba untuk menggali potensi diri yang ada pada masyarakat lokasi pelaksanaan sehingga potensi yang ada dapat kita kembangkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLBPM. Berhubung PLBPM ini merupakan kegiatan tindak lanjut sehingga pemilihan LK tidak lagi dilaksanakan, namun memberdayakan LK yang lama agar lebih dapat memberikan sumbangsih positifnya, sedangkan untuk motivator mengalami perubahan, karena pada tahun 2009 mengalami perubahan pemilihan desa. Kendala yang dihadapi dalam pemilihan motivator desa adalah adanya keinginan satu kelompok untuk langsung menunjuk salah satu wakil dari anggota masyarakat untuk menjadi motivator desa, namun demi kelancaran kegiatan PLBPM ke depannya nanti, akhirnya pemilihan motivator diadakan dengan cara rembung desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan pihak Tim Teknis Pengendali Daerah.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa ini, masyarakat desa sangat berperan aktif, mengingat manfaat dari kegiatan PLBPM tahun sebelumnya (tahun 2007). Motivator desa mengetahui wilayah target group, sehingga dalam penentuan kegiatan prioritas ini selalu dimusyawarahkan dulu oleh masyarakat lokasi pelaksanaan. Motivator desa juga berkonsultasi dengan pihak kecamatan untuk mengidentifikasi wilayah/daerah mana yang sudah dianggarkan dalam kegiatan APBD maupun PNM Mandiri sehingga harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar kegiatan ini tidak tumpang tindih. Masyarakat lokasi pelaksanaan mengusulkan rencana prioritas kegiatan pada kegiatan fisik berupa kegiatan pembangunan SPAL, jalan lingkungan dan kegiatan pembangunan rumah nelayan yang layak huni. Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir dikerjakan secara swadaya dengan dana pendampingan oleh pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Tangerang. Berikut ini tabel kegiatan PLBPM di Kabupaten Tangerang :

Tabel 1. Kegiatan PLBPM

Kegiatan PLBPM	2007		2008		2009	
	Kronjo	Iilir	Kronjo	Pagedangan Iilir		
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-		1 Paket (Dana swadaya masyarakat)	
Pembangunan MCK	2 unit	2 unit	1 unit		-	
Pengadaan Air Bersih			1 unit			
Pembangunan Bak sampah	2 unit	2 unit	1 unit		-	
Pembuatan Papan Himb.	4 unit	-	2 unit		-	
Pembuatan SPAL	458.5 m	739 m	542.5 m		408.3 m	
Pemb. jl. Lingkungan	532 m	218 m	207 m		221.7 m	
Pemb/Rehab Rumah Nelayan	5 unit	5 unit	4 unit		5 unit	
Semenisasi	-	-	1 unit		-	
Penanaman Mangrove	5500 btg	5500 btg	3861 btg		-	

Partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan adalah berperan aktif dalam rangka mensosialisasikan kegiatan PLBPM kepada masyarakat di lokasi pelaksanaan, bahkan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pendampingan pada setiap kegiatan PLBPM dari sejak tahun 2007 hingga 2009. Program lain yang dilakukan di desa lokasi pelaksanaan sebagai sharing pemerintah daerah kabupaten/kota ataupun pemerintah provinsi terhadap kegiatan PLBPM adalah program PNPM Mandiri.

Dari kegiatan PLBPM ini masyarakat merasakan manfaat yang sangat besar seperti terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan tertata dengan baik. Tertatanya jalan lingkungan dapat mempermudah aksesibilitas

sehingga kegiatan perekonomian dan produktivitas masyarakat meningkat. Kegiatan PLBPM ini menyadarkan masyarakat desa tersebut akan pentingnya kelestarian lingkungan pesisir, tertatanya SPAL serta pentingnya kesehatan masyarakat pesisir. Rasa persaudaraan dan kebersamaan masyarakat kembali tumbuh melalui kegiatan gotong royong yang selama ini hampir hilang dari kegiatan masyarakat.

Seluruh fasilitas fisik hasil kegiatan-kegiatan dalam PLBPM ini disepakati masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum yang telah dibangun dengan cara membuat kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok ini mendapat jadwal bergantian untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh warga desa tersebut dan masyarakat sekitarnya. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



MULYADI, S.St.Pi, dilahirkan di Madura pada tanggal 1 Januari 1977. Tahun 1996 diterima di Sekolah tinggi Perikanan Jakarta dengan Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2000 bekerja di kapal perikanan milik PT. Avona di daerah Kaimana Papua. Pada tahun 2002 - sampai 2003 pindah kerja ke PT. Ocean Mitra Mas di Unit kapal supervisi di Ternate Maluku Utara. Sebagai Tenaga Pendamping Desa pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Serang tahun 2003 - 2006. Kegiatan

ini mendorong masyarakat untuk menggali potensi dan kendala yang ada desa untuk dapat menata lingkungan pesisir yang lebih baik.



ALI HAMZAH, SE dilahirkan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Desember 1975. Pada tahun 2007 bekerja di PT. Karya Cipta Balindo Golf Sanur Bali. Motivasi sebagai TAP pada kegiatan PLBPM adalah ingin mengembangkan dan memotivasi masyarakat pesisir berpola pikir maju baik dalam menata daerah dan perekonomiannya. ●



Pandeglang

KABUPATEN



Merias Wajah Muram Kecamatan Labuan Melalui Program PLBPM



Pandeglang, merupakan sebuah kabupaten yang berada di selatan Provinsi Banten. Mungkin bagi banyak kalangan yang jarang berwisata atau pergi ke luar kota, sedikit terasa asing terhadap Kabupaten ini. Pantai Carita, Kawasan Wisata Tanjung Lesung, Kawasan Pantai Bama, Pantai Ciputih, wisata Gunung Karang dan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan objek wisata yang cukup membuat Kabupaten ini dikenal oleh khalayak umum. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 6°21' - 7°10' Lintang Selatan dan 104° 48' - 106 °11' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lebak di sebelah timur, Selat Sunda di sebelah barat, Samudera Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Serang di sebelah utara. Kabupaten yang mempunyai garis pantai cukup panjang ini, memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang cukup besar. Namun karena letaknya yang menghadap Samudera Indonesia, penangkapan di perairan sekitar kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim selatan, saat ombak cukup besar, para nelayan di kabupaten ini khususnya mereka yang menggunakan perahu bermesin kecil tidak dapat melaut. Oleh karena itu, mengingat

Jenis Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pandeglang TA 2006 dan 2007

No	Kegiatan	2006		2007
		Desa Cigondang	Desa Kalanganyar	
1.	Penanaman tanaman pantai	11.000 batang	-	-
2.	Pembangunan talud	100 m3	-	-
3.	Pembangunan saluran air (sistem drainase)	609 m	1.000 m	1 unit
4.	Pembuatan sarana MCK	2 unit	4 unit	1 unit
5.	Pembuatan bak sampah	89 unit	-	-
6.	Penataan dan pembuatan jalan lingkungan	1.170 m2	1.500 m2	1.000 m
7.	Pembuatan sumur bor/pengolahan air minum	7 unit	-	-
8.	Pembuat rumah contoh	-	2 unit	-
9.	Perbaikan/renovasi rumah	33 unit	55 unit	-



masih banyak potensi wisata bahari, Pemda juga mulai mengembangkannya sebagai sektor pendorong perekonomian daerah.

Program PLBPM mulai diperkenalkan di Kabupaten ini pada tahun 2006 dan berlanjut di tahun 2007. Pada tahun 2006, pelaksanaan kegiatan berada di Desa Cigondang dan Desa Kalanganyar. Kedua desa ini masuk wilayah Kecamatan Labuan. Kedua desa ini merupakan desa pesisir yang mayoritas penduduknya adalah keluarga prasejahtera dengan kepala keluarga berprofesi sebagai nelayan dan pengolah hasil perikanan. Selain itu image desa pesisir yang tertinggal dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kumuh dengan sampah yang terlihat dimana-mana serta abrasi akibat rusaknya ekosistem pesisir,

melekat pada kedua desa ini.

Untuk mencapai kedua desa tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat dari ibukota kabupaten menuju Labuan. Kondisi jalan dari ibukota kabupaten hingga Labuan sudah cukup baik namun kondisi jalannya berliku-liku dan mendaki. Saat ini sudah tersedia angkutan umum yang melayani transportasi dari Kota Pandeglang menuju Labuan. Dari Labuan untuk mencapai Desa Cigondang dan Kalanganyar dapat menggunakan ojek atau becak dengan perjalanan sekitar 10-15 menit. Kondisi akses jalan menuju kedua lokasi sudah cukup baik.

Berdasarkan permasalahan prioritas yang teridentifikasi di kedua desa tersebut, maka dipilihlah beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

Peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui program betonisasi, pembuatan saluran drainase lingkungan, pembuatan sumur bor dan pembuatan MCK merupakan jenis kegiatan yang dipilih melalui forum musyawarah desa. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, di kedua desa tersebut juga dilakukan renovasi rumah warga yang tidak layak huni. Di desa Cigondang rumah warga yang direnovasi sebanyak 33 unit dan di Desa Kalanganyar sebanyak 55 unit. Di Desa Kalanganyar juga dilakukan pembuatan contoh rumah sehat sebanyak 2 unit dan diharapkan



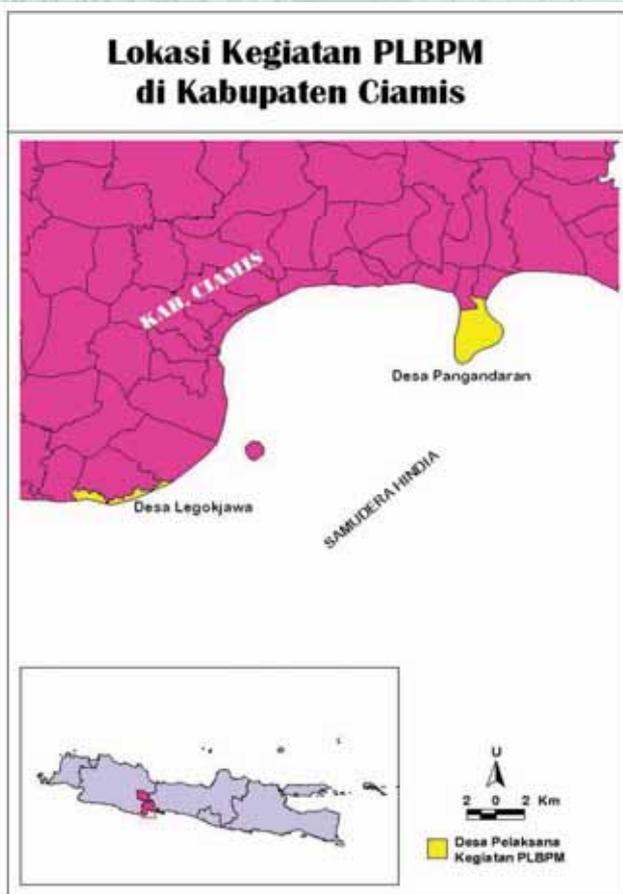
dapat menjadi contoh bagi masyarakat desa. Sedangkan untuk menanggulangi permasalahan abrasi yang terjadi di Desa Cigondang dilakukan pembangunan talud sepanjang 100 meter dan perbaikan ekosistem pesisir dengan penanaman vegetasi pantai. Pelaksanaan penanaman vegetasi pantai ini melibatkan masyarakat desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat merasa memiliki tanaman yang telah mereka tanam dan diharapkan mereka akan turut menjaga dan memelihara dengan baik.

Pada tahun 2007, kegiatan PLBPM hanya dilaksanakan di Desa Kalanganyar. Alasan yang mendasarinya adalah masih adanya sejumlah kegiatan di desa ini yang memerlukan penanganan lanjutan. Pembangunan yang masih harus dilanjutkan di desa ini adalah pembuatan saluran drainase, pembangunan MCK dan penataan jalan lingkungan desa sepanjang 1 km.

Masyarakat di kedua desa target grup ikut berpartisipasi melalui sumbangan tenaga dengan aktif bergotong royong ataupun memberikan bantuan material bahan bangunan untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini.

Kegiatan PLBPM di Kabupaten ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan ini lingkungan permukiman di kedua desa tersebut tertata dengan rapi, bersih dan sehat sehingga dapat memberikan rasa nyaman. Melalui kegiatan ini pula, masyarakat memiliki sarana dan prasarana seperti jalan desa sehingga mempermudah mobilitas lintas wilayah. dengan terciptanya kondisi ini diharapkan akan terdorongnya pertumbuhan ekonomi di kedua desa tersebut. ●





Desa Cijulang Menuju Desa Pesisir Mandiri di Kabupaten Ciamis

Oleh: Jajat Sudrajat, Yadi Yogaswara dan Jodi Sujadi



Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten pesisir di Jawa Barat. Kabupaten yang memiliki panjang garis pantai 91 km ini terdiri dari 24 desa pesisir. Kabupaten ini juga memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Akses untuk menuju kabupaten ini sangatlah mudah, karena anda hanya membutuhkan waktu 5 jam dari Jakarta melalui jalur darat.

Kegiatan PLBPM mulai menyentuh desa pesisir Kabupaten Ciamis sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, kegiatan difokuskan pada desa Pangandaran dan desa Legokjawa yang merupakan bagian dari kecamatan Cimerak. Pada tahun berikutnya hanya dilakukan di Desa Legokjawa. Pemilihan desa target group ini dilakukan dengan metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yang dilanjutkan dengan survey awal untuk menggali informasi mengenai potensi dan permasalahan masyarakat desa. Hasil kegiatan ini selanjutnya dilakukan analisis

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Ciamis

Kegiatan	2006		2007	2008	2009
	Desa Pangandaran	Desa Legokjawa	Desa Legokjawa	Desa Legokjawa	Desa Cijulang
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	1 Paket
Pembuatan Papan Pengumuman	4 Unit	-	-	-	-
Pembangunan Tembok Penahan Abrasi	-	-	70 m	100 m	116 m
Pembuatan Terumbu Karang Buatan	100 Unit	-	-	-	-
Pembuatan Saluran Drainase	-	-	-	14 m	630 m
Pembangunan Jalan Lingkungan	-	-	1.000 m	-	100 m
Pembuatan Saluran Keliling Limbah TPI dan Septi tank	-	-	18 m	-	-
Pembangunan Pagar Keliling TPI	-	-	40 m	-	-
Pembuatan Saluran Air	733 m	-	116 m	-	-
Pengerasan dan Peninggian Halaman Parkir TPI	-	-	709 m ²	-	-
Pembuatan MCK	1 Unit	-	-	-	-
Pembangunan Rumah Percontohan Tahan Gempa dan Tsunami	1 Unit	1 Unit	-	-	-
Perbaikan Rumah Penduduk	21 Unit	30 Unit	-	-	-



skoring sehingga didapatkan lokasi yang benar-benar membutuhkan kegiatan ini yakni Desa Batukaras dan Desa Cijulang. Konflik penentuan desa target group menjadi konflik klasik yang mewarnai kegiatan PLBPM seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan skoring ini merupakan hasil kesepakatan yang diambil oleh Forum Teknis Koordinasi Daerah (FKTD), Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dan tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Berdasarkan hasil skoring diketahui bahwa Desa Cijulang memiliki skor tertinggi, maka dengan otomatis desa Cijulang dipilih sebagai desa pelaksanaan PLBPM tahun 2009. Kegiatan lanjutan pada desa Legok Jawa telah terselesaikan pada kegiatan PLBPM tahun 2008.

Desa Cijulang termasuk dalam kecamatan Cijulang, dengan Luas keseluruhan sekitar 777.996 ha dan pada ketinggian 0 – 8 meter dari permukaan laut. Untuk berkunjung ke desa ini, dapat menggunakan jalur darat selama 3 jam dari kabupaten Ciamis. Permukiman masyarakat di desa ini umumnya menyebar di beberapa titik, dan mayoritas bangunan rumahnya berupa semi permanen.

Kondisi infrastruktur permukiman di desa ini tidak teratur, hal ini terlihat dengan kurangnya sarana dan prasarana penunjang permukiman seperti drainase, jalan lingkungan, MCK dan sarana air bersih, serta perlunya dibuat tanggul penahan tebing sungai dan tambatan perahu yang juga dipergunakan sebagai dermaga pendaratan ikan. Jumlah penduduk desa ini adalah 5.167 jiwa yang terbagi dalam 1.763 KK. Mata pencaharian penduduk umumnya nelayan dan petani, namun ada sebagian kecil sebagai pedagang dan pengrajin.

Pelaksanaan sosialisasi PLBPM di desa ini dilakukan dengan cara pendekatan persuasif.

Metode ini terlihat dapat memancing antusiasme masyarakat terhadap kegiatan PLBPM terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir dalam rembung desa. Namun, sangat disayangkan adanya keterbatasan tempat dalam pelaksanaan sosialisasi ini dan menyebabkan masyarakat desa yang hadir pun terpaksa harus dibatasi. Dalam rembung desa kali yang bertujuan untuk pembentukan LK dan penunjukan motivator desa dihadiri oleh Tim FKTD, Tim TPD, Camat Cijulang, Kepala Desa Cijulang dan tokoh masyarakat. Meskipun dengan keterbatasan tempat tersebut, rembung desa tetap berjalan dengan lancar sehingga dapat terbentuk LK dan terpilihnya motivator yang dapat mewakili aspirasi masyarakat.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa Cijulang, keikutsertaan masyarakat desa sangat aktif. Hal ini terlihat jelas pada setiap pertemuan, masyarakat selalu mengutarakan argumennya masing-masing agar dapat terakomodir didalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang diusulkan untuk menanggulangi permasalahan desa dalam rembung desa ini diantaranya: pembangunan penahan abrasi/kirmir, drainase dan gorong-gorong, jalan lingkungan, MCK, penyediaan sarana air bersih, Penanganan limbah rumah tangga, renovasi rumah penduduk serta penanaman



mangrove. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh dengan cara menentukan kegiatan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan membutuhkan penanganan yang segera, serta disesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelah dipilah-pilah, kegiatan yang akan dilakukan di desa cijulang adalah pembangunan turap/kirmir penahan abrasi sepanjang 116 meter, saluran drainase sepanjang 630 meter dan pembu-

atan jalan lingkungan sepanjang 100 meter. Pemerintah daerah kabupaten Ciamis menyediakan dana pendampingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLBPM pada Tahun 2006 - 2008. Pada tahun 2009, dana pendampingan dari daerah dialihkan untuk penanganan bencana alam gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten Ciamis. Partisipasi masyarakat desa Cijulang khususnya dusun Nusagede adalah berupa tenaga

melalui dukungan pikiran dalam perencanaan dan kerja bakti dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM, motivator desa menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan persuasif dan memberikan penjelasan mengenai kegiatan PLBPM.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan PLBPM yang telah dilakukan di desa Cijulang antara lain desa lebih tertata sehingga terwujudnya desa dengan lingkungan yang baik, bangunan fisik yang dibangun melalui kegiatan ini dapat menunjang perekonomian masyarakat, adanya pekerjaan alternatif bagi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik sehingga sedikit demi sedikit dapat memberi pembelajaran pada masyarakat agar memiliki keahlian tersendiri yang dapat menjadi modal untuk penghidupan kedepannya.

Tindaklanjut dari kegiatan PLBPM oleh masyarakat desa Cijulang khususnya masyarakat dusun Nusagede untuk menjaga dan memelihara fasilitas fisik yang telah terbangun melalui program PLBPM, adalah dengan melalui pengadakan gerakan - gerakan kerja bakti dalam rangka memelihara bangunan fisik yang diadakan setiap bulan melalui pembentukan kelompok kerja disetiap RT secara bergiliran. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Biodata Diri Penulis



JAJAT SUDRAJAT, SPI, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 27 Desember 1979 dengan pendidikan terakhir Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro-Semarang pada tahun 2005. Pengalaman Kerja antara lain selain sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM dari tahun 2006 dan sebagai Tenaga Ahli pada Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Legokjawa. Alasan serta motivasi menjadi TAP adalah ingin membangun daerah sendirinya, khususnya wilayah pesisir. Kesan selama menjadi TAP adalah kekompakan masyarakat dilapangan menjadi menu yang sangat spesial bagi TAP. Alamat rumah di Dusun Golempang Desa Ciliang, Kecamatan Parigi - Kabupaten Ciamis RT/RW.01/01 Kode Pos 46393, No.telp/HP : 081.312.75.83.83 E-Mail : jatstea@yahoo.co.id



YADI YOGASWARA, ST, dilahirkan di CIAMIS pada tanggal 03 Desember 1982, lulus SARJANA TEKNIK PLANOLOGI dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) - Bandung pada tahun 2006. Pengalaman kerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping PLBPM Tahun 2007 dan turut serta sebagai Tenaga Ahli Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Legokjawa. Alasan dan motivasi menjadi TAP adalah ingin menata lingkungan pesisir menjadi lebih baik dan teratur. Kesan selama menjadi TAP adalah banyak pengalaman baru yang ditemui di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan teori. Alamat rumah di Dusun Pamaganan Desa Karangbenda RT/RW.05/13, Kecamatan Parigi - Kabupaten Ciamis Kode Pos 46393 No.telp/HP : 0813.944.944.63 E-Mail : yad_yoga@yahoo.co.id



JODI SUJADI, ST, lahir dikota Banjar, dekat perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah pada tanggal 11 November 1977. Pendidikan terakhir Sarjana Teknik Sipil pada tahun 2004 dari Universitas Kristen Palangkaraya - Palangkaraya. Pengalaman kerja antara lain sebagai Tenaga Ahli Pendamping PLBPM Tahun 2009 dan sebagai Tenaga Ahli Pada Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan didesa Legokjawa. Penulis pernah menjadi Tenaga Teknis pada Perusahaan Pembibitan untuk Kegiatan Program Gerakan Nasional dan Rehabilitasi Hutan (GN-RHL) pada tahun 2005 - 2006 di Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan serta motivasi menjadi TAP adalah ingin membangun dan menata kawasan pesisir agar menjadi kawasan yang indah dan asri serta menjadi kawasan penyangga bagi kawasan di sekitarnya. Kesan selama menjadi TAP adalah sungguh sangat menyenangkan dan mendapatkan pengalaman berharga selama di lapangan. Alamat tempat tinggal di Jalan R. Dewi Sartika NO.19 RT/RW.01/06 Dusun Cibulan Kelurahan Banjar - Kota Banjar Kode Pos 46311 No.telp/HP : 081.349.234.567 E-Mail : jodisujadi@yahoo.com ●

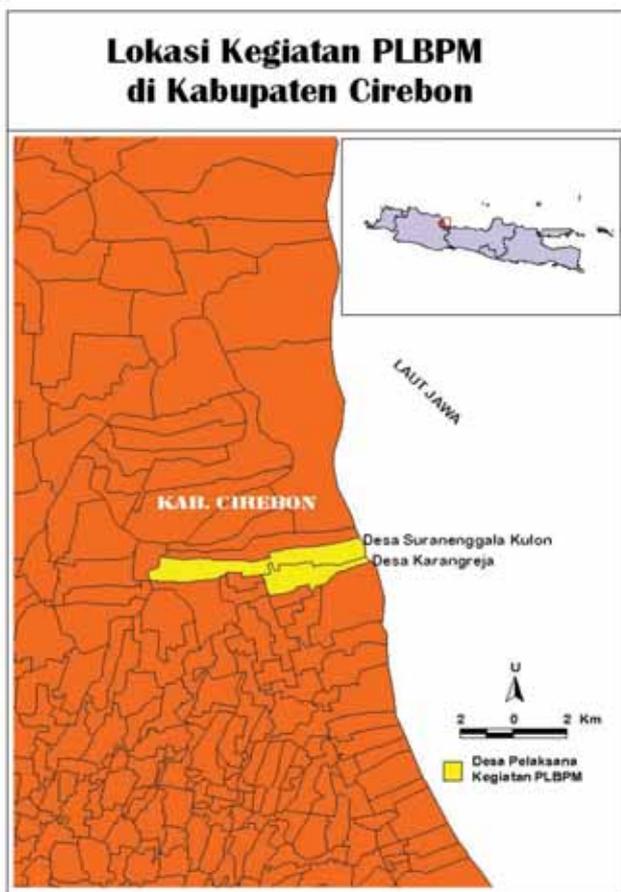


Bersama PLBPM Mengukir Pembangunan di Desa Pesisir Kabupaten Cirebon

Oleh: Ibnu Alwan, Ratno Septiady dan Rusnanto



Kabupaten Cirebon terletak di Pantai Utara bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang memiliki panjang garis pantai sepanjang 54 km ini, memiliki 25 desa pesisir yang terbagi dalam 8 kecamatan. Sebagai kabupaten yang memiliki wilayah dengan tipe dataran rendah dan tinggi, Kabupaten ini memiliki banyak potensi unggulan di bidang pariwisata dan pertanian. Kabupaten ini juga memiliki potensi perikanan yang cukup beragam. Lokasi tujuan wisata di kabupaten ini adalah peninggalan sejarah dan wisata belanja, seperti kompleks Makam Gunung Jati dan Sentra Batik Trusmi. Produk unggulan di bidang pertanian adalah mangga dan bawang. Produk unggulan di sektor perikanan berupa ikan segar serta hasil olahan seperti terasi dan kerupuk. Dengan keberadaannya yang sangat strategis di



Jenis Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program PLBPM di Kabupaten Cirebon	2007		2008		2009	
	Desa Suranenggala Kulon	Desa Karangreja	Desa Karangreja	Desa Karangreja	Desa Karangreja	Desa Karangreja
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	-	1 Paket
Penataan Pasar Ikan	-	1 Paket	-	-	-	-
a. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah	-	-	190 m	120 m	-	-
b. Pemasangan Paving block	-	-	441 m	180 m ²	-	-
c. Penataan Kios	-	-	10 Unit	12 Unit	-	-
d. Pembuatan Sumur	-	-	1 Unit	-	-	-
Pembangunan MCK	1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	-
Penanaman Tanaman Pantai	200 bgt	200 bgt	-	-	2.623 bgt	-
Pembuatan Gapura	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-
Pembuatan Papan Himbauan Pembangunan	3 Unit	4 Unit	-	-	-	-
Saluran Pembuang Air Limbah (SPAL)	1.455 m	1.190 m	870 m	137 m	-	-
Pembangunan Jalan Setapak (paving)	420 m	311 m	100 m	88 m	-	-
Rehab jalan setapak	-	-	-	-	261,5 m	-
Pembangunan TPS	1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	-
Pengaspalan Jalan	1.000 m	465 m	200 m	300 m	-	-
Rehabilitasi Rumah Warga Miskin / Jompo	20 Unit	18 Unit	9 Unit	5 Unit	-	-
Pembuatan Tempat Tambat Perahu	-	-	1 Unit	2 Unit	-	-
Pembangunan Rumah Contoh	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-

jalan pantura yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kabupaten ini sangat mudah untuk dicapai melalui jalur darat. Dari Jakarta, Anda bisa menggunakan bis ataupun kereta dengan tujuan Cirebon, ataupun kota-kota di Jawa Tengah/Jawa Timur, begitu pula sebaliknya.

Program PLBPM di Kabupaten ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Pada awal pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan di 2 desa yaitu Desa Karangreja dan Desa Suranenggala Kulon. Pada tahun 2008, kegiatan ini difokuskan hanya pada Desa Karangreja. Penentuan desa prioritas ini dilakukan pada musyawarah Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD) yang dikuasai Sekretaris Daerah Kab. Cirebon dan beranggotakan staf dari Dinas/SKPD terkait seperti BAPEDA, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Lingkungan Hidup Daerah, LPPM Universitas 17 Agustus Cirebon. Dikarenakan PLBPM merupakan program yang telah dilaksanakan pada beberapa tahun, maka diformulasikan

metode untuk menentukan desa pelaksana kegiatan selanjutnya dengan meninjau kembali hasil kegiatan pada tahun sebelumnya. Dari hasil kegiatan pada tahun 2007 dan 2008, dipilihlah lokasi yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Penilaian didasarkan pada kegiatan fisik yang dihasilkan, keterlibatan masyarakat dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari penilaian yang dilakukan terhadap hasil kegiatan pada tahun 2007, keterlibatan masyarakat di Desa Karangreja - Kecamatan Suranenggala sangat baik dan dapat dilihat dari dana swadaya untuk mendukung kegiatan ini mencapai 49,95% dari total dana yang diterima masyarakat. Pada tahun 2008, dana masyarakat yang disumbangkan untuk mendukung program ini sekitar 27,86% dari total dana yang diterima masyarakat. Kegiatan fisik yang dilaksanakan ternyata mampu menyerap tenaga kerja di desa hingga 4,7% dari jumlah total penduduk. Untuk TA. 2009, setelah dilakukan pembicaraan lebih lanjut, FKTD merekomendasikan dan menentukan lokasi pelak-

sanaan kegiatan PLBPM dilaksanakan di Desa Karangreja.

Desa Karangreja termasuk dalam wilayah Kecamatan Suranenggala. Luas Desa ini sekitar 140 ha. Desa ini terletak pada ketinggian 0 - 2 m dari permukaan laut. Untuk mencapai desa ini sangat mudah, karena terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu, dengan jarak sekitar 15 km dari Kota Cirebon. Pemukiman masyarakat di desa ini umumnya terpusat disekitar Jalur Pantura, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini terbuat dari tembok/bata dan sekitar 30% menggunakan bilik bambu tanpa ventilasi dan berlantaikan tanah. Kondisi infrastruktur pemukiman di desa ini tidak teratur. Di desa ini masih banyak ditemui



jalan desa yang terbuat dari tanah, sehingga susah dilalui ketika musim hujan. Saluran drainasepun masih belum tertata baik dan sebagian besar masih berbentuk galengan/saluran tanah. Jumlah penduduk desa ini adalah 3.895 jiwa. Masyarakat di desa ini 65% bekerja pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan dan sisanya bekerja di bidang pertanian, sektor formal/informal (PNS, Karyawan Swasta, dan buruh lainnya).

Kegiatan PLBPM di Desa Karangreja yang memasuki tahun ketiga ini dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan dan Motivator Desa sama pada tahun sebelumnya. Memang terjadi pergantian struktural yang disebabkan oleh salah satu pengurus yang mengundurkan diri akan tetapi tidak berdampak pada pelaksanaan

kegiatan. Cara yang ditempuh untuk sosialisasi PLBPM kepada masyarakat desa di lokasi ini adalah melalui forum rembung desa. Rembug desa ini dilaksanakan oleh Kuwu/Kepala Desa dan perangkatnya selaku *stake holder* setempat beserta Lembaga Kemasyarakatan "Bawal Jaya" selaku pelaksana kegiatan PLBPM. Pada setiap rembug desa tanggapan masyarakat sangat baik, berupa input saran dan masukan untuk kegiatan PLBPM di desanya. Masyarakat di desa ini bahkan menyampaikan kesanggupannya untuk membantu sesuai dengan kemampuannya, baik dalam bentuk dana, tenaga bahkan bantuan makan dan minum pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada jumlah dan kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan RT/RW setempat.



Motivator Desa sangat membantu dan dapat mewakili aspirasi masyarakat desa. Motivator Desa yang terpilih adalah tokoh muda yang dapat menggerakkan kegiatan di desanya, tidak hanya untuk kegiatan PLBPM saja tetapi juga kegiatan pembangunan desa lainnya. Permasalahan yang terangkat dalam penentuan kegiatan adalah menentukan lokasi kegiatan yang akan dikerjakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan dilaksanakannya survey mendetail untuk setiap kegiatan. Sebagai contoh misalnya untuk pembuatan jalan dilakukan survey dan analisa jumlah pengguna jalan, serta kemungkinan aktivitas dan akses yang lebih mudah untuk pembangunan jalan setapak tersebut, selanjutnya dibicarakan dengan pemilik tanah dan warga setempat, hingga akhirnya



diberikan izin. Untuk perbaikan rumah tidak layak huni, juga dilakukan survey untuk mengenai jenis pekerjaan/profesi, tingkat pendapatan, jumlah keluarga dan sarana yang ada di rumah-rumah yang diusulkan untuk diperbaiki. Kriteria tersebut selanjutnya dibicarakan kepada aparat desa, LK, Ketua RW/RT, dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Dengan anggaran yang terbatas tersebut, terlebih dahulu ditentukan jumlah dan dana yang disediakan untuk satu unit rumah yang akan diperbaiki.

Kegiatan yang diusulkan oleh seluruh masyarakat desa untuk kegiatan PLBPM T.A 2009 adalah pengaspalan/pengerasan jalan desa, pembuatan jalan setapak dengan, pembuatan/rehabilitasi saluran drainase dan penyediaan sarana-prasarana penataan pasar, agar dapat menjadi aset desa sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan desa.

Untuk mendukung pelaksanaan PLBPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menyediakan dana yang berasal dari APBD II, yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (T.A 2007) dan Rp. 40.000.000,- (T.A 2008 dan 2009). Untuk T.A 2007 dan 2008, dana tersebut dialokasikan pada kegiatan pembuatan gerobak sampah (4 unit), penanaman 200 batang pohon kelapa untuk penghijauan di sepanjang Sungai Karangsembung, pembuatan tanggul penahan tanah untuk sarana pendukung pasar ikan dan penanaman vegetasi pantai. Kegiatan PLBPM ternyata selalu mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon maupun SKPD lain dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM,



masyarakat berupaya untuk berpartisipasi melalui sumbangan tenaga dan bantuan dana spontan yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Beberapa warga bahkan merelakan lahannya digunakan untuk pembangunan sarana pendukung desa yang dibangun melalui kegiatan PLBPM. Antusiasme ini tidak terlepas dari peran motivator desa yang melakukan pendekatan pada sepele/tokoh masyarakat maupun pemuda-pemuda setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan PLBPM di desa target group adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Kondisi jalan yang lebih baik, kondisi pasar yang tertata rapi, drainase yang tertata baik dengan berkurangnya titik-titik genangan air akibat meluapnya air pada saat musim hujan dan kemudahan pendaratan ikan sebagai akibat dari kondisi tempat tambak perahu yang lebih baik merupakan manfaat nyata yang dapat langsung dilihat. Saat ini, Desa Karangreja menjadi salah satu wisata belanja dan banyak pembeli-pembeli ikan yang datang dari luar daerah untuk membeli komoditi ikan laut lokal yang berasal dari Cirebon Utara.

Untuk menjaga fasilitas yang telah terbangun, akan dibuat dan ditetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan dan pemanfaatannya. Melalui penerbitan aturan ini, diharapkan fasilitas yang telah dibangun dapat terpelihara baik dan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan. Pada masa mendatang Desa Karangreja diharapkan dapat menjadi desa yang mandiri. ●

Biografi

Tentang Penulis

IBNU ALWAN, A.Md dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 1985. Masa kecil hingga SMU dihabiskan di Cirebon. Melanjutkan studi pada tahun 2003 di Fakultas Biologi Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Mulai bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) untuk program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) pada tahun 2008. Keseharian yang dilakukan dalam program PLBPM adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat, mendampingi dalam penyusunan RAB, desain teknis dan membantu pengawasan kegiatan fisik. Kenikmatan terbesar yang diperoleh dari program ini adalah saat masyarakat mulai merasakan manfaat dari kegiatan PLBPM dan memahami pentingnya penataan infrastruktur pemukiman.

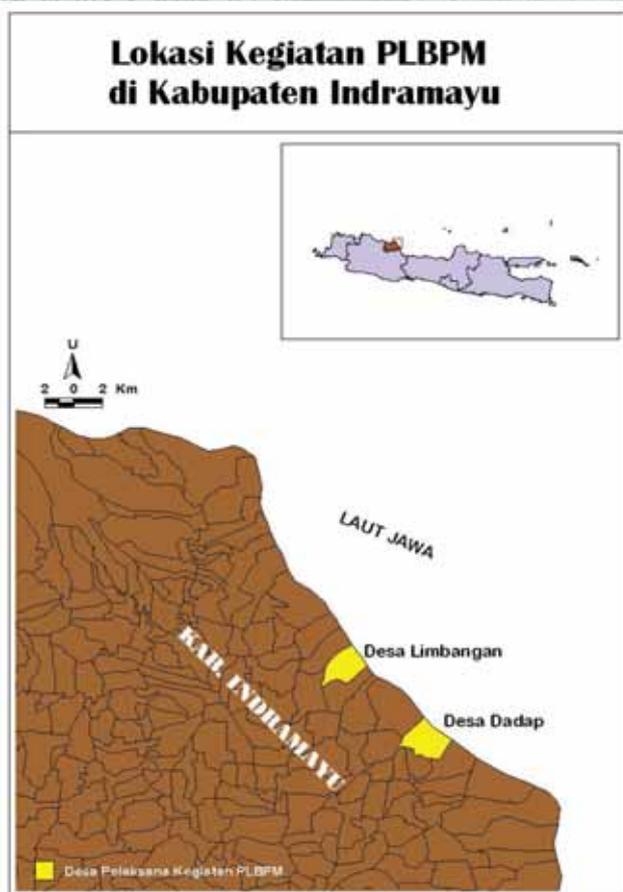
RATNO SEPTIADY, S.T. dilahirkan di Kuningan pada tanggal 06 September 1976. Melanjutkan studi di Universitas Merdeka Malang pada Fakultas Teknik Sipil dengan khusus Jurusan Struktur. Setelah lulus kuliah pada tahun 2001, penulis langsung bekerja di tambang pasir cuci PT Rejeki Karunia Alam sebagai Field Manager, akan tetapi hanya 1 tahun perusahaan tersebut mengalami pailit (bangkrut). Tak berselang lama, penulis bekerja pada perusahaan perbankan (Standard chartered Bank sebagai Asisten Manager Loan dan Tekstil PT. Setiatex Kusuma Jaya masing-masing selama 2 tahun) dan selanjutnya bekerja untuk PT. Ginta Perkasa Abadi selama 2 tahun dan PT. Bank Danamon Tbk, selama 1,5 tahun. Pada tahun 2009, bergabung menjadi TAP kegiatan PLBPM. Penulis menyukai pekerjaan ini karena merasa tergerak ingin berbagi ilmu dan pengalaman bekerja yang selama ini dimilikinya.

RUSNANTO, S.Pi dilahirkan di Cirebon pada tanggal 20 Maret 1976 dan masa kecil dihabiskan di Cirebon. Pada tahun 1999 melanjutkan kuliah di UNDIP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Perikanan. Bersamaan dengan menjalankan akritis kuliah, penulis bekerja untuk PT. SS Motor Yamaha Semarang sebagai Sales Counter (Senior Employee). Pada tahun 2002, penulis lulus dari kuliah dan bekerja untuk PT. Tunas Finance Cab. Cirebon sebagai Collection Head. Pada tahun 2002-2003, penulis bekerja untuk PT. Apex Pharma Indonesia sebagai Area Cirebon - Koordinator Medical Reprs. Tahun 2004-2008, penulis bekerja untuk PT. Pacific Indomas (cooking oil product) sebagai Sales Supervisor Area Purwokerto - Tegal/Pekalongan. Pada tahun 2008, penulis bergabung menjadi TAP dalam program PLBPM. Sebagai TAP, penulis bertugas dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dan membantu pengawasan kegiatan fisik. Jerih payah terbayar lunas ketika masyarakat mulai merasakan manfaat dari kegiatan PLBPM dan masyarakat merasakan begitu pentingnya penataan infrastruktur pemukiman. ●



Membangkitkan Ekonomi Desa : Metamorfosa Lokasi PLBPM menjadi Lokasi Tujuan Wisata Kuliner

Oleh: Oni, S.Hut.



Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di jalur PANTURA (Pantai Utara) Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 114 km, dan di sepanjang garis pantai tersebut terdapat 36 desa pesisir yang tersebar pada 11 kecamatan.

Potensi unggulan di kabupaten ini adalah produksi pertanian, namun sektor kelautan dan perikanan juga tidak kalah saing dalam menyumbangkan potensinya. Jika Anda mau berkunjung ke kabupaten ini, anda dapat menggunakan Kereta Api dari Jakarta menuju Jatibarang dengan waktu tempuh selama ± 3 jam, kemudian dilanjutkan menggunakan mobil selama 30 menit ke Kota Indramayu. Tetapi anda juga bisa berkunjung dengan menggunakan mobil sambil menikmati pemandangan di sisi jalur pantura selama 4 jam.

Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2008. Dalam penentuan desa target group, FKTD



yang telah dibentuk melakukan identifikasi desa-desa pesisir yang memiliki 3 pokok permasalahan, yaitu degradasi lingkungan, kondisi infrastruktur permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pada setiap pokok masalah di pertajam dengan point-point penilaian untuk dilakukan scoring/nilai. Maka dari hasil scoring tersebut, terpilih desa-desa yang memiliki permasalahan sehingga dijadikan Bakal Calon Lokasi PLBPM. Pada tahun 2006 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 2 desa, yaitu; Desa Dadap dan Limbangan Kecamatan Juntinyuat. Namun untuk kegiatan tindak lanjut pada tahun berikutnya hanya dilakukan di Desa Limbangan.

Desa Limbangan merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Juntinyuat. Luas desa ini adalah 263,1 Ha atau 2,63 km² yang terletak pada ketinggian 1-2 meter dari permukaan laut. Permukiman masyarakat di desa ini pada umumnya menyebar di wilayah pesisir. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini terdiri dari 80 % bangunan permanen dan 20% semi permanen. Sedangkan kondisi infrastruktur permukiman di desa ini sudah tertata namun masih minimnya sarana dan prasarana penunjang permukiman seperti jalan yang masih tanah sehingga perlu dilakukan pengaspalan jalan dan penerasan jalan setapak antar blok. Jumlah penduduk desa ini adalah 3.657 jiwa dan terdiri dari 816 KK. Masyarakat di desa ini 81 % bekerja sebagai nelayan tradisional, 20 % buruh swasta sebesar, dan sebagian kecil

masyarakat bekerja di bidang pertanian, pengolahan perikanan serta pedagang. Potensi unggulan di desa ini adalah Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya Payau, Pertanian Padi, Pengolahan Perikanan.

Mekanisme proses pembentukan LK dan penunjukan motivator desa di desa ini adalah melalui rembug desa. Lembaga Masyarakat (LK) yang ditunjuk merupakan masyarakat yang sudah mapan dalam organisasi dan teruji dalam manajemen seperti di Koperasi Perikanan Laut sejenis KUD pada umumnya. Setelah terbentuknya LK, maka masyarakat memberikan nama untuk Lembaga tersebut adalah "Mina Sejati". Sedangkan pemilihan motivator desa dilakukan dengan menajring tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wawasan dalam organisasi dan memiliki track record baik dimasyarakat.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa ini, partisipasi masyarakat desa sangat aktif, hal ini dapat terlihat dengan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan usulan-usulan kegiatan untuk membangun desanya. Dalam rembug desa ini, motivator Desa juga ikut serta dalam menajring aspirasi masyarakat yang kemudian dipilah-pilah sehingga dapat tergambar apakah usulan tersebut kebutuhan atau hanya bersifat keinginan masyarakat. Kemudian peran motivator desa selanjutnya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan PLBPM. Karena banyaknya usulan dari masyarakat dalam kegiatan ini, sedangkan alokasi dananya terbatas, maka kami harus melakukan rembug desa berjenjang dan berkali-kali. Maksudnya dari istilah ini adalah rembug desa tahap awal membahas secara luas, dilanjutkan rembug yang materinya semakin terfokus sehingga mengerucut menjadi program prioritas PLBPM. Dari hasil rembug desa tersebut, usulan kegiatan yang dominan dan prioritas yaitu; penanganan abrasi pantai, penanganan abrasi sungai, penghijauan pantai, prasarana permukiman, penerasan jalan desa, jalan setapak, rehabilitasi saluran drainase, MCK, rehabilitasi rumah, penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) baik permanen ataupun nonpermanen. Kegiatan-kegiatan PLBPM di Kabupaten Indramayu tertera pada tabel berikut :

Tabel 1. Kegiatan PLBPM Tahun 2006 - 2008 Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Kegiatan PLBPM	2006		2007		2008	
	Desa Dadap		Desa Limbangan			
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket	-	-	-
1. Pembangunan Rumah Contoh PLBPM	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0
2. Rehabilitasi Penahan Abrasi Pantai	0	650 meter	0	0	0	0
3. Rehabilitasi Rumah Miskin	29 rumah	40 rumah	0	0	0	0
4. Kade/tambat Perahu	0	140 meter	135 meter	200 meter	0	0
5. Penerasan Jalan Lingkungan (macadam)	0	1.532 mtr	0	0	0	0
6. Penerasan Jalan Pemukiman (pavingblock)	2.000 mtr	0	0	0	0	0
7. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	3 unit	2 Unit	2 unit	0	0	0
8. Tong Sampah (Uk. ½ drum)	0	0	75 unit	50 buah	0	0
9. Gerobak Sampah (dorong/roda 2)	0	0	4 unit	0	0	0
10. Papan Himbaunan Sanitasi/ Lingkungan	3 buah	3 buah	2 buah	0	0	0
11. Pembuatan Doking Perahu Nelayan	0	0	2 unit	0	0	0
12. Pembuatan Gapura Desa Wisata PLBPM	0	0	0	1 unit	2	0
13. TPT (tembok penahan tanah) saluran	0	0	0	524 meter	0	0
14. Pembuatan gorong-gorong	1 unit	0	0	2 unit	0	0
15. Pembuatan MCK dan instalasi air	3 unit	2 Unit	1 unit	0	0	0
16. Rehabilitasi /Penanaman Mangrove	10.104 btg	5.000 btg	5.000 btg	200 btg	200 btg
17. Penanaman Vegetasi pantai/Ketapang	1.000 btg	400 btg	0	0	0
18. Pembuatan saluran permukiman/drainase	0	2.211 mtr	420 meter	0	0

Peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM ini antara lain: gotong royong pada setiap kegiatan, sumbangan makan dan minum alakadarnya, serta mendukung setiap kegiatan-kegiatan PLBPM. Motivator di desa ini mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan teladan kepada masyarakat dengan terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong pada setiap RT / blok dengan penjadwalan harian sesuai lokasi, selain itu motivator ini juga mampu membangkitkan swadaya masyarakat seperti sumbangan bahan material.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan ini adalah sedikit teratasi masalah abrasi pantai di desa ini; sarpras kegiatan nelayan kecilpun semakin memadai dengan tersedianya kade dan doking perahu; terciptanya lingkungan permukiman yang lebih

tertata dan bersih dengan adanya peningkatan sanitasi lingkungan seperti drainase, MCK dan TPS; mobilitas masyarakat yang semakin mudah dengan adanya pengaspalan jalan dan pembangunan jalan lingkungan; serta terbukanya peluang usaha yang berbasis sumberdaya seperti wisata kuliner dan wisata bahari. Dari beberapa manfaat tersebut sedikit demi sedikit akan mampu memudarkan kesan wilayah pesisir yang kumuh serta diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi sebuah desa yang aman dan nyaman sebagai tujuan wisata bahari.

Tanpa terasa hasil-hasil kegiatan PLBPM yang didukung dengan peran aktif masyarakat di Desa Limbangan mampu menjadikan sebuah desa dengan wisata kuliner Ikan Bakar yang biasa disebut "Mina Ayu" yang diresmikan oleh Bupati Indramayu. Sehingga wisata kuliner ini

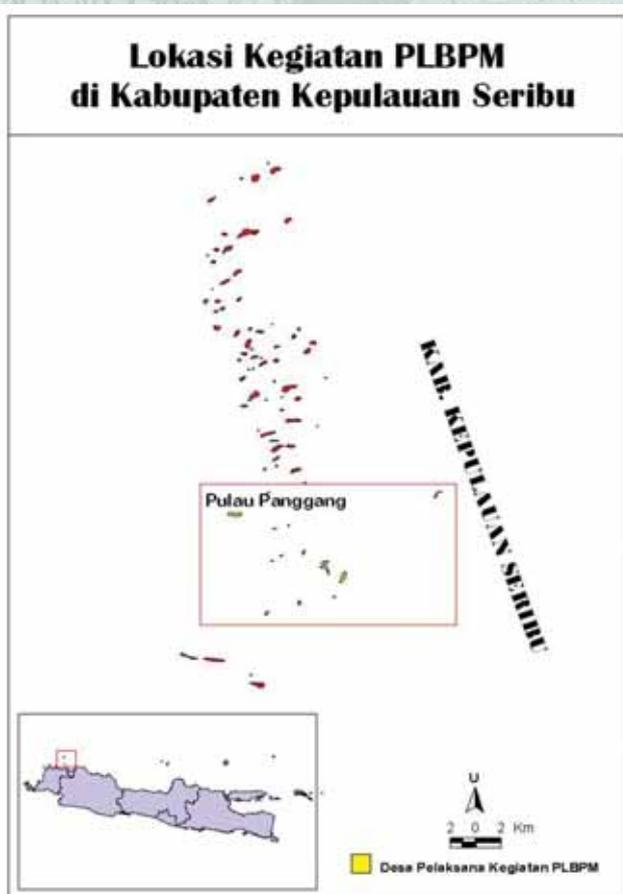
Monevarelaa Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM



telah menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang/hari.

Setelah diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) No. 3 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, telah direspon oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Kimpraswil Jawa Barat dijadikan model penataan desa pesisir di Propinsi Jawa Barat. Dan pada tahun 2009 dilakukan Kajian Pengembangan Desa Wisata Pesisir Limbangan Kecamatan Juntinyuat. Proses ini sedang diusulkan mulai tahun 2010-2014 sebagai desa percontohan untuk penataan desa pesisir di Jawa Barat. ●





Kepulauan Seribu

K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir

Oleh: M. Luthfi Aminullah, Ahmad Haerudin dan Halimah, TS



Kepulauan Seribu resmi berstatus Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setelah dikeluarkannya PP nomor 55 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kabupaten ini berlokasi di tengah-tengah laut dengan luas 11 kali daratan Jakarta, dimana luas daratan mencapai 897,71 Ha dan luas perairan mencapai 6.997,50 km². Dari semua pulau yang dimiliki, hanya 11 pulau yang berpenghuni dan memiliki potensi unggulan dibidang usaha perikanan dan pariwisata. Untuk menuju kabupaten ini dapat dijangkau dengan menggunakan kapal laut (ojek) dari Muara Angke (Jakarta Utara) selama 2-3 jam ke pusat pemerintahan di Pulau Pramuka.

Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendapat kesempatan untuk menata lingkungan desa pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang dilakukan di satu lokasi. Dalam proses pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan, tim Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD), Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dan Tim Pengendali Daerah (TPD) melakukan inventarisasi dan indentifikasi masalah-masalah atau isu-isu terkini yang ada pada masing-masing

Jenis Kegiatan PLBPM Tahun 2009 di Pulau Panggang, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Satuan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket
Pembuatan Tempat Penampungan Ikan Konsumsi (TPIK)	8x17 m
Perbaikan Jalan Setapak di Lingkar Pantai	200 m
Penanaman Pohon Pelindung Pantai	800 pohon
Perbaikan Gorong-gorong	100m
Pembuatan Tanggul Dermaga	17m ²
Perbaikan Dermaga	8x2m



Pulau. Melalui proses tersebut disepakati bahwa Pulau Panggang terpilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dengan pertimbangan bahwa penduduk di pulau ini mayoritas (80%) bermata pencaharian sebagai nelayan dan merupakan pulau terpadat yang perlu ditata akibat degradasi lingkungan pesisir. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dipertimbangkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.

Pulau Panggang merupakan bagian dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang mempunyai luas sekitar 9 Ha, dengan topografi berupa dataran rendah. Untuk menuju ke pulau ini dapat ditempuh dengan menggunakan kapal laut dari Muara Angke (Jakarta Utara) selama 2-3 jam. Pemukiman masyarakat terpusat di pesisir pantai dan sudah



banyak rumah dengan bangunan permanen, namun belum tertata sehingga terlihat kumuh dan tidak teratur. Di pulau ini sulit sekali mendapatkan air bersih untuk diminum.

Tahapan awal dari kegiatan PLBPM di Pulau Panggang adalah dilakukannya rembuk desa yang bertujuan membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang mewakili berbagai komponen masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, Dewan Kelurahan (Dekel) dan tokoh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada saat pembentukan LK adalah masih ada sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan PLBPM ini merupakan proyek besar dan memberikan keuntungan besar pula. Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat diberikan penjelasan oleh Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang bahwa kegiatan PLBPM ini adalah benar-benar murni dari kita, oleh kita dan untuk kita, sehingga masyarakat harus



gawasan, menunjang pembangunan infrastruktur tersebut dan mempermudah dalam proses perizinan. Pemerintah Daerah juga memberikan tanah seluas 16x8 m bekas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk dijadikan sebagai Tempat Penampungan Ikan Konsumsi (TPIK). Disamping itu juga sudah banyak program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masuk ke Pulau Panggang.

Manfaat dari kegiatan PLBPM yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk secara mandiri merencanakan, dan melaksanakan kegiatan penataan lingkungan desa. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih sadar arti penting penataan lingkungan pemukiman yang dapat mem-

berperan aktif untuk menata pulaunya sendiri.

Penentuan kegiatan prioritas dilakukan melalui rembuk desa dengan disertai penjelasan bahwa dana PLBPM diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan desa. Dengan terlebih dahulu menyusun Rencana Tata Ruang Pulau dan Rencana Zonasi kawasan pesisir sebagai arahan pembangunan Pulau Panggang selama 5 tahun yang akan datang serta disepakati oleh masyarakat. Untuk mewujudkan impian tersebut masyarakat telah sepakat dengan visi untuk mewujudkan kawasan pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Peran serta Pemerintah Daerah pada kegiatan ini berupa pendampingan, pen-



berikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat pulau. Perencanaan kegiatan dengan rembuk warga serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat pulau. Pembangunan Tempat Penampungan Ikan Konsumsi (TPIK) dan jalan setapak di lingkar pulau dapat memudahkan masyarakat dalam meningkatkan mobilitas perekonomiannya.

Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM ini, masyarakat di Pulau Panggang sepakat untuk membuat Peraturan Pulau dan sepakat untuk mengumpulkan dana sukarela perbulan untuk melakukan perawatan infrastruktur. ●



Biografi

Sekilas Tentang Penulis



AHMAD HAERUDIN, Amd., dilahirkan di Pulau Panggang, Jakarta pada tanggal 4 juli 1983. Sepanjang hidupnya dibesarkan di Kepulauan Seribu, serta pendidikan dasar dari SD, SMP, dan SMA. Setelah itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Kota Bogor pada Jurusan Manajemen Bisnis Perikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan cita-cita mengembangkan dan memajukan kalangan yang termarjinalkan (nelayan kecil). Pekerjaan sebelum menjadi TAP adalah pendamping atau fasilitator PKSPL-IPB yang ditempatkan untuk mendampingi masyarakat Pulau Panggang dalam Program Sea Farming.

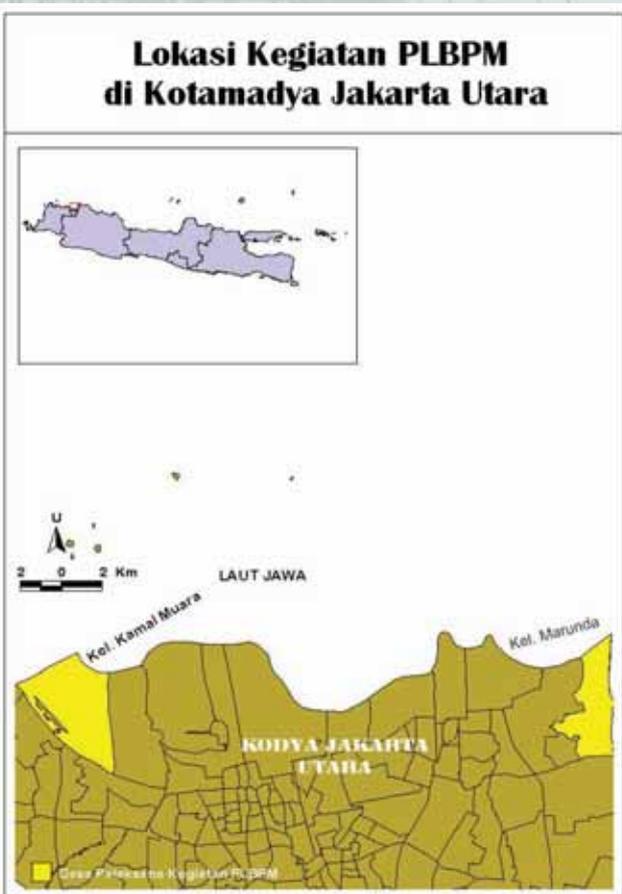


HALIMATUSSADIAH, Amd, dilahirkan di Pulau Panggang, Jakarta pada tanggal 13 Juni 1982 adalah anak pertama dari tujuh bersaudara dan merupakan Anak Pulau Seribu asli yang akan hidup untuk mengembangkan dan memajukan pulau ini. Setelah menempuh pendidikan SD sampai SMA di Pulau kemudian melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Jurusan Manajemen Kehutanan. Setelah menamatkan kuliah dan kembali ke pulau penulis merasakan kehidupan masyarakat nelayan di pulau semakin susah karena terbatasnya sumberdaya alam dan penurunan hasil penangkapan ikan Kemudian penulis bekerja sebagai Tenaga Pendamping Teknis (TPT) di Suku Dinas Perikanan Kepulauan Seribu, dan menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada kegiatan PLBPM.



MUHAMAD LUTHFI AMINULLAH, Amd., dilahirkan di Pulau Panggang, Jakarta pada tanggal 5 Desember 1985. Masa kecil hingga SMA dihabiskan di Pulau Panggang, dan kemudian melanjutkan kuliah pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB pada tahun 2003. Pada tahun 2006 penulis berhasil lulus dan memperoleh gelar Amd. Sebelum menjadi TAP PLBPM penulis pernah bekerja di PT.Lautan Bahari Sejahtera sebagai Quality Control (QC), PKSPL-IPB sebagai Tenaga Pendamping (TP) masyarakat untuk pengembangan rumput Laut. Penulis tertarik menjadi TAP PLBPM karena ingin mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menata lingkungan tempat tinggalnya sehingga image pesisir tidak lagi kumuh dan terbelakang. ●





Jakarta Utara

K O T A M A D I A



Merias Wajah Marunda dan Kamal Muara



Pada masa lalu, Kotamadya Jakarta Utara dikenal sebagai pusat pertumbuhan Batavia yang sekarang dikenal sebagai DKI Jakarta. Pada masa itu, muara Sungai Ciliwung merupakan bandar pelabuhan Kerajaan Tarumanegara dan dipertegas dengan keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa, yang pada saat itu merupakan pelabuhan terpenting yang menjadi simpul utama aktivitas sosial dan ekonomi di Nusantara. Selain pelabuhan Sunda Kelapa, menara Miring, Gedung VOC, Gereja Tugu, Mesjid Al-Alam, Rumah Si Pitung dan Masjid Luar Batang merupakan obyek wisata sejarah yang perlu di kunjungi jika Anda kebetulan berkesempatan mengunjungi Kodya ini

Kotamadya Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51 Km² dengan kondisi daratan membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke laut antara 4-10 km. Ketinggian Kodya ini dari permukaan laut berkisar antara 0 - 20 meter. Kotamadya ini memiliki pantai beriklim panas,

Jenis Kegiatan PLBPM di Kotamadya Jakarta Utara TA 2006

No	Kegiatan	2006	
		Kel. Marunda	Kel. Kamal Muara
1.	Perbaikan jalan lingkungan	2.800 x 1,2 m	-
2.	Peningkatan jalan beton	160 x 1,2 m	-
3.	Penanaman pohon mangrove	80.000 pohon	41.000 pohon
4.	Penanaman pohon bintang	3.000 pohon	-
5.	Renovasi rumah nelayan	40 unit	-
6.	Pembuatan sumur bor	-	1 unit
7.	Pembangunan balai pertemuan nelayan	-	1 unit

Sumber : Data Primer, 2008

dengan suhu rata-rata 27^o C dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm. Dengan letak yang demikian itu, potensi perikanan dan kelautan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sayangnya, penataan ruang di sepanjang pesisir utara Jakarta buruk.

Pencemaran yang cukup berat terjadi di perairan Teluk Jakarta sebagai akibat buangan limbah permukiman dan industri di wilayah Jabotabek. Kondisi ini menyebabkan semakin jauhnya daerah tangkapan ikan. Bahkan perkembangan terakhir, adanya kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta telah mengancam eksistensi nelayan dan petambak yang ada di wilayah ini. Di Kodya ini terdapat 6 kecamatan, yaitu Penjaringan, Kelapa Gading, Koja, Cilincing, Tanjung Priok dan Pademangan.

Permasalahan pencemaran dan degradasi lingkungan menjadi salah satu alasan mengapa Kodya Jakarta Utara mendapat bantuan untuk merehabilitasi dan menata lingkungannya melalui kegiatan PLBPM. Dari hasil survey dipilih dua desa yaitu Kelurahan Marunda di Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Kamal Muara yang masuk wilayah Kecamatan Penjaringan. Permasalahan utama di Marunda adalah pencemaran lingkungan karena sampah. Kelurahan yang dikelilingi pabrik-pabrik serta adanya Kawasan Berikat Nusantara ini, ternyata menyisakan rumah-rumah sederhana dengan sampah yang berserakan dimana-mana. Permasalahan lainnya yang ditemui di kelurahan ini adalah degradasi ekosistem pesisir akibat



tingginya tingkat abrasi dan kerusakan ekosistem pesisir. Kondisi infrastruktur permukiman yang cukup memprihatinkan menjadi salah satu bahan pertimbangan terpilihnya kedua desa tersebut. Sebagian penduduk di kedua kelurahan masih mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utamanya khususnya sebagai nelayan tradisional. Semakin jauhnya daerah tangkapan akibat pencemaran dan memburusnya harga solar semakin meningkatkan kemiskinan di kedua kelurahan tersebut.

Untuk mencapai kedua lokasi, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Kelurahan Marunda dapat dicapai melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Cakung atau pintu tol Tanjung Priok, kemudian melalui jalan Tanjung Priok-Cilincing untuk menuju lokasi. Kondisi jalan menuju Kelurahan Marunda sudah relatif baik,



hanya di beberapa lokasi sering terjadi kemacetan yang cukup panjang mengingat jalur ini sering melintas truk-truk dengan tonase besar. Sedangkan untuk menuju Kelurahan Kamal Muara dapat menggunakan Jalan Tol Bandara dan keluar di pintu tol Kamal. Selanjutnya dari pintu tol tersebut menuju ke lokasi melalui jalan yang kondisinya relatif baik.

Pada tahun 2006, jumlah penduduk Kelurahan Marunda sebanyak 2.876 jiwa yang terbagi menjadi 574 KK. Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Kamal Muara pada tahun yang sama sebanyak 4.768 jiwa yang terbagi ke dalam 875 KK. Berdasarkan jenis mata pencahariannya, sebagian besar penduduk di kedua lokasi sebagai nelayan baik nelayan tangkap, nelayan bagan, nelayan sero laut, nelayan kerang hijau, dan petani tambak.

Permasalahan sampah yang ada di Marunda merupakan akibat dari perilaku masyarakat yang tidak mengelola sampahnya dengan baik. Permasalahan ini dimungkinkan karena produksi sampah yang semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan jumlah tempat penampungan-

nya. Akibatnya laur menjadi pilihan sebagai tempat pembuangan. Sampah yang berserakan membuat desa tampak kumuh, penyakit kulit dan penyakit lain seperti diare, muntaber banyak di derita masyarakat di wilayah ini. Oleh karena itu prioritas kegiatan disini adalah memperbaiki kualitas lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu permasalahan yang cukup menonjol di Marunda adalah masih buruknya kondisi jalan lingkungan dan sebagian rumah warga. Perbaikan jalan lingkungan dan peningkatan jalan beton, serta renovasi rumah warga yang kondisinya tidak layak huni juga menjadi prioritas kegiatan yang dilakukan. Masalah lain yang dialami di kedua lokasi ini adalah degradasi lingkungan pesisir yang ditandai dengan tingginya abrasi pantai sebagai akibat rusaknya hutan mangrove. Untuk itu, kegiatan PLBPM yang dilaksanakan difokuskan untuk dapat memperbaiki ekosistem pesisir yaitu dengan melakukan penanaman mangrove dan pohon bintang. Penanaman vegetasi pantai tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat abrasi yang terjadi. Sedangkan untuk

Morosekelua Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Kelurahan Kamal Muara peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilakukan dengan pembuatan sumur bor dan membangun balai pertemuan warga.

Pelaksanaan kegiatan di kedua lokasi mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Sebagian besar aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan PLBPM. Mereka bergotong royong melakukan pembangunan sarana fisik dan penanaman vegetasi pantai dengan ongkos harian yang tidak penuh. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat menginginkan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan ikut berpar-

tisipasi, masyarakat akan merasa memiliki sarana fisik yang telah dibangun. Sehingga dengan sendirinya mereka akan menjaga dan memeliharanya.

Masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini. Perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang 3.800 m, telah memberikan nuansa permukiman yang berbeda dari sebelumnya. Pembangunan sumur bor di Kelurahan Kamal Muara diakui sangat membantu warga yang selama berkecenderungan dalam penyediaan air bersih. Keberadaan balai pertemuan nelayan telah



dimanfaatkan warga di kedua kelurahan sebagai wahana untuk melakukan berbagai aktivitas warga. Masyarakat juga sudah mulai menyadari akan pentingnya memelihara ekosistem pesisir untuk mencegah terjadinya abrasi.

Dampak tidak langsung PLBPM dapat dirasakan pemerintah daerah setempat dalam rangka memajukan wisata bahari di wilayah Jakarta Utara. Kegiatan PLBPM memotivasi masyarakat untuk menjaga dan mengelola lingkungannya terutama lingkungan pesisir, sehingga potensi wisata bahari dapat dikembangkan. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat juga dapat diperoleh dengan adanya kegiatan wisata bahari yang baru melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. ●





Batang

K A B U P A T E N



Menata Lingkungan Desa Pesisir Kabupaten Batang

oleh: M. Zaqqi Abdi, Dadit Saki Ardi dan Ananto Pratikno



Tentunya Anda tidak asing lagi mendengar nama Kabupaten Batang, bukan? Kabupaten ini adalah salah satu kabupaten di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di provinsi Jawa Tengah, memiliki panjang garis pantai 38,750 km dan memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 139 desa dan 9 kelurahan, dimana terdapat 17 desa/kelurahan yang terletak di sepanjang garis pantai. Potensi unggulan yang dimiliki adalah produk emping, madu, ikan asin dan galangan kapal perikanan. Sangat mudah untuk mengunjungi Kabupaten Batang dari Jakarta. Jika menggunakan jalur udara, Anda dapat menggunakan pesawat menuju ke kota Semarang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 2 jam dari kota tersebut. Alternatif lain adalah dengan jalur darat. Anda dapat menggunakan kereta api menuju ke stasiun Pekalongan selama ± 6 jam, kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum menuju ke kabupaten ini selama 20 menit.



lingkungan permukiman, dan bangunan rumah lokasi pelaksanaan. Proses identifikasi ini menggunakan metode RRA (*Rapid Rural Assessment*) dan proses analisis penilaian pada skala prioritas dengan melihat dan menimbang permasalahan, potensi, kebutuhan, dan manfaat ditinjau dari lingkungan/ekosistem pesisir, prasarana permukiman, dan pembangunan rumah.

Untuk menentukan penerima program PLBPM TA 2009, kegiatan identifikasi penentuan desa lokasi pelaksanaan dilakukan kembali. Tenaga Ahli Pendamping (TAP) melakukan survey di 13 desa pesisir yang ada di Kabupaten Batang. Survey difokuskan pada 3 (tiga) issue penting diantaranya lingkungan pesisir, sarana prasarana lingkungan dan permukiman serta kondisi ekonomi masyarakat. Untuk isu mengenai lingkungan pesisir, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejadian bencana alam pesisir dan tingkat degradasi lingkungan ekosistem pesisir. Untuk isu mengenai sarana prasarana lingkungan dan permukiman, hal yang diperhatikan seperti tambatan kapal, kondisi air bersih, saluran air (*drainase*), sarana prasarana pengelolaan sampah dan, akses jalan. Dan yang terakhir, untuk isu terkait kondisi ekonomi masyarakat, hal yang diperhatikan yaitu mata pencaharian, penghasilan rata-rata penduduk dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil skoring tertinggi dengan indikator terbesar tingkat kerusakan akibat degradasi lingkungan, Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) menetapkan kembali Desa Kedungsegog, Kecamatan Tulis sebagai desa lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM..

Pada tahun 2008, Kabupaten Batang mendapatkan kesempatan menata desa pesisirnya melalui program kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM), yang dilaksanakan di dua desa pesisir yaitu di Desa Kedungsegog dan Desa Sengon. Untuk kegiatan PLBPM tahun 2009 ini, lokasi pelaksanaan masih dilakukan di dua desa tersebut, namun karena yang diminta hanyalah satu desa, maka harus dilakukan pengurangan dan identifikasi yang lebih detail. Proses identifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi masalah prioritas berkaitan dengan aspek lingkungan/ekosistem pesisir, kondisi

petani dan nelayan. Selain itu, masyarakat di desa ini cenderung memiliki semangat bekerja yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun masih dalam keterbatasan. Kedua aspek tersebut membawa dampak yang baik pada perkembangan perekonomian di desa ini. Untuk menunjang perihal tersebut, perlu diadakannya peningkatan infrastruktur seperti peningkatan akses jalan.

Kehidupan adat istiadat Desa Kedungsegog tergolong masih kental dengan ciri masyarakat pesisirnya. Masyarakat desa ini juga masih taat pada ajaran agama dalam seluruh kehidupannya. Secara umum karakteristik sosial budaya masyarakat desa ini sudah bergeser dari masyarakat sosial (*gemeinschaft*) ke masyarakat individual (*gesellschaft*). Semula kehidupan masyarakat diwarnai rasa kekeluargaan bersifat



batiniyah kekal, serta jauh dari rasa pamrih ekonomi. Sekarang masyarakatnya telah diwarnai dengan hubungan-hubungan spasial yang bersifat lahiriah, sekunder, kontraktual dan diwarnai dengan perhitungan-perhitungan untung rugi. Namun demikian, masyarakat di desa ini masih rasa kekeluargaan, gotong royong dan cenderung masih taat pada pemimpin formal (Kepala Desa) dan pemimpin non formal (kyai atau ustadz). Mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini dalam bentuk permanen dan semi permanen dengan kondisi infrastruktur permukiman di desa ini tidak teratur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang



permukiman seperti jalan, air bersih, sanitasi, sarana penyeberangan dan tambatan perahu.

Cara yang ditempuh untuk memperkenalkan PLBPM kepada masyarakat desa di lokasi pelaksanaan adalah melalui musyawarah desa dan diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*). Warga Desa Kedungsegog menyambut dengan baik kegiatan ini. Hal ini terlihat dengan kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan rembung desa. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam menyusun dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator dilakukan secara musyawarah dan diputuskan dengan suara terbanyak. Diharapkan hasil rembung ini dapat

mewakili aspirasi seluruh warga desa ini. Dalam penyusunan rencana kegiatan PLBPM 2009, terdapat usulan dari salah satu kelompok warga yang menghendaki programnya dimasukkan ke dalam program kegiatan PLBPM. Namun karena usulan tersebut tidak sesuai dengan prinsip

rapat koordinasi antar instansi. PEMDA juga menyediakan alokasi dana pendamping yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang. Program lain yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu mengadakan program penanaman mangrove di pesisir desa Kedungsegog yang berasal

pengarahan pada warga tentang betapa pentingnya masyarakat berperan dalam merencanakan pembangunan desanya sendiri. Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat. PLBPM membuat masyarakat sadar

lebih memahami tentang hidup sehat dan bersih. Relokasi rumah dari tepian pantai membuat warga merasa lega atas kekhawatirannya terhadap abrasi. Adanya pemasangan trukuk bambu dan penanaman mangrove yang telah berangsur-angsur mengurangi degradasi pesisir.

Tabel 1. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada PLBPM T.A 2009

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN
I	PERBAIKAN EKOSISTEM		
	Penanaman ketapang	bt	1,180
	Upah tanam, langsir dan Acir	bt	1,180
II	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR		
	1. Sarana Prasarana Air Bersih		
	- Tandon Induk Air bersih	unit	1
	- Tandon distribusi	unit	2
	- sumur bor	unit	1
	2. Pekerjaan Pavingisasi	paket	1
	3. Pekerjaan Persampahan		
	Bak sampah induk	Unit	1
	Bak sampah penampung	Unit	2
	Tempat sampah perumahan	bh	146
	Gerobag sampah	Unit	2
	4. Pekerjaan Saluran Drainase	paket	1
	5. Pekerjaan Tambat Kapal	Unit	2
	6. WC Umum	Unit	1
	III	TATA RUANG	
Perumusan PERDES		Paket	1
Papan Peta Zonasi		bh	1
Papan Peringatan		bh	3
	Penyusunan RTRW – Desa	Paket	1

PLBPM dan manfaatnya tidak dapat dirasakan seluruh warga. TAP mencoba memberikan pemahaman mengenai konsep PLBPM dan skala prioritas atas usulan warga. Dalam musyawarah tersebut tersusun jenis kegiatan PLBPM untuk TA 2009 seperti tercantum pada Tabel 1.

Pemerintah Kabupaten Batang melalui FKTD berperan aktif dalam kegiatan pendampingan, pengawasan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program. Selain itu, membantu mengatasi permasalahan yang timbul melalui

dari Perhutani, dan pengaspalan jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kedungsegog. Melalui keputusan Bupati, perairan laut Roban Desa Kedungsegog ditetapkan sebagai zona penangkapan tradisional dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Masyarakat Roban Desa Kedungsegog berpartisipasi dengan memberikan pemikiran dan tenaganya dari penyusunan rencana kegiatan hingga proses pelaksanaan kegiatan. Motivator desa membangun partisipasi masyarakat melalui

Tabel 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada PLBPM T.A 2008 dan 2009

KEGIATAN PLBPM	2008	2009
Penanaman ketapang	400	1.356
Penanaman cemara	600	-
Penanaman Mangga	500	-
Sarana Prasarana Air Bersih	1 sumur bor	1 paket
Sarana air bersih (tandon induk & distribusi)	-	1 paket
Pekerjaan Pavingisasi	160 m	1 paket
pekerjaan Persampahan	-	1 paket
Pekerjaan Saluran Drainase	Paket	Paket
Pekerjaan Tambat Kapal	-	-
Pekerjaan Sarana penyeberangan	-	1 unit
MCK/ WC Umum	3 unit	1 Unit
Relokasi rumah	10 unit (5x5m)	-
Pasar Desa	1 unit	-
Pekerjaan jembatan (gorong-gorong)	1 unit	-
Peningkatan lingkungan dan Musholla	-	1 paket
Penyusunan RTRW- Desa	-	1 Paket
Perumusan Perdes	-	1 paket
Papan peta Zonasi	-	1 buah
Papan peringatan	-	3 buah

betapa pentingnya penataan lingkungan pemukiman yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rembug desa, serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat desa. Dengan terbangunnya jalan paving block, mobilitas warga semakin mudah bagi warga. Keberadaan fasilitas MCK dan air bersih membuat warga

Untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun, masyarakat dengan sukarela melakukannya terhadap seluruh infrastruktur yang telah dibangun sepanjang periode PLBPM. Sebagai contoh, untuk menjaga kebersihan MCK disusun jadwal untuk membersihkannya, mengeruk saluran air yang telah mengalami pendangkalan dan mengadakan jimitan (istilah iuran tiap minggu) untuk perawatan fasilitas tersebut. ●

Sekilas Mengenai Penulis



M. ZAQQI ABDIH, S.Pi dilahirkan di Pekalongan, 18 Oktober 1981 tepatnya di Desa Bener - Kecamatan Wiradesa. Sejak kecil penulis diasuh dalam keluarga dan lingkungan agamis. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Pekalongan pada Fakultas Perikanan, mengambil program studi budidaya perairan. Penulis dikenal aktif di berbagai kegiatan diantaranya adalah sebagai surveyor penanganan limbah batik kota Pekalongan, surveyor penelitian profil wanita nelayan Kota Pekalongan, koordinator surveyor identifikasi persoalan masyarakat Kota Pekalongan,

koordinator Tim Pemantau Independen UN Kabupaten Pekalongan dan tenaga pembantu di laboratorium Aplikasi Budidaya Fakultas Perikanan - Universitas Pekalongan. Penulis pernah mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat Nasional bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua tim. Setelah lulus dari Universitas Pekalongan pada bulan Maret 2009, penulis sempat pula mengikuti kegiatan sebagai surveyor konversi minyak tanah ke LPG di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan yang saat ini penulis lakukan adalah sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dalam kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Penulis merasa tertantang untuk dapat memotivasi masyarakat dalam menata dan memajukan lingkungannya sehingga kawasan pesisir menjadi bersih, rapi, indah dan lestari.



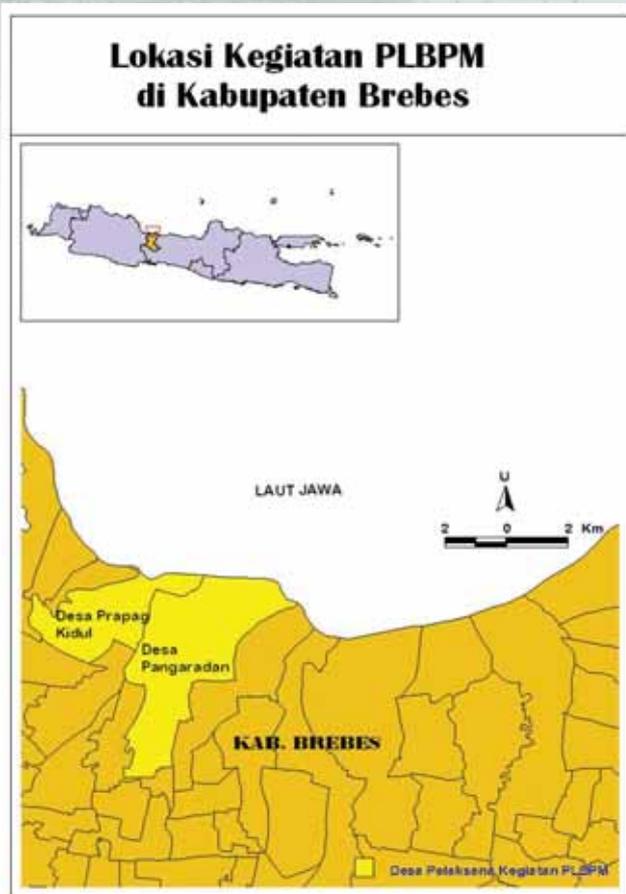
DADIT SAKI ARDI, S.Pi adalah pria kelahiran Batang, 21 Oktober 1983. Sejak kecil hingga sekarang, tinggal di Jl. RE. Martadinata No.20 Ngarakan Karangasem Utara-Batang. Penulis menamatkan sekolah menengah tingkat atas di SMU Negeri 2 Batang, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Pekalongan program studi Budidaya Perairan berhasil lulus pada tahun 2007. Pengalaman pekerjaan penulis diawali sebagai surveyor penanganan limbah batik kota Pekalongan, surveyor identifikasi persoalan masyarakat kota Pekalongan, Asisten Supervisor Mall Sri Ratu Megacentre Pekalongan dan Suveyor Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG 3kg Di Kabupaten Banjarnegara. Pada saat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang membuka lapangan pekerjaan sebagai TAP, penulis bersedia mencu-

rahan waktu dan tenaga dalam kegiatan PLBPM. Selama menjadi TAP, penulis sangat menikmati pekerjaannya karena program ini didasarkan survey kebutuhan masyarakat dan banyak berinteraksi dengan masyarakat pesisir.



ANANTO PRATIKNO, ST dilahirkan di Batang, 29 Oktober 1978. Pria berusia 31 tahun ini selama hidupnya bertempat tinggal di Jl.Gajahmada no.28 Proyonanggan Tengah-Batang. Mengenyam pendidikan dari SD sampai SMU di wilayah Batang dan kemudian melanjutkan kuliah di universitas Muhammadiyah Yogyakarta Program Studi Teknik Sipil. Setelah lulus, penulis bekerja sebagai Pelaksana di CV. Sekar Ungu Pekalongan, Pelaksana di PT. Sumber Daya Panca Perkasa Jakarta dan Konsultan Pengawas di CV. Parikesit Indotama Batang. Kegiatan yang dilakukan saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli Pendamping pada Kegiatan PLBPM T.A

2009. ●



Brebes

K A B U P A T E N



Profil PLBPM 2009 Kabupaten Brebes



Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terletak di esisir Jawa Tengah dengan panjang garis pantai \pm 53 km dengan jumlah desa pesisir sebanyak 14 desa. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil telor asin dan bawang merah. Selain itu, kabupaten ini memiliki potensi perikanan yang cukup bagus seperti rajungan, udang dan ikan. Untuk menuju Brebes dari Jakarta dapat menggunakan kereta api dengan waktu tempuh kira-kira 4 jam.

Kabupaten Brebes melaksanakan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009 lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM ini dilakukan di desa Prapag Kidul. Pertimbangannya adalah bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun 2008 dan selain itu partisipasi masyarakat di desa ini sangat aktif. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.589 jiwa, mayoritas suku Jawa.

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Brebes

Kegiatan PLBPM	2006		2007		2008		2009	
	Desa							
Penyusunan Tata Ruang Desa dari Rencana Zonasi Kawasan Pesisir								1 paket
Pembuatan tanggul penahan rob								1 paket
Pembuatan jalan lingkungan								1 paket
Pembuatan saluran drainase								1 paket
Pembuatan MCK								1 paket
Perbaikan jembatan								1 paket

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa untuk membentuk masyarakat yang peduli lingkungan. Dalam menentukan warga yang mendapatkan perbaikan rumah untuk nelayan dengan cara diundi. Peran Motivator sangat penting dimana motivator memberikan contoh dan dukungan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan PLBPM. Permasalahan di desa sangat banyak dan sama-sama memerlukan bantuan sehingga perlu kesepakatan antara masyarakat. Dengan dilakukannya musyawarah permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara baik. Sehingga tidak ada konflik yang berkepanjangan antar warga desa.



Berdasarkan survey Tenaga Ahli Pendamping (TAP) terinventarisir beberapa permasalahan ekosistem pesisir, antara lain : sering terjadinya rob yang menyebabkan kawasan tersebut tergenang air laut, sehingga pembuatan tanggul penahan rob dan kegiatan perbaikan ekosistem mangrove menjadi prioritas program PLBPM tahun 2009. Selain itu juga dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir.



Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui PLBPM di Kabupaten Brebes

Pelaksanaan PLBPM pada tahun 2009 di Desa Prapag Kidul tidak jauh bedanya dengan

pelaksanaan pada tahun 2008. Semangat masyarakat untuk bergotong royong membangun desa sangat tinggi. Sebagian besar mereka menyumbangkan tenaganya dalam

pembangunan fasilitas fisik, seperti jalan desa, saluran drainase, pembuatan MCK dan perbaikan jembatan.

Dengan adanya jalan desa yang baru mobilitas masyarakat menjadi mudah. Adanya saluran drainase dan MCK membuat masyarakat menjadi hidup lebih bersih dan sehat. Tanggul penahan rob mengurangi dan mencegah naiknya air laut ke lingkungan desa. Dengan demikian sudah tidak kelihatan lagi desa Prapag Kidul yang kumuh dan bau.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan



Zonasi Kawasan Pesisir merupakan kegiatan baru dalam kegiatan PLBPM ini. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perencanaan tata ruang skala desa supaya lebih teratur dan terarah dalam melakukan pembangunan.

Kegiatan PLBPM yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa mereka, diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki. Sehingga secara sadar mereka akan menjaga dan memelihara fasilitas fisik yang telah mereka bangun. ●

Biografi

Biodata Tenaga Ahli Pendamping (TAP)



Nama : Rakhmat Edi, S.T
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Solo,
Pendidikan : S1 Teknik
Pengalaman Kerja : Tenaga Pendamping PLBPM
Alasan/Motivasi menjadi TAP : Ingin memajukan daerah pesisir
Kesan selama menjadi TAP : Menyenangkan
Alamat : Jl. Ahmad Dahlan No. 20 Brebes
Telepon : 02833290140



Nama : Akhmad Ghozali, S.H
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 6 Agustus 1968
Pendidikan : S1 (Hukum)
Pengalaman Kerja : Konsultan PNPMM Mandiri
Tenaga Pendamping PLBPM 2008
Alasan / Motivasi menjadi TAP : Ingin memajukan daerah pesisir
Kesan selama menjadi TAP : Menyenangkan
Alamat : Jl.Purwa no 1 Suradadi Tegal
Telepon : 0283 3336746 / 02833289353
085642887971



Nama : Dwi Muji Herawati, A.Md
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 15 September 1984
Pendidikan : D3 Teknologi Informasi Kelautan
Institut Pertanian Bogor
Pengalaman Kerja : -
Alasan / Motivasi menjadi TAP : Ingin meningkatkan kesejahteraan dan Meningkatkan kualitas masyarakat pesisir
Kesan selama menjadi TAP : Menyenangkan bekerja dengan masyarakat desa
Alamat : Desa Penuapan Rt 02 Rw 04
Kec. Pangkah Kab. Tegal 52471
Telepon : 085218970915





Pekalongan

KABUPATEN



Menata dan Memperbaiki Lingkungan Wilayah Pesisir di Kota Pekalongan

Oleh: Prasetyo Angger Rachmat Nugroho, Edy Zulianto dan Indah Setyawati



Kota Pekalongan... anda pasti pernah mendengar nama kota ini. Kota yang terkenal sebagai penghasil BATIK. Istilah BATIK pun melekat sebagai motto kota ini yang merupakan akronim dari "Bersih Aman Tertib Indah dan Komunikatif". Kota ini juga dikenal sebagai kota perikanan, karena terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara yang merupakan pusat pendaratan ikan terbesar di Asia Tenggara. Kota ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa. Jika anda mau berkunjung ke kota ini, anda dapat menggunakan Kereta Api atau Bus dari Jakarta menuju Kota Semarang atau Kota Surabaya, dengan waktu tempuh sekitar 4 Jam jika menggunakan kereta api dan 8 Jam jika menggunakan bus.

Pada tahun ini, Kota Pekalongan mendapatkan kesempatan kedua dalam melaksanakan kegiatan PLBPM. Kegiatan ini akan menindaklanjuti

Tabel Kegiatan PLBPM di Kota Pekalongan

Kegiatan	2008		2009
	Dusun Boyongsari	Dusun Pandanarum	
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket
Pembuatan Pintu Air	1 Unit	2 Unit	-
Peninggian dan Pavingisasi Jalan	813 m ²	1.007 m ²	724,5 m ²
Pavingisasi Cangkring	-	-	112,5 m ²
Pembuatan Saluran U 20	438 m	126,6 m	490 m
Pembuatan Saluran MD 60	118,26 m ³	108,8 m ³	-
Pembuatan Saluran MD 80	-	-	63,76 m ³
Pembuatan Plat Dekker	-	32,05 m	-
Pemugaran Fasilitas MCK	1 Unit	-	-
Pemugaran Rumah	173 Unit	-	-
Papan Himbauan Pelestarian Lingkungan	4 Unit	4 Unit	-
Pembuatan Papan Nama Kegiatan	2 Unit	2 Unit	-
Penanaman Vegetasi	-	1 Paket	1 Paket

pekerjaan - pekerjaan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2008 dilakukan pada 2 lokasi pelaksanaan kegiatan dalam 1 kelurahan pesisir. Kedua lokasi ini dipilih berdasarkan survey lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode skoring oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Dari analisis tersebut terdapat 9 titik lokasi yang kumuh kategori sedang dan 11 titik lokasi kategori kumuh ringan. Selain kategori tersebut, kami juga menilai dari jumlah penduduk miskin dan permasalahan lingkungan pesisir. Jumlah KK di Kelurahan Panjang Baru yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 812 KK atau 34,95 % sedangkan bantuan beras miskin (raskin) sebesar 1.993 KK atau 85,79 %. Di Kelurahan ini juga sering terjadi ROB yang menggenangi lingkungan pemukiman sejauh hampir 1 km dari pantai. Dari hasil analisis tersebut, Kelurahan Panjang Baru dapat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM. Dalam rapat FKTD, Wilayah Boyongsari dan Pandanarum dipilih sebagai target group yang merupakan bagian dari Kelurahan Panjang Baru dengan pelaksanaannya LK dari LPM dan UPPKS.

Dusun Boyongsari merupakan salah satu wilayah Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara yang memiliki tingkat kekuasaan paling tinggi. Saluran air yang tidak



teratur membuat kondisi infrastruktur di wilayah ini selalu tergenang air di saat pasang atau lebih parah lagi saat musim hujan. Dimana untuk mengeringkan infrastruktur tersebut membutuhkan waktu antara 3 - 4 hari. Keadaan ini sangatlah menyulitkan aktivitas masyarakat. Pemukiman masyarakat di dusun ini relatif menyebar dengan mayoritas bangunan rumahnya terbuat dari lempengan - lempengan kayu / bambu dengan lantai yang masih berupa tanah. Fasilitas MCK di dusun ini sudah ada, namun kurang terawat sehingga kondisi fisiknya sudah mulai rusak.



Dusun Pandanarum juga termasuk dalam wilayah kelurahan yang sama dengan dusun Boyongsari. Seperti halnya dengan dusun Boyongsari, Pandanarum juga tidak memiliki sistem drainase yang memadai sehingga di saat air pasang kondisi rumah, jalan dan infrastruktur lain menjadi tergenang. Namun berbeda dengan dusun Boyongsari, fasilitas MCK di dusun ini masih terawat dan bersih.

Seperti halnya dengan masyarakat pesisir lainnya, di kedua dusun ini ada sekitar 70% penduduk di dusun ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan yang diantaranya bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan ataupun buruh pada industri pengolahan produk perikanan. Hasil tangkapan nelayan di dusun ini berupa ikan pelagis kecil, seperti ikan kembung dan selar. Sedangkan ikan yang dibudidayakan di dusun ini adalah jenis ikan lele (*Clarias batrachus*). Untuk mencapai dusun Boyongsari dan Pandanarum, anda dapat menggunakan angkutan umum seperti becak, ojek, taksi dan angkutan kota (THR - BOUM) yang ada di sekitar Terminal Pekalongan ataupun Stasiun KA Pekalongan. Dengan angkutan umum tersebut, anda hanya membutuhkan waktu 10 - 15 menit.

Dari Bekal pelatihan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada bulan April lalu, dan pengalaman kami pada tahun sebelumnya, kami

melakukan pendampingan kepada masyarakat dusun wilayah Boyongsari dan Pandanarum. Karakteristik masyarakat di kedua dusun ini tidak berbeda karena letaknya yang berdekatan. Tanggapan dan antusiasme masyarakat sangatlah besar, hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang hadir saat sosialisasi dan rembuk desa. Di kedua dusun ini, telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan (LK) sendiri, yaitu untuk dusun Boyongsari dilaksanakan oleh LPM, sedangkan di dusun Pandanarum dilaksanakan oleh UPPKS. Masyarakat dari kedua dusun ini mempercayai kegiatan PLBPM ini kepada LK yang telah ada. Pada kesempatan ini kami juga melakukan pemilihan motivator desa dari sejumlah masyarakat yang hadir dalam rembuk desa. Pada masing - masing dusun dipilih 1 (satu) orang motivator desa yang merupakan Ketua RW setempat, sebab ketua RW ini dianggap mampu untuk menggerakkan warga dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Setelah terpilihnya LK dan motivator, maka dilaksanakan rembuk desa kembali untuk menentukan kegiatan prioritas. Dalam rembuk desa kali ini, banyak masyarakat yang mengusulkan agar dibangunnya pintu air untuk mengatasi air rob dan pembangunan infrastruktur permukiman seperti pembangunan jalan paving blok dan 2.271,09 meter. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penghi-



jauan pantai dengan menanam mangrove, mangga dan cemara. Namun, untuk menetapkan calon penerima bantuan rumah, kami berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Dari hasil koordinasi tersebut, didapatkan daftar nama calon penerima bantuan rumah di RW V, VI dan VII. Dari daftar tersebut, kami harus melakukan skoring karena melihat terbatasnya anggaran dan banyaknya calon penerima bantuan. Kriteria dalam skoring tersebut adalah status tanah, kondisi lantai, WC, ruang tidur, atap rumah, penerangan, dan tembok, serta penghasilan UMR per orang/bulan. Akhirnya setelah melakukan skoring, kemudian kami berkoordinasi dengan LK setempat dan ditetapkan sebanyak 173 rumah yang mendapatkan bantuan rehab rumah dengan biaya perbaikan masing-masing sesuai dengan keadaan/kebutuhan rumah tersebut. Setelah semua kegiatan ini disepekatkan oleh masyarakat, kami pun melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM T.A 2009, kami juga melakukan penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir sebagai cita-cita dan impian masyarakat desa dalam upaya mewujudkan desa pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sharing pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan PLBPM dengan menyediakan dana pendukung sebesar Rp. 110.000.000,-. Secara umum kegiatan PLBPM telah bersinergi dengan tujuan Kota Pekalongan yang Bebas Kawasan Kumuh Tahun 2010. Karena pada kegiatan PLBPM Tahun 2008 ini telah memperbaiki 173 rumah masyarakat pesisir.

Meski dalam pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan seperti perubahan nama satker yang mempersingkat waktu kegiatan dan begitu luasnya kawasan target group, namun pada kegiatan ini telah mampu memberikan pekerjaan alternatif bagi para nelayan sekitar 5.500 orang per hari. Selain itu, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk kerja bakti serta memberikan bantuan makanan sekedarnya untuk terlaksananya pekerjaan di lingkungan mereka. ●

Biografi



PRASETYO ANGGER RACHMAT NUGROHO. Dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1986 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Putra pertama dari Ibu Pratiwi Rahayu Soerono dan Bapak Suriyono. Dibesarkan di Kota Pekalongan hingga sampai saat ini. Pada tahun 2004, diterima di Universitas Pekalongan (UNIKAL) di Fakultas Perikanan Program S-1 Budidaya Perairan. Pada awal bulan maret 2008 meraih gelar Sarjana Perikanan (S.Pi). Kemudian diterima bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) TA. 2008 dan TA. 2009 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan (DPPK) Kota Pekalongan. Sebagai TAP PLBPM Kota Pekalongan yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata dan memperbaiki lingkungan wilayah pesisirnya sendiri dimana masyarakat terlibat langsung baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga merasakan manfaat hasilnya sendiri. Posisi TAP ini bagi merupakan suatu hal yang baru dan memberikan pengalaman kerja yang menyelesaikan kuliah pada tahun 2008. Sebagai TAP, tertantang untuk dapat memotivasi masyarakat dalam menata dan memajukan lingkungan pesisir sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai wilayah yang identik dengan kekumuhan.



INDAH SETIAWATI. Dilahirkan di Pekalongan tanggal 20 April 1981. Pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan S-1 pada Perguruan Tinggi Universitas Pekalongan Jurusan Perikanan Program Studi Budidaya Perairan. Pada tahun 2004 diterima sebagai Tenaga Pendamping Desa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA. 2004 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Tahun 2009 ini, diterima bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) TA.2009 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan (DPPK) Kota Pekalongan. Tertarik menjadi TAP PLBPM Kota Pekalongan yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang kompleks dimana banyak tantangan-tantangan saat ada di lapangan. Bersama-sama masyarakat merencanakan, melaksanakan dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.



EDY ZULIANTO. Lahir pada tanggal 6 November 1984 di Jepara. Pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikan program studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Tahun 2009, diterima satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan (DPPK) Kota Pekalongan sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Sebagai TAP yang sangat berkesan dalam mendampingi masyarakat dalam menyusun apa yang direncanakan serta mengarahkan hingga tercapai kesepakatan bersama dalam membangun desa. ●



Demak
K A B U P A T E N



Desa Pesisir Kabupaten Demak

oleh: Puspitasari Purnama Putri, Anis Yuniarti dan Supratiknyo



Secara administratif, Kabupaten Demak merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Panjang garis pantai kabupaten ini sekitar 57,58 km dan terbagi menjadi 12 desa pesisir. Luas wilayah kabupaten ini adalah 89.743 ha. Dari luasannya tersebut, sebagian lahan besar digunakan sebagai lahan pertanian dan sebagian kecilnya dimanfaatkan sebagai lahan tambak. Untuk mencapai Kabupaten Demak, Anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Semarang, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 1,5 jam.

Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kabupaten Demak telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2009. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa *stakeholders* seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk menentukan desa pelaksana kegiatan, tahapan pertama yang dilakukan adalah pembentukan Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) yang beranggotakan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Assisten Ekonomi dan Pembangunan,

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Demak

Kegiatan PLBPM	2007		2008		2009	
	Desa Timbulsloko	Desa Surodadi	Desa Surodadi	Desa Surodadi	Desa Timbulsloko	Desa Timbulsloko
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	-	1 paket
Betonisasi jalan	2126 m	1914 m	180 m	-	-	141 m
Pembangunan Jembatan	1 unit	3 unit	1 unit	-	-	1 unit
Peninggian Tanggul I dengan kanan kiri dari bambu	-	-	-	-	-	2 unit
Pembuatan pintu air	-	-	-	-	-	1 unit
Trucuk Bambu	300 m	2000 m	-	-	-	-
Penanaman Mangrove	-	10000	167650 btg	-	-	50000 btg
Pembangunan/perbaikan rumah	-	-	14 unit	-	-	6 Unit



Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Kasi Sumber Hayati pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak, Unsur Kodim 0716 Kabupaten Demak, Unsur Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Demak, Unsur DPU PPE Kabupaten Demak, Unsur Kecamatan Sayung, Kasi Pengelolaan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Demak. Agenda dalam Rapat FKTD Kabupaten Demak adalah membahas dan menetapkan desa pelaksana kegiatan PLBPM. Hasil keputusan dari Rapat FKTD ini diambil dengan cara musyawarah mufakat. Proses pemilihan desa ini menggunakan metode skoring setelah sebelumnya dilakukan survey lokasi bersama Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Survey lokasi tersebut memper-

hatikan kondisi ekosistem pesisir, kondisi prasarana lingkungan pemukiman dan kondisi bangunan rumah penduduk. Dalam penentuan target group ini, Tenaga Ahli Pendamping (TAP) menemukan 4 desa yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu desa Bedono, desa Sriwulan, desa Timbulsloko dan desa Surodadi. Dari hasil skoring yang dilakukan, TAP mengusulkan desa yang memiliki bobot nilai yang tertinggi dijadikan lokasi prioritas pelaksana kegiatan PLBPM yaitu Desa Timbulsloko dan Desa Surodadi. Dalam rapat FKTD ditetapkan di Desa Timbulsloko dan Desa Surodadi yang kemudian diverifikasi oleh Tim Teknis Pengendali dari Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Desa Timbulsloko merupakan bagian dari



Kecamatan Sayung dengan luas wilayah sekitar 500.847 ha dan memiliki panjang garis pantai 3.50 kilometer. Desa ini terletak pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar lahan di desa Timbulsloko adalah lahan tambak dengan luas sekitar 334.350 hektar. Hasil utama dari lahan tersebut diantaranya bandeng dan udang. Permukiman penduduk Desa Timbulsloko berpusat di Dusun Karanggeneng. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini semi permanen dan permanen. Kondisi dinding rumah terbuat dari tembok dan papan yang sudah keropos. Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2009, jumlah penduduk di desa ini adalah 3.611 jiwa dan terdiri dari 977 KK. Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat adalah petani, nelayan



dan swasta. Potensi unggulan di desa ini adalah pertanian tambak dan perikanan. Jumlah rumah yang berdinding tembok 389 KK, dinding kayu 472 KK dan dinding Bambu 116 KK, dengan kondisi lantai keramik 523 KK, lantai semen 315 KK, lantai kayu 8 KK dan lantai tanah 131 KK. Kondisi infrastruktur pemukiman di desa ini tidak teratur, dimana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti jalan lingkungan, jembatan, tanggul, MCK dan sarana air bersih. Untuk dapat mencapai desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 16 km dari ibukota Kabupaten Demak, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit.

Desa Surodadi merupakan bagian dari Kecamatan Sayung, dengan luas wilayah sebesar 5,1 km² dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 4.56 kilometer. Desa ini terletak pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Jumlah

penduduk Desa Surodadi berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2007 adalah sebanyak 2.742 jiwa. Permukiman penduduk Desa Surodadi berpusat di Dusun Surodadi. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di desa ini semi permanen dan permanen. Kondisi dinding rumah terbuat dari tembok dan papan yang sudah keropos. Jumlah rumah yang berdinding tembok 279 KK, dinding kayu 241 KK dan dinding Bambu 25 KK. Sedangkan kondisi lantai keramik 85 KK, lantai semen 320 KK dan lantai tanah 140 KK. Kondisi infrastruktur pemukiman di desa ini tidak teratur, dimana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti jalan lingkungan, jembatan, tanggul, MCK dan sarana air bersih. Mata pencaharian utama seba-



gian besar masyarakat di desa ini adalah petani, nelayan dan swasta. Potensi unggulan di desa ini adalah pertanian tambak dan perikanan. Untuk dapat mencapai wilayah desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 19 km dari ibukota Kabupaten Demak, dengan waktu tempuh kurang lebih selama 40 menit.

Sosialisasi PLBPM dengan masyarakat desa pelaksana kegiatan PLBPM dilakukan melalui rembung desa yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Satkerperwil KIM-TARU), Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Demak, Unsur Dpu Ppe Kabupaten Demak, Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan (LK), BPD, LKMD, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat desa sendiri. Masyarakat di desa ini sangat antusias dan men-

dukung kegiatan PLBPM, hal ini terlihat dengan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, rebug desa hingga pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme proses pembentukan LK dan penunjukan motivator desa di desa Timbuloko ini juga dilakukan melalui forum rebug desa yang dihadiri oleh Tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat Desa. Perbedaan pendapat masyarakat mengenai pembentukan LK dan Motivator desa menjadi salah permasalahan yang terangkat dalam rebug desa ini. Namun permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan cara musyawarah mufakat. Motivator desa yang terpilih diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat desa.

Setelah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan (LK) maka langkah selanjutnya adalah penentuan



kegiatan prioritas. Pada tahapan ini, masyarakat desa sangat aktif dalam menyampaikan usulan-usulan kegiatan fisik beserta permasalahan yang ada di desa. Usulan-usulan tersebut ditampung dan dicatat oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Namun kegiatan prioritas ini lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, jembatan, tanggul penahan rob dan pintu air. Hal ini disebabkan karena infrastruktur merupakan salah satu penunjang kegiatan ekonomi, komunikasi dan transportasi antar desa. Permasalahan yang terangkat dalam penentuan kegiatan prioritas ini adalah banyaknya aspirasi dari masyarakat dalam hal pemerataan pembangunan desa di setiap dusunnya, masyarakat masih mengedepankan ego perorangan, karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam menganalisa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh cara

mengumpulkan seluruh aspirasi masyarakat, kemudian ditentukan sesuai skala prioritasnya berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat banyak. Rencana kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat adalah perbaikan ekosistem pesisir, perbaikan infrastruktur permukiman dan perbaikan rumah penduduk.

Partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM berupa dana penunjang dalam sosialisasi program yang dialokasikan dari dana APBD II. Selain itu, sharing dari pemerintah daerah berupa integrasi dengan program lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM Mandiri dan PEMP. ADD merupakan salah satu Program pengembangan dari program PLBPM, yang setiap tahunnya dianggarkan sebesar 125 juta. Sumber dana tersebut digunakan untuk membangun sarana infrastruktur yaitu berupa betonisasi jalan Dusun Bogorame di Desa Timbuloko yang dilaksanakan dari tahun 2007 - 2009 dengan volume pekerjaan sebesar 400x 2,25 x 0,17 m².

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PLBPM berupa partisipasi pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM, motivator desa menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan motivasi kepada seluruh desa agar turut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan desa mereka.

Manfaat yang diasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan PLBPM adalah berkurangnya bahaya abrasi pantai dengan adanya penanaman mangrove dan pembangunan talud. Selain itu, tersedianya kesempatan kerja alternatif khususnya bagi masyarakat nelayan pesisir yang sementara waktu tidak dapat melaut akibat dampak kenaikan harga BBM ataupun pada saat cuaca buruk. Masyarakat dapat memperoleh upah kerja pada pekerjaan-pekerjaan fisik dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM seperti pembangunan rumah, jalan, jembatan dan penanaman mangrove. Kondisi infrastruktur permukiman masyarakat yang lebih baik dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Upaya masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara fasilitas fisik yang telah terbangun dalam program PLBPM ini adalah membentuk suatu peraturan yang dihasilkan dari rebug desa, seperti biaya yang harus dikeluarkan dalam pemeliharaan fasilitas fisik tersebut. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



SUPRATIKNYO ST, MT, dilahirkan di Demak pada tanggal 10 Februari 1967. Pada tahun 1990, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Teknik Bangunan, IKIP Semarang, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar ST (Sarjana Teknik) pada tahun 1995. Dan pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Sultan Agung dan lulus tahun 2006. Setelah lulus dan sampai saat ini bekerja sebagai Direktur CV Karya

Abadi Demak dan menjadi Tenaga Ahli Pendamping dalam kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Tertarik menjadi TAP karena dapat mengaplikasikan teori akademik yang diperoleh di kampus dan aplikasinya di lapangan dengan mengetahui permasalahan masyarakat pesisir.



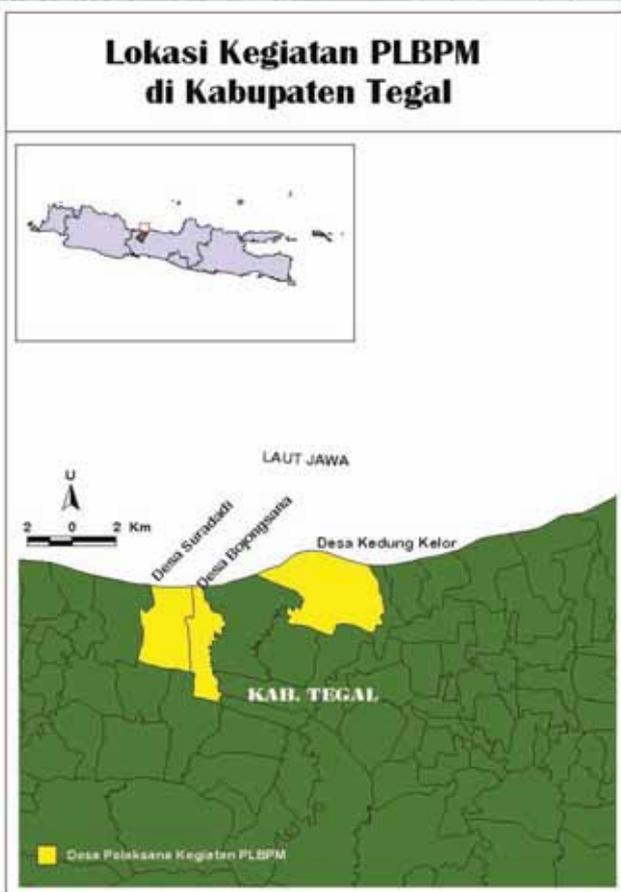
PUSPITASARI PURNAMA PUTRI, S.Pi, dilahirkan di Semarang pada tanggal 21 Desember 1983. Pada tahun 2002, terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2007, berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar S.Pi (Sarjana Perikanan). Tahun 2008 hingga sekarang, masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya

Perikanan dan menjadi Tenaga Ahli Pendamping dalam kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Program PLBPM ini sangat menarik perhatian karena kegiatan tersebut menyentuh langsung ke dalam masyarakat pesisir, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki selama duduk di bangku kuliah.



ANIS YUNIARTI, S.Pi dilahirkan di Pemalang pada tanggal 13 April 1984. Pada tahun 2002, terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Manajemen Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2007 berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar S.Pi (Sarjana Perikanan). Pada tahun 2008 menjadi Tenaga Ahli Pendamping dalam kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat (PLBPM). ●



Tegal
K A B U P A T E N



Pelaksanaan Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tegal



Bicara mengenai Tegal pasti kita akan teringat akan warung tegal atau biasa orang menyebutnya warteg. Hal ini karena banyak perantau yang berasal dari Tegal yang membuka usaha warung makan di Jakarta. Namun sebenarnya Kabupaten Tegal tidak hanya terkenal dengan wartegnya, tetapi wilayah yang terletak di pesisir utara Jawa ini juga mempunyai beberapa potensi lainnya yang dapat diunggulkan sebagai sumber pendapatan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri khususnya industri kerajinan. Beberapa industri yang berkembang di daerah ini mulai dari industri kecil hingga industri unggulan diantaranya industri kerajinan tenun ikat, kerajinan bordir, industri pengerjaan logam, industri shuttle cock dan industri pengolahan hasil ikan (*fillet ikan*). Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah

Jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui PLBPM di Kabupaten Tegal

No.	Kegiatan	2006			2007		2008
		Desa Kedungkelor	Desa Surodadi	Desa Bojongsana	Desa Surodadi	Desa Bojongsana	
1.	Pembangunan Turap	536 m	-	-	-	-	-
2.	Pembuatan Jalan Paving Blok	343,4 m	2.804,86 m	879,9 m	-	-	-
3.	Pengerasan Jalan Sirtu	262 m	-	-	-	-	-
4.	Pembuatan Gorong-Gorong	1 Unit	-	-	-	-	-
5.	Pengerasan Jalan	146,6 m	-	-	6.697 m	938 m	-
6.	Pembuatan Drainase	205 m	-	-	-	-	-
7.	Penambahan Sayap Sal. Lama	31,4 m	-	-	-	-	-
8.	Pembuatan Saluran Utama	-	-	815 m	-	-	-
9.	Pembuatan Saluran Tepi	-	-	600 m	-	-	-
10.	Pengaspalan Jalan Penetrasi	-	-	262,5 m	-	-	-
11.	Pembuatan papan himbauan	-	-	-	1 paket	1 unit	-
12.	Pembangunan jembatan	-	-	-	-	1 unit	-
13.	Saluran limbah penduduk	-	-	-	-	687 m	-
14.	Perbaikan rumah penduduk	-	-	-	-	11 unit	-
15.	Sarpras Nelayan	-	-	-	1 unit	-	-



kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi. Letaknya strategis di jalur pantura, yang membuat kabupaten ini dapat menjadi penunjang kegiatan perekonomian bagi wilayah lain di sekitarnya. Seperti umumnya daerah pesisir, maka kabupaten ini pun mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Wisata bahari juga menjadi andalan pendapatan daerah pesisir.

Namun demikian, sektor perikanan dan kelautan yang seharusnya merupakan potensi besar, masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kabupaten ini, walaupun sektor ini ternyata mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang serius di Kabupaten Tegal, baik oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Usaha perikanan yang berkembang di wilayah ini adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya khususnya budidaya tambak dan kolam air tawar.

Perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah pesisir diwujudkan pada kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

(PLBPM). Di Kabupaten Tegal PLBPM dimulai pada tahun 2006. Sebagai pelaksana PLBPM ditentukan 3 desa pelaksanaan kegiatan yaitu Desa Surodadi, Desa Bojongsana dan Desa Kedungkelor. Alasan yang mendasari adalah kondisi umum yang terjadi di desa pesisir seperti permukiman masyarakat yang kumuh, sarana dan prasarana lingkungan yang masih sangat terbatas serta infrastruktur yang kurang memadai. Untuk menuju ke ketiga desa tersebut dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan mobil dari ibukota kabupaten. Pada tahun 2007 kegiatannya hanya dilaksanakan di Desa Surodadi. Sedangkan pada tahun 2008, difokuskan di Desa Bojongsana yang merupakan kegiatan tindak lanjut. Pada tahun 2006, jumlah penduduk Desa Surodadi berjumlah 13.788 jiwa dengan 1.439 KK, Desa Bojongsana yaitu 6724 jiwa dengan 819 KK, sedangkan penduduk Desa Kedungkelor berjumlah 6.475 dengan 1.443 KK.

Pemilihan prioritas kegiatan di tiga desa dilakukan melalui rembuk desa yang dihadiri oleh warga, LK, TAP dan motivator desa. Akhirnya disepakati bahwa pada tahun 2006, kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan jalan

desa, pembuatan gorong-gorong, perbaikan sistem drainase dan pembuatan turap. Turap sendiri berfungsi untuk menahan gelombang yang hanya dibangun di desa Kedungkelor. Pembuatan gorong-gorong dan sistem drainase di desa Kedungkelor diharapkan dapat mengurangi genangan air dari buangan limbah masyarakat. Untuk memperlancar dan mempermudah akses dan mobilitas warga, di ketiga desa target grup dilakukan pembuatan jalan dengan paving blok. Sebenarnya, jalan yang selama ini sudah tersedia pada masing-masing desa tersebut, akan tetapi masih berupa jalan tanah. Saat musim hujan menjadi sangat becek dan sulit dilalui.

Pada pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2007 yang dilakukan di desa Surodadi merupakan kegiatan yang menindaklanjuti kegiatan tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan jalan desa, pembuatan papan himbauan dan pembangunan sarana dan prasarana nelayan serta sarpras nelayan.

Sedangkan pada tahun 2008, pelaksanaan kegiatan di Desa Bojongsana juga masih melanjutkan kegiatan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan, pembuatan papan himbauan, pembangunan jembatan, saluran limbah dan



Moroccan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

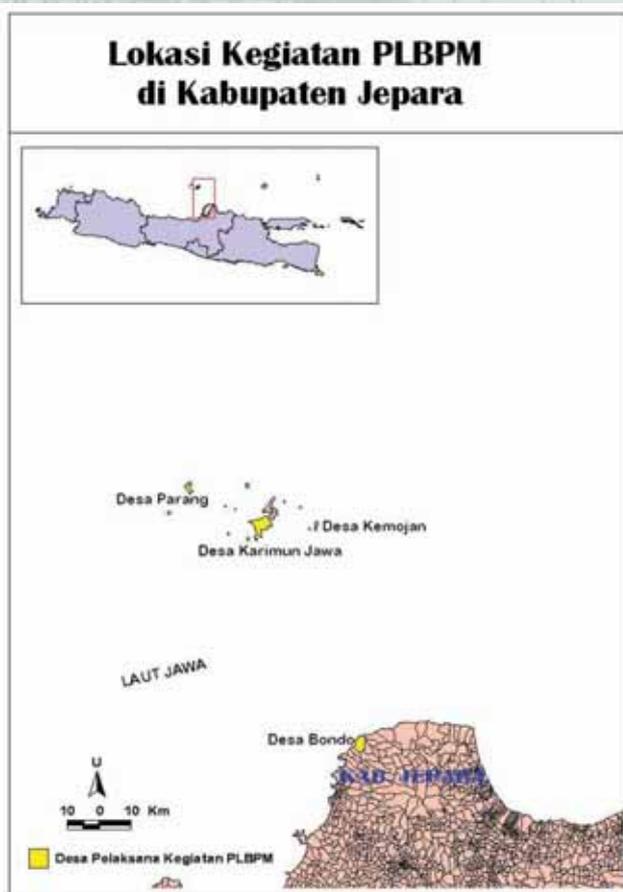


renovasi rumah warga sebanyak 11 unit.

Masyarakat di masing-masing desa ikut berperan aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan baik pria maupun wanita. Para pria terlibat aktif dalam pembangunan fasilitas fisik sedangkan para wanitanya ikut berperan serta dengan menyediakan makanan dan minuman bagi para warga yang bekerja. Mereka bekerja secara sukarela dan senang hati. Beberapa anggota masyarakat juga ada yang menyumbangkan bahan material dalam pembangunan berbagai fasilitas fisik. Pemda Tegal sendiri juga sangat mendukung kegiatan PLBPM. Hal ini dibuktikan dengan memberikan dana pendampingan pada masyarakat.

Berbagai kegiatan khususnya pembangunan fisik lingkungan permukiman telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di ketiga desa. Dengan pembangunan dan perbaikan jalan desa masyarakat semakin mudah dalam mobilitas kegiatan mereka sehari-hari. Lingkungan permukiman yang sebelumnya terlihat kumuh saat ini sudah cukup baik. Renovasi rumah yang dilakukan di desa Bojongsana sangat memberikan manfaat bagi penerimanya sehingga dapat hidup lebih layak. Kegiatan PLBPM ini juga secara tidak langsung meningkatkan PAD Kabupaten Tegal, karena dengan kemandirian masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya. Desa pelaksana PLBPM juga menjadi contoh desa pesisir lainnya untuk memotivasi kemandirian masyarakatnya. ●





Jepara

K A B U P A T E N



Menata Lingkungan Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Oleh : Arif Mustofa, Dyah Agustiningrum dan Dian Inayah



Mungkin anda mengenal Jepara sebagai kota penghasil furniture jati daripada pesisirnya. Memang benar adanya, di kabupaten ini banyak pengusaha furniture jati yang tidak hanya untuk konsumsi domestik tapi juga sebagai komoditi ekspor.

Pelaksanaan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Jepara dilakukan pada tahun 2006, 2007 dan 2009. Pelaksanaan pada tahun 2006 dilaksanakan di tiga desa yang terletak di Kepulauan Karimun Jawa yaitu Desa Karimun Jawa, Desa Kemojan dan Desa Parang. Ketiga desa ini dipilih karena kondisi lingkungan permukiman yang buruk dan terjadi degradasi lingkungan pesisir. Pada tahun 2007 program PLBPM hanya dipusatkan di Desa Parang, yang lebih memerlukan kegiatan tin-

dakanjurt. Sedangkan pelaksanaan PLBPM pada tahun 2009 dilaksanakan di Desa Bondo Kecamatan Bangsri. Lokasi PLBPM di Kepulauan Karimun Jawa yang terlalu jauh dan memerlukan biaya transportasi yang sangat besar. Selain itu, hasil survey Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dan tim Teknis Pengendali Daerah (TPD), Desa Bondo merupakan salah satu desa pertumbuhan, yang terletak di kawasan pesisir dengan kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian serius.

Desa Bondo termasuk wilayah Kecamatan Bangsri, dengan panjang garis pantai kurang lebih 5 km. Keadaan Topografi desa ini berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 100 meter diatas permukaan air laut. Untuk dapat mencapai desa ini, dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh kurang lebih selama 20 menit. Permukiman penduduk di desa ini

han lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator desa. Secara mufakat akhirnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) "Dadi Mulyo" ditunjuk sebagai penggerak kegiatan PLBPM.

Setelah pembentukan LK dan peunjukan motivator desa, dilakukan rembug desa untuk menentukan kegiatan prioritas. Rembug desa ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW. Masyarakat aktif dalam menyampaikan permasalahan lingkungannya, antara lain tentang kondisi infrastruktur pemukiman, kondisi perumahan dan kondisi lingkungan pesisir. Untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, TAP membantu dengan membuat skoring mengenai jumlah pemanfaat, tingkat kepentingan dan adanya partisipasi masyarakat. Pada akhirnya



menyebarkan jumlah penduduk desa sebanyak 11.023 jiwa. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan. Jumlah rumah penduduk yang ada di desa ini adalah sekitar 2000 unit, kebanyakan rumah tersebut terbuat dari bahan tembok dan dalam kondisi baik dan sekitar 100 unit rumah lainnya terbuat dari keping bambu (gedek).

Sosialisasi PLBPM 2009 dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan aparat Desa Bondo bersama dengan BPD, tokoh agama dan masyarakat, serta Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pemili-

diputuskan urutan kegiatan PLBPM 2009 di Desa Bondo adalah perbaikan jalan lingkungan, pembuatan saluran air limbah rumah tangga, pembangunan MCK umum dan pengadaan sumber air bersih, pembuatan bak sampah, pembuatan tanggul penahan abrasi pantai, relokasi rumah dan warung yang ada di wilayah TPI serta perbaikan ekosistem kawasan pesisir yang dilakukan dengan penghijauan kembali. Pada tahun 2009 ini dibuat juga rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan desa untuk pengembangan ke depannya. Kegiatan PLBPM

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Jepara

Kegiatan	2006			2007	2009
	Desa Karimunjawa	Desa Kemujan	Desa Parang	Desa Parang	Desa Bondo
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	1 paket
Renovasi Rumah	61 unit	-	-	-	-
Pembangunan Rumah Contoh	1 unit	-	-	-	-
Pembangunan MCK	3 unit	7 unit	-	-	2 unit
Pembuatan Tong Sampah	9 unit	-	-	-	-
Pembuatan Bak Sampah Permanen	5 unit	-	-	-	4 unit
Pembuatan Sumur	-	4 unit	-	-	-
Pembangunan/Perbaikan Drainase	-	475 m	-	-	-
Pembangunan Jembatan	-	1 unit	-	-	-
Perbaikan Tambatan Perahu	-	-	60 m2	-	-
Pembangunan Rambu Laut Alur Kapal	-	-	4 unit	-	-
Pavingisasi Jalan Desa	-	-	2.500 m	900 m	158 m
Pembuatan Selokan/Saluran Air	-	-	300 m	-	158 m
Pembuatan Talud	200m3	-	-	-	50 m
Pembuatan Peraturan	-	-	-	3 paket	-
Penghijauan	-	-	-	-	200 bgt
Relokasi Warung Rumah	-	-	-	-	4 unit



tahun 2009 di Desa Bondo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan PLBPM ini, karena merupakan pembelajaran bagi masyarakat untuk menganalisa, memecahkan dan menghasilkan solusi terhadap permasalahan lingkungannya. Pertemuan intensif dan monitoring pelaksanaan kegiatan sering dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. Desa Bondo juga dijadikan sebagai desa penerima program PNPB-KP sehingga bukan hanya dari sisi sosial saja yang dibangun tetapi juga dari sisi usaha kecil yang dilakukan warga Bondo mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sesuai dengan pertemuan rembug desa serta pertemuan-pertemuan lain yang dihadiri oleh TAP, kegiatan dalam PLBPM membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dalam bentuk apapun agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sukses sesuai rencana. Sifat

gotong royong masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara masal yang mereka sebut *perayaan*. Dalam kegiatan ini pula tidak ketinggalan peran motivator desa dalam mengerahkan massa untuk *bersengelayung* (bergotong-royong) bersama-sama membangun desa. Hal ini dilakukan dalam setiap kesempatan, *kumpulan ngaji* (pengajian), *jagong* (nongkrong bareng) atau saat bertemu di jalan.

Manfaat PLBPM bagi masyarakat dipastikan sangat besar. Kondisi sarana prasarana masyarakat yang sangat kurang ataupun rusak, dengan adanya program ini kemudian dibenahi satu persatu. Kekurangan air bersih sudah bukan masalah lagi karena sekarang sudah tersedia supplainya, adanya penahan abrasi dan penghijauan di pantai menghilangkan kekhawatiran rumah diterjang ombak besar, sampah yang dulu dibuang ke pantai sekarang sudah tersedia bak sampah, jalan yang semula hilang terbenam tanah sekarang sudah bagus dan saluran air membuat lingkungan mereka menjadi sehat dan indah.

Untuk menindaklanjuti kegiatan PLBPM di masa yang akan datang, mereka sudah mempersiapkannya melalui mekanisme rembug warga di tingkat masyarakat lokasi pelaksanaan PLBPM dalam hal ini Desa Bondo. Pemeliharaan bangun-

nan hasil pelaksanaan PLBPM ditanggung oleh masyarakat pengguna manfaat. Tata caranya diatur lebih lanjut melalui pertemuan warga lingkungan. Tidak ketinggalan juga peran Motivator Desa guna melestarikan program ini agar hasil yang dicapai dapat berguna semaksimal mungkin bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Mereka mengajak masyarakat pengguna hasil kegiatan PLBPM supaya menjaga hasil kegiatan ini dengan sebaik-baiknya supaya dapat dipakai selama-lamanya. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



ARIF MUSTOFA, ST, dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 Juni 1973. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1992 dan selesai pada 1998. Aktif dalam berbagai organisasi sosial keagamaan, hingga jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Pimpinan Cabang GP. Ansor Kabupaten Jepara. Beraktifitas sebagai Tenaga Ahli Pendamping sejak tahun 2006 karena kegiatan ini sangat sesuai dengan jiwa sosialnya dalam turut membantu masyarakat pesisir untuk mengelola lingkungannya supaya lebih baik.

Selama menjadi TAP kesan mendalam yang tak terlupakan adalah keinginan masyarakat untuk didampingi dalam melaksanakan kegiatan PLBPM agar tidak menyimpang dari pedoman pelaksanaan maupun rencana kerja dan biaya yang dibuat. Di samping itu, kegemilangan yang terluap dari masyarakat penerima PLBPM tidak dapat dilupakan ketika program ini menghasilkan bangunan yang sangat lama mereka inginkan.



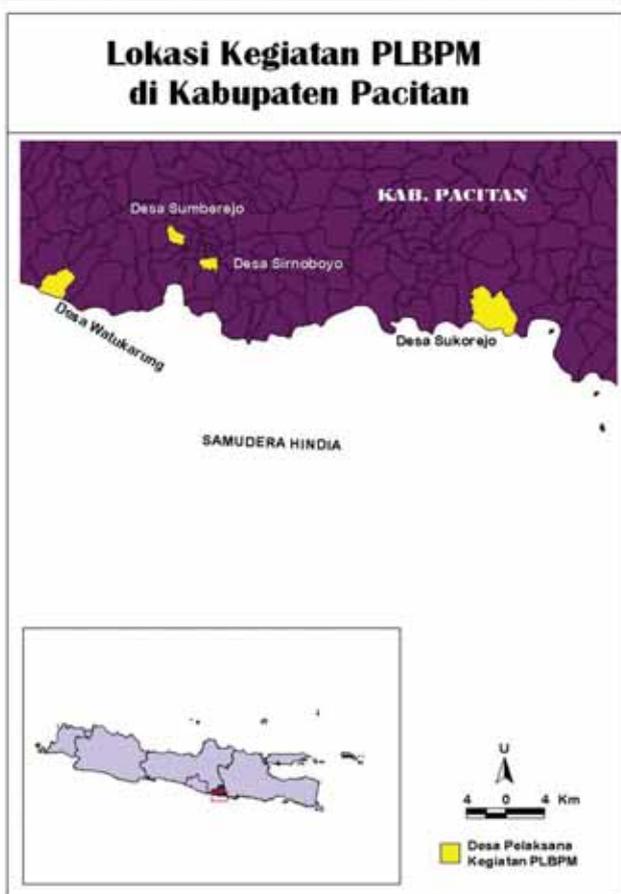
DYAH AGUSTININGRUM, SP, dilahirkan di Jepara pada tanggal 30 Agustus 1975. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Setelah lulus, bekerja sebagai Staf Administrasi di perusahaan meubel Bunga Jati Furniture selama 1 tahun, kemudian bekerja sebagai Staf Administrasi di PT. Delta Furniture selama 1 tahun dan akhirnya ikut mendaftar ketika ada lowongan menjadi Tenaga Ahli Pendamping PLBPM 2009 yang diumumkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.

Motivasi untuk menjadi TAP adalah ingin mendapatkan pengalaman dalam program pendampingan kepada masyarakat sesuai aturan dalam PLBPM. Sedangkan kesan yang didapatkan menjadi TAP adalah sosialisasi dengan masyarakat menjadi terbuka lebih luas. Sehingga apa yang diinginkan oleh warga secara tidak langsung dapat terserap.



DIAN INAYAH, ST, dilahirkan di Jepara pada tanggal 12 Juli 1978. Meraih gelar S1 di Jurusan Teknis Sipil Fakultas Teknis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) hingga mendapatkan gelar S1. Setelah lulus pada tahun 2007 bekerja sebagai Freelance Drafter dan pada tahun 2008 terdaftar sebagai staf pengajar di sebuah sekolah di dekat rumahnya.

Motivasi utama bekerja sebagai TAP adalah mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah juga turut membantu masyarakat untuk mengelola lingkungannya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kesan selama menjadi TAP adalah betapa masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman mereka. Sedangkan jika dana itu dibebankan kepada mereka, amat sangat berat bagi mereka. Sehingga dengan adanya PLBPM, mereka sangat gembira dan antusias untuk menstuskeskan kegiatan itu. ●



Pacitan
K A B U P A T E N



Melanjutkan Penataan Desa Pesisir di Kabupaten Pacitan



Kabupaten Pacitan mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur ini mulai dikenal setelah Bapak Susilo Bambang Yudhono menjadi Presiden RI karena beliau berasal dari Pacitan. Kabupaten dengan garis pantai sepanjang 70,71 km ini memiliki 26 desa pesisir yang merupakan pemasok kebutuhan ikan layur, tuna dan lobster untuk Jawa Timur. Disamping potensi perikanan, Kabupaten Pacitan juga memiliki potensi pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan komoditas unggulan berupa cengkeh dan kelapa. Untuk menuju Kabupaten Pacitan anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Solo atau Yogyakarta yang dilanjutkan dengan perjalanan darat selama \pm 3 jam. Barulah anda tiba di Kabupaten Pacitan yang memiliki pesona wisata 1001 goa serta panorama pantai selatan yang indah.

Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan sejak tahun 2006 yang di laksanakan di 3 desa yaitu Desa Sukorejo - Kecamatan Sudimoro,

Tabel. kegiatan PLBPM di Kabupaten Pacitan

Kegiatan	2006			2007		2008
	Desa Watukarung	Desa Simoboyo	Desa Sukorejo	Desa Watukarung	Desa Sumberejo	Desa Watukarung
Penyusunan RTR dan Renc. Zonasi	-	-	-	-	-	1 paket
Konservasi	-	-	-	400 batang	100 batang	175 batang
Pembangunan Jalan Paving Block	163 m ²	-	1.611,48 m ²	730 m ²	-	764,4 m ²
Pembangunan Jalan Telford	-	851,4 m ³	314,72 m ³	-	-	-
Pembangunan Jalan Rabat	-	63,94 m ³	-	20,91 m ³	7,65 m ³	60,63 m ³
Pengaspalan Jalan	1.315 m ²	-	-	-	-	-
Pembangunan Talud	68,25 m ³	269,2 m ³	-	-	162,28 m ³	45,45 m ³
Pembangunan Drainase	-	-	520,6 m	-	-	57 m
Pembangunan Gorong-gorong	-	8 titik	-	-	-	-
Pembangunan MCK	4 unit	-	-	-	-	7 unit
Tambatan Perahu	-	-	-	-	1 paket	-
Tempat Pendaratan Kapal	105 m	-	-	-	-	-
Pembuatan Sarana Air Bersih	318 m	1 unit	-	-	-	-
Pembangunan Jembatan	-	1 unit	-	-	-	-
Penerangan TPI	1 paket	1 unit	-	-	1 unit	-
Pembuatan Sumur	-	-	-	-	1 unit	-

Desa Watukarung - Kecamatan Pringku dan Desa Simoboyo - Kecamatan Pacitan. Pada tahun 2007, tindak lanjut kegiatan PLBPM dilakukan di dua desa yaitu Desa Watukarung - Kecamatan Pringku dan Desa Sumberejo yang merupakan pemekaran Desa Sukorejo dimana kegiatan PLBPM telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, Kabupaten Pacitan kembali mendapat kesempatan

untuk menata kembali lingkungan pesisir dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui program PLBPM. Sesuai dengan Pedoman PLBPM, untuk kabupaten lokasi tindak lanjut dipilih salah satu lokasi yang sudah ditangani sebelumnya yakni Desa Watukarung atau Desa Sumberejo. Proses pemilihan lokasi desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu penetapan kriteria penilaian, survey lokasi, analisis dan pembobotan serta penetapan lokasi. Bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD), TAP ikut berperan dalam proses pemilihan lokasi. Survey lokasi dilakukan dalam rangka mendapatkan data sebagai dasar skoring. Hasil survey dan analisis menunjukkan bahwa kedua desa ini memang layak untuk dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan karena sama-sama masih memerlukan perbaikan infrastruktur permukiman. Tetapi hasil skoring menunjukkan bahwa Desa Watukarung memiliki prioritas yang lebih utama karena desa ini mengalami degradasi lingkungan dan permasalahan sanitasi, yang terlihat dengan adanya kerusakan pantai akibat

penambangan pasir serta masih banyak ditemukan kotoran manusia ditepi pantai. Setelah penetapan desa tersebut, muncul konflik akibat kecemburuan dari Desa Sumberejo yang tidak terpilih menjadi desa pelaksana kegiatan. Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat desa setempat.

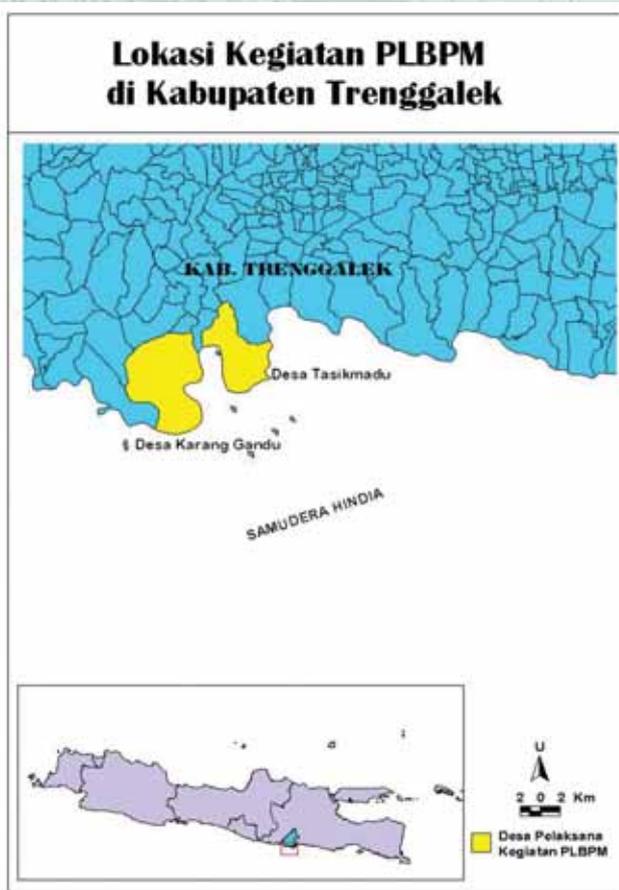
Desa Watukarung merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Pringku dengan luas wilayah sekitar 5,45 km². Bentang alamnya merupakan dataran rendah dan berbukitan, sehingga memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian rata-rata 75 m di atas permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat yang jaraknya 35 km dari ibukota kabupaten dengan jarak tempuh sekitar

dagang dan buruh. Hasil tangkapan nelayan berupa ikan tongkol, tuna dan layur. Meskipun desa ini memiliki permasalahan lingkungan permukiman, namun desa ini menyimpan potensi wisata berupa pantai yang indah dengan hamparan pasir putih yang dihiasi dengan terumbu karang. Lokasi ini juga sering digunakan selancar oleh turis asing.

Kegiatan pendampingan awal yang kami lakukan adalah sosialisasi PLBPM di desa lokasi melalui forum rembung desa. Karena desa ini merupakan desa tindak lanjut dalam kegiatan ini, masyarakat telah memahami sekilas mengenai PLBPM. Meskipun demikian, masyarakat tetap antusias mengikuti jalannya rembung desa. Terutama saat kami memaparkan salah satu lingkup kegiatan PLBPM yang berupa penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana

1 jam. Antara wilayah permukiman pesisir dan berbukitan dipisahkan oleh batas alam berupa hutan. Sebagian besar bangunan rumah penduduk telah menggunakan batu-bata, namun masih ditemukan rumah semi permanen dan non permanen. Kondisi lingkungan permukiman di desa ini masih belum teratur karena kurangnya prasarana dan sarana terutama jalan lingkungan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), drainase dan sanitasi. Pada musim penghujan, permukiman dan jalan lingkungan yang tergenang karena jalan yang berupa tanah sehingga sulit dilewati. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 1.373 jiwa yang terdiri dari 473 KK, dimana lebih dari 95% bekerja sebagai nelayan, dan sebagian kecil masyarakat desa bekerja sebagai petani, pe-

Zonasi karena bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang baru. Disamping sosialisasi, agenda yang dibahas dalam rembung desa ini adalah pembentukan LK dan penunjukan Motivator sekaligus pembentukan Tim Kerja Rencana Zonasi. LK dan Motivator desa pada tahun sebelumnya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat desa untuk mewakili masyarakat desa dalam kegiatan ini. Namun dalam rembung desa kali ini, ada segelintir masalah mengenai persepsi kawasan target group. Ada beberapa tokoh masyarakat yang menghendaki kawasan target group dipindahkan di dusun lain, dimana dusun tersebut berada di wilayah perbukitan dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan. Kami dan tim TPD mencoba memberikan sedikit pemahaman mengenai



Trenggalek

KABUPATEN



Membangun Desa Pesisir di Kabupaten Trenggalek

Oleh: Harwi Fia Maraputra



Kabupaten Trenggalek terletak pada koordinat 7053'8034' Lintang Selatan dan 111024'112011' tepatnya di sebelah selatan dari provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sekitar 1.900 km dan 7 (tujuh) desan pesisir. Potensi perikanan di kabupaten ini cukup besar.

Hasil perikanan tersebut berupa tuna mata besar, cakalang, tongkol como, layang bengkol, layang deles, dan layur. Jika anda mau berkunjung ke Kabupaten Trenggalek anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Surabaya dan Malang, setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 4 (empat) jam dari kota tersebut.

Tahun 2009 merupakan tahun pertama bagi Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat (PLBPM), yang bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir memajukan kawasannya melalui kemandirian masyarakat. Artinya masyarakat diberi kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan daerahnya. Tentunya dengan pendampingan dari pemerintah daerah setempat dan Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Pelaksanaan kegiatan PLBPM dilakukan di dua desa pesisir. Penentuan lokasi pelaksanaan dilakukan oleh Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD). Pada acara pemilihan desa lokasi pelaksanaan tim FKTD memilih Desa Tasikmadu dan Karanggandu sebagai desa lokasi pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kabupaten Trenggalek, setelah melalui metode skoring dan survey lapangan yang dilakukan bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Desa Tasikmadu pada dasarnya merupakan desa yang menjadi pusat kegiatan perikanan dan kelautan terbesar di Trenggalek yang mengalami keterpurukan infrastruktur lingkungan. Sedangkan Desa Karanggandu merupakan desa pesisir yang mempunyai potensi di bidang perikanan tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat pesisir.

Desa Tasikmadu merupakan bagian dari Kecamatan Watulimo yang luasnya sekitar 28,45 km². Topografi daerah ini datar, berombak dan curam dengan ketinggian 2 (dua) m dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini dapat menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh kurang lebih 47 km dari ibukota kabupaten atau dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Pemukiman masyarakat di desa ini umumnya terpusat di daerah pusat kegiatan seperti pelabuhan, pasar dan kantor desa. Sebagian besar pemukiman penduduk berpola linier mengikuti garis pantai dan ruas jalan. Bangunan rumah masyarakat di desa ini terdiri dari rumah permanen dan non permanen dan masih sangat sederhana. Kondisi infrastruktur pemukiman di desa ini tidak teratur dimana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti masih sedikitnya drainase (saluran air), banyaknya Tembok Penahan Jalan (TPJ) yang rusak, kondisi jalan lingkungan yang tidak layak dan sanitasi lingkungan yang buruk dengan belum adanya fasilitas MCK. Jumlah penduduk desa ini adalah 10.378 jiwa atau terdiri dari 3.760 KK. Masyarakat di desa ini mayoritas bekerja sebagai nelayan sebesar 35%, mata pencaharian yang



mendukung kegiatan di bidang perikanan sangat besar hingga 20% seperti buruh angkut, pedagang ikan ataupun tengkulak ikan. Potensi unggulan di desa ini adalah potensi hasil perikanan dan kelautan (meliputi : tuna mata besar, cakalang, tongkol como, layang benggol, layang deles, dan layur).

Desa Karanggandu termasuk dalam Kecamatan yang sama dengan Desa Tasikmadu. Luas desa ini sekitar 49,60 km². Perjalanan menuju desa ini dapat menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh kurang lebih 48 km dari ibu kota kabupaten atau dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Pemukiman masyarakat di desa ini umumnya terpusat di daerah pusat kegiatan, namun sebagian besar pemukiman penduduk berpola linier mengikuti garis pantai dan ruas jalan. Rumah-rumah penduduk masih sangat sederhana baik permanen maupun semi permanen. Kondisi infrastruktur masih minim dimana sarana dan prasarana penunjang pemukiman sangat terbatas. Seperti tidak adanya sistem drainase, banyaknya Tembok Penahan Jalan (TPJ) yang rusak, kondisi jalan



setapak lingkungan dan aspal yang tidak layak, serta rusaknya tanaman mangrove yang ada. Jumlah penduduk desa ini adalah 6.464 jiwa atau terdiri dari 2.187 KK. Masyarakat di desa ini mayoritas nelayan dan petani. Mata pencaharian yang mendukung kegiatan di bidang perikanan sangat besar seperti buruh angkut, pedagang ikan ataupun tengkulak ikan. Potensi unggulan di desa ini adalah potensi hasil

Jenis Kegiatan PLBPM di Kabupaten Trenggalek

Kegiatan PLBPM	Desa Tasikmadu	Desa Karanggandu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembuatan Drainase	461,25 m	405,9 m
Pembuatan Tembok Penahan Jalan (TPJ)	135,30 m	184,4 m
Rabat Jalan Lingkungan	1048 m	1026 m
Pengaspalan Jalan Lingkungan	-	1201,05 m
Pembuatan MCK	1 unit	-
Penanaman Mangrove	-	46.300 batang
Rehabilitasi Rumah Warga	14 unit	15 unit

perikanan dan kelautan (meliputi : tongkol como, layang benggol, layang deles, dan layur).

Berebek dari hasil pelatihan TAP di Jakarta bulan April lalu, kami ikut serta dalam pendampingan kepada masyarakat Desa Tasikmadu dan Desa Karanggandu untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PLBPM. Pada rembug desa yang pertama di Desa Tasikmadu adalah melakukan sosialisasi PLBPM pada masyarakat, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan penunjukan motivator desa. Perlunya sosialisasi adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu PLBPM. Respon masyarakat sendiri terhadap kegiatan ini sangat antusias dibuktikan dengan banyaknya masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir untuk bermusyawarah.



Sedangkan di Desa Karanggandu sambutan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini juga luar biasa antusiasnya. Mekanisme proses pembentukan LK dan penunjukan motivator dilakukan dengan pengusulan orang-orang yang dianggap mampu mewakili, mengetahui seluk beluk atau mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kemudian dimusyawarahkan dihadapan masyarakat yang hadir, apakah disetujui atau tidak. nama-nama calon yang diusulkan tersebut. Kemudian disahkan oleh Surat Keputusan (SK).

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa ini, keikutsertaan masyarakat desa sangat aktif karena masyarakat lebih mengetahui kegiatan mana yang dirasa perlu untuk segera dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat

sekitar. Motivator desa yang terpilih di kedua desa lokasi pelaksanaan ini dapat mewakili aspirasi masyarakat, mengutarakan permasalahan yang ada di kedua desa mereka selama ini, dan memberikan usulan kegiatan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, motivator juga dapat menyemangati masyarakat untuk selalu aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang terangkat dalam penentuan kegiatan prioritas di Desa Tasikmadu dan Karanggandu ini diantaranya sistem drainase yang sangat kurang, infrastruktur desa yang masih buruk, tidak ada MCK, sanitasi yang buruk serta tidak terpeliharanya ekosistem pesisir sehingga rusaknya vegetasi pesisir. Pada umumnya rembug desa yang dilaksanakan



untuk menentukan kegiatan prioritas dalam mengatasi masalah-masalah desa tersebut, berjalan dengan lancar. Hanya saja terjadi permasalahan pada saat penentuan penerima bantuan untuk perbaikan rumah. Masing-masing individu masyarakat bersikeras untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun setelah diberi pengertian dengan menjelaskan bahwa dana PLBPM ini terbatas hingga tidak semua usulan dari masyarakat dapat direalisasikan. Dengan skala prioritas ini dapat ditentukan titik mana atau jenis kegiatan yang dirasa sangat perlu dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sedangkan kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada kegiatan ini, dapat direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM berupa pendampingan dan pengawasan pada kedua desa lokasi pelaksanaan kegiatan. Program lain yang dilakukan kedua desa sebagai sharing Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun pemerintah provinsi terhadap kegiatan PLBPM, berupa alokasi dari dana DAK dan PAK untuk penanaman mangrove untuk perbaikan ekosistem pesisir dan mitigasi bencana dari DKP provinsi.

Peran serta masyarakat desa Tasikmadu dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM adalah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik dengan bergotong royong. Sebelum dana bantuan PLBPM cair, setiap minggu mereka (bapak-bapak di bantu pemuda dari karang taruna) mengadakan "gerakan" (gotong royong) mencari batu koral untuk kegiatan fisik rabat jalan lingkungan. Saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat bahu membahu membawa material dari jalan utama menuju jalan kampung, hal ini dilakukan karena jalan desa yang sempit sehingga truk pengangkut material tidak bisa langsung masuk lokasi kegiatan. Ibu-ibu di desa ini tidak mau ketinggalan dalam berpartisipasi membangun desa, mereka memberikan sumbangsih berupa penyediaan makanan dan minuman untuk para warga yang bekerja, bahkan sebagian ibu-ibu ada yang membantu mengangkat material genteng untuk rehab rumah dengan cara estafet karena lokasi rumah tidak berada di pinggir jalan.

Peran serta masyarakat Desa Karanggandu juga cukup tinggi. Semua masyarakat melakukan gotong royong, karena masyarakat menginginkan agar terciptanya keteraturan lingkungan pemukiman, yang nantinya keteraturan tersebut dapat menopang mobilitas ekonomi masyarakat Desa Karanggandu itu sendiri. Motivator desa menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan penjelasan tentang manfaat dari kegiatan PLBPM. Pada prinsipnya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Dengan terciptanya keteraturan lingkungan pemukiman, maka pada akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penjelasan tersebut disampaikan saat sosialisasi maupun pengajian yang diadakan oleh warga

supaya partisipasi masyarakat meningkat.

Dengan adanya PLBPM ini menyadarkan warga dan masyarakat sekitar betapa pentingnya penataan lingkungan permukiman. Proses perencanaan melalui rembug desa hingga kegiatan fisik dengan bergotong royong telah meningkatkan kekompatan dan kebersamaan masyarakat desa. Kondisi masyarakat desa menjadi lebih baik, tingkat perekonomian masyarakat meningkat dengan terbangunnya fasilitas infrastruktur di kedua desa. Pembangunan saluran air (drainase) sangat bermanfaat untuk menghindari genangan air yang selama ini merupakan pemandangan yang buruk di kedua desa tersebut. Tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat, karena selain sistem drainase yang sudah baik, pembangunan MCK juga mengajarkan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Pembuatan Tembok Penahan Jalan (TPJ) di kedua desa bermanfaat untuk menghindari timbunan lumpur dan tidak terjadi longsor. Rabat jalan lingkungan di kedua desa bermanfaat untuk memperlancar akses transportasi masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapan yang diperoleh. Pengaspalan jalan lingkungan di Desa Karanggandu dapat memperlancar akses transportasi masyarakat. Rehabilitasi rumah warga di kedua desa masing-masing Desa tasikmadu 14 unit dan Desa Karanggandu 15 unit, selain bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat juga untuk meningkatkan nuansa tata bangunan rumah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir membuat masyarakat, mengerti arah tujuan pembangunan dan pengembangan desa untuk kemajuan masyarakat desa itu sendiri. Karena semua kegiatan dalam PLBPM dikerjakan oleh warga desa sendiri maka mereka pulalah yang harus menjaga dan memelihara semuanya itu, baik itu berupa fasilitas fisik maupun ekosistem pesisir. Penanaman mangrove dapat menghindarkan warga dari bahaya abrasi pantai. Untuk lebih optimal, masyarakat kedua desa sepakat untuk membuat peraturan desa dalam pemeliharaan hasil kegiatan PLBPM. Masyarakat juga sepakat untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan PLBPM. ●

Biografi

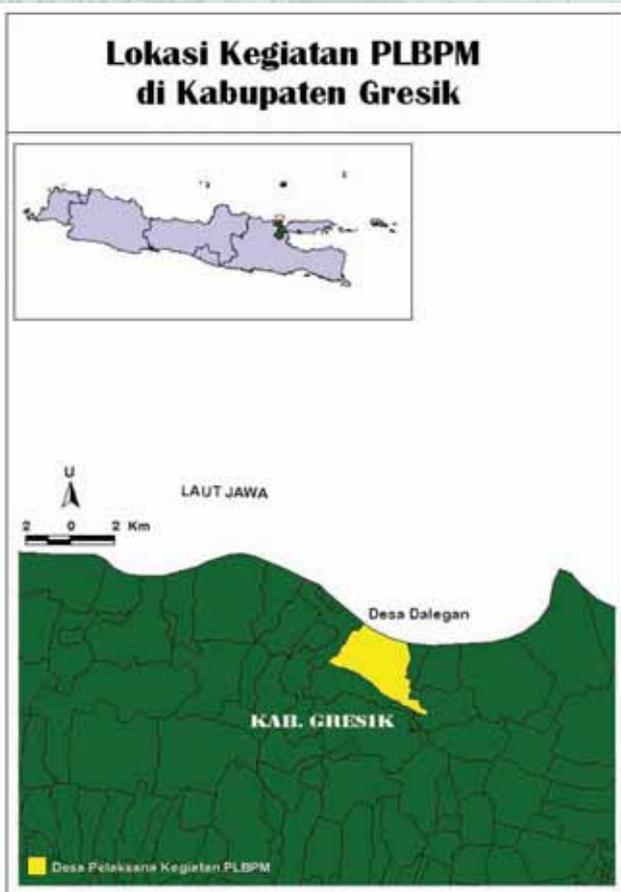
Sekilas Mengenai Penulis



HARWI FIA MARAPUTRA, S.Pi, dilahirkan Trenggalek pada tanggal 9 November 1984, menempu study di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya dan berhasil mendapat gelar S.Pi pada tahun 2007. Bekerja perusahaan cat di PT. Tanuri Nusatama di Kota Malang. Tahun 209 menjadi TAP PLBPM di Kab. Trenggalek. Kegiatan ini mampu mendorong masyarakat desa pesisir dalam menata lingkungan, mereka sendiri yang merencanakan, melaksanakan sampai menikmati hasil dari kegiatan.

Saya ingin memotivasi masyarakat bahwa kegunaan kegiatan ini nantinya bermanfaat untuk mewujudkan desa pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir. Selama menjadi TAP yang saya rasakan mulai dari rebug desa, survey lapang, mendampingi dalam penyusunan RAB dan sampai dengan pengawasan pelaksanaan dapat mengetahui karakter masyarakat pesisir yang juga dapat menjadi pelajaran tersendiri bagi saya selaku TAP. ●





Gresik
K A B U P A T E N



Senyum Mengembang di Pesisir Kabupatenku

Oleh: Miftakhlul Huda, Totok Haryono dan Siswanto



Gresik... Anda mungkin pernah mendengarnya. Kabupaten ini terkenal dengan produksi semennya. Kabupaten ini juga terkenal dengan tempat wisata sejarahnya, dimana terdapat makam Syech Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri sebagai wali besar penyebar agama Islam. Dahulu kabupaten ini bernama Kabupaten Soerabaya, namun sejak tahun 1978 berdiri sebagai kabupaten tersendiri. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sejauh 140 km dan terdiri dari 48 desa pesisir. Potensi kabupaten ini berupa pengembangan industri perikanan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Untuk mencapai kabupaten ini, Anda dapat menggunakan pesawat menuju Bandara Internasional Juanda dan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 2 jam.

Pada tahun 2009, Kabupaten Gresik baru mendapat kesempatan untuk menata desa pesisir melalui program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Dalam penentuan desa pelaksana kegiatan, berbagai faktor kepentingan muncul demi meraih simpati saat bersamaan dengan pemilihan DPRD dan Bupati Gresik pada tahun 2010. Kondisi desa pesisir di kabupaten ini

sangat merata sehingga kesulitan dalam menentukan desa pelaksana. Namun adanya petunjuk penentuan desa pada Pedoman Pelaksanaan PLBPM dapat membantu penentuan desa tersebut. Selain itu, program ini merupakan program nasional yang pertama dan diharapkan dapat mengangkat kabupaten ini ke tingkat nasional dengan potensi wisata pantainya. Dari pertimbangan tersebut, pelaksanaan kegiatan PLBPM dilakukan di Dusun Krajan dan Dusun Mulyorejo yang terletak di Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Dahulu, daerah ini merupakan dengan pemandangan yang indah, akan tetapi pencemaran dan degradasi telah merusak daerah ini. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan pesisir sehingga perlu diadakannya perbaikan lingkungan.

Dusun Krajan memiliki luas sekitar 244,043 ha, yang terbagi atas 6 Rukun Warga dan 25 Rukun Teranga. Garis pantai dusun ini adalah 1 km dan terletak pada ketinggian 2 - 15 m diatas permukaan laut. Untuk menuju dusun ini, membutuhkan waktu selama 1,5 jam dengan menggunakan transportasi darat. Pemukiman masyarakat di dusun ini masih menyebar. Kondisi infrastrukturnya seperti air bersih dan jalan yang belum memadai dan belum tersedianya tempat pendaratan ikan. Jumlah penduduk dusun ini sebanyak 3.942 jiwa dan terdiri dari 1.146 KK. Penduduknya sebagian bekerja sebagai nelayan tradisional. Penghasilan nelayan di dusun ini

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Potensi unggulan dusun ini adalah pariwisata pantainya, yang terkenal dengan nama Wisata Segoro Indah Dalegan (WISID). Akan tetapi, kawasan wisata ini masih membutuhkan perbaikan dalam sarana prasarana.

Dusun Mulyorejo memiliki luas sekitar 173,140 ha, dengan panjang garis pantai sekitar 1 km dan terletak pada ketinggian 2 - 15 m diatas permukaan laut. Untuk mencapai dusun ini, dapat menggunakan transportasi darat selama 1,5 jam. Pemukiman masyarakat dusun ini tersebar dengan kondisi tata ruang yang tak teratur. Kondisi infrastrukturnya masih membutuhkan sarana dan prasarana seperti pengadaan tambatan perahu, pavingisasi jalan dan pengaturan saluran air. Jumlah penduduknya sebanyak 883 jiwa yang terdiri atas 255 KK. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional, dengan peng-



hasilan yang tak menentu.

Sosialisasi PLBPM dilakukan melalui pertemuan rebug desa, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan aparat desa. Secara umum, masyarakat menyambut baik program ini. Untuk memperlancar kegiatan, diperlukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan motivator desa. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi waktu, maka aparat desa mengumpulkan tokoh masyarakat dari kedua dusun dalam satu meja perundingan dalam menentukan LK dan motivator desa.

Masyarakat antusias untuk menjadi anggota LK dan motivator desa, sehingga terjadi perdebatan antar masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tenaga Ahli Pendamping (TAP) memberikan pertimbangan mengenai



tingkat kemampuan, pengaruh dan kharisma. Sehingga LK dan motivator dapat dimengerti dan diterima oleh berbagai pihak masyarakat.

Setelah permasalahan pembentukan LK selesai, timbul permasalahan lain. Permasalahan ini terjadi saat penentuan kegiatan prioritas. Setiap masyarakat memaksakan agar usulan diterima. Akhirnya diambil keputusan untuk menyaring aspirasi warga lebih dulu dan setelah itu diadakan pemilihan kegiatan prioritas. Kemudian disepakati beberapa usulan seperti penyediaan air bersih, pavingisasi jalan pemukiman, pembangunan tempat pendaratan ikan, perbaikan rumah nelayan, pavingisasi jalan wisata dan penghijauan.

Masyarakat dusun Mulyorejo mengusulkan kegiatan prioritas antara lain pembangunan tambatan perahu, paving jalan lingkungan, rehabili-

tasi saluran air, perbaikan rumah nelayan, dan penghijauan. Walaupun masih banyak usulan lain, kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas yang telah disepakati, mengingat besaran dana dan waktu pelaksanaannya yang terbatas. Kegiatanpun berlanjut untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang membutuhkan waktu lebih lama. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, karena anggota LK serta motivator desa punya kesibukan masing-masing. Penyusunan RAB ini, didampingi oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP) yang diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama.

Pemerintah daerah berpartisipasi dalam memperlancar segala urusan kegiatan PLBPM, karena kegiatan ini sangat bermanfaat dalam pembangunan pedesaan. Program ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2007 yang pendanaannya berasal dari APBD dan PAD desa.

Pelaksanaan program PLBPM Tahun Anggaran 2009 di dusun Krajan dan dusun Mulyorejo telah memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakatnya. Mereka bahkan mengharapkan agar program ini terus berkelanjutan. Selain memudahkan mobilitas, juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keindahan dan hidup sehat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbangunnya fasilitas infrastruktur, memberi dampak secara langsung bagi masyarakat dalam mengubah pola hidupnya. Jalan yang tertata bagus, kebutuhan air yang terpenuhi, pantai yang tertata rapi dan hijau, menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam meningkatkan ekonominya. Tumbuhnya pola pikir masyarakat bahwa mereka sebenarnya mampu untuk mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang bersih, indah, asri, dan sehat, yang didukung oleh penataan industri, maritim, agraris, dan niaga yang baik dan rapi.

Sebagai ucapan terima kasih maka masyarakat berjanji untuk terus menjaga amanah yang telah mereka peroleh dengan mengadakan dana partisipasi rutin dalam rangka memelihara fasilitas fisik yang telah terbangun, bahkan mengadakan perbaikan atau melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan. ●

Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Gresik

Kegiatan PLBPM	Dusun Krajan	Dusun Mulyorejo
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Tambatan Perahu	-	30 m
Air Bersih	1 unit	-
Paving Jalan	472 m ²	1.500 m ²
Saluran air / Drainase	-	200 m
Pusat Pendaratan Ikan (PPI)	1 unit	1 unit
Paving Wisid	180 m ²	-
Perbaikan Rumah Nelayan	3 unit	2 unit
Penghijauan	1120 btg	200 btg

Sekilas Mengenai Penulis



MIFTAKHUL HUDA, SP, Pendidikan terakhir sebagai Sarjana Pertanian pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian - Universitas Jember. Pekerjaan yang ditekuni selalu berkenaan dengan hubungan kemasyarakatan. Pernah menjadi pembimbing siswa tingkat SD sampai SLTA, menjadi tenaga *Payment Point* pada lembaga koperasi dan terakhir sebagai Tenaga Ahli Pendamping pada program PLBPM. Menjadi TAP merupakan beban sekaligus tantangan karena pandangan masyarakat TAP

ahli dalam segala bidang. Masyarakat tidak memandang latar belakang keahlian tapi dianggap sama. Motivasi yang utama adalah saling belajar antara pribadi dengan masyarakat karena disini terdapat seni yang tak dijumpai dalam dunia pendidikan. Berbagai watak dan sifat menjadi kendala sekaligus ujian kemampuan dalam mengambil suatu keputusan. Interaksi sosial yang terjadi menuntut kedewasaan dalam bertindak. Mengerti, memahami orang lain dan ikhlas dalam berbuat merupakan motivasi penting dalam kegiatan ini. Kesan selama menjadi TAP adalah kita menjadi lebih memahami bahwa kebijakan dan kebijaksanaan seiring dalam perbuatan. Banyak pelajaran berharga yang diperoleh dari sisi kehidupan masyarakat yang beragam yang dapat menjadi bekal untuk terjun di masyarakat manapun nantinya.



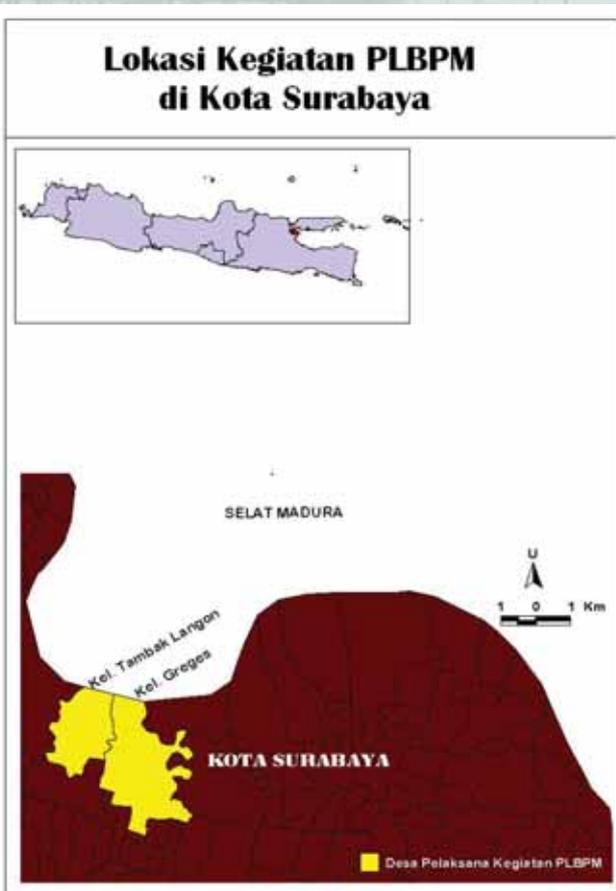
TOTOK HARYONO, ST, lahir di kota pahlawan-Surabaya, pada tanggal 29 Maret 1981. Pendidikan terakhir sebagai Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Sejak kuliah bekerja di instansi swasta, dan sebelum menjadi TAP bekerja di sebuah Kontraktor Sipil selama 5 tahun. Kemudian bekerja sebagai asisten Engineer di sebuah perusahaan perkapalan dan Crane selama 3 bulan. Lalu bergabung di Anc Architecture bergerak di bidang konsultan teknik sipil.

Selama menjadi TAP banyak hal yang dihadapi, banyaknya pemikiran-pemikiran masyarakat yang beragam. Anggapan masyarakat TAP mampu menghadapi semua problema yang muncul, namun karena keterbatasan ilmu yang dipunyai, penulis dituntut untuk terus belajar dan belajar. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, sehingga ilmu yang baru didapat ini nantinya dapat dikembangkan di kemudian hari.



SISWANTO, S.Pi, dilahirkan pada tanggal 8 Februari 1973 di Gresik - Jawa Timur. Gresik yang terkenal sebagai kota merupakan daerah tempat penulis dibesarkan dan tempat menuntut ilmu semenjak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jenjang pendidikan untuk mencapai gelar kesarjanaan dicapai dari sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang cukup terkenal di kota Gresik, yaitu Universitas Muhammadiyah Gresik.

Fakultas yang diambil penulis adalah Fakultas Perikanan jurusan Budidaya perikanan dan lulus pada tahun 2007 dengan predikat sangat memuaskan. Semenjak kuliah penulis sudah bekerja sebagai tenaga pengajar pada lembaga pendidikan swasta di kota Gresik. Penulis tertarik sebagai TAP pada kegiatan PLBPM Kabupaten Gresik karena kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan dan memberikan daya tarik untuk ikut terjun di dalamnya. Hal ini ditemukan pada kegiatan PLBPM yang mencoba memberikan pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menata lingkungannya secara mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan hingga merasakan manfaat dari hasil kegiatan PLBPM. Sebagai TAP, penulis melakukan pendampingan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan PLBPM, misalkan memotivasi masyarakat dalam menata lingkungannya, pembuatan RAB dan membantu pengawasan kegiatan fisik. Selama menjadi TAP, penulis merasa puas disaat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan oleh masyarakat melalui rembug desa karena dapat terwujud dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. ●



Surabaya

K O T A



Menata Pesisir, Di Antara Deru Roda- Roda Industrialisasi

Oleh: Gatot Ardian dan M. Farid Fauzi



Kota Surabaya merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur. Kota ini sangat mudah dijangkau, sekitar 50 menit dari Ibukota Negara, Jakarta, jika ditempuh menggunakan pesawat terbang. Kota yang mempunyai panjang garis pantai 34,11 km ini, memiliki jumlah penduduk sebesar 2.412.880 jiwa. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Jawa dan orang Madura. Namun sebagai kota besar kedua setelah Jakarta, daerah pesisir masih menjadi PR bagi pemerintah kota. Ketidakteraturan dan keku-

muhannya masih menjadi image yang melekat. Sehingga perlu perhatian yang lebih dalam penataan ruang daerah pesisir.

Beruntung bagi Surabaya mendapat bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menata lingkungan pesisir melalui program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) pada tahun 2009.

Penentuan daerah sasaran disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah kota Surabaya dan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Surabaya. Faktor lainnya adalah terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai dengan rusaknya ekosistem pesisir. Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka melalui rapat Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dipilihlah Kelurahan Greges dan Kelurahan Tambak Langon sebagai lokasi pelaksanaan program



PLBPM tahun 2009. Kedua kelurahan tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Asemrowo.

Kelurahan Greges luasnya sekitar 5,83 km², dengan ketinggian daerah rata-rata 1,25 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ke Greges dilakukan melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dari pusat kota Surabaya. Lokasi pemukiman penduduk kelurahan ini terpusat di daerah pesisir, dimana sekitar lokasi merupakan daerah pergudangan. Jumlah penduduk kelurahan ini adalah 4.258 jiwa dan terdiri dari 1.171 KK. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di kelurahan ini sudah permanen (tembok) yang berjumlah 912 unit. Kondisi infrastruktur pemukiman di kelurahan ini kurang memadai, dimana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti jalan, MCK, penerangan dan tambak labuh. Masyarakat kelurahan ini mayoritas bekerja sebagai karyawan di sektor industri sebesar 68,75 %. Potensi unggulan di kelurahan ini adalah industri, pergudangan dan makanan hasil laut.

Kelurahan Tambak Langon yang luas daerahnya sekitar 2,95 km², mempunyai ketinggian rata-rata 2 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju Tambak Langon melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 60 menit dari pusat kota Surabaya. Lokasi pemukiman penduduk terpusat di daerah pesisir dimana sekitar lokasi merupakan daerah pergudangan. Jumlah penduduk kelurahan tambak Langon adalah 2.173 jiwa dan terdiri dari 504 KK. Mayoritas bangunan rumah masyarakat di kelurahan ini terdiri dari rumah tembok yang berjumlah 470 unit. Sama halnya dengan Greges, kondisi infrastruktur di kelurahan ini juga masih berantakan dan kurang memadai. Sarana dan prasarana penunjang pemukiman seperti jalan, MCK dan penerangan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Masyarakat di kelurahan ini mayoritas bekerja sebagai karyawan di sektor industri sebesar 53%. Potensi unggulan di kelurahan ini adalah industri, pergudangan dan makanan hasil laut.

Sosialisasi PLBPM kepada masyarakat kedua kelurahan ini, dilakukan melalui forum rembung kelurahan. Acara ini difasilitasi oleh pihak kelurahan, kelompok nelayan dan dihadiri oleh

dinas terkait serta Tenaga Ahli Pendamping (TAP). TAP direkrut oleh dinas yang bertugas mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM. Tanggapan masyarakat Greges terhadap PLBPM sangat antusias, bahkan mereka merasa program ini kurang panjang dan dananya kurang besar. Sedangkan pada kelurahan Tambak Langon yang hadir pada acara sosialisasi hanya para tokoh masyarakat dan pihak pemerintah Kelurahan. Hal ini dikarenakan Pak Lurah khawatir akan muncul konflik di kalangan masyarakat (berdasarkan pengalaman yang lalu). Mekanisme proses pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan penunjukan motivator dilakukan melalui forum rembung (musyawarah) yang dihadiri oleh pihak kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), kelompok nelayan, dinas terkait dan TAP.

Saat penentuan kegiatan prioritas, terjadi masalah di kelurahan Greges. Masalah tersebut muncul pada usulan kegiatan pembangunan tambak labuh. Sebagian warga merasa keberatan jika pengangkutan bahan-bahan bangunan melewati perkampungan mereka karena khawatir akan merusak jalan kampung. Pengurus LK berusaha mencari solusi untuk menyelesaikannya. Mereka melakukan pendekatan dengan Ketua RT dan warga sekitar untuk menjelaskan betapa pentingnya kegiatan ini bagi pembangunan kelurahan Greges secara keseluruhan dan apabila ada jalan kampung yang rusak, warga bersedia untuk memperbaiki kembali.

Setelah diadakan beberapa kali rembung (musyawarah) dengan warga kelurahan barulah dapat disusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di kedua kelurahan tersebut. Untuk memperlancar akses masyarakat diadakan pembuatan jalan paving. Pengadaan penerangan jalan diperlukan karena bila malam hari di kedua desa masih tampak gelap padahal aktivitas nelayan dan pekerja industri dilakukan pada malam hari. Untuk mengurangi degradasi lingkungan diadakan penanaman mangrove. Sedangkan pembangunan tambak labuh perahu hanya dilakukan di kelurahan Greges. Pada kegiatan PLBPM tahun 2009 ini ada satu kegiatan yang menjadi fokus yaitu pembuatan Rencana Tata Ruang Kelurahan dan Rencana

Zonasi Kawasan Pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita masyarakat dalam mengembangkan daerahnya menjadi wilayah pesisir yang maju dari segi ekonomi serta menghilangkan image daerah pesisir yang kumuh dan tidak teratur.

Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan ini berupa pendampingan dan pengawasan serta pengalokasian dana pendamping untuk kedua kelurahan pelaksana kegiatan PLBPM. Selain itu, sebagian bibit mangrove akan disediakan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. Sedangkan peran serta masyarakat kedua kelurahan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan ini mayoritas berupa tenaga serta fasilitas pertemuan (rembug) warga. Motivator dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara ikut serta dalam pertemuan-pertemuan warga. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



GATOT ARDIAN, S.Pi lahir di Surabaya tanggal 15 Oktober 1973. Masa kecil hingga SMP dihabiskan di Surabaya. Jenjang pendidikan SLTA ditempuh di SPPS-UPM Negeri Sidoarjo. Gelar Sarjana Perikanan (S.Pi) diperoleh setelah menamatkan kuliah tahun 2000 dari Fakultas Perikanan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Brawijaya Malang. Sejak di bangku kuliah sudah akrab dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terlibat dalam

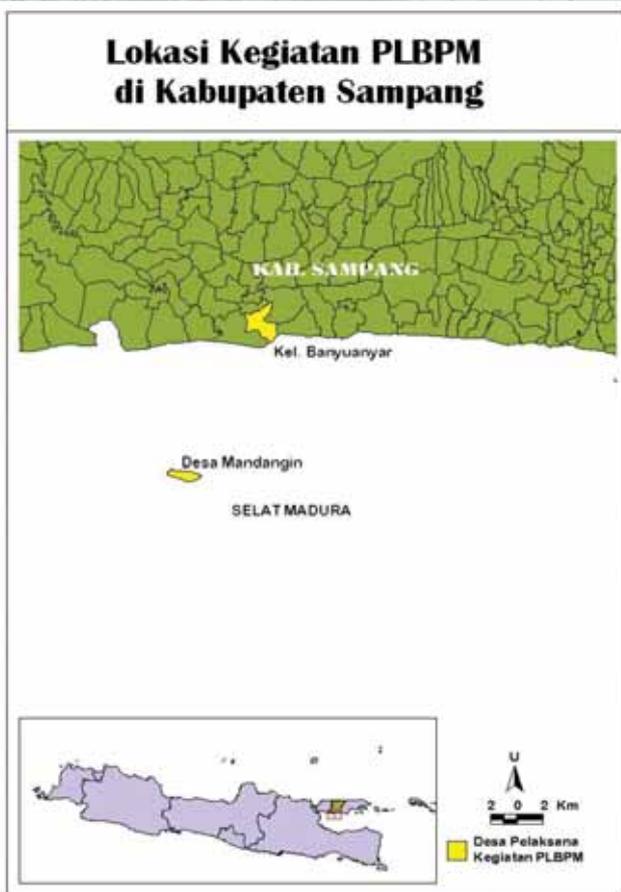
Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan usaha kecil, memperbanyak pengalaman pemberdayaan masyarakat, termasuk di daerah pesisir. Pengalaman kerja terkait pemberdayaan masyarakat antara lain: (1) *Community Mobilization Specialist* Kabupaten Aceh Jaya pada Program ETESP Sektor Perikanan ADB-Bina Swadaya-BRR NAD 2005-2008 (2) Tenaga Ahli pada Pemberdayaan Pesisir di Sampang dan sekarang menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM di Kota Surabaya.



M. FARID FAUZI, SE lahir di Tulungagung tanggal 7 Nopember 1979. Masa kecil hingga SMU dihabiskan di Tulungagung. Menamatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Airlangga tepatnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2005. Sejak saat itu mulai akrab dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga tergabung dalam Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan usaha kecil.

Banyaknya pengalaman yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk di daerah pesisir memotivasi untuk menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM di Surabaya. Pengalaman kerja yang terkait pemberdayaan masyarakat antara lain: (1) Ketua Koperasi Amanah di Bulak Banteng Surabaya, (2) Manajer Program Pengembangan Usaha Mikro di Surabaya, (3) Manajer Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Sampang. ●





Sampang

K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir di Kabupaten Sampang

Oleh: Ach. Faridy dan Faizal Cahyadi



Sampang merupakan salah satu kabupaten dari Pulau Madura yang mempunyai banyak tempat wisata. Seperti Pantai Camplong, Pulau Mandangin, Air Terjun Toroan, Waduk Klampis, Kuburan Madegan, Reruntuhan Raden Segoro dan hutan monyet Nepa, Reruntuhan Pababaran dan Batu Ampar. Kabupaten Sampang terletak diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan di sebelah barat dan Kabupaten Pamekasan di sebelah timur. Sedangkan di utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Kabupaten ini memiliki 9 kecamatan pesisir dengan panjang garis pantai 86 m dimana disepanjang garis pantai tersebut terdapat 35 desa pesisir. Mayoritas hasil tangkapan nelayan berupa udang dan ikan yang sebagian diolah menjadi petis, krupuk dan ikan kering.

Morosenaba Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Jika anda ingin berkunjung ke Kabupaten Sampang, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Surabaya. Setelah itu melalui jalur darat melewati jembatan Suramadu atau laut dengan menggunakan kapal Ferry. Jangka waktu yang ditempuh selama perjalanan dari Surabaya ke Kabupaten Sampang sekitar ± 2 jam.

Sampang mendapat bantuan kegiatan untuk menata lingkungannya dari pemerintah pusat berupa Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) untuk yang pertama kalinya di tahun 2007. Terdapat dua desa pesisir yang menjadi lokasi pelaksanaan. Berdasar rapat Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD) dan hasil survey lapangan maka ditetapkan Kelurahan Banyuanyar dan Desa P. Mandangin sebagai desa yang dianggap paling tepat untuk mendapatkan bantuan kegiatan PLBPM ini. Melihat kondisi lingkungan desa yang sangat jauh dari kondisi desa pesisir yang sehat, bersih dan teratur, maka

kegiatan PLBPM di Banyuanyar difokuskan untuk membenahi kondisi lingkungan dengan Pembuatan Drainase/Saluran, Rabat Beton, dan Tutup Plat Beton.

Sedangkan untuk desa P. Mandangin dimana sarana dan infrastruktur desa yang sangat kurang, difokuskan pada pembangunan kedua hal tersebut. Pembuatan jalan dengan paving stone dan pembangunan Balai Nelayan, merupakan beberapa diantara kegiatan fisik PLBPM di desa ini. Dengan dibangunnya jalan maka diharapkan pada musim penghujan nantinya, jalan yang ada sudah tidak becek sehingga mempermudah akses penduduk kemanapun juga. Sedangkan pembangunan Balai Nelayan di maksudkan agar ada suatu tempat untuk para nelayan dan masyarakat untuk bermusyawarah menyampaikan aspirasi mereka untuk kemajuan desa. Selain itu ruangan besar seperti Balai Nelayan ini, menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk menerima tamu atau kunjungan dari luar daerah P. mandangin.

Pada tahun 2008 kabupaten Sampang mendapatkan kembali bantuan kegiatan PLBPM. Setelah dilakukan pemilahan dan penilaian hasil kegiatan PLBPM pada tahun sebelumnya maka ditetapkan Kelurahan Banyuanyar sebagai daerah tindak lanjut. Kegiatan yang menjadi prioritas pada PLBPM tahun 2008 masih sama dengan tahun 2007 yaitu berupa Rabat Beton, drainase/saluran, Prasasti dan Portal Jalan. Kelurahan Banyuanyar merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sampang yang terletak sebelah timur Kecamatan Sampang dengan jarak 4,5 Km dari ibu kota kecamatan terdekat yang dapat ditempuh selama ± 15 menit dan memiliki luas 167,098 Ha. Jumlah penduduk keseluruhan di Kelurahan Banyuanyar adalah 6.506 jiwa dengan tingkat penduduk miskin 3.815 jiwa (60%). Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk hidup dalam taraf ekonomi rendah. Sebagian penduduk Kelurahan Banyuanyar bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sekitar 35% dari jumlah penduduk , mereka bertempat tinggal disebelah selatan Kelurahan Banyuanyar yaitu di Desa Ju' Lanteng. Topografi desa ini berada dikedirgian 1,8 m diatas permukaan laut.

Selain itu, Kelurahan Banyuanyar khususnya Desa Ju' Lanteng menghadapi beberapa permasalahan antara lain : masih terbatasnya infra-

Morosenaba Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

struktur, hal tersebut ditandai dengan masih adanya beberapa jalan berupa jalan tanah. Pada musim penghujan jalan tersebut menjadi becek sehingga berdampak pada kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi, disamping itu Desa Ju' Lanteng terletak di tepi sungai yang menghubungkan ke laut. Tidak jarang Desa tersebut mengalami banjir akibat air laut pasang, setidaknya terhitung dua kali dalam satu bulan desa tersebut mengalami banjir yang mengakibatkan jalan menjadi becek dan menyisakan genangan air dikarenakan sanitasi yang kurang baik sehingga lingkungan ini menjadi



kotor dan kumuh. Hampir setiap tahun masyarakat setempat menderita penyakit muntaber dan demam berdarah. Sehingga untuk ke tiga kalinya Kelurahan Banyuanyar di tahun 2009 ditetapkan sebagai daerah lokasi pelaksanaan kembali PLBPM melalui tahapan menggunakan panduan skoring penentuan desa lokasi pelaksanaan yang kemudian hasil skoring kami usulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Dari hasil skoring tersebut kami bersama Tim Pengendali Daerah (TPD) melakukan survey. Dari hasil survey kami mengajukan dua calon desa lokasi pelaksanaan yaitu Desa/Kelurahan Banyuanyar dan Desa Pulau Mandangin. dimana hasil skoring dan survey tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan dan pertimbangan dalam rapat FKTD.

Rapat FKTD menetapkan Kelurahan Banyuanyar sebagai lokasi tindak lanjut PLBPM tahun 2009. Berbekal dari pelatihan yang diperoleh di Jakarta bulan April lalu, kami bersama masyarakat desa Ju' Lanteng melakukan perte-

Kegiatan PLBPM	2007		2008	2009
	Kel. Banyuanyar	Pulau Mandangin	Kel. Banyuanyar	Kel. Banyuanyar
1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	1 Paket
2) Pembuatan jalan Paving Stone	-	2132,1 m	-	-
3) Pembangunan Balai Nelayan	-	1 buah	-	-
4) Rabat Beton	575,3 m	-	807,5 m	354 m
5) Drainase/Saluran	305 m	-	267 m	419,5 m
6) Prasasti	-	-	1 buah	-
7) Portal Jalan	-	-	1 buah	-
- Pek. Gorong-gorong Plat Beton	7 Unit	-	-	7 Unit
- Pek. Plat Beton penutup saluran	11,63 m	-	-	32 Unit

muan rembug desa di salah satu tempat tinggal warga. Di dalam pertemuan ini kami mendampingi masyarakat untuk memilih anggota dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK), juga menjelaskan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab LK, selain itu kami menampung aspirasi warga melalui tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian kami dapat mengetahui secara langsung segala permasalahan yang ada.

Pada pertemuan rembug desa berikutnya, kami mendampingi masyarakat untuk memilih Motivator Desa. Sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, pemilihan Motivator Desa tidak mengalami kesulitan karena di desa ini terdapat dua orang yang memiliki pengaruh besar dilingkungannya serta mempunyai rasa tanggung jawab dan kinerja yang baik.

Keputusan pemilihan Motivator Desa disepakati oleh seluruh warga yang hadir dalam pertemuan ini. Setelah itu, kami menjelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab Motivator Desa.

Dua hari setelah pemilihan Motivator Desa, kami bersama masyarakat melakukan pertemuan rembug desa kembali untuk menentukan prioritas kebutuhan yang akan menjadi pilihan dalam kegiatan PLBPM tahun 2009. Sebelum ke pokok pembahasan kami menjelaskan maksud dan arti prioritas itu sendiri kepada masyarakat agar dapat dipahami. Ternyata dalam mengikuti rembug desa ini masyarakat sangat antusias memberikan usulan-usulan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang ada. Tapi kami tekankan kepada masyarakat agar kegiatan prioritas disesuaikan dengan anggaran dana yang ada serta kegiatan prioritas lebih diutamakan pada infrastruktur pemukiman sesuai dengan Pedoman PLBPM. Masyarakat mengusulkan perbaikan jalan, pembuatan drainase dan tambahan perahu. Usulan dari masyarakat dilakukan secara voting agar tidak ada kecurangan dan masyarakat sendiri dapat mengetahui secara jelas hasil suara yang diperoleh. Dari beberapa usulan ini ada satu usulan dari masyarakat yang tidak kami pilih sebagai kegiatan prioritas yaitu tambahan perahu karena selain mendapat hasil suara terendah, juga kami pertimbangan akan berpotensi menimbulkan masalah. Misalnya perubutan dalam penggunaannya karena sebagian besar warga di desa ini berprofesi sebagai nelayan, yang tentu saja dalam

penggunaan dana akan mengurangi volume dalam perbaikan jalan dan pembangunan drainase yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan PLBPM. Masyarakat yang mengusulkan kegiatan ini tidak mau menerima penjelasan dari kami. Mereka tetap pada usulannya agar dapat dilaksanakan dengan memberikan alasan masih kurangnya tambahan perahu. Dari perbedaan pendapat ini, Motivator Desa memberikan penjelasan kembali kepada masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur lebih bermanfaat karena dapat dirasakan langsung penggunaannya oleh seluruh masyarakat. Mendengar penjelasan dari Motivator, masyarakat dapat mengerti dan menyepakati kegiatan yang dipilih dalam kegiatan prioritas adalah perbaikan jalan dan Pembuatan drainase. Setelah semua sepakat dengan kegiatan ini, kami melakukan pendampingan dalam menyusun RAB untuk pembangunan fisik. Selain kegiatan fisik, kami selaku TAP telah menyusun suatu Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Tata Ruang Desa sebagai cita-cita masyarakat desa dalam upaya membangun desanya dalam 5 tahun yang akan datang dan hal ini telah disepakati oleh masyarakat.

Masyarakat di desa ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik, mereka melakukannya secara bergotong royong. Sebagian ibu-ibu tidak mau kalah, mereka membantu dengan cara menyiapkan makanan untuk warga yang bekerja.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan menata lingkungannya sendiri. Dengan adanya kegiatan ini mereka menyadari pentingnya rasa peduli terhadap lingkungan dan pentingnya menata lingkungan sendiri. Kini dengan lingkungan baru yang tertata dan bersih, maka masyarakat merasa nyaman, sejahtera dan hidup sehat. Tidak ada lagi jalan rusak yang mengganggu mobilitas ekonomi dan tidak ada lagi genangan air yang menjadi sumber penyakit. Untuk menjaga hasil dari kegiatan yang telah dibangun masyarakat secara bersama-sama, masyarakat sepakat membuat peraturan desa dan melakukan kegiatan rutin bulanan dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas fisik yang ada. ●

Biografi

Sekilas Mengenai Penulis

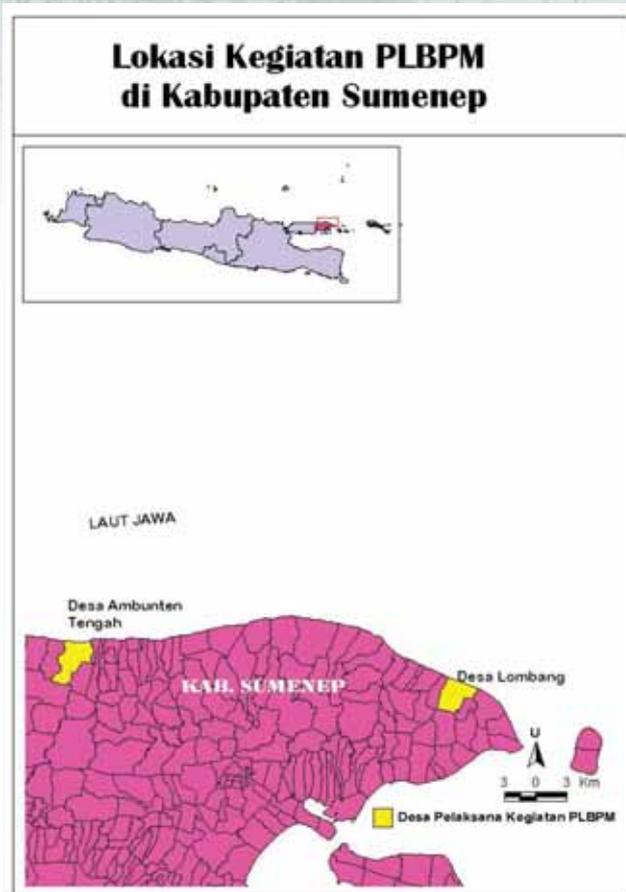


ACH. FARIDY, A.Md, dilahirkan pada tanggal 17 April 1984 di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Selama pendidikan hingga lulus SMU berada di Kabupaten Sampang, tahun 2003 saya melanjutkan pendidikan selama 3 tahun di Vocational Education Development Centre of Agriculture (VEDCA) Cianjur Jawa Barat jurusan Nautika Perikanan Laut. Lulus Tahun 2006 dan mendapat gelar Diploma 3. Pengalaman mengajar di SMKN 2 Probolinggo. Saya tertarik menjadi TAP karena saya ingin daerah pesisir yang ada di Kabupaten Sampang memiliki tata ruang yang baik serta memiliki lingkungan yang bersih dan sehat.



FAIZAL CAHYADI, ST di lahirkan pada tanggal 12 Oktober 1980 di Sampang Madura Jawa Timur dari kecil hingga SMP waktu saya habiskan di kabupaten Sampang selanjutnya Saya Melanjutkan di STM Bangunan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Hingga pada akhirnya di tahun 1999 saya di terima di program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan berhasil merampungkan gelar sarjana di tahun 2004. Dengan bekal gelar sarjana akhirnya mulai tahun 2005 saya bekerja di beberapa program pemberdayaan. Sebagai konsultan pengawas yang ada di Dinas dinas terkait di

Kabupaten Sampang dan juga di Propinsi Jawa Timur dan pada awal tahun 2007 saya kemudian merasa tertarik untuk menjadi TAP pada Program PLBPM hingga saat ini. ●



Sumenep

K A B U P A T E N



Pelaksanaan PLBPM di Kabupaten Sumenep

Oleh: Ananto Pratikno dan M. Zaqqi Abdih



Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten paling timur dari pulau Madura. Luas perairan laut kabupaten ini diperkirakan $\pm 50.000 \text{ km}^2$ dengan gugusan pulau sebanyak 126 pulau, dimana 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Panjang garis pantai kabupaten ini diperkirakan 577,76 km. Potensi unggulan kabupaten ini adalah budidaya kerang mutiara, budidaya ikan karang, budidaya ikan air tawar, budidaya rumput laut, dan potensi budidaya wisata bahari. Untuk mencapai kabupaten Sumenep, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Surabaya, yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam. Selama perjalanan akan banyak menjumpai pemandangan indah di pinggiran pantai.

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memberdayakan masyarakat pesisir sejak dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan dan kebutuhannya. Kedepannya akan terjadi proses keberlanjutan pengelolaannya oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kabupaten Sumenep dilakukan sejak tahun 2006 dengan lokasi kegiatan di dua desa yaitu desa Ambunten Tengah di kecamatan Ambunten dan Desa Lombang Pulau Gili Raja di Kecamatan Gili Genteng. Kemudian pada tahun 2007 lokasi kegiatan ada di Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten. Dan pada tahun 2009 kembali mendapat PLBPM yang dilaksanakan di Desa Lombang Pulau Gili Raja di Kecamatan Gili Genteng. Dalam penentuan desa pelaksana adalah dengan melihat potensi desa dan desa tersebut pernah melaksanakan kegiatan PLBPM di tahun sebelumnya. Karena kegiatan PLBPM tahun 2009 merupakan



tindak lanjut dari tahun sebelumnya. Sedangkan metode/cara yang dilakukan untuk menentukan adalah dengan melihat potensi desa melalui profil desa yang ada setelah itu baru melakukan survey ke lokasi. Desa Lombang termasuk dalam wilayah kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Luas wilayah desa ini adalah 45.800 ha dan terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Untuk menuju desa ini, dapat menggunakan jalur laut selama kurang lebih 3 jam dari kabupaten Sumenep. Permukiman masyarakat di desa ini umumnya menyebar di daerah pesisir dengan bangunan rumah dari anyaman bambu atau biasa disebut gedek. Kondisi infrastruktur permukiman di



desa ini tidak teratur, dimana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang permukiman seperti jalan desa, saluran air, tempat sampah, MCK, dan lain-lain. Jumlah penduduk desa ini adalah 5.482 jiwa dan terdiri dari 2.426 KK dan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Potensi unggulannya adalah budidaya rumput laut dan budidaya ikan karang (kerapu).

Untuk melakukan sosialisasi PLBPM kepada masyarakat desa pelaksana adalah dengan mengadakan rembung desa. Pada forum ini dijelaskan bahwa kegiatan PLBPM tahun ini lebih mengedepankan pada kegiatan perencanaan tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir. Sedangkan untuk kegiatan fisik merupakan tindak lanjut saja. Tanggapan masyarakat desa mengenai kegiatan PLBPM sangat antusias. Adanya PLBPM ini sangat membantu masyarakat dalam mengatur desa untuk pengembangan infrastruktur dan

kelengkapan sarana dan prasarana desa. Untuk mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan penunjukan motivator desa adalah dengan mengadakan musyawarah tingkat desa yang dihadiri kepala desa. Permasalahan yang ada pada saat musyawarah adalah perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan persepsi individu. Dengan cara memberikan pemahaman terhadap pokok permasalahan dan menjembatani antara pihak yang berbeda pendapat, permasalahan dapat diselesaikan. Masyarakat berperan aktif dalam penentuan kegiatan. Banyak usulan dari warga yang disampaikan dalam forum. Keaktifan masyarakat ini juga karena motivator desa



mampu menggugah semangat warga. Permasalahan yang timbul adalah semua usul warga maunya dijadikan prioritas. Namun di forum ini ditekankan bahwa kegiatan yang diprioritaskan adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menempuhnya dengan cara membuat skala prioritas berdasarkan azas manfaat. Berdasarkan hasil musyawarah diputuskan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penanaman ketapang untuk perbaikan ekosistem pesisir. Pengadaan sarana dan prasarana air bersih berupa tandon induk & distribusi serta sarana MCK umum. Pembangunan infrastruktur desa meliputi pavingisasi jalan, pembuatan saluran drainase, pengadaan sarana penyeberangan, penyediaan tempat sampah. Untuk penataan ruang dan zonasi dibuat penyusunan RTRW desa, perumusan Perdes dan pembuatan papan peta

zonasi. Untuk menjaga lingkungan dibuat papan himbauan. Musholla disertakan dalam kegiatan ini karena mayoritas penduduk adalah muslim dan belum mempunyai sarana ibadah yang layak.

Pemerintah kabupaten Sumenep berperan aktif dalam kegiatan pendampingan melalui Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan lapangan dan memonitor perkembangan pelaksanaan program. Selain itu turut serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul melalui rapat koordinasi antar instansi dan menyediakan alokasi dana pendamping PLBPM lewat APBD. Program lain yang dilakukan di desa pelaksana sebagai *sharing* pemerintah daerah adalah penanaman mangrove oleh Perhutani Tahun 2008, pengaspalan jalan menuju ke TPI sepanjang 1 KM.

Masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM aktif berperan serta ini berupa berpartisipasi dalam menyusun, merencanakan program kegiatan PLBPM serta mekasankan dan mengawasi jalannya kegiatan. Motivator desa menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pengarahannya pada warga tentang betapa pentingnya masyarakat merencanakan pembangunan desanya sendiri.

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan PLBPM. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang perencanaan menata lingkungan mereka sendiri. Dengan adanya fasilitas fisik yang dibangun seperti MCK, pengadaan air bersih dan jalan lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih, rapi dan indah masyarakat sangat terbantu. Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari masyarakat menjadi lebih mudah.

Namun demikian semua kegiatan hasil program PLBPM harus dijaga dan dipelihara agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah di bangun seperti membersihkan MCK secara terjadwal, mengeruk saluran air yang telah mengalami pendangkalan dan mengadakan *jimatan* (istilah iuran tiap minggu) untuk merawat fasilitas yang telah di bangun. ●



Pamekasan

KABUPATEN



Membenahi Desa Pesisir secara Partisipatif

Oleh: M. Hadi Risqianto dan Rakhmat Hartanto



Pulau Garam. Julukan itulah yang melekat pada Pulau Madura. Bagaimana dengan Karapan Sapi atau Sate Madura? Hal-hal tersebut juga mengingatkan Anda akan Pulau Madura. Namun berminatkah anda ke Madura? Mungkin Anda akan pikir panjang untuk memutuskannya. Namun setelah diresmikannya Jembatan Suramadu bukan pada bulan Juni 2009 oleh Presiden SBY arus wisatawan dan arus kegiatan ekonomi mulai meningkat. Jembatan yang dibangun untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, memang bertujuan memperlancar akses dari Pulau Jawa ke Madura sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan dan perekonomian di Pulau Madura. Pamekasan merupakan pusat kegiatan perekonomian di Madura dan sejak dulu dianalogikan sebagai pusat atau ibukota Madura. Pamekasan adalah salah satu dari empat kabupaten yang ada di Madura yang

terletak di bagian tengah Pulau. Kabupaten ini memiliki luas daratan 79.230 Ha dengan garis pantai sepanjang 52 km, dimana panjang pantai pesisir utara yakni 18 km dan panjang pantai pesisir selatan yakni 34 km. Dari 178 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan terdapat 8 desa di pesisir utara dan 18 desa di pesisir selatan. Pamekasan memiliki berbagai unggulan komoditi di berbagai sektor. Di sektor pertanian dikenal sebagai penghasil tembakau dan berbagai jenis palawija yang berkualitas baik. Sedangkan di bidang perikanan selain sebagai penghasil ikan-ikan pelagis kecil juga merupakan penghasil udang hasil budi daya yang menjadi komoditi ekspor. Jika anda

hendak berkunjung ke Kabupaten Pamekasan anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Surabaya, kemudian disambung dengan perjalanan darat sekitar 3 jam melalui Jembatan Suramadu. Sedangkan bila anda dari Surabaya ingin melanjutkan melalui perjalanan laut maka dapat menggunakan kapal ferry untuk menyeberang ke Kamal, Kab. Bangkalan, Madura. Setelah itu dilanjutkan perjalanan darat lagi melalui 2 kabupaten sejauh 83 km. Di sepanjang perjalanan, baik melalui jalur utara ataupun jalur selatan di Pulau Madura anda akan melihat pantai dengan mangrove yang cukup subur.

Pada tahun 2008 Kabupaten Pamekasan men-

dapatkan kesempatan untuk membenahi desa pesisirnya melalui program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Pada tahun tersebut pelaksanaan PLBPM dilaksanakan di dua desa pesisir yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan. Pada acara pemilihan lokasi pelaksanaan, tim Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD) cukup kesulitan dalam menentukannya. Kami selaku Tenaga Ahli Pendamping (TAP) mengusulkan skoring untuk setiap desa pesisir yang ada. Berdasarkan hasil skoring kemudian dilakukan survey lokasi ke desa-desa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan bersama Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Sebagai pertimbangan pemerataan akses pembangunan antara pesisir pantai utara dan pesisir pantai selatan maka dipilih dua desa yang

lokasi pelaksanaan.

Desa Sotabar merupakan bagian dari Kecamatan Pasean yang luasnya 335,625 km². Topografi desa ini merupakan dataran rendah serta sebagian juga terdiri dari bukit dan lembah pada wilayah yang lebih masuk ke daratan, dengan ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 41 km dari ibukota kabupaten atau dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan ke arah utara Kabupaten Pamekasan. Rute perjalanan ke desa ini sedikit kurang baik dan berkelok-kelok melewati perbukitan dan lembah. Permukiman masyarakat terpusat di pinggir pantai. Bangunan rumah di desa ini sudah cukup baik tetapi ada beberapa rumah

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Kegiatan PLBPM

Kegiatan PLBPM	2008		2009
	Desa Bandaran	Desa Sotabar	Desa Sotabar
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket
Pembangunan Talud	-	1 Unit	-
Pembuatan Papan Informasi	10 Unit	5 Unit	-
Penghijauan	1078 Bibit	-	-
Rabat Beton	9 Lokasi	-	-
Paving	-	3 Lokasi	7 Lokasi
Paving + TPT	-	1 Lokasi	-
Paving + Saluran	-	4 Lokasi	2 Lokasi
Pembangunan Saluran	4 Lokasi	-	1 Lokasi
Penyediaan Sarana Air Bersih			
- Rumah Mesin Pompa	-	1 Unit	-
- Tandon Air/ Reservoir	-	1 Unit	-
- Pisanisasi	-	1 Unit	-
- Mesin Pompa dan Genzet	-	1 Unit	-
- Lampu Penerangan	-	2 Unit	1 Unit
TPS	3 Unit	-	2 Unit
Mandi Kakus (MK)	3 Unit		
Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	33 Unit	34 Unit	8 Unit



mewakili masing-masing pesisir. Dua desa pelaksanaan terpilih adalah Desa Sotabar yang terletak di pesisir pantai utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Desa Bandaran yang terletak di pesisir pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Desa Sotabar merupakan desa pesisir yang sulit dijangkau dan masih sedikit program pemerintah yang diakses desa tersebut sehingga terbatasnya infrastruktur serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat pesisir. Untuk Desa Bandaran merupakan desa pesisir yang mengalami keterpurukan infrastruktur lingkungan dan mengalami degradasi lingkungan pesisir. Hasil skoring dan laporan pengamatan lokasi tersebut kami laporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program PLBPM Kab. Pamekasan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan desa



yang masih tidak layak huni. Kondisi permukiman di desa ini dapat dikatakan tidak teratur, bangunan rumah banyak yang bertumpuk dan sedikit jarak ruang antar rumah penduduk. Pada musim hujan terdapat genangan air di jalan-jalan permukiman penduduk dan terdapat pula bau yang tidak sedap dari saluran pembuangan, dan sanitasi di desa ini cukup buruk serta belum tersedianya balai pertemuan. Masyarakat yang mendiami desa ini berjumlah 4.225 jiwa atau terdiri dari 1.392 KK, 47,91 % masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan, dan sisanya bekerja sebagai petani dan pedagang. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa ikan pelagis kecil, namun desa ini lebih dikenal sebagai penghasil teri nasi yang hasilnya merupakan komoditi ekspor.

Di Desa Sotabar tanggapan masyarakat pada dasarnya cukup baik, namun ada beberapa

masalah yang terjadi di internal mereka, yakni menyangkut konflik kepentingan dan politik diantara kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan proses pendekatan kami maupun dalam mengumpulkan masyarakat yang berbeda kepentingan cukup kesulitan. Namun berbekal ketelatenan dan kesabaran, kami dapat memfasilitasi kepentingan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Untuk meredakan konflik tersebut kami mengadakan rembuk desa beberapa kali, tidak hanya di rumah Kepala Desa saja tapi juga berpindah-pindah di rumah-rumah penduduk agar tercapai kesepakatan. Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan cukup lancar walaupun ada hambatan, oleh karena itu anggota LK kami usulkan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Sedangkan di Desa Bandaran



tanggapan masyarakatnya cukup baik, selain itu pula sikap otoriter Kepala Desa terhadap masyarakatnya menyebabkan segala perintah Kepala Desa diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu pemilihan anggota adan ketua Lembaga Kemasyarakatan berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Sayangnya usulan dari masyarakat tidak dapat disuarakan. Kepala Desa Bandaran sendiri sangat mendukung penuh Kegiatan PLBPM ini. Pada rembuk desa untuk penentuan kegiatan prioritas di Desa Sotabar pada tahun 2008, hal yang lebih banyak diusulkan adalah tentang perbaikan sarana dan prasarana terutama dalam hal pemilihan lokasi kegiatan fisik yang diprioritaskan untuk dikerjakan, sehingga kami sebagai TAP mengusulkan untuk menentukan skala prioritas yakni berdasarkan lima ketentuan

seperti disebutkan di atas. Semua masyarakat dapat menerima hasil keputusan dari kegiatan yang ditetapkan oleh hasil rembuk desa, yakni: pembuatan tanggul laut (talut) 1 unit, pemasangan papan informasi sebanyak 5 unit, paving stone di 3 lokasi, paving dan TPT di 1 lokasi, paving dan saluran di 4 lokasi, pengadaan air bersih yakni berupa pembangunan rumah mesin pompa 1 unit; rehab. Tandon air/ reservoir 1 unit; pipanisasi 1 unit; pengadaan mesin pompa dan genzet masing-masing 1 unit, pengadaan lampu penerangan pantai 2 unit dan pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 34 unit. Setelah semua kegiatan ini disepakati oleh masyarakat, kami selaku TAP melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan



fisik
Desa Bandaran termasuk Kecamatan Tlanakan dengan luas 189 Ha. Tipologi desa ini cukup landai dengan ketinggian 4 m dari permukaan laut. Jika anda mau berkunjung ke desa ini anda dapat menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 10 km atau waktu tempuh 20 menit dari ibu kota kabupaten ke arah selatan Kabupaten Pamekasan dan dilanjutkan ke arah barat, kondisi jalannya sudah cukup baik yang merupakan jalan ke arah Kabupaten Sampang. Permukiman masyarakat desa ini terpusat di pinggir pantai dengan kondisi yang telah cukup baik dan sebagian bangunan sudah permanen. Namun kondisi permukimannya tidak teratur serta sanitasi lingkungan yang sangat buruk, hal ini mengakibatkan banyak genangan air di pinggir

jalan dan di pemukiman penduduk pada waktu musim penghujan. Jumlah masyarakat yang tinggal di desa ini berjumlah 5.738 jiwa yang terdiri dari 972 KK. Mayoritas di desa ini atau kira-kira 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan selebihnya bekerja sebagai pedagang dan petani. Hasil tangkapannya berupa ikan pelagis kecil. Rembuk desa di Desa Bandaran dapat terbilang sangat lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti. Kegiatan fisik yang dilaksanakan di desa ini yakni pemasangan papan informasi 10 unit, penghijauan lingkungan desa berupa 998 bibit mangga dan 80 bibit glodokan tiang, rabat beton di 9 lokasi, mandi kakus (MK) 3 unit, TPS 3 unit, saluran pembuangan di 4 lokasi, serta rehab. rumah tidak layak huni sebanyak 33 unit. Sedangkan rembuk desa di Desa Bandaran dapat terbilang sangat lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti. Kegiatan fisik yang dilaksanakan di desa ini yakni pemasangan papan informasi 10 unit, penghijauan lingkungan desa berupa 998 bibit mangga dan 80 bibit glodokan tiang, rabat beton di 9 lokasi, mandi kakus (MK) 3 unit, TPS 3 unit, saluran pembuangan di 4 lokasi, serta rehab. rumah tidak layak huni sebanyak 33 unit. Tahun 2009 sebagai lokasi tindak lanjut PLBPM ditentukan satu desa lokasi pelaksanaan berdasarkan penilaian pekerjaan fisik dan partisipasi masyarakatnya pada tahun sebelumnya. Dari hasil penilaian maka dipilihlah Desa Sotabar sebagai lokasi pelaksanaan PLBPM tahun anggaran 2009. Sebagai lokasi pelaksanaan tindak lanjut, dalam melakukan sosialisasi tentang kegiatan ini tidak banyak mengalami kesulitan. Begitu juga dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) kami hanya melakukan follow up dan membenahi kekurangan pada tahun 2008. Usulan masyarakat dalam kegiatan PLBPM ini cukup banyak dan mereka cukup aktif, namun saat penentuan kegiatan prioritas mereka cenderung lebih banyak mementingkan kebutuhan pribadi atau kelompok mereka. Sehingga LK maupun Motivator Desa memberikan jalan tengah berdasarkan lima ketentuan yaitu pertama diusahakan lebih mengutamakan kegiatan di lingkungan sekitar pantai, kemudian kegiatan yang berhubungan langsung

dengan perikanan, dalam hal ini diwakili oleh nelayan yang notabene merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk, yang ketiga didasarkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti; selokan, jalan kampung, keempat mendahulukan kegiatan yang lebih bersifat umum dan mengena kepada kepentingan komunitas yang lebih luas, seperti; lampu penerangan pantai, dan yang terakhir harus sesuai dengan dana yang tersedia. Motivator desa yang terpilih dapat dikatakan masih terbilang cukup muda namun dapat mewakili aspirasi dan utamanya dapat berbaur baik dengan masyarakat serta dapat merangkul seluruh kelompok masyarakat yang ada.

Pada tahun 2009 ini kegiatan yang diprioritaskan adalah paving stone di 7 lokasi, dan pembuatan saluran di 2 tempat, saluran air kotor di 1 tempat, TPS 2 unit, lampu penerangan 1 unit serta pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 8 unit.

Selain kegiatan fisik, juga disusun Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir sebagai pedoman pembangunan desa dan sarana untuk menata kawasan pesisir desa. Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan melalui rembuk desa, pengumpulan saran dan masukan dari tokoh masyarakat. Serta berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, FKTD, TPD serta instansi yang terkait dalam pembangunan desa seperti BAPPEDA serta Pemerintah Kecamatan. Hasilnya diharapkan dapat mewujudkan impian masyarakat desa Sotabar sesuai dengan visi desa dalam mewujudkan desa pesisir yang tertata dan lestari sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat pesisir di desa tersebut.

Sama seperti tahun sebelumnya, masyarakat cukup aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Mereka bahu membahu membangun fasilitas-fasilitas fisik. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Semua itu mereka lakukan demi kemajuan desa. Meskipun ada konflik-konflik kecil, namun dapat diselesaikan saat itu juga. Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan ini baik pada tahun anggaran 2008 dan 2009 yakni berupa pendampingan dan pengawasan serta pengalokasian dana pendamping untuk desa lokasi pelaksanaan. Bahkan pemerintah desa pun

pada tahun 2008 di Desa Sotabar memberikan bantuan penyambungan instalasi listrik yang digunakan untuk lampu penerangan.

Wujud nyata dari kegiatan PLBPM ini telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik secara langsung berupa pembenahan atau perbaikan lingkungan serta sarana dan prasarana maupun manfaat secara tidak langsung berupa kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian desa. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih upaya sendiri sehingga dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan sadar betapa pentingnya penataan lingkungan pemukiman yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejateraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rebug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat desa. Dengan terbangunnya jalan paving memudahkan masyarakat dalam mobilitas ekonomi dan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya kondisi prasarana tersebut cukup menghambat kegiatan masyarakat. Keberadaan saluran pembuangan yang tertata baik akan membuat lingkungan dapat lebih sehat dan memiliki sanitasi yang baik serta dapat mengurangi bau tak sedap yang dapat mengganggu lingkungan. Penyediaan air bersih memiliki manfaat yang paling besar terasa oleh masyarakat. Sebelumnya untuk memperoleh air bersih harus membeli atau mengambil di sumber air yang lokasinya cukup jauh dari permukiman penduduk. Dengan adanya sarana ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan air setiap harinya. Pengadaan lampu penerangan pantai juga sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat terutama nelayan. Mereka mudah untuk berlaluh juga mengamankan perahu mereka. Wilayah pesisir yang merupakan daerah yang kering dan gersang maka dengan adanya penghijauan dapat memperindah dan mempersejuk suasana desa. Pembangunan tanggul laut (talut) sangat penting untuk perlindungan pantai. Sebagai pendukung dalam mensosialisasikan dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya kelestarian alam dan tidak melakukan pengrusakan maka keberadaan

papan informasi cukup penting keberadaannya. Untuk menjaga hasil kegiatan fisik yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM serta untuk kelestarian lingkungan, masyarakat di kedua desa ini sepakat untuk membuat peraturan desa tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut. Bahkan di Desa Sotabar juga melakukan rebug desa yang khusus membahas tentang Pengelolaan dan Penyaluran Air Bersih dimana masyarakat mengelola dan mengawasi sendiri dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, yakni masyarakat diwajibkan membayar penggunaan air bersih tiap bulannya untuk operasional serta menyisihkan sebagian untuk biaya perawatan sarana air bersih tersebut. ●



Biografi

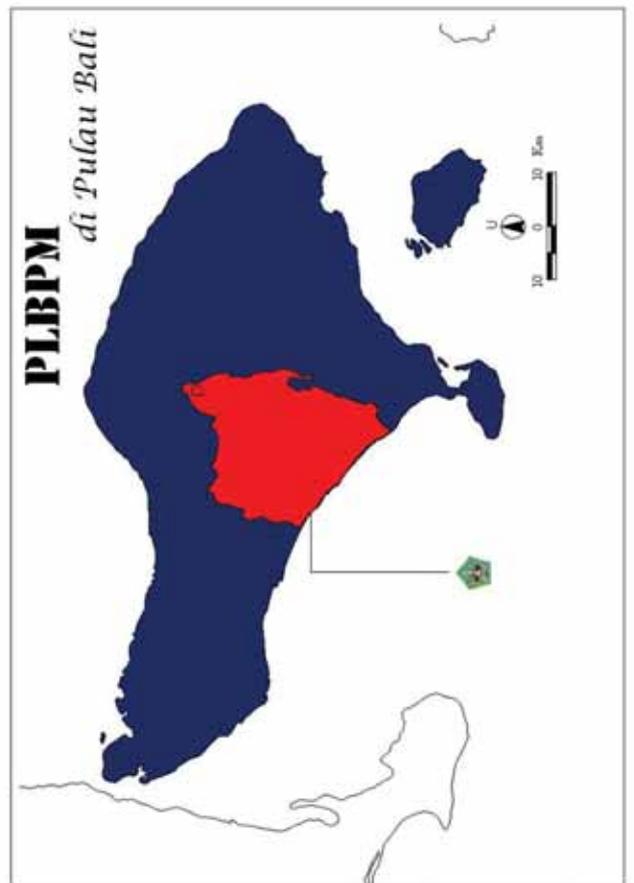
Sekilas Mengenai Penulis

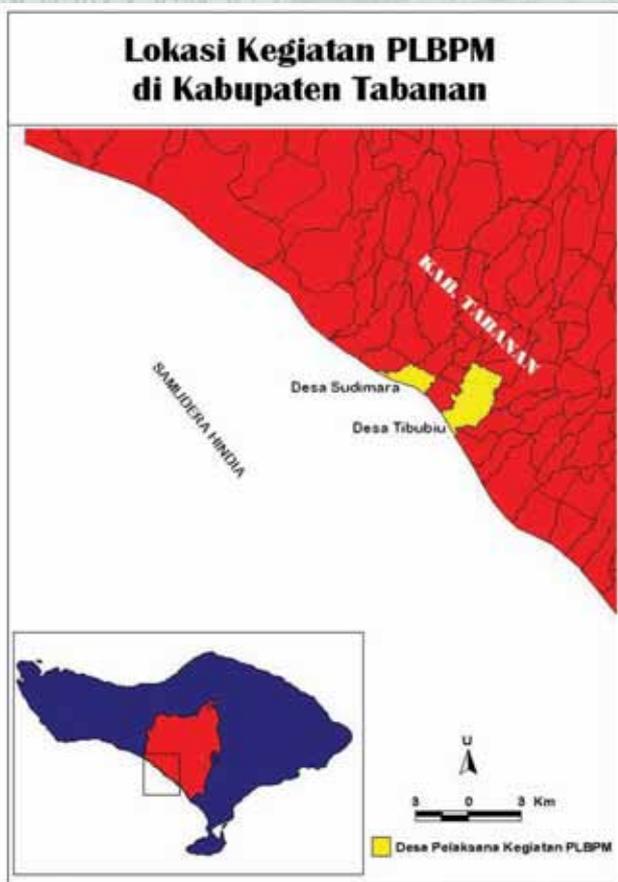


M. HADI RISQIANTO, S.Pi, dilahirkan di Pamekasan, Madura pada tanggal 19 September 1979. Tahun 1999 diterima di Fakultas Perikanan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan dan berhasil mendapat gelar S.Pi pada tahun 2005. Pada saat kuliah aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus. Baik yang berorientasi sosial seperti HMJ dan HMI maupun yang berorientasi profit yakni event organizer Coral Production. Selain aktif di organisasi, sempat pula mengembangkan hobi dan bekerja di usaha jasa desain grafis dan juga di usaha percetakan yakni CV. Merah Putih Printing. Selain itu menjadi asisten dosen antara lain pada Laboratorium Pemetaan dan Pengembangan Potensi Kelautan (LP3K) serta Program Kampus yang bermitra dengan instansi luar antara lain Konsorsium Kemitraan Bahari, Co Fish Project Banyuwangi, Lembaga Bahtera Indonesia. Pengalaman menjadi Tenaga Ahli Pendamping dimulai sejak tahun 2007. Pada saat itu sebagai untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pada tahun selanjutnya yakni tahun 2008 dan 2009 menjadi TAP dalam kegiatan PLBPM. Motivasi menjadi TAP PLBPM karena program ini menghasilkan wujud yang nyata dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat serta menumbuhkan semangat masyarakat untuk belajar mandiri dalam menata lingkungan desanya.



RAKHMAT HARTANTO, S.T dilahirkan di Pamekasan, Madura pada tanggal 25 Maret 1980. Berhasil mendapat gelar Sarjana Teknik pada tahun 2004. Awal bekerja adalah sebagai Tenaga Teknis pada CV. Nanda Graha di Sumenep selama 2 tahun. Kemudian bertugas menjadi Tenaga Teknis pada CV. PILAR PERSADA 1 tahun. Setelah berakhirnya masa kontrak dilanjutkan menjadi Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri Kab. Pamekasan (Dana APBD) selama 1 tahun. Pada tahun 2008 ada lowongan dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menjadi Tenaga Ahli Pendamping dalam kegiatan PLBPM tahun anggaran 2008 dan diterima. Kegiatan ini menarik selain telah terbiasa dengan program semacam ini, juga karena kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat nelayan yang cukup berbeda karakteristiknya dengan kondisi masyarakat yang sebelumnya. Pada tahun 2009 kembali dipercaya untuk mendampingi masyarakat dalam menata lingkungan pesisirnya. ●





Tabanan

K A B U P A T E N



Pantai Yeh Gangga Semakin Dikenal

Oleh: I Gusti Gede Manic Agra Pryambhada,
I Nengah Hery Wahyudi dan I Made Kawan



Kabupaten Tabanan memiliki panjang garis pantai 35 km atau 5,88 % dari total panjang pantai Pulau Bali dan memiliki 12 desa pesisir. Potensi sumberdaya pesisir di kabupaten ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Tabanan dapat ditempuh dari Kota Denpasar selama 1 jam ke arah barat laut. Kemudian diperlukan waktu sekitar 15 menit lagi ke arah selatan dari kota Tabanan untuk sampai di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Tabanan dilakukan sejak tahun 2008, yang difokuskan di dua desa yaitu Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Pantai Yeh Gangga dan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan

Pantai Pasut. Kedua desa tersebut, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai pertimbangan setelah melakukan survey ke desa pesisir yang ada. Namun pada pelaksanaan kegiatan PLBPM pada tahun 2009 akan dilaksanakan di Desa Sudimara, hal ini dilakukan dengan pertimbangan nilai partisipasi masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan Desa Tibubiu.

Desa Sudimara merupakan bagian dari kecamatan Tabanan. Dilihat dari kondisi geografis, wilayah Desa Sudimara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 10 meter diatas permukaan air laut. Jumlah penduduk di desa ini adalah 6.306 jiwa yang terdiri dari 1.915 KK dengan 68 KK masih tergolong miskin. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani nelayan yang terdiri dari nelayan tangkap, budi daya perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Alat tangkap yang gunakan nelayan ini berupa gill net (jaring insang), jala, bubu, pancing. Sedangkan hasil tangkapannya berupa lobster, udang manis, tongkol dan cucut. Desa ini juga memiliki obyek wisata pantai yang sudah terkenal yaitu Pantai Yeh Gangga. Pantai ini berpasir hitam pekat yang bernilai ekonomi tinggi sehingga rawan dari pencurian. Untuk melindungi pasir pantai ini, masyarakat adat Yeh Gangga melindunginya dengan Perarem atau aturan adat yang melarang pengambilan

pasir dan material lain di pantai dengan ancaman denda cukup tinggi. Di pantai ini juga terdapat batu karang yang unik dan terkenal dengan nama Karang Bolong Manunggal. Selain itu, pantai Yeh Gangga juga digunakan oleh masyarakat Hindu untuk melaksanakan aktifitas upacara keagamaan. Dari semua kegiatan tersebut, wajar jika pantai ini harus berbenah dan dijaga kelestariannya agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Desa Sudimara telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang berasal dari Kelompok Nelayan Dharma Murti sebagai pengelola kegiatan PLBPM sejak tahun 2008. Kegiatan pada tahun 2009 ini adalah pembangunan bangsal perahu nelayan yang berfungsi untuk menyimpan perahu beserta alat-alat lainnya, pembangunan jalan setapak di tepi pantai dengan jembatan kecil yang menghubungkan antara pantai timur dan pantai barat, pemasangan gorong-gorong beton, pembuatan tugu informasi kegiatan PLBPM, perbaikan tembok pagar sisi timur Pura Dalem Segara, pembangunan bak penampung sampah sementara, penanaman vegetasi pantai dan lanjutan senderan bangsal yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Selain kegiatan fisik tersebut, kegiatan ini juga melakukan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi kawasan pesisir yang akan menjadi dasar pem-

bangunan desa pada masa yang akan datang. Sesuai dengan rebug desa yang telah dilakukan, di desa ini tidak melakukan pembangunan /perbaikan rumah seperti pada kegiatan sebelumnya, karena rumah nelayannya bisa dikategorikan layak huni.

Respon dan partisipasi masyarakat di desa ini cukup besar mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Masyarakat sering mengadakan rebug desa secara mandiri dalam merencanakan fasilitas fisik yang akan dibangun serta pembagian tugas gotong royong. Masyarakat juga tidak mengambil upah dari

Akses jalan dari parkir timur menuju Tempat Ibadah (Pura Segara/Pura Dalem) dan Bangsal Nelayan menjadi lebih lancar dan mudah dilakukan. Bahkan obyek wisata pantai Yeh Gangga saat ini terlihat lebih tertata. Melalui penataan areal parkir, pemasangan lampu penerangan serta tersedianya fasilitas MCK, diperoleh kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 37.000.000/tahun. Selain kontribusi tersebut, masyarakat dan wisatawan merasa aman dan nyaman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keagamaan dan sosial lainnya. Hal ini selanjutnya dibuktikan melalui pelak-



Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tabanan

Kegiatan	2008		2009
	Desa Tibubiu	Desa Sudimara	Desa Sudimara
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket
Pembangunan Senderan Pengaman Pantai	526,08 m3	583,38 m3	3,25 m
Peningkatan Saluran Drainase	-	77,63 m3	-
Pembangunan Jembatan	-	-	3 unit
Pengerasan & Pembuatan Jalan Setapak	-	135 m	34,35 m
Pemasangan Gorong-Gorong Beton	-	-	1 unit
Peningkatan Sarana Ibadah	57 m	20 m	42,5 m
Pembangunan dan Perbaikan MCK	1 unit	2 unit	-
Pembangunan TPS	-	-	1 unit
Pembuatan Open Shower/Tempat Cuci Mesin Perahu	1 unit	1 unit	-
Penerangan Pantai	-	7 unit	-
Penanaman Vegetasi Pantai	4.100 btg	3.900 btg	350 btg
Peningkatan Sistem Penerangan	3 unit	-	-
Penataan Parkir	597 m2	-	-
Pembuatan papan Himbauan	5 unit	-	-
Pembangunan Bangsal Nelayan	-	-	1 unit
Pembuatan Tugu Informasi Perikanan	-	-	2 unit

pekerjaan yang dilakukan dan menambah volume pekerjaan yang akan dibangun.

Melalui pelaksanaan program ini, telah terlihat beberapa perubahan terutama di kedua desa tempat pelaksanaan program. Abrasi pantai yang terjadi di Parkir Timur Pantai Yeh Gangga, Pantai Barat Yeh Gangga, di depan Bangsal Nelayan Muara Sungai Empas dapat teratasi melalui penanaman vegetasi pantai.

sanaan Bupati Tabanan CUP II "Deep Ocean Fishing Tournament" pada tanggal 23 Nopember 2008 yang mengambil lokasi di Pantai Yeh Gangga. Keamanan dan kenyamanan yang tercipta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan terutama ke Pantai Yeh Gangga dan berdampak nyata terhadap peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Data terakhir yang berhasil di himpun oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan, telah terbuka sejumlah lapangan pekerjaan yang mampu menampung 300 orang angkatan kerja.

Pembangunan jalan setapak dan jembatan penghubung sejauh 600 meter pada kegiatan PLBPM tahun 2009, tidak hanya berfungsi sebagai penghubung dan sarana penunjang pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas dari investor atau pengusaha sejenis agar tidak menggunakan tepi pantai sebagai bagian dari bangunan investasinya.



Dan pada tahun 2009 ini masyarakat Yeh Ganga mendapatkan penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari karena berhasil mengelola lingkungan pesisir dengan baik. Lembaga Kemasyarakatan Dharma Murti yang ada di desa ini juga telah berpengalaman dalam mengelola dana pada kegiatan PEMP untuk penguatan modal nelayan yang masih terus berputar dan berkembang sampai saat ini. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



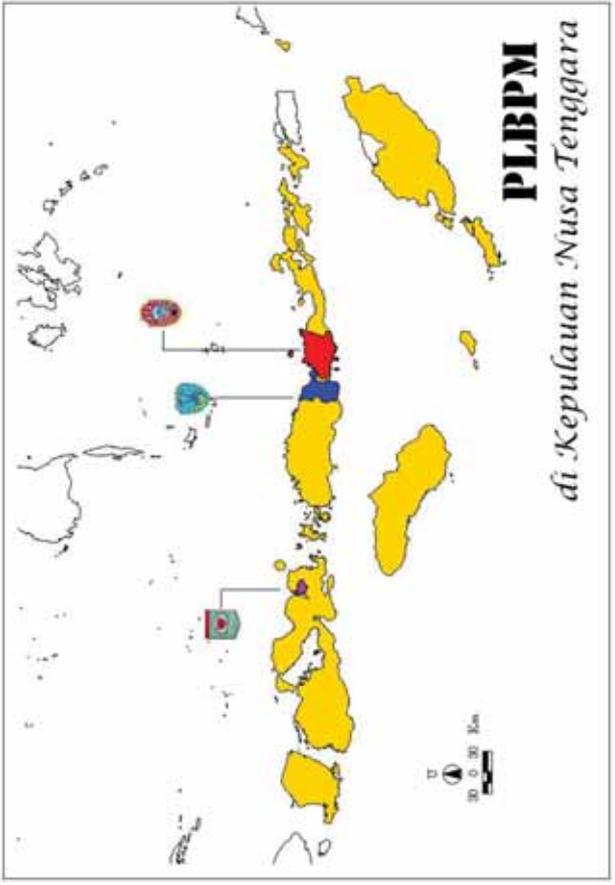
I GUSTI GEDE MANIC AGRI PRYAMBHADA, ST., dilahirkan di Denpasar 14 Oktober 1982 dan Lulus pendidikan Strata 1 Jurusan Teknik Sipil, ITS Surabaya. Sebelum sebagai Tenaga Ahli Pendamping bekerja sebagai Pengawas lapangan dan Staf Teknik di Kontraktor PT Rancang Bangun Sarana, dan Staf di PT. Bamboomedia Cipta Persada.

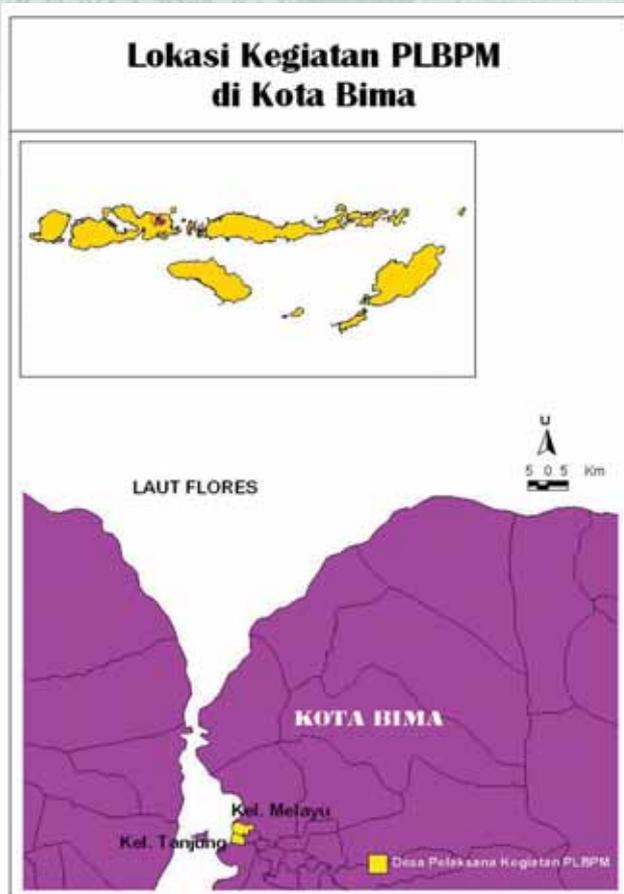


I NENGAH HERY WAHYUDI, ST., dilahirkan di Tabanan 10 Juli 1974. Lulus Pendidikan Strata 1 Teknik Arsitektur Universitas Udayana - Denpasar. Sebelum sebagai Tenaga Ahli pendamping bekerja pada proyek ; 1) Proyek Rumah Tinggal di Jalan Tukad badung XXI Tahun 2002, 2) Freelance mulai Tahun 2003 s.d. Tahun 2005 3) Drafer di PT Candi Bali International Tuban Denpasar mulai bulan Mei s.d. September 2005, 4) Staf ahli Arsitektur CV.Sanggar Agung Tabanan mulai September 2005 sampai dengan Januari 2007, 5) Bekerja sebagai Sub kontraktor pada proyek-proyek swasta mulai tahun 2007 sampai sekarang.



Ir. I MADE KAWAN, M.Si., lahir di Bebetin - Buleleng pada tanggal 22 Agustus 1959. Lulus Pendidikan Strata 1 Jurusan Biologi Molekuler, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya - Malang. Sebelum sebagai Tenaga Ahli Pendamping bekerja sebagai Staf Pengajar Jurusan Perikanan dan Ilmu kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa sampai dengan sekarang, Pendamping Kegiatan Pada Beberapa Instansi Pemerintah. ●





Bima
K O T A



Indahnya Gotong Royong Dalam Merehabilitasi Desa Dara di Kota Bima

Oleh: Yulia Rahma dan Dewi Kurniawati



Kota Bima merupakan salah satu kotamadya di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di Pulau Sumbawa. Jarak Kota Bima ke Jakarta adalah ± 1.375 Km dan dapat ditempuh dengan menggunakan dua jenis angkutan yaitu dengan angkutan darat dengan waktu tempuh 3 hari 3 malam, dan angkutan udara dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Sementara itu jarak Kota Bima dari Kota Mataram yang merupakan ibukota propinsi NTB adalah ± 500 Km, dan dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan angkutan udara dan 12 jam jika menggunakan angkutan darat termasuk menyeberang dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa.

Kota Bima merupakan daerah pemekaran dari wilayah Kabupaten Bima yang dibentuk sejak awal tahun 2000, dengan jumlah desa pesisir sebanyak 4

Morosenabau Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

desa. Luas wilayah kota ini ± 222,25 km² dan memiliki garis pantai sepanjang ±27,7 km. Dengan luas wilayah pantai yang ada, kota ini memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan dan kelautan termasuk di dalamnya potensi pariwisata bahari, budidaya perikanan, penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan. Penangkapan ikan merupakan



kegiatan yang paling menonjol di sektor kelautan dan perikanan kota ini. Namun kegiatan budidaya perikanan yang memiliki potensi cukup besar belum digali secara optimal. Sampai saat ini, kegiatan budidaya yang sudah dilakukan adalah budidaya rumput laut yang berpusat di Soati, Desa Kolo dan budidaya ikan tawar yang berada di Desa Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan yang sasaran utamanya adalah penataan lingkungan pesisir sudah menjangkau wilayah Kota Bima. Pelaksanaan PLBPM tahun 2009 di Kota ini adalah yang ketiga kalinya, dimana pada tahun 2006 dilakukan di dua lokasi yaitu Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tanjung, sedangkan tahun 2007 hanya dilakukan di Desa Tanjung dan tahun 2008 tidak ada kegiatan PLBPM.

Penentuan lokasi target grid didasarkan pada metode yang terdapat pada Pedoman

Tabel Kegiatan PLBPM di Kota Bima

No	Kegiatan	2006		2007		2009	
		Kel. Melayu	Kel. Tanjung	Kel. Tanjung	Kel. Dara	Kel. Dara	Kel. Dara
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	-	1 Paket
2.	Saluran Drainase	59 m	289 m	60 m	-	-	-
3.	Saluran Drainase Buis	-	65 m	298,2 m	-	-	-
4.	Saluran Buis dan Talud	634 m	-	-	-	-	-
5.	Jalan Rabat Beton	158 m	169 m	894,40 m	202,5 m	-	-
6.	Pasangan Talud jalan	-	50 m	-	-	-	-
7.	Rabat Beton dan saluran pinggir	-	215,3 m	-	-	-	-
8.	Jalan sirtu	121 m	-	-	-	-	-
9.	Aspal jalan lingkungan	693 m	160 m	-	-	-	-
10.	MCK + sumur bor	3 unit	5 unit	1 Unit	-	-	-
11.	Deuker	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-
12.	Saluran Pinggir	110 m	-	-	-	-	-
13.	Tiang dan lampu hias jalan	28 unit	-	-	-	-	-
14.	Gapura	2 unit	-	-	-	-	-
15.	Rehab rumah	51 Unit	41 Unit	-	-	-	-
16.	Lantai Jemur	-	38 m	-	-	-	-
17.	Pekerjaan jembatan	-	-	1 Unit	-	-	-
18.	Penanaman Mangrove	-	-	300 bgt	-	-	-
19.	Pekerjaan pembuatan gerobak Sampah	-	-	5 Unit	-	-	-
20.	Pekerjaan pembuatan Bak sampah	-	-	26 Unit	-	-	-

Morosenabau Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Pelaksanaan PLBPM. Beberapa parameter yang digunakan adalah aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat akan kesejahteraan lingkungannya, serta permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks seperti permasalahan degradasi lingkungan dan pemukiman masyarakat pesisir yang kumuh. Pada PLBPM Tahun anggaran 2009 ini, dipilih lokasi baru dengan pertimbangan yaitu : memiliki wilayah pesisir dengan kondisi lingkungan, perumahan, dan infrastruktur yang tidak tertata dengan baik dan cenderung kumuh serta ditambah dengan minimnya sarana air bersih dan

km dan berada pada ketinggian 1 m diatas permukaan laut. Sifat pemukimannya menyebar dimana 498 rumah masyarakatnya berbentuk bangunan permanen dan 506 rumah lainnya merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari bambu/kayu. Untuk menempuh Desa Dara ini dari pusat pemerintahan Kota Bima dapat melalui jalan darat selama 20 menit.

Pada tahap awal dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima dimaksudkan untuk mengenalkan kepada masyarakat apa maksud kegiatan PLBPM ini.



fasilitas MCK,

Adanya kebijakan Pemerintah Kota Bima yang mencanangkan untuk mempercepat pembangunan wilayah selatan dan memperbaiki penataan ruang, lingkungan pemukiman serta sarana infrastruktur lainnya adalah salah satu hasil dari penentuan lokasi tersebut maka kelurahan/desa yang ditetapkan sebagai lokasi PLBPM yaitu Kelurahan Dara tepatnya di Dusun Wadumbolo.

Kelurahan Dara terletak di Kecamatan Rasanae Barat, memiliki luas wilayah 10,14 Km² dengan panjang garis pantainya berkisar 1

Disamping itu juga dilakukan pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan 2 orang sebagai motivator desa yang akan bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Pemilihan dua unsur tersebut dilakukan dengan proses voting yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dalam kegiatan ini masyarakat begitu antusias dan tidak ada masalah yang menjadi penghambat masuknya program ini.

Kegiatan rebug desa yang kedua adalah untuk menjangkau usulan kegiatan dari masyarakat. Pada proses kegiatan penjangkauan usulan, hampir semua tokoh masyarakat

menyampaikan usulannya serta memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan adanya program ini. Dalam kegiatan ini ada beberapa item pekerjaan yang diusulkan oleh masyarakat setempat yaitu : kegiatan perbaikan jalan lingkungan rabat sebanyak 16 ruas, pengadaan air bersih 3 titik, pembuatan MCK 2 unit, perbaikan drainase, rehab rumah 20 unit, pembuatan bak sampah dan gerobak sampah serta penanaman mangrove. Tetapi karena keterbatasan dana maka hanya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir dan pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 202,5 m yang bisa dilaksanakan.

Permasalahan yang ditemui saat penentuan kegiatan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum karena jarak antara rumah yang begitu rapat dan masyarakat cenderung mempertahankan lahannya. Pemecahan masalah ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan oleh pengurus LK kepada masyarakat agar lebih partisipatif dan

memahami program ini.

Sementara itu bentuk partisipasi Pemerintah Kota Bima adalah adanya andil kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum berupa kegiatan perbaikan jalan lingkungan serta pengadaan air bersih. Selanjutnya sebagai dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan PLBPM ini adalah bagaimana mengarahkan masyarakat untuk merawat apa yang sudah dibangunnya. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat aturan yang mengarahkan masyarakat untuk menjaga hasil kegiatan PLBPM.

Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat pada kegiatan PLBPM ini sangat besar, diantaranya adalah masyarakat dapat berjalan di atas jalan lingkungan yang bebas becek dan lumpur, masyarakat bisa menikmati fasilitas air bersih, masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak menggunakan laut sebagai tempat pembuangan. Fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibangun melalui PLBPM dapat mengurangi aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. ●



Biografi

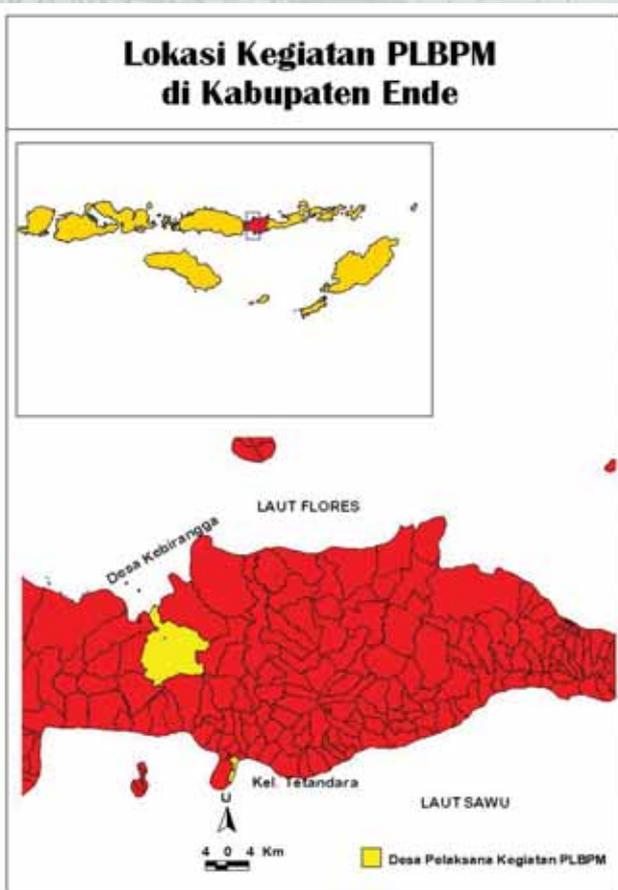
Sekilas Mengenai Penulis



YULIA RAHMA, ST., dilahirkan di Kota Bima, tanggal 04 Juli 1979. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan keahlian di bidang arsitektur. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Administrasi Marketing PT. Columbindo Perdana Cabang Bima, Tenaga Ahli Pendamping (TAP) kegiatan PLBPM tahun 2006, Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) DKP tahun 2008 dan Tenaga Ahli Pendamping PLBPM tahun 2009 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima



DEWI KURNIAWATI, ST., dilahirkan di Kota Bima pada tanggal 01 Januari 1979. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Mataram dengan keahlian bidang teknik elektro. Sebelumnya penulis pernah bekerja sebagai Surveyor Jaringan Listrik PLN dari tahun 2004 sampai tahun 2006 dan kemudian bergabung menjadi Tenaga Ahli Pendamping kegiatan PLBPM tahun 2009. ●



Ende
KABUPATEN



Membangun dan Menata Desa Pesisir di Kabupaten Ende

Oleh: Sulaiman Jafar, Lukas Lusi, dan Vincensius Levi



Kabupaten Ende berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang mempunyai panjang garis pantai 205,572 km, memiliki 60 desa pesisir. Kabupaten ini mempunyai potensi laut dan merupakan penghasil ikan pelagis sebanyak 11.645,4 ton/tahun dan ikan demersal sebanyak 7.645 ton/tahun. Untuk mencapai kabupaten ini, Anda dapat menggunakan transportasi udara dari Jakarta ke kota Kupang sebagai tempat transit sementara untuk selanjutnya diteruskan dengan penerbangan ± 30 menit.

Sejak 2006 hingga 2009, Kabupaten Ende mendapatkan kesempatan untuk membangun dan memperbaiki keadaan lingkungan pesisir melalui

kegiatan PLBPM. Pada tahun 2006, kegiatan ini dilakukan di 2 desa pesisir yaitu desa Arubara dan desa Nioniba. Pada tahun 2008, tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) memilih satu desa saja yaitu desa Arubara untuk melaksanakan program PLBPM. Pada tahun 2009, Tim FKTD menentukan desa pelaksana PLBPM dengan menggunakan kriteria bahwa desa yang melaksanakan program ini adalah desa pesisir yang telah mengalami degradasi lingkungan pesisir serta kurang sarana infrastruktur. Pemilihan desa tersebut dilakukan melalui metode skoring dan survey yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP) bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) untuk selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada FKTD. Permasalahan yang dihadapi dalam penentuan desa pelaksana kegiatan PLBPM adalah jarak desa yang cukup jauh dari kota kabupaten. Sedangkan untuk desa yang dekat dengan kota kabupaten, untuk perbaikan lingkungan pesisirnya akan membutuhkan biaya yang besar. Setelah didiskusikan dalam rapat FKTD, kegiatan PLBPM tahun 2009 akan dilakukan di Desa Kibirangga yang

sangat membutuhkan pembangunan sarana infrastruktur dan perbaikan lingkungan.

Desa Arubara merupakan salah satu desa di Kecamatan Ende Selatan, dengan luas 15 km². Warga desa ini berjumlah 2.817 orang yang terdiri dari 230 KK. Mata pencaharian warga desa ini sebanyak 95% bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Hasil tangkapan para nelayan di desa ini adalah ikan cakalang dan ikan karang. Desa Arubara ini terletak pada kondisi topografi yang sangat rawan terhadap bencana alam longsor karena berada dibawah kaki gunung meja dan permukiman penduduknya sangat dekat dengan pantai. Pada musim hujan penduduk di desa ini dihantui dengan bencana erosi dan kerusakan akibat abrasi yang menggerogoti pantai pada musim gelombang pasang. Desa ini berada pada ketinggian 10 m dari permukaan air laut. Kondisi bangunan rumah di desa ini masih terbilang sangat sederhana. Desa Arubara dapat dicapai selama 5 – 10 menit dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Keadaan permukiman Desa Arubara belum teratur dengan kondisi infrastruktur yang

sangat minim. Pada musim hujan jalan-jalan desa dan permukiman warga digenangi air akibat kurangnya sarana drainase.

Sedangkan Desa Nioniba dan Desa Kibirangga merupakan bagian dari Kecamatan Mauko dengan luas desanya masing-masing 20 km² dan 28 km². Kondisi topografi kedua desa ini agak datar dengan ketinggian 1 – 2 m dari permukaan air laut. Desa ini terletak sekitar 80 km dari Ibukota kabupaten dan untuk mencapai lokasi ini harus melalui jalan yang sangat buruk. Permukiman di kedua desa ini menyebar dipinggiran pantai dan pegunungan dengan kondisi bangunan rumah masyarakat hampir sebagian merupakan rumah non permanen yang sudah tidak layak huni. Kondisi permukiman di kedua desa ini sangat tidak teratur. Pada saat musim hujan dan saat pasang tiba, banyak genangan air di sekeliling jalan desa dan tempat-tempat umum seperti pasar. Di kedua desa ini juga belum tersedia balai pertemuan, jumlah sarana air bersih, MCK dan TPS masih sangat minim. Jumlah masyarakat yang tinggal di desa Nioniba sebanyak 568 jiwa yang terbagi dalam 101 KK. Jumlah penduduk desa Kibirangga sebanyak 1.604 jiwa dan terbagi dalam 330 KK. Sekitar 95% penduduk di kedua desa ini bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Hasil tangkapan mereka berupa ikan cakalang dan ikan teri karenanya daerah ini juga terkenal sebagai pemasok ikan teri kering untuk pulau Flores.

Rembug desa dilakukan dalam pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LK). Di Desa Nioniba dan Desa Kibirangga, aparat desa tidak diberikan kesempatan untuk duduk di dalam kepengurusan LK. Untuk mengatasi hal ini, TAP dan dinas teknis terkait mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya latar belakang pendidikan dan kemampuan dalam memimpin agar kegiatan ini dapat terkelola dengan baik.

Pada rembug desa untuk menentukan kegiatan prioritas, terlihat dukungan dan keaktifan dari masyarakat Desa Arubara. Masyarakat terlihat aktif dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dalam membangun dan menata desa. Rencana kegiatan prioritas yang

diusulkan oleh masyarakat desa Arubara yaitu membuat saluran drainase, MCK, balai pertemuan, tembok penahan tanah serta kegiatan konservasi seperti penanaman waru serta pembangunan penahan abrasi. Namun demikian, seluruh kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan biaya cukup besar.

Sedangkan penentuan kegiatan di Desa Nioniba dan Desa Kibirangga, masyarakat tidak terlalu antusias untuk berpartisipasi. Hal ini terlihat dengan kurangnya kehadiran masyarakat



dalam rembug desa. Permasalahan yang dialami saat penentuan kegiatan prioritas di kedua desa ini adalah masyarakat masih kurang mampu dalam menyampaikan aspirasi mereka. Untuk mengatasi hal ini motivator meminta pendapat masyarakat agar dapat mewakili menyampaikan aspirasi masyarakat dengan tidak memaksakan kehendak. Akan tetapi timbul masalah ketika ada seseorang yang dianggap berpengaruh di desa tersebut mengeluarkan pendapat yang

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui PLBPM di Kabupaten Ende

Kegiatan PLBPM	2006		2008	2009
	Desa Arubara	Desa Nioniba	Desa Arubara	Desa Kibirangga
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-
Pembangunan Drainase	100 m	100 m	250 m	434 m
Pembangunan Balai Desa	1 Unit	1 Unit	-	-
Pembangunan Jalan Desa	-	300 m	-	162 m
Pembangunan MCK	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit
Pembuatan Tembok Penahan	50 m	30 m	-	20 m
Pembuatan Gorong-gorong	1 Unit	1 Unit	-	-
Pembuatan Sumur Gali	-	-	-	3 Unit
Pembuatan TPS	-	2 Unit	-	2 Unit
Pembuatan papan pengumuman	1 Unit	1 Unit	-	2 Unit
Penanaman Waru	410 Btg	300 Btg	250 Btg	-
Penanaman Mangrove	-	-	-	2500 Btg

selalu bertentangan dengan pendapat masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diambil inisiatif berupa voting dalam penentuan kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan skala prioritas masing-masing kegiatan. Prioritas kegiatan untuk Desa Nioniba adalah membangun balai pertemuan, membuat jalan desa, membuat MCK dan TPS serta kegiatan konservasinya dengan penanaman waru.

Kegiatan PLBPM tahun 2009 yang dilaksanakan di Desa Kibirangga berupa pembangunan prasarana fisik seperti peningkatan saluran



drainase sepanjang 434 m, pembangunan jalan desa sepanjang 162 m, pembangunan MCK sebanyak 1 unit, pembuatan TPS sebanyak 2 unit dan penggalian dan pembuatan sumur sebanyak 3 unit serta kegiatan penanaman mangrove sebanyak 2.500 batang, dan penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir.

Untuk mendukung pelaksanaan PLBPM,

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende memberikan dukungan berupa pendampingan dan pengawasan serta pengalokasian dana pendamping untuk lokasi pelaksanaan kegiatan. Program-program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengadaan air bersih, pengaliran aliran listrik, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat Desa Arubara dalam kegiatan PLBPM sejak tahun 2006 hingga 2008 sangat tinggi dengan keikutsertaannya dalam kegiatan fisik dan memberikan sumbangan lahan seluas 8 x 10 m untuk pembangunan balai desa serta memberikan sebagian tanahnya untuk digunakan saluran drainase. Masyarakat Desa Nioniba turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program PLBPM dalam bentuk kegiatan gotong royong dalam melaksanakan pekerjaan fisik. Manfaat kegiatan PLBPM telah dirasakan masyarakat di Desa Arubara dan Desa Nioniba. Terciptanya kebersamaan diantara masyarakat mendorong timbulnya kesepakatan untuk saling menjaga dan infrastruktur fisik yang telah dibangun melalui program PLBPM demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis

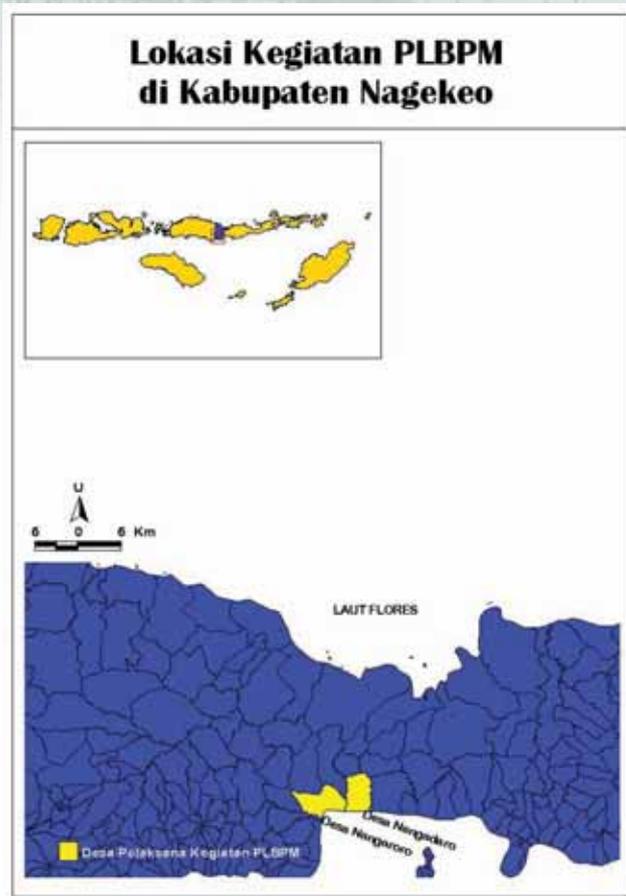


SULAIMAN JAFAR, ST dilahirkan di kota pesisir Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Maret 1978. Pada tahun 1996, penulis merantau ke Kota Ujung Pandang dan melanjutkan studi di perguruan tinggi dan mendapat gelar Sarjana Teknik (ST) Jurusan Teknik Sipil pada tahun 2002. Sejak tahun 2000 - 2004, penulis bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Penulis melanjutkan kuliah selama 2 tahun untuk menambah kemampuan Bahasa Inggris di English Graduate Diploma (EGD). Pada tahun 2005, penulis berpikir untuk kembali mengabdikan diri di tanah kelahirannya kota Ende dan bekerja pada perusahaan Konsultan

Perencana sebagai tenaga Ahli Teknik. Dengan modal kemampuan di lapangan, penulis mencoba terjun di dunia kemasyarakatan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti PEMP dan bergabung dengan Program PLBPM sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Sejak diterima sebagai TAP, penulis termotivasi untuk menjadi tenaga fasilitator yang handal dalam pemberdayaan khususnya masyarakat pesisir. Penulis merasa bangga telah memberikan pikiran dan tenaga untuk membangun dan menata infrastruktur permukiman desa-desa pesisir khususnya di Kabupaten Ende. Sejak bergabung dengan program-program yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, penulis banyak belajar ilmu-ilmu kelautan dan perikanan serta ilmu tata ruang kawasan pesisir dan mitigasi bencana alam.

LUKAS LUSI, Spi., dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Wolooora pada tanggal 18 Juni 1978. Pada tahun 1996 melanjutkan kuliah di STIP Malang. Bergabung dalam program PLBPM sebagai TAP pada tahun 2009. Penulis merasa senang bergabung dengan program seperti ini karena memberikan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata lingkungannya sendiri. Tugas utama dalam program ini adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat dari rumah ke rumah, mendampingi dalam penyusunan RAB dan lain-lain hingga pelaksanaan PLBPM selesai.

VINCENSUS LEVI, A.Md., dilahirkan di Bolenggo pada tanggal 12 Oktober 1978 di daerah Bolenggo. Pada tahun 1992, penulis bersekolah di SUJPM di Kabupaten Maumere dan melanjutkan ke perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Perikanan di Yogyakarta dan mendapat gelar Diploma III Perikanan Jurusan Budi Daya Perikanan pada tahun 2002. Setelah lulus, penulis mencoba bergabung dengan Perusahaan Camar Sentosa yang bergerak dibidang Budi Daya Mutiara yang kebetulan berada di Desa Magekapa-Kabupaten Ende selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 2009, penulis bergabung sebagai tenaga Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Penulis tertarik menjadi tenaga TAP PLBPM karena kegiatan ini mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menata lingkungan mereka. Penulis merasa tertantang untuk memotivasi masyarakat dalam menata dan memajukan lingkungannya sehingga kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai daerah kumuh. ●



Nagekeo

K A B U P A T E N



Menata Kembali Daerah Penghasil Kristal Putih Asin sebagai Penopang Mobilitas Ekonomi Masyarakat Pesisir

Oleh: Aloysius Riwu



Sebagian besar orang mungkin akan bertanya dimanakah lokasi Kabupaten Nagekeo itu? Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ngada dan terkenal sebagai kabupaten pesisir karena memiliki 5 kecamatan pantai dari 7 kecamatan yang ada. Panjang garis pantai bagian utara kabupaten ini sekitar 131,40 km, sedangkan pada bagian selatan sekitar 60,44 km², dan disepanjang garis pantai tersebut terdapat 27 Desa Pesisir. Kabupaten ini terkenal dengan hasil laut yang sangat bervariasi, dengan salah satu prospek

yang paling strategis adalah budidaya rumput laut dan pemasok ikan Sunuk ke Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Jika anda mau berkunjung ke Kabupaten Nagekeo anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Ende, setelah itu dilakukan perjalanan darat selama 2 jam dari kota tersebut. Sepanjang perjalanan anda menikmati pemandangan yang indah dimana perjalanan yang berkelokkelok dan daerah perbukitan penuh rerumputan hijau di sisi jalan seakan-akan menggugah perasaan anda untuk peduli terhadap Nagekeo yang baru lahir menjadi daerah otonom baru.

Kabupaten Nagekeo mendapat kesempatan untuk menata kawasan pesisir melalui program PLBPM sejak tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebagai kegiatan tinjauan lanjut. Oleh sebab itu sebagai penerima program lanjutan maka pelaksanaan kegiatan PLBPM di kabupaten Nagekeo terfokus pada satu desa pesisir sehingga melalui forum yang merupakan kepedulian pemerintah daerah dalam menyambut program tersebut harus menetapkan salah satu desa sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada acara pemilihan lokasi ini tim Forum Koordinasi Tingkat Daerah (FKTD) agak kesulitan dalam menentukan desa lokasi yang baru karena di Kabupaten Nagekeo terjadi pemindahan lokasi pelaksanaan kegiatan dari program yang sudah di kerjakan pada tahun sebelumnya. Mengingat masyarakat pesisir di Desa Tendakinde sangat

membutuhkan kepedulian pemerintah maka tim FKTD yang merupakan perwakilan dari Instansi terkait menetapkan Desa Tendakinde sebagai desa lokasi program PLBPM 2009 melalui Berita Acara Penetapan Desa Lokasi di Desa Tendakinde.

Desa Tendakinde merupakan bagian dari Kecamatan Wolowae yang luasnya 44,61 Km² dengan topografi berupa daratan rendah pada ketinggian 10 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju Desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 35 km dari ibukota Kabupaten Nagekeo dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Pemukiman masyarakat di desa ini terpusat di pinggir pantai utara Laut Flores dengan kondisi bangunan rumah masih jauh dari kategori baik, disekitar pusat desa masih banyak rumah-rumah non permanen yang tidak layak huni. Kondisi pemukiman Desa Tendakinde ini bisa di bilang tidak teratur, Hal ini terlihat jelas saat musim hujan terlihat aliran air menggenangi pemukiman masyarakat akibat sanitasi lingkungan masih sangat buruk. Masyarakat desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani garam dan sisanya sebagai nelayan dan peternak.

Berbekal dari hasil pelatihan TAP di Jakarta Bulan April lalu, dilakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Tendakinde. Desa ini memiliki karakteristik yang berbeda karena pen-



uduknya terdiri dari masyarakat asli Desa Tendakinde (suku Toto) dan masyarakat dari suku Buton dan suku Bajo. Tanggapan masyarakat Desa Tendakinde pada kegiatan PLBPM ini kurang responsif, dimana belum semua masyarakat terlibat dalam proses rebug desa. Namun untuk desa ini sudah dibentuk pengurus LK selaku pengelola program di tingkat desa dan motivator desa selaku pengger-



ak kegiatan, berdasarkan hasil kesepakatan rebug desa secara bermusyawarah. Pada saat penentuan kegiatan masyarakat Desa Tendakinde menyepakati satu kegiatan saja sehingga bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi yaitu Pembangunan Tanggul Penahan Luapan Air Laut ke Lokasi Tambak Garam, yang meliputi beberapa kegiatan yaitu penimbunan tanggul penahan luapan air laut, pembangunan tembok permanen, pembuatan pintu masuk air, pemasangan kawat beronjong di lokasi tanggul yang aliran airnya deras. Kepala Desa tendakinde menghimbau kepada masyarakat bahwa "Kegiatan PLBPM ini merupakan berkah dari Tuhan melalui Depatemen



Kelautan dan Perikanan RI untuk kita yang semua, serta keputusan berasal dari kita oleh kita untuk kita tanpa intervensi dari Instansi terkait".

Setelah semua kegiatan ini disepakati oleh masyarakat kemudian disusun RAB untuk pembangunan fisik dan penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan pesisir sebagai cita-cita dan impian masyarakat Desa dalam membangun Desanya selama 5 tahun ke depan dan hal ini telah disepakati oleh masyarakat. Untuk mewujudkan impian tersebut telah disepakati oleh masyarakat Desa Tendakinde dengan visi "**Menata Kembali Daerah Penghasil Kristal Putih Asin sebagai Penopang Mobilitas Ekonomi Masyarakat Pesisir**".

Peran serta Pemerintah Daerah pada kegiatan PLBPM ini berupa pendampingan dan pengawasan, Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait Pemerintahan Daerah Nagekeo. melalui Dinas / Instansinya masing-masing

Tabel. Kegiatan PLBPM di Kabupaten Nagekeo

Kegiatan	2008		2009
	Desa Nangadhoro	Kelurahan Nangaroro	Desa Tendakinde
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket
Pembangunan Saluran dan Dinding Penahan	160 meter	-	-
Pembangunan Saluran Pembuangan / Drainase	210,50 m	372 m	-
Pembangunan Tempat Penampungan Air	9 unit	3 Unit	-
Pembuatan Gorong-gorong	4 unit	12 unit	-
Pembangunan MCK umum	3 unit	1 Unit	-
Pembangunan Stapak	130 meter	-	-
Pembangunan Stapak Blok F	210,50 m	-	-
Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan	-	1 Unit	-
Pembangunan Tanggul Penahan Luapan Air Laut	-	-	1.400 m
Pembangunan Tanggul Permanen	-	-	25 m
Pembuatan Pintu Masuk Air	-	-	3 Unit
Pemasangan Kawat Beronjong	-	-	25 m

diharapkan akan mengalokasikan kegiatan tambahan yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat untuk menjawab keluhan masyarakat pesisir Desa Tendakinde.

Masyarakat di Desa Tendakinde turut berpartisipasi dalam proses kegiatan fisik, bersedia melakukan pekerjaan secara bergotong royong untuk kegiatan yang tidak tertampung dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk menyukseskan program ini, ibu-ibu di desa ini juga ikut berpartisipasi secara aktif, mengangkat batu pasir dan menyiapkan makanan dan minuman bagi pekerja yang diawasi oleh motivator desa sebagai teladan.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima program pada tahun 2008 lalu, yang sekarang semua fasilitas sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang mendapat program tersebut.

Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM, masyarakat di Desa ini sepakat untuk membuat suatu aturan yang akan dituangkan lewat Peraturan Desa (PEDES), dan masyarakat juga bersedia mengumpulkan dana secara sukarela untuk

merawat fasilitas yang sudah dibangun apabila terjadi kerusakan. Selain itu melalui Pemerintah Desa setempat akan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo untuk membangun fasilitas penunjang lainnya. ●



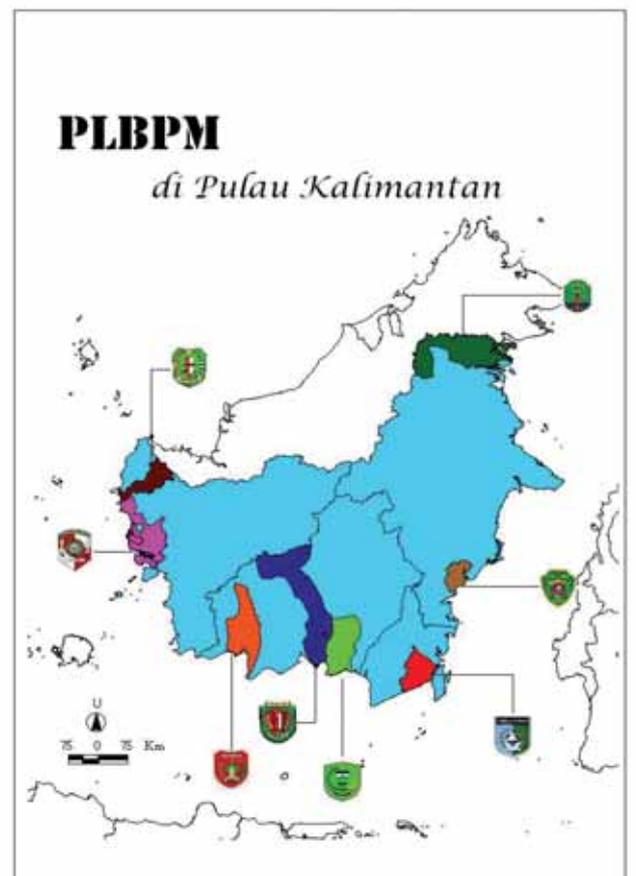
Biografi

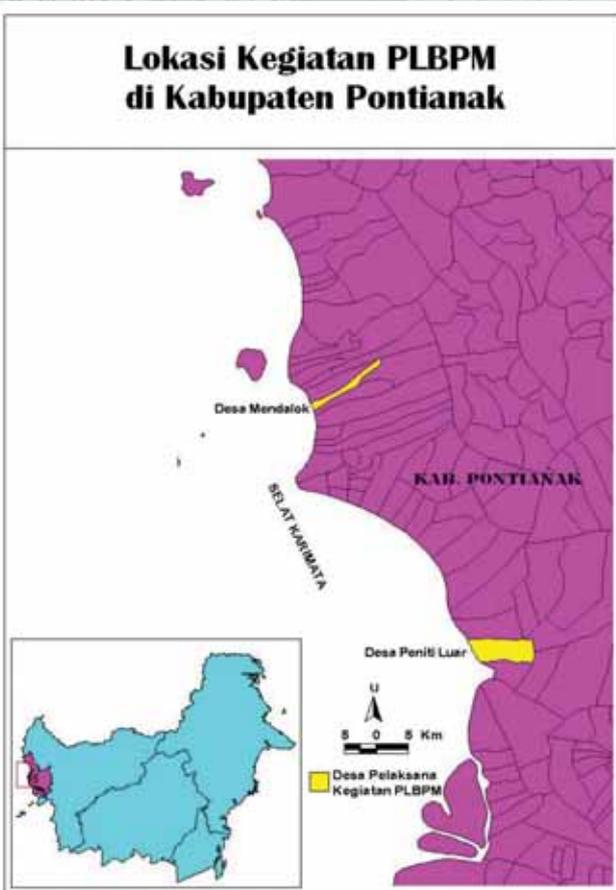
Sekilas Mengenai Penulis



ALOYSIUS RIWU, S.Pi., dilahirkan di Towaklayng Mbay II pada tanggal 5 februari 1978. Sepanjang hidup dibesarkan di tempat kelahiran hingga lulus SMU. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi di ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada tahun 2006 penulis berhasil mendapat gelar Sarjana Perikanan (S.Pi). Setelah lulus bekerja sebagai tenaga Teknis Pendamping (TP) kelompok budidaya udang di kecamatan Aessa di bawah asuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Ngada.

Penulis melanjutkan pekerjaan sebagai Tenaga Harian Lepas dan pada tahun 2008-2009 bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping kegiatan PLBPM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Motivasi dasar yang mendorong penulis menjadi TAP PLBPM Kabupaten Nagekeo ini, karena merupakan Program partisipatif dan aspiratif tanpa ada tekanan dari pihak luar terhadap semua keputusan yang ada di tangan masyarakat penerima program, sehingga mereka sendirilah yang menentukan Program Kegiatan di lapangan. ●





Pontianak

KABUPATEN

Menata Desa Pesisir di Kabupaten Pontianak

Oleh: Utin Apridayani, Benhard Pangihutan dan Nur Muhammad



Kabupaten Pontianak merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat dan lebih dikenal sebagai Bumi Katulistiwa karena terletak pada garis katulistiwa dunia. Kabupaten ini dikenal sebagai pemasok ikan tongkol terbesar di Propinsi Kalimantan Barat. Memiliki panjang garis pantai sekitar 78 Km dan 36 desa pesisir. Untuk menuju Kabupaten Pontianak, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Pontianak yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 2 jam dari kota Pontianak.

Tahun 2009, merupakan tahun pertama kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Pontianak. Pemilihan kedua desa tersebut bukan hal yang mudah, hal ini dilalui dengan proses yang cukup sulit dan alot terutama dalam menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kriteria dalam pedoman PLBPM. Namun berdasarkan hasil diskusi, analisa dan kerjasama yang baik antara tim Forum

Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dengan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dan tim Teknis Pengendali Daerah (TPD), pemilihan lokasi dilakukan dengan metode metode skoring yang dinilai berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh TAP dan TPD sehingga dipilih Desa Peniti Luar dan Desa Mendalok.

Desa Peniti Luar merupakan bagian dari Kecamatan Siantan yang luas desanya sekitar 24 km². Topografi desa ini berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 - 3 meter dari permukaan laut. Masyarakat desa ini cenderung soliter. Hal ini terlihat dari permukiman yang menyebar diseluruh di penjuru desa dengan kondisi rumah yang masih jauh dari kategori baik. Kondisi lingkungan permukimannya pun bisa dibayangkan yang terlihat jelas pada saat musim penghujan dengan banyaknya genangan air di sekeliling jalan desa serta masih buruknya sanitasi lingkungan. Di sisi lain desa ini juga belum memiliki balai pertemuan. Perjalanan menuju desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 43 km dari ibu kota kabupaten dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Total penduduk yang tinggal di desa ini adalah sekitar 3.171 jiwa atau terdiri dari 641 KK, dimana 55 % bekerja sebagai nelayan, sedangkan lainnya bekerja sebagai petani. Hasil produksi perikanan di desa ini berupa ikan pelagis kecil seperti ikan tongkol, ikan merah, ikan kembung, udang dan cumi-cumi. Selain ikan pelagis desa ini juga terkenal sebagai daerah penghasil kepah dan kepiting terbesar di Kabupaten Pontianak.

Desa Mendalok merupakan bagian dari Kecamatan Sungai Kuryit dengan luas sekitar 6,66 km². Topografi desa ini cukup landai dengan ketinggian 1 m dari permukaan laut. Untuk berkunjung ke desa ini anda bisa mendarai kendaraan bermotor kurang lebih 35 menit dari ibu kota kabupaten. Permukiman masyarakat di desa ini terpusat dipinggiran pantai. Bangunan rumah di desa masih sangat sederhana, di seputaran pusat desa masih banyak rumah-rumah non permanen yang tidak layak huni. Permasalahan yang ada di desa ini adalah terdapat genangan air di sekeliling jalan desa pada musim hujan, belum tersedianya steger dan MCK, serta belum adanya drainase yang baik di beberapa ruas jalan terutama di jalan gang nelayan. Jumlah penduduk desa ini adalah 1.464 jiwa yang terdiri dari 330 KK. Desa ini 60 % masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai nelayan tangkap. Hasil tangkapan masyarakat ini berupa ikan tongkol, ikan talang, ikan merah, ikan malong, ikan kembung, ikan tenggiri, udang dan cumi-cumi.

Berebak dari hasil pelatihan TAP di Jakarta bulan April lalu kami melakukan pendampingan kepada masyarakat desa Peniti Luar dan desa Mendalok. Kedua desa target group ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tanggapan masyarakat desa Peniti Luar pada kegiatan PLBPM ini sangat baik, terlihat dari antusiasme masyarakat yang hadir dalam rembug desa. Melalui rembug desa juga dilakukan pemilihan LK dan motivator desa dari sejumlah

masyarakat desa yang hadir.

Pada saat penentuan kegiatan prioritas, masyarakat desa Peniti Luar cenderung pasif dan dipengaruhi oleh segelintir orang yang dominan bahwa kegiatan PLBPM adalah suatu proyek besar. Namun dengan segala upaya sosialisasi kegiatan PLBPM dari Kepala Desa, TPD dan TAP akhirnya masyarakat sedikit mengerti bahwa kegiatan PLBPM merupakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata lingkungannya, yang pada prinsipnya kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat sendiri, sehingga diharapkan semua masyarakat desa harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam memformulasikan kegiatan prioritas,

masyarakat turut serta dalam mengutarakan permasalahan yang ada di lapangan. Beberapa usulan masyarakat antara lain : pembangunan jembatan permanen/semi permanen sepanjang 23 m, penanaman mangrove, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 40 m, pembangunan 1 unit MCK, pengadaan 1 unit TPS. Setelah semua kegiatan ini disepakati oleh masyarakat, kami melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pembangunan fisik. Selain kegiatan fisik, kami selaku TAP telah menyusun rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir sebagai cita-cita dan impian masyarakat desa dalam upaya membangun desanya untuk 5 tahun yang akan datang. Perencanaan tersebut sesuai dengan visi desa



yang akan mewujudkan desa pesisir yang tertata rapi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbeda dengan desa Peniti Luar, sambutan hangat masyarakat desa Mendalok terhadap program PLBPM seakan menepis semua kesulitan yang ada. Masyarakat berkumpul dalam rembug desa yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan LK beserta penunjukan motivator desa. Semua masyarakat berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi untuk membangun desanya. Semua aspirasi masyarakat

Tabel Kegiatan PLBPM tahun 2009 di Kabupaten Pontianak

Kegiatan PLBPM	Desa Peniti Luar	Desa Mendalok
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi-Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembangunan Jembatan	23 m	-
Penanaman Mangrove	9000 batang	4000 batang
Pembangunan Jalan Lingkungan	40 m	175 m
Pembangunan Steger	-	70 m
Pembangunan MCK	1 unit	1 unit
Pengadaan TPS	1 unit	1 unit
Pembangunan instalasi Air Bersih	-	1 unit

telah kami catat untuk menentukan prioritas kegiatan yang telah diusulkan, kemudian dilakukan voting untuk penentuan kegiatan yang benar-benar prioritas dari semua kegiatan yang diusulkan sehingga tidak mengecewakan pihak-pihak yang telah berpartisipasi. Adapun kegiatan fisik yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan steger sepanjang 70 m, pembangunan 1 unit MCK, pengadaan 1 unit TPS, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan jalan lingkungan di Gang Nelayan sepanjang 175 m. Masyarakat di desa ini telah sepatok untuk mengalokasikan semua dana PLBPM dalam perbaikan infrastruktur permukiman untuk kepentingan bersama.

Dalam kegiatan ini, pemerintah ikut berperan serta dalam kegiatan ini diantaranya dengan membantu proses identifikasi daerah lokasi pelaksanaan kegiatan dan memberikan pengarah kepada masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Di kabupaten ini juga, kegiatan PLBPM bersinergi dengan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yaitu PNPM

Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perikanan dan Kelautan.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat ikut aktif dalam pembangunan lingkungannya dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dari jerih upaya mereka sendiri. Melalui kegiatan PLBPM ini masyarakat sadar betapa pentingnya penataan lingkungan permukiman yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kenyamanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang di kemudian juga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui terbangunnya jembatan dapat memudahkan masyarakat desa Peniti Luar dalam peningkatan ekonomi seperti memudahkan nelayan dalam pengangkutan hasil tangkapan, akses menuju lingkungan pesisir lebih mudah. Sedangkan dengan adanya steger, nelayan Desa Mendalok menjadi mudah memasarkan hasil tangkapan. Kehidupan masyarakat jauh lebih sehat dengan MCK dan TPS, sehingga jumlah masyarakat yang terkena penyakit seperti demam berdarah dan diare dapat berkurang. Penanaman mangrove telah berangsur-angsur mengurangi degradasi pesisir berfungsi sebagai sebagai tempat berkembangbiakan habitat ikan, kepah dan kepiting.

Untuk menjaga bangunan fisik yang telah dibangun pada kegiatan PLBPM ini masyarakat kedua desa ini sepakat untuk membuat peraturan desa. Masyarakat juga mengumpulkan dana sukarela per bulannya untuk melakukan perawatan fasilitas fisik serta mengalokasikannya untuk membangun fasilitas penunjang desa lainnya. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



UTIN APRIDAYANI, Amd., dilahirkan di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 07 April 1986. Diterima di program studi ilmu kelautan di Politeknik Negeri Pontianak dan lulus tahun 2005 dan meraih gelar Ahli Madya pada tahun 2008. Sebulan setelah lulus diterima kerja di perusahaan distributor makanan di Kota Pontianak yaitu PT. Sanghiang Perkasa. Namun hanya bertahan selama 6 bulan diperusahaan tersebut. Pada tahun 2009 ini bekerja sebagai

Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI.



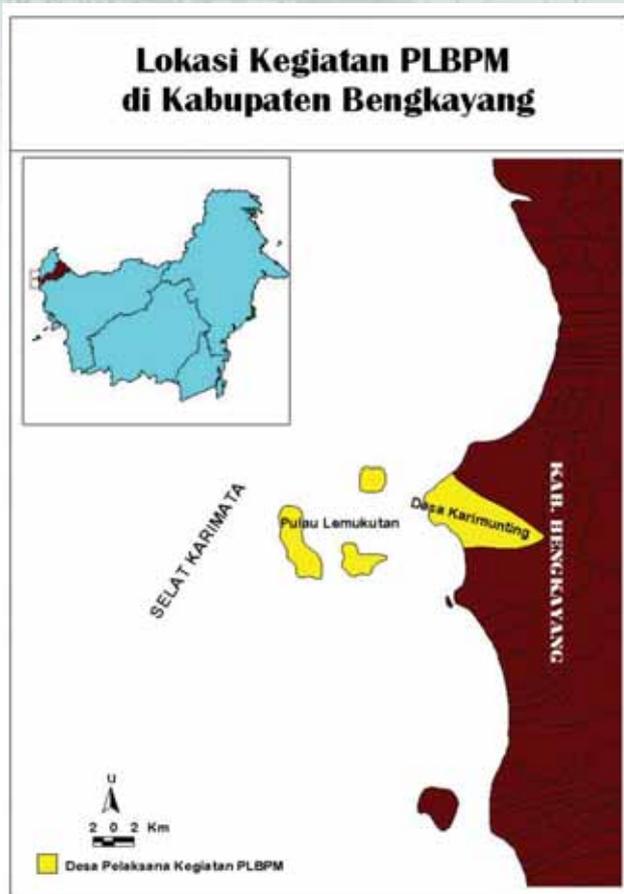
BENHARD PANGIHUTAN N, ST dilahirkan di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 27 September 1984. Kuliah di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak dan lulus tahun 2001 dan meraih gelar sarjana pada tahun 2006. Pernah bekerja di Perusahaan Konsultan Perencana Integreha dan terakhir sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Tertarik menjadi TAP PLBPM yang mendorong masyarakat untuk menjadi mandiri dalam

menata lingkungan tempat tinggalnya sehingga kawasan pesisir tidak lagi dipandang kumuh.



NUR MUHAMMAD, S.E.I, dilahirkan di Desa Pak Utan Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Oktober 1979. Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2005. Pernah mengajar pada lembaga Pendidikan non formal di Mempawah. Tahun 2008 bekerja sebagai Tenaga Pendamping Daerah (TPD) pada kegiatan PEMP di Kabupaten Pontianak. Dan tahun ini bekerja sebagai TAP PLBPM 2009 di Kabupaten Pontianak. Kegiatan ini menantang untuk dapat memotivasi masyarakat

dalam menata dan memajukan lingkungannya, sehingga kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai daerah kecil yang kumuh. ●



Bengkayang

K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir di Bumi Sebalu



Bumi Sebalu, demikian masyarakat Kalimantan biasa menyebut Bengkayang, Kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak - Malaysia Timur dan terletak pada jalur Singbebas (Singkawang, Bengkayang dan Sambas), dan menghubungkannya ke Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan *Bonder Gate* antara Indonesia-Malaysia. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak diantara 108,39° - 110,04° BT dan 0,33° - 2,02° LU sedangkan secara administratif wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Sambas di sebelah utara, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak di sebelah selatan, Laut Natuna dan Kota Singkawang di sebelah barat, dan Kabupaten Sanggau dan

Moroccan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Serawak Malaysia di sebelah timur. Letaknya yang strategis membuat Bengkayang mempunyai banyak potensi yang dapat ditunggangkan. Apalagi dengan relief yang beragam, dari pegunungan hingga daerah pesisir pantai, menjadikan Bengkayang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Namun pembangunan di wilayah ini masih tertinggal. Garis pantai kabupaten ini sekitar 40,5 kilometer. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari perairan, baik laut maupun sungai, yang mempunyai potensi cukup tinggi. Potensi perikanan yang cukup potensial adalah udang dan ikan segar yang berasal dari hasil tangkapan dan kegiatan budidaya.

Program PLBPM dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2006, yang diokuskan di dua desa yaitu Desa Lemukutan dan Desa Karimunting yang merupakan bagian dari Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Mayoritas penduduk di kedua desa tersebut berprofesi sebagai nelayan. Kedua desa tersebut dapat dicapai dengan menggunakan jalan darat dari ibukota kabupaten Bengkayang dengan waktu sekitar 4 jam. Kondisi jalan darat dari ibukota kabupaten menuju lokasi dalam kondisi yang cukup baik, beraspal walaupun di beberapa tempat ada yang rusak. Terpilihnya kedua desa pesisir tersebut karena kondisi dan permasalahan yang hampir sama, yaitu kondisi lingkungan permukiman yang buruk seperti jalan desa yang masih tanah, saluran air yang tidak memadai, ketidaktersediaan fasilitas MCK dan tempat pembuangan sampah serta belum terse-

dianya sumber air bersih khususnya di Desa Karimunting Pulau Kabung. Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Desa Lemukutan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas jalan lingkungan dan perbaikan rumah warga.

Dari hasil musyawarah dengan masyarakat yang diwadahi dalam forum rembung desa disepakati bahwa kegiatan PLBPM di Desa Karimunting difokuskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi tingkat abrasi dan membangun serta merehabilitasi rumah warga yang miskin. Pembangunan gorong-gorong, jalan lingkungan, jembatan, MCK dan sarana air bersih merupakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, sedangkan untuk mengurangi terjadinya abrasi dilakukan pembangunan talud. Rehabilitasi rumah warga di desa ini dilakukan dengan membangun 1 unit rumah contoh serta merehabilitasi 3 unit rumah warga. Sedangkan dari hasil rembung desa disepakati, untuk Desa Lemukutan akan diprioritaskan pada kegiatan rehabilitasi rumah dan pembangunan jalan desa. Jalan desa sebagai akses utama masih berupa tanah dimanfaatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Bila musim hujan tiba, jalan-jalan tersebut menjadi sangat becek sehingga menghambat akses kegiatan masyarakat. Banyaknya kondisi rumah masyarakat yang memprihatinkan sehingga diperlukan rehabilitasi rumah. Di wilayah ini dibangun 1 unit rumah contoh dan rehabilitasi rumah penduduk sebanyak 211 unit.

Jenis Kegiatan PLBPM di Kabupaten Bengkayang TA 2006

No	Kegiatan	2006	
		Pulau Kabung	Pulau Lemukutan
1.	Pembangunan Talud	190 m3	-
2.	Pembangunan Gorong-gorong	30 unit	-
3.	Pembuatan MCK	5 unit	-
4.	Pembuatan Jalan Lingkungan	656 m2	7.500 m2
5.	Pembangunan Jembatan / plat / culvert box	1 unit	-
6.	Pembangunan Tambatan Perahu	225 m2	-
7.	Pembuatan sumber air bersih	3 unit	-
8.	Pembangunan rumah contoh	1 unit	1 unit
9.	Rehabilitasi rumah	3 unit	211 unit

Sumber : Data Primer, 2008

Moroccan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

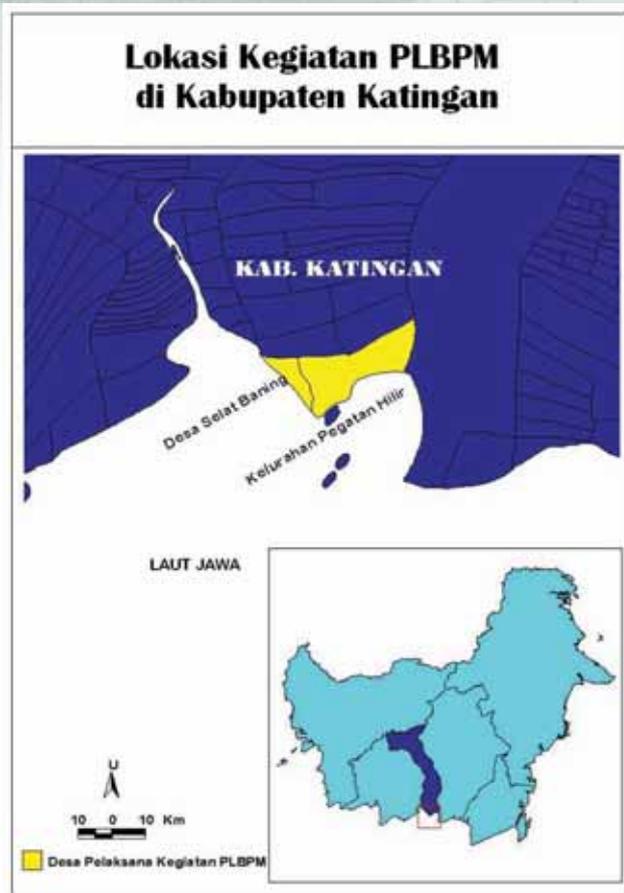


3 unit berhasil dibangun 5 unit. Pembangunan penahan abrasi juga dilaksanakan melebihi dari rencana awal yaitu dari 180 x 0,4 m menjadi 190 x 1 m. Demikian juga dengan pembangunan tambat perahu dari rencana awal sepanjang 92 m berhasil dibangun sepanjang 150 m.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif. Pembangunan penahan abrasi di Desa Karimunting memberikan manfaat dengan berkurangnya abrasi. Demikian juga dengan berbagai fasilitas fisik yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kedua lokasi target. Diharapkan kedepannya desa tersebut dapat dengan mandiri menata lingkungan dan memajukan kegiatan perekonomian mereka. ●

Kegiatan PLBPM di kedua desa target grup mendapat tanggapan positif dari masyarakat ataupun Pemda setempat. Masyarakat ikut berpartisipasi melalui keterlibatannya dalam setiap pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dengan menyumbangkan tenaga atau material bahan bangunan seperti pasir, batako, semen ataupun batu. Beberapa bangunan fisik terbangun seperti pembangunan jembatan box, berhasil dibangun melebihi target yang sudah direncanakan yaitu dari 4 meter menjadi 8 meter. Pembangunan MCK yang direncanakan





Katingan
K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir di Kabupaten Katingan

Oleh: Darung Untung, Christian Agus Taupan dan Patmaniaty Pandayani



Kabupaten Katingan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki sumberdaya kelautan yang cukup melimpah, dengan panjang garis pantai sekitar 54 km dan terdiri dari 16 desa pesisir. Kabupaten Katingan merupakan pemasok udang yang cukup besar untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan sentra budidayanya ada di Kecamatan Katingan Kuala.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Katingan dilaksanakan sejak tahun 2008,

Merasuklah Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

yang dilaksanakan di Desa Selat Baning dan Kelurahan Pegatan Hilir. Pada pemilihan kedua lokasi tersebut, dilakukan oleh tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PLBPM yang ada. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2009 dilaksanakan di Desa Kramat, yang memiliki keterpurukan infrastruktur pemukiman.

Kelurahan Pegatan Hilir merupakan bagian dari Kecamatan Katingan Kuala dengan luas 1.867 Ha. Topografi kelurahan ini berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0,5 - 2 m diatas permukaan laut. Perjalanan menuju kelurahan ini, dapat dilakukan dengan menggunakan jalur sungai dengan jarak tempuh 200 km dari ibukota kabupaten. Pemukiman masyarakat desa ini berpusat dipinggiran pantai. Bangunan rumah masyarakat di kelurahan ini masih banyak yang non-permanen, dengan atap rumah yang terbuat daun nipah. Masyarakat yang menghuni kelurahan ini berjumlah 3.552 jiwa dan terdiri

dari 970 KK.

Desa Selat Baning juga termasuk dalam wilayah Kecamatan Katingan Kuala dengan luas sekitar 4.867 Ha. Jumlah penduduk yang tinggal di desa ini adalah 375 jiwa dan terdiri dari 101 KK. Topografi desa ini juga berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,5 - 2 m diatas permukaan laut. Untuk menuju desa ini kita hanya bisa menggunakan kapal kecil dari kelurahan Pegatan Hilir, dan itu pun saat air pasang. Hal ini karena lokasi desa berada diantara dua pulau dengan jarak ± 50 meter dan kedalamannya sekitar 5-10 meter. Masyarakat desa ini cukup ramah, sistem gotong royong pun masih diterapkan di desa ini. Infrastruktur desa ini sangat minim dengan jalan masih berupa tanah keras, belum tersedianya fasilitas penunjang permukiman seperti listrik, air bersih, dan MCK.

Desa Selat Baning dan Kelurahan Pegatan Hilir memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Dimana tanggapan masyarakat Desa Selat Baning begitu antusias, mengingat belum

ada program pemerintah yang masuk di desa mereka. Antusias ini pun terbukti saat kami melaksanakan rebug desa pertama yang dipenuhi masyarakat. Sedangkan sambutan masyarakat Kelurahan Pegatan Hilir kurang hangat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat menganggap kegiatan ini merupakan suatu proyek, yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terlihat saat sosialisasi hanya 15 orang yang hadir. Akhirnya masyarakat dapat mengerti, dengan pendampingan dan penjelasan dari tim Tenaga Ahli Pendamping (TAP), bahwa kegiatan PLBPM bukan proyek tetapi sebuah program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat sendiri.

Masalah dalam penentuan kegiatan prioritas di kedua lokasi ini adalah masyarakat tidak mengetahui kebutuhannya, sehingga TAP dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) mengusulkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan melalui

musyawarah mufakat, masyarakat akhirnya dapat menentukan kegiatan prioritas.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, sebagian besar masyarakat berperan aktif dalam membangun desa mereka. Swadaya masyarakat di desa ini berupa penyediaan lahan, material / bahan-bahan dan tenaga kerja, hingga konsumsi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat bergotong royong

Peran serta Pemerintah Daerah pada kegiatan ini cukup besar, dengan menyediakan dana penunjang, pengawasan dan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah nelayan. Disamping itu juga peran aparat pemerintah daerah cukup besar dalam tim FKTD.

Pembelajaran singkat ini, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Tidak perlu tergantung dari pemerintah saja tapi bisa dengan swadaya masyarakat dalam melakukan pembangunan. Masyarakat dapat lebih mandiri dan bertanggungjawab atas infrastruktur yang sudah dibangun. ●

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Katingan

Kegiatan	2008		2009		
	Kel. Pegatan Hilir	Desa Selat Baning	Kel. Pegatan Hilir	Desa Selat Baning	Desa Kramat
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penanaman Mangrove	10.000 btg	-	-	-	5.000 btg
Perbaikan Rumah Penduduk	25 unit	9 unit	-	-	-
Pembangunan Jembatan	2 unit	1 unit	-	-	-
Pembangunan MCK	4 unit	2 unit	-	-	-
Pembangunan Tempat Penampungan Air Bersih	5 unit	4 unit	-	-	-
Perbaikan Sistem Air Bersih	1 unit	-	-	-	-
Pembuatan Tempat Parkir	64 m ²	-	-	-	-
Perbaikan Tempat Ibadah	2 unit	-	-	-	-
Renovasi Tempat Air Bersih	1 unit	-	-	-	-
Semenisasi Jalan	4.000 m	-	-	-	1.128 m



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



DARUNG UNTUNG, S.Pi, lahir pada tanggal 28 Desember 1984 di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2002, diterima di Universitas Palangka Raya Jurusan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan dan meraih gelar sarjana pada tahun 2007. Pada bulan Februari 2008, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM Kabupaten Katingan. Selama pelaksanaan kegiatan begitu banyak suka duka yang dihadapi, tetapi setelah pekerjaan selesai penulis merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Masyarakat sangat berterimakasih, karena mereka telah merasakan manfaat yang begitu besar dari program PLBPM.

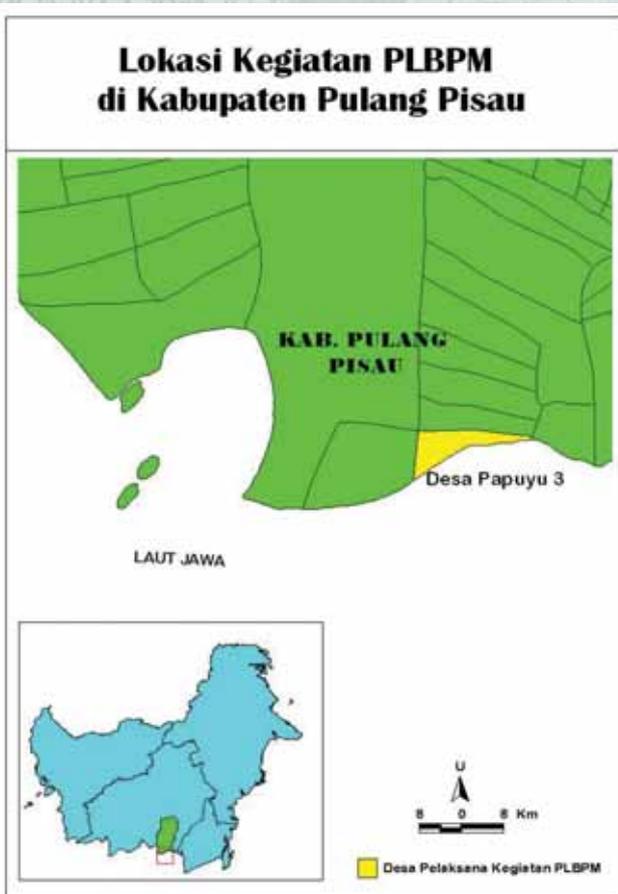


CHRISTIAN AGUS TAUPAN, S.Pi, dilahirkan di Kasongan Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Agustus 1978. Menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di ibukota Propinsi Kalimantan Tengah hingga meraih gelar sarjana. Sejak lulus dari perguruan tinggi bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian tahun 2009, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM Kabupaten Katingan, yang sangat menyenangkan, karena dapat memotivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya.



PATMANIATI PANDAYANI, ST, dilahirkan di Buntok pada tanggal 15 Juni 1982. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Palangkaraya pada tahun 2008. Setahun sebelum lulus, pernah bekerja sebagai *planner* di sebuah Jasa Konsultan Building di Palangka Raya selama 2 tahun. Pada tahun 2009, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) kegiatan PLBPM. ●





Pulang Pisau

K A B U P A T E N



Turut Membangun Bumi Handep Hapakat melalui Kegiatan PLBPM

Oleh: Lindya Arninatama, M. Saleh dan Ridha Muslimatulhusnah



Kabupaten Pulang Pisau terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai motto "Handep Hapakat". Motto ini berarti adanya persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat, dengan tidak membedakan agama, suku, dan warna kulit. Sebagaimana kehidupan masyarakat Suku Dayak Rumah Betang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas kabupaten ini adalah 8.997 km² atau 899.700 ha yang terdiri dari 8 kecamatan, 88 desa dan 2 Kelurahan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga merupakan harapan besar bagi aksesibilitas transportasi dan sarana fisik yang mendukung pembangunan Kalimantan Tengah secara komprehensif. Jika ingin ke kabupaten ini, anda melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Palangkaraya selama 1 jam 45 menit, dan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kabupaten ini

Murabahat Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

sendiri selama 2 jam.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten baru dalam melaksanakan kegiatan PLBPM pada tahun 2009 ini. Kegiatan ini akan dilakukan di dua lokasi yang berada dalam satu desa pesisir, yaitu desa Papuyu III Sei Puduk. Desa ini belum tersentuh pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Desa Papuyu III Sei Puduk mempunyai luas desa sekitar 124,00 km². Jumlah penduduk di desa ini adalah 2.291 jiwa yang terdiri dari 506 KK, sehingga kepadatan penduduk 18,48 jiwa/km². Permukiman penduduk pada umumnya menyebar sepanjang aliran sungai yang bermuara pada Laut Jawa. Mayoritas bangunan rumah penduduk di desa ini terbuat dari kayu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Desa ini juga belum mempunyai infrastruktur yang memadai, seperti jalan lingkungan, system sanitasi, MCK dan air bersih. Mata Pencaharian pokok masyarakat yang hidup di pesisir desa ini sebagian besar adalah nelayan, dan sebagian kecil bekerja sebagai petani.

Pelaksanaan kegiatan PLBPM melibatkan semua masyarakat Desa Papuyu III Sei Puduk. Sehingga kegiatan PLBPM mendapat sambutan hangat dari masyarakat desa. Masyarakat berjanji akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan PLBPM agar desanya dapat lebih maju dan sejahtera. Sulitnya menjangkau Desa Papuyu III Sei Puduk melalui darat merupakan salah satu kendala dalam hal pengiriman material kegiatan PLBPM. Namun penyediaan sumur bor dan MCK mampu mengantarkan masyarakat pada kehidupan masyarakat yang sehat, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. ●



Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Pulang Pisau

Kegiatan	Desa Papuyu III Sei Puduk
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket
Pembangunan Jalan Setapak	1.500 m
Pembangunan Rumah Percontohan	2 unit
Pembangunan MCK	2 unit

Biografi

**TENAGA AHLI PENDAMPING PLBPM
KABUPATEN PULANG PISAU
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2009**



- Nama : M. SALEH, Spi
 Tempat/Tanggal Lahir : Lupak Dalam, 2 Agustus 1981
 Pendidikan Terakhir : S-1 Perikanan, Universitas Achmad Yani Banjarmasin
 Pengalaman Kerja : 1. Sebagai TPD (2006 dan 2008)
 2. Tenaga Ahli Pendamping (TAP - 2009)
 Motivasi menjadi TAP : Membantu memfasilitasi masyarakat bebas dari ketergantungan dan mampu berdikari.
 Kesan selama menjadi TAP : Senang dapat menjadi bagian dari kegiatan karena dapat memahami berbagai realitas lingkungan, menggali dan mengorganisasikan potensi dan sumberdaya.
 Alamat : Jln. Pasar Senin, RT 02 No. 17 Lupak Dalam, Kapuas Kuala.
 No. Tlp/Hp. : 085285631071



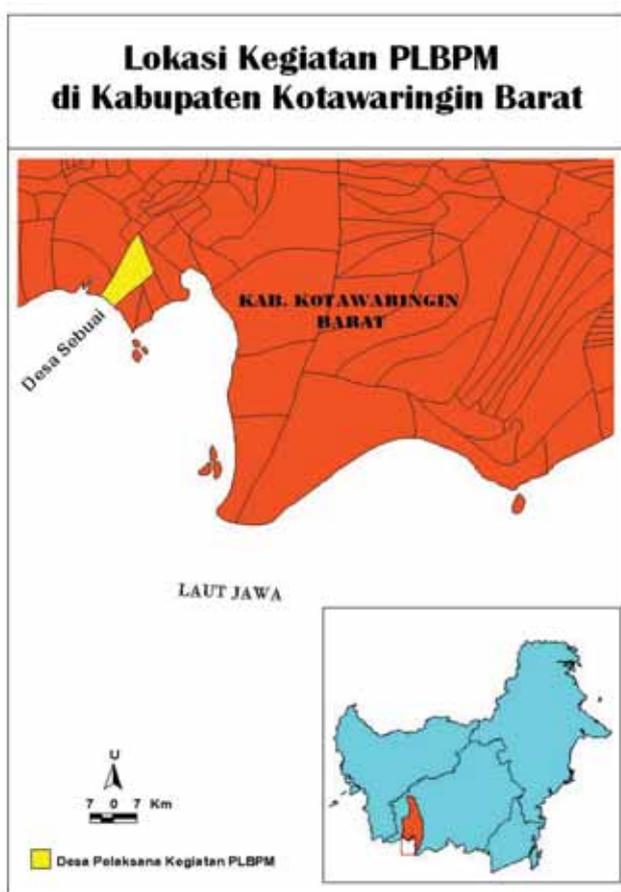
- Nama : RIDHA MUSLIMATULHUSNA, Spi
 Tempat/Tanggal Lahir : Sei Tinggiran, 8 Februari 1986
 Pendidikan Terakhir : S-1 Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin-Kalsel
 Pengalaman Kerja : 1. Sebagai TPD (2008) dan
 2. Tenaga Ahli Pendamping (TAP - 2009)
 Alasan /Motivasi menjadi TAP : Menambah Pengalaman Kerja.
 Kesan selama menjadi TAP : Dapat membantu dan mendampingi masyarakat desa pelaksana dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di sekitar mereka.
 Alamat : Sei Tinggiran RT 03/1, Tanjung Perawan, Bahaur
 No. Tlp/Hp : 085230793307

Morosekelas Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM



3. Nama : LINDYA ARNINATAMA, ST
Tempat/Tanggal Lahir : Gohong, 24 November 1981
Pendidikan Terakhir : S-1 Teknik Arsitektur Universitas Palangkaraya - Kalteng
- Pengalaman Kerja : 1. Konsultan Perencana dan Pengawas (2006-2007)
2. Tenaga Freelance (2007-2008)
3. Tenaga Tenaga Ahli Pendamping (TAP - 2009)
- Alasan / Motivasi menjadi TAP : Menambah Pengalaman Kerja, menggali dan mempelajari berbagai hal/karakter baik dalam kegiatannya maupun manusianya.
- Kesan selama menjadi TAP: Merasa senang diberi kesempatan untuk dapat berperan serta dalam kegiatan PLBPM ini, setiap kegiatan pasti ada hal-hal positif maupun negatifnya. Berbagai hal yang timbul dari setiap kegiatan, saya rasa sangat wajar karena inilah yang menjadi daya tarik dari kegiatan PLBPM ini. Semoga di masa yang akan datang hal-hal tersebut dapat dengan mudah untuk diatasi dan diselesaikan dengan baik karena berbekal dari pengalaman yang ada sebelumnya.
- Alamat : I. Lintas Kalimantan, RT.VI No. 34
Gohong, Pulang Pisau
- No. Tlp/Hp. : 081250956424





Sekilas Pelaksanaan PLBPM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Oleh: Warisman, Agryanto dan Muhammad Syahirul Fajar



Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten Induk dari Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Kabupaten yang terletak pada $1^{\circ} 19'$ sampai $3^{\circ} 36'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 50'$ Bujur Timur ini, memiliki luas wilayah 10.759 km^2 dengan panjang Garis Pantai 156 km dan 12 desa pesisir. Keadaan topografis kabupaten ini dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit. Untuk mencapai Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat dari Jakarta langsung ke Kota Pangkalan Bun yaitu Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan waktu tempuh 80 menit. Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 baru mendapatkan kesempatan untuk menata desa pesisir melalui kegiatan PLBPM. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Moroseselua Duri Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

(PLBPM) akan dilaksanakan di dua lokasi yaitu Sabuai Timur dan Sabuai Barat (Sungai Rengas) Desa Sabuai Kecamatan Kumai. Rapat Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) menentukan lokasi kegiatan PLBPM di Desa Sabuai menjadi target group dengan alasan karena desa pesisir tersebut termasuk desa tertinggal dan dapat disenergikan dengan kegiatan PM2L yang diinisiasi oleh Propinsi.

Desa Sabuai terletak di sebelah selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jarak kurang lebih 65 km dari Pusat Kota Kabupaten dan kurang lebih 50 km dari Pusat Kota kecamatan. Luas desa yang secara astronomi terletak

pada 111°16' - 111°32' BT dan 2°33' - 2°48' LS ini adalah 14,124 km² dan. Desa Sabuai secara administratif masuk kedalam Kecamatan Kumai. Jumlah penduduk desa ini adalah 783 orang yang terbagi dalam 185 KK. Desa ini terletak pada ketinggian daratan tanah sekitar 0 - 5 meter. Dari Permukaan Laut (DPL), sehingga secara alami wilayah ini dipengaruhi oleh aktifitas pasang surut perairan laut di sekelilingnya. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sabuai sebagian besar bergerak di bidang penangkapan, pengolahan hasil perikanan dan yang lainnya dibidang pertanian

Sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan

Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui PLBPM T.A 2009

No.	Kegiatan PLBPM	LK. Sebogor Mandiri	LK. Rengas Mandiri
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang dan rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
2.	Penghijauan (Menanam Mangrove)	1.600 Batang	1.400 Batang
3.	Tower Air Bersih (2.200 Lt)	14 Buah	1 Buah
4.	Tower Air Bersih (8.800 Lt + Pipanisasi 1.200 m) RT. 03		1 Buah
5.	Tower Air Bersih (8.800 Lt + Pipanisasi 600 m) RT. 04		1 Buah
6.	Tower Air Bersih (4.400 Lt) RT. 06		1 Buah
7.	Membangun Rumah Sangat Sederhana (24 m ²)	1 Buah	1 Buah
8.	Membangun Rumah Sehat Sederhana (36 m ²)		1 Buah
9.	Rehab Rumah (Atap Rumah)	7 Buah	
10.	Membuat Sumur Bor		3 Buah
11.	Membuat Sumur Buis (Sumur Gali)		28 Buah
12.	Membangun Balai Pertemuan Nelayan	1 Buah	
13.	Membangun MCK	10 Buah	23 Buah
14.	Pengendali Air Asin		1 Paket
15.	Mesin Genset 1200 Watt	7 Buah	1 Buah
16.	Mesin Genset 5000 Watt	1 Buah	
17.	Tong Air (kapasitas 2.200 liter)	3 Buah	

Moroseselua Duri Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

PLBPM dan bekal dari hasil pelatihan TAP di Jakarta, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Awalnya kami berkoordinasi dengan perangkat kedua desa tersebut, terutama Kelapa Desanya bahwa di desa ini akan dilaksanakan kegiatan PLBPM, dan kami mohon terhadap perangkat desa supaya mengumpulkan semua masyarakat desa untuk diadakan pengenalan/soialisasi PLBPM. Untuk pelaksanaan sosialisasi di Sabuai Timur bertempat di Balai PKK Desa Sabuai yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009 jam 14.00 s/d 16.15 WIB, yang dihadiri Pengelola Kegiatan PLBPM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staff Administrasi,

Desa Sabuai beserta staf-stafnya, Masyarakat Desa Sabuai (Sabuai Barat/Sungai Rengas) dan Tenaga Ahli Pendamping (TAP).

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PLBPM sangat positif. Hal disebabkan oleh masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Proses pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan penunjukan Motivator Desa adalah melalui rembuk/musyawahar Desa, dengan cara pemilihan langsung oleh peserta rembuk desa. Saat melakukan sosialisasi, pembentukan LK dan penunjukan Motivator desa tidak ada kendala, karena sudah melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Dalam penentuan kegiatan prioritas di Desa Target Group, keikutsertaan masyarakat desa sangat aktif karena kegiatan



Perwakilan Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD), Kepala Desa Sabuai beserta staf-stafnya, Masyarakat Desa Sabuai (Sabuai Timur) dan kami selaku Tenaga Ahli Pendamping (TAP).

Sedangkan pelaksanaan pengenalan/soialisasi di Sabuai Barat (Sungai Rengas) bertempat di Balai Pertemuan Desa Sabuai yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009 jam 09.00 s/d 12.00 WIB. yang dihadiri oleh Pengelola Kegiatan PLBPM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, PPK, Staff Administrasi, Perwakilan tim TPD, Kepala

tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam penentuan kegiatan prioritas Motivator desa yang terpilih tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat desa karena yang menentukan prioritas kegiatan adalah rembuk desa (musyawarah desa) yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa. Dalam rembuk desa, masyarakat mengajukan jenis kegiatan sebagai berikut :

Sabuai Timur (LK. SEBOGOR MANDIRI) : penyusunan Rencana Zonasi dan Tata Ruang Desa, Penghijauan, Rehab Rumah, pembangu-

nan Rumah Baru Sederhana 1 (satu) unit, pembangunan Air Bersih (Tower), pembangunan Balai Pertemuan Nelayan, pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak (TK), pembangunan WC, Rehab WC, Rehab Balai PKK dan pengadaan Mesin Genset & Tong Air (kapasitas 2.200 liter).

Sabuai Barat/Sungai Rangas (LK. RENGAS MANDIRI) : penyusunan rencana Zonasi dan Tata Ruang Desa, Penghijauan, pembangunan Rumah Sehat Sederhana 1 (satu) unit, Relokasi Rumah 1 (satu) unit, pembangunan Air Bersih (Tower), pembuatan Sumur Bor dan Sumur Bis (Sumur Gali), pembangunan WC, Penimbunan Lapangan, Membuat Patok Cor, pembangunan Bundaran, Pemagaran Pemakaman Umum dan Pengendali Air Asin

Akan tetapi karena keterbatasan dana, akhirnya dipuruskan jenis kegiatan prioritas yang akan dilakukan yaitu :

Sabuai Timur : penyusunan Rencana Zonasi dan Tata Ruang Desa, Penghijauan, Rehab Rumah, pembangunan Rumah Baru Sederhana 1 (satu) unit, pembangunan Air Bersih, pembangunan Balai Pertemuan Nelayan, pembangunan WC, pengadaan Mesin Genset & Tong Air (kapasitas 2.200 liter)

Sabuai Barat/Sungai Rangas : penyusunan Rencana Zonasi dan Tata Ruang Desa, Penghijauan, pembangunan Rumah Sehat Sederhana 1 (satu) unit, Relokasi Rumah 1 (satu) unit, pembangunan Air Bersih (Tower), pembuatan Sumur Bor, Sumur Buis (Sumur Gali), pembangunan WC, Pengendali Air Asin

Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan

PLBPM berupa pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi pelaksanaan kegiatan. Pemerintah propinsi juga mengadakan kegiatan PM2L di lokasi ini. Kegiatan yang dilaksanakan pada program PM2L adalah bidang Infrastruktur.

Peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM sangat aktif artinya masyarakat yang merencanakan dan juga mereka yang melaksanakan semua kegiatan tersebut saling bahu membahu demi kelancaran terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/dijadwalkan.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan PLBPM adalah bahwa masyarakat bisa merencanakan, melaksanakan dan menikmati jerih usahanya sendiri, sehingga dengan adanya kegiatan ini masyarakat sadar betapa beratnya penataan lingkungan yang baik untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rembug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan gotong royong dapat menimbulkan kebersamaan masyarakat desa. Kondisi masyarakat desa dengan terbangunnya fasilitas infrastruktur di desa sangat bermanfaat misalnya yang tadinya kesulitan air bersih dengan dibangunnya tower air bersih sekarang masyarakat sudah tidak kesulitan air bersih.

Masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas fisik yang telah dibangun dalam program PLBPM adalah membuat peraturan desa sesuai kesepakatan seluruh masyarakat desa. Diharapkan semua fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dipelihara. ●

Biografi



N a m a
Tempat/Tanggal Lahir
Pendidikan Terakhir
Pengalaman Kerja

: **Warisman, ST.**
: Cilacap, 31 Juli 1967
: Sarjana Teknik dan Manajemen Industri
: 1. PT. Bakrie Building Industri Jakarta sebagai staff Production Planning Control (PPC)
2. PT. Sumber Batu Group Jakarta sebagai Pengawas Proyek
3. MTC Institute Jakarta sebagai Pengajar
4. PT. Artechland Agung Konsultan Palangka Raya

Alasan/Motivasi menjadi TAP : Karena kegiatan PLBPM memberi pembelajaran kepada masyarakat pesisir dalam menata lingkungannya sendiri, dimana seluruh masyarakat dilibatkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Disini saya tertantang untuk dapat memotivasi masyarakat dalam menata lingkungan tempat tinggalnya.

A l a m a t : Jl. Pangeran Diponegoro No. 12 RT. 01/01 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Propinsi Kalimantan Tengah.

Biodata Penulis



Monev/evaluasi Diri Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM



N a m a : Agryanto, S.Pi
Tempat/Tanggal Lahir : Saing, 15 Agustus 1984
Pendidikan Terakhir : Sarjana Perikanan
Pengalaman Kerja : -
Alasan/Motivasi menjadi TAP : Karena ingin menambah pengalaman terjun ditengah masyarakat terutama di masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan.

A l a m a t : BTN PINANG MERAH XIII RT.07 Ds. Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Propinsi Kalimantan Tengah.



N a m a : Muhammad Syahirul Fajar, ST.
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 13 November 1975
Pendidikan Terakhir : Sarjana Teknik
Pengalaman Kerja : 1. Staf Teknik PT. Mentobi Pangkalan Bun
2. Staf Teknik PT. Mega Surya Konsultan Pangkalan Bun

Alasan/Motivasi menjadi TAP : Karena Progam ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana merancang sebuah rencana kegiatan yang tersusun dalam sebuah analisa perencanaan kegiatan yang terdesain secara terperinci dalam Rencana Anggaran Biaya. Dimana, dalam pelaksanaannya nanti masyarakat langsung yang melaksanakan dalam kegiatan nantinya.

A l a m a t : Jl. Malijo Gg. LKMD RT.13 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Propinsi Kalimantan Tengah.





Tanah Bumbu

K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir dibawah Bayang-Bayang Degradasi Lingkungan Di Kabupaten Tanah Bumbu

Oleh: Suranto, Aidil Anshori dan Ani Juwandinar R



Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Selatan, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kotabaru. Kabupaten yang memiliki panjang garis pantai sekitar 158,7 km dan 6 desa pesisir ini, memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan batubara. Untuk menuju kabupaten ini, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Banjarmasin (Bandara Syamsudinooor) yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat kurang lebih selama 5 jam atau menggunakan pesawat kecil dari Bandara Syamsudinooor menuju kabupaten Tanah Bumbu.

Sejak tahun 2008 kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Pelaksanaan program PLBPM tahun ini merupakan tahap lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Proses penentuan desa pelaksana pada tahun 2008

dilakukan dengan cara survey dan pendekatan persuasif kepada masyarakat desa untuk menggalang permasalahan yang ada. Kendala dalam penentuan desa pelaksana ini adalah hampir semua desa pesisir yang ada di kabupaten ini masih sangat tertinggal. Setelah hasil survey tersebut, dilanjutkan dengan rapat pemerintah kabupaten khususnya tim Forum Teknis Pengendali Daerah (FKTD), yang memutuskan agar desa Angsana dan desa Setarap sebagai pelaksana kegiatan PLBPM.

Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2009 sebagai tahap lanjutan dilakukan pada satu desa yang dipilih dari kegiatan sebelumnya. Akan tetapi, khusus di kabupaten ini tetap dilakukan di dua desa tersebut. Keputusan ini diambil karena adanya integrasi program pemerintah daerah berupa Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) yang dialokasikan pada selu-

ruh desa yang ada, dengan bertujuan untuk menjangkau keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan desa baik dibidang fisik maupun ekonomi khususnya di wilayah pesisir.

Desa Angsana merupakan bagian dari kecamatan Angsana dengan luas wilayah 6.497 ha dan berupa daratan rendah. Untuk menuju desa ini dapat menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 90 km dari ibu kota kabupaten atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam. Pemukiman masyarakat di desa ini tersebar antara wilayah pesisir yang dihuni sebanyak 1.228 jiwa dan terdiri dari 268 KK. Masyarakat di desa ini berangsur pindah ke arah darat karena kurangnya daya dukung di wilayah pesisir tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu tidak ada muara yang besar untuk dijadikan sebagai tempat tambahan kapal, sehingga aktivitas para nelayan terganggu. Hingga saat ini masyarakat

yang masih menggantungkan hidupnya sebagai nelayan hanya sekitar 21% dan yang lainnya beralih sebagai petani dan karyawan perusahaan.

Desa Setarap termasuk dalam kecamatan Satu yang memiliki luas wilayah sekitar 49,7 km². Topografi desa ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut.

Apabila anda ingin berkunjung ke desa ini bisa ditempuh selama 3 jam dari ibu kota kabupaten menggunakan jalur darat. Jalan menuju desa ini, sangat sulit dilalui saat musim hujan sehingga desa ini bisa dikategorikan sebagai desa yang terisolir. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.596 jiwa dan terdiri dari 399 KK, dan mayoritas masyarakat desanya bekerja sebagai nelayan tangkap, bagan, budidaya dan pengolah hasil perikanan seperti terasi. Fasilitas umum di desa ini masih sangat minim serta kondisi perumahan yang kurang teratur dengan mayoritas bangunan rumah terbuat dari dinding kayu dan daun nipah.

Banyak pelajaran yang didapatkan pada pelaksanaan program tahun sebelumnya. Adanya pro dan kontra masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi PLBPM. Karakteristik masyarakat pesisir begitu keras dan sangat sulit dimasuki oleh tatanan-tatanan dari luar merupakan salah satu kendala bagi kami. Namun, hasil pelatihan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) yang sangat bermanfaat dan berguna dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir. Adapun pendampingan pertama dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat agar lebih luasa dan lebih mudah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sendiri bila kita telah terlebih dahulu berinteraksi dengan pemimpinnya.

Namun pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pada tahun ini, tinggal melanjutkan hasil dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat perbedaan karakteristik masyarakat Desa Angsana dan Desa Setarap. Di desa Angsana masyarakatnya memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dengan respon yang baik terhadap program PLBPM. Akan tetapi, dalam pengambilan kebijakan dan penentuan kegiatan

prioritas, masih didominasi oleh segelintir orang yang memiliki pengaruh di desa tersebut.

Beda halnya dengan Desa Setarap, di desa ini keterlibatan masyarakat yang sangat minim hal ini seperti kurangnya kehadiran masyarakat dalam rembung desa serta tidak peduli terhadap kegiatan yang berasal dari pemerintah daerah maupun dari instansi lain. Akan tetapi, sedikit demi sedikit kita ajak bersama-sama untuk bergabung dan ikut serta dalam kegiatan untuk membangun dan memperindah tempat tinggal mereka sendiri. Fenomena yang tidak disadari terjadi di desa ini, dimana ada sebagian masyarakat yang sangat memanfaatkan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga individu masyarakat memperlakukan posisi sebagai pelaksa kegiatan.

Dalam pemilihan ketua Lembaga Kemasyarakatan (LK) di kedua desa tersebut, dilaksanakan secara musarah mufakat yang mengedepankan kebersamaan. Program PLBPM tahun 2009 ini berorientasi dan dititik beratkan pada perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan pesisir, yang terlebih dahulu menggalang permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan rembung

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Tanah Bumbu

Kegiatan PLBPM	2008		2009	
	Desa Angsana	Desa Setarap	Desa Angsana	Desa Setarap
Rencana tata ruang dan zonasi kawasan pesisir	-	-	1 paket	1 paket
Penanaman Vegetasi Pantai	500 btg	1500 btg	171 btg	260 btg
Pembuatan Papan Hibauan	2 unit	2 unit	-	-
Pembangunan Dermaga	100 m	30 m	-	-
Pembukaan jalan	-	-	3,5 km	-
Pembangunan Jalan Lingkungan	-	300 m	-	-
Siring jalan	-	-	-	622 m
MCK	1 unit	1 unit	-	3 unit
Sumur	-	4 unit	-	2 unit
Pembangunan Tong Tower Air Bersih	1 unit	1 unit	-	-
Pengurukan jalan menuju dermaga	-	-	-	100 m
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	-	-	-	4 unit
Renovasi TPA	-	1 unit	-	-
Perbaikan Ruma rumah	8 Unit	-	8 unit	-
Pembangunan rumah	-	-	-	2 unit
Pembuatan Plang Rumah	8 Unit	-	-	-
Pembangunan Tempat Wudhu	-	1 unit	-	-



desa dan terjun langsung ke lapangan. Dari penyusunan tata ruang dan zonasi kawasan pesisir diharapkan kita bisa melihat rencana jangka panjang akan untuk pengembangan desa pesisir.

Pendekatan partisipatif akan menciptakan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, yang kita ketahui bahwa pembangunan tanpa melibatkan masyarakat akan menghasilkan produk-produk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya pembangunan tanpa peran masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang tanpa arah dan tidak teratur. Dalam hal ini kami selaku tenaga pendamping memberikan arahan dan pendampingan bagi pengurus LK bagaimana tata cara penyusunan rencana Anggaran Biaya (RAB) dan administrasi.



Adapun usulan dari masyarakat Desa Angsana untuk jangka panjang diantaranya pembangunan tempat pengeringan ikan, pabrik es, pembuatan bronjong, pengerasan jalan, perbaikan area wisata, pembuatan jalan tembus antara Desa Angsana dengan Desa Setarap yang bertujuan agar Desa Setarap tidak terisolir, pembangunan pendopo pertemuan, pembangunan tambahan kapal, drainase dan penyediaan sumur bor.

Sedangkan usulan dari masyarakat Desa Setarap untuk rencana pembangunan jangka panjang berupa pembangunan dermaga, TPI, pabrik es, infrastruktur jalan pemukiman, pen-

geringan ikan, sumur, MCK, pembuatan fasilitas kesehatan dan perbaikan jalan poros desa. Usulan jangka panjang dari masyarakat kedua desa tersebut dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir.

Dalam kegiatan PLBPM ini banyak proses pembelajaran-pembelajaran singkat yang bermanfaat besar bagi masyarakat, misalnya berartinya sebuah perencanaan sebagai usaha untuk menyusun langkah yang sistematis dalam mencapai tujuan sehingga dapat dinikmati secara bersama.

Adanya program PLBPM tahun 2008 di Desa Angsana telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat seperti pembangunan dermaga untuk memperlancar aktivitas nelayan saar melaut, kegiatan bedah rumah, sanitasi, dan penghijauan kawasan pesisir. ●



Biografi

Sekilas Mengenai Penulis



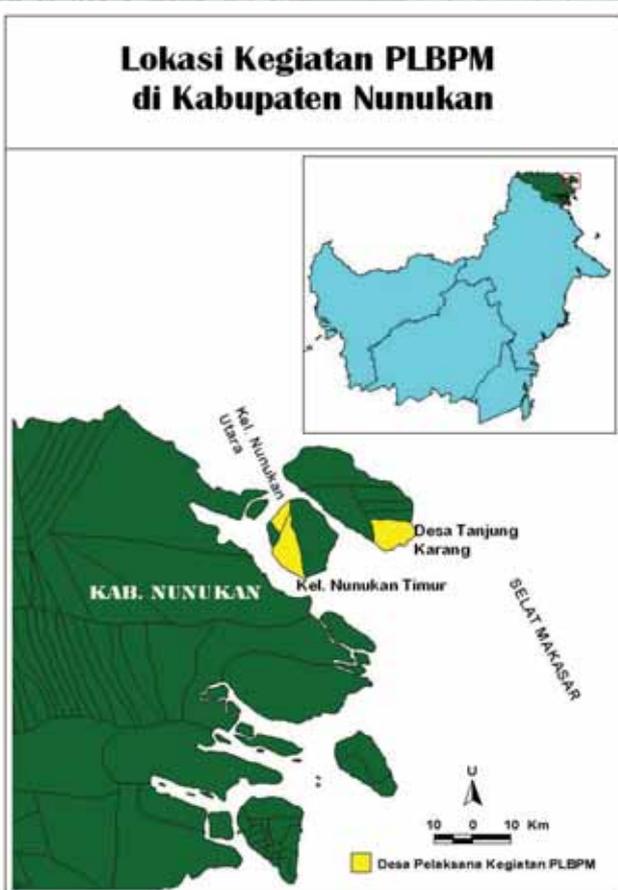
Suranto, S.Pi dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 27 Desember 1982. Lulus sebagai Sarjana Perikanan dan mulai bekerja sebagai TAP pada kegiatan PLBPM T.A 2008 di Kabupaten Tanah Bumbu. Menjalankan tugas sebagai TAP yang sangat mengharukan, menegangkan dan menyenangkan.



Aidil Anshori, S.Pi dilahirkan di Pagatan, pada tanggal 13 Desember 1979. Pendidikan terakhir sebagai Sarjana Perikanan. Pernah bekerja di PT. Philips, PT. Nusantara dan menjadi TAP pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2008 hingga sekarang. Bekerja sebagai TAP dapat menambah pengalaman baru di bidang pemberdayaan masyarakat.



Any Juwandinar R., ST, dilahirkan di Kota Baru pada tanggal 12 Juni 1984. Pendidikan terakhir sebagai Sarjana Teknik sipil. Pernah bekerja di PT. Yamapindo dan PT. Tata Banjaran Lestari. Pada tahun 2009, bekerja sebagai TAP pada program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Kabupaten Tanah Bumbu. Bekerja sebagai TAP ternyata penuh resiko dan tantangan, namun hal ini merupakan pelajaran yang berharga yang tidak didapatkan di bangku kuliah.



Nunukan

KABUPATEN



Menata Desa Pesisir di Kabupaten Nunukan

Oleh: Budiman HS, Syarifuddin dan Muhammad Taufik



Kabupaten Nunukan terletak di Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan pada tahun 1999. Untuk mencapai kabupaten ini, dapat menggunakan pesawat udara ke Kota Tarakan (Bandara Juata). Setelah sampai di Kota Tarakan ada 2 alternatif transportasi yang dapat digunakan menuju Kabupaten Nunukan dengan menggunakan pesawat Trigana Air yang ditempuh selama 15 menit atau menggunakan speed boat dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

Kabupaten Nunukan mendapatkan kesempatan untuk menata desa pesisirnya melalui kegiatan PLBPM pada tahun 2006, 2008 dan 2009. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) tahun 2006 dilakukan di tiga lokasi yaitu Kampung Pukat, Gang Kakap dan Desa Tanjung Karang. Pemilihan lokasi tersebut, dilakukan oleh Forum Komunikasi Teknis Daerah (FKTD) yang dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping dengan menggunakan metode scoring dan dari hasil

survey bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Untuk tahun selanjutnya, kegiatan PLBPM hanya difokuskan di Desa Tanjung Karang.

Kampung Pukat merupakan bagian dari Kecamatan Nunukan Utara. Perjalanan menuju ke desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 5 Km dari kantor Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Pemukiman masyarakat di desa ini terpusat di pinggir pantai. Bangunan rumah masyarakat di desa ini tergolong sederhana dan terbuat dari bahan kayu. Kondisi permukiman desa ini masih mengandalkan jalan berupa jembatan jeramba yang menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lainnya. Perbaikan jalan ini menjadi kegiatan prioritas dalam kegiatan PLBPM tahun 2006. Sebagian besar masyarakat desa ini bekerja sebagai nelayan dan sebagian kecil bekerja sebagai pedagang. Potensi perikanan di desa ini berupa udang ekspor, udang bintik, ikan senangin, ikan tenggiri dan ikan pari.

Gang Kakap termasuk dalam wilayah Kecamatan Nunukan Timur dengan jarak sekitar 3 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Pemukiman masyarakatnya terpusat di pinggir pantai. Kondisi infrastruktur yang sangat minim seperti kurangnya fasilitas jalan lingkungan ataupun jembatan jeramba dan tambatan perahu yang menyulitkan mobilisasi ekonomi masyarakat nelayan. Pelaksanaan kegiatan PLBPM tahun 2006 di desa ini berupa perbaikan jalan lingkungan dan pembuatan tambatan perahu.

Desa Tanjung Karang adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sebatik Induk. Desa ini mempunyai luas wilayah sekitar 4.966 Ha dan ketinggian 2.340 m dari permukaan laut. Jumlah penduduk yang menghuni desa ini adalah 3.308 jiwa dan terdiri dari 724 KK. Pemukiman masyarakat di desa ini terbagi dalam dua wilayah yaitu wilayah pesisir dan wilayah daratan. Kondisi bangunan rumah di desa ini tergolong sederhana yang terbuat dari bahan kayu dan berbentuk rumah panggung.



Masyarakat yang tinggal di desa ini 40 % bekerja sebagai nelayan, 50 % sebagai petani dan 10 % bekerja sebagai wiraswasta dan pertukangan. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa udang bintik, udang ekspor, cumi-cumi, ikan bilis/teri, ikan bawal, ikan arut, ikan senangin, ikan tenggiri dan ikan pari. Tidak adanya tempat penjemuran ikan, menyebabkan masyarakat masih menjemur di jalan yang berdekatan dengan rumahnya. Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidaknyamanan dalam melintasi jalan tersebut. Untuk mencapai desa ini, hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dengan jarak tempuh sekitar 70 km dari Ibukota Kabupaten. Kegiatan PLBPM yang dilakukan di desa ini, pada tahun 2006, adalah berupa pembangunan jembatan jeramba atau jalan lingkungan sedangkan untuk tahun 2008 dilakukan pembangunan pasar nelayan, yang dilatarbelakangi dengan sulitnya pemasaran hasil tangkapan nelayan. Masyarakat harus menempuh jarak sejauh 5 km untuk menuju pasar terdekat.

Pelaksanaan PLBPM tahun 2009 merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 yang dirasakan belum optimal. Prosedur pemilihan ketua LK, motivator dan penentuan kegiatan prioritas dilakukan berdasarkan rembung desa. Melalui musyawarah mufakat, diputuskan bahwa kegiatan prioritas pada PLBPM tahun 2009 adalah penyusunan rencana tata ruang dan zonasi kawasan pesisir, pembangunan lantai jemur dan optimalisasi pasar yang merupakan lanjutan dari kegiatan pembangunan pasar tahun sebelumnya.

Manfaat dari kegiatan PLBPM yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dalam menata lingkungannya, sehingga memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan jembatan jeramba dapat memudahkan masyarakat dalam mobilitas ekonominya. Dengan terbangunnya pasar nelayan pada tahun 2008, masyarakat dapat bertransaksi tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Masyarakat tidak lagi menjemur ikannya di badan jembatan jeramba dengan adanya pembangunan lantai jemur. ●

Jenis Kegiatan yang dilakukan melalui PLBPM di Kabupaten Nunukan

Kegiatan	2006			2008	2009
	Kampung Pukat	Gang Kakap	Desa Tanjung Karang	Desa Tanjung Karang	Desa Tanjung Karang
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	-	-	-	-	1 Paket
Pembangunan Jembatan Jeramba (Jalan lingkungan)	1 unit	1 unit	1 unit	-	-
Pembangunan Lantai Jemur Ikan	-	-	-	-	1 Unit
Pembangunan Pasar Nelayan	-	-	-	1 unit	-
Optimalisasi Pasar Nelayan:					
a. Pengecatan Pasar					1 Paket
b. Pembuatan Meja-meja Pasar					20 unit
c. Pembuatan Bak Sampah					2 unit
d. Plang Pengumuman Pasar/Gapura					1 Unit

Biografi

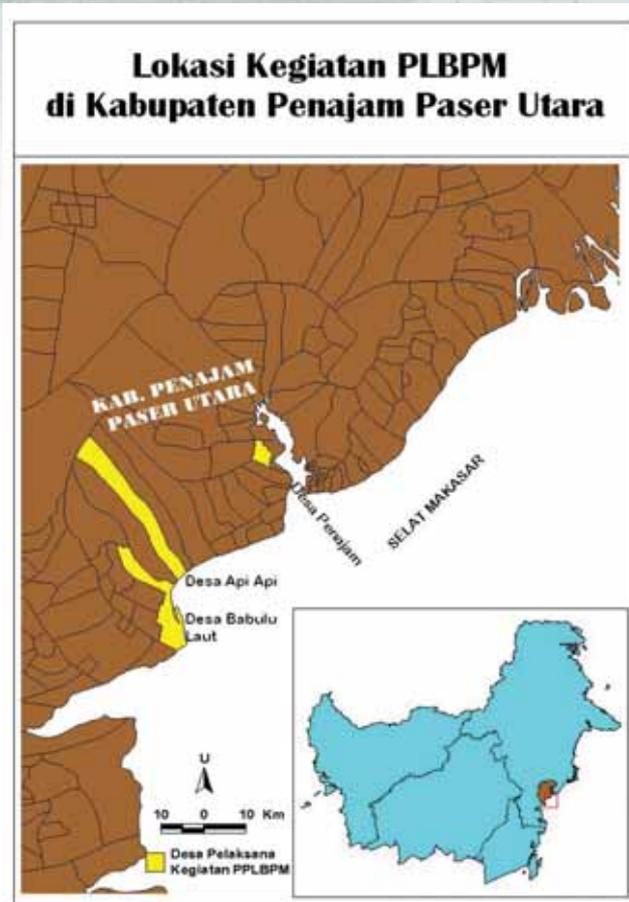
Sekilas Mengenai Penulis

Budiman HS, S. Sos, dilahirkan di Sebatik, Kabupaten Nunukan pada tanggal 29 Agustus 1983. Dibesarkan dan disekolahkan di Sebatik dari SDN sampai SMP. Melanjutkan SMUN 2 di Kota Tarakan dan kuliah di Universitas Mulawarman di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Bersama masyarakat dalam membangun desa terutama tanah kelahiran merupakan hal yang sangat membanggakan.

Syarifuddin, S. Pi., dilahirkan di Tarakan pada tanggal 18 April 1982 dan merupakan penduduk asli sebatik (Orang Bonjai). Menempuh pendidikan di Sebatik sampai tingkat SMP, dan melanjutkan ke jenjang SMU di Kabupaten Nunukan. Kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang ada di Kota Makassar. Setelah lulus, langsung bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada kegiatan PLBPM di Kabupaten Nunukan.

Muhammad Taufik, ST, lahir dan dibesarkan di Kota Makassar, mulai dari SD hingga kuliah pada Fakultas Teknik Sipil. Setelah lulus, bekerja sebagai Konsultan di bidang Kontruksi di Kabupaten Nunukan. Terpanggil menjadi TAP, karena ingin memperjuangkan nasib warga pesisir yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.





Penajam Paser Utara

K A B U P A T E N



Membangun Perumahan Atas Air di Penajam

Oleh: Muhammad Yusuf



Penajam Paser Utara merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini berhadapan langsung dengan Selat Makassar, dan memiliki panjang garis pantai sekitar 225 km yang membentang diantara 23 kelurahan/desa. Umumnya wilayah pesisir ini merupakan areal perkebunan kelapa dan tambak. Untuk mencapai kabupaten ini, anda dapat melakukan penerbangan menuju Kota Balikpapan, yang dilanjutkan dengan menyeberangi Teluk Balikpapan selama \pm 15 menit.

Program PLBPM di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan pada tahun 2006, 2007 dan 2009. Karena ini merupakan program lanjutan, maka kegiatan ini dilakukan pada lokasi sebelumnya yaitu Kelurahan Penajam

Murasekela Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Kecamatan Penajam.

Kelurahan Penajam merupakan pintu gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara, karena letaknya yang berhadapan dengan teluk Balikpapan. Pola permukiman penduduk berbentuk linear terhadap garis pantai dan jalan utama. Umumnya masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai, bekerja sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal pada jalan utama bekerja di bidang jasa, perdagangan dan maupun pertanian. Mayoritas masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir mendiami perumahan yang terbuat dari kayu di daerah pasang surut. Permukiman masyarakat ini, masih banyak kekurangan fasilitas penunjang seperti tambatan kapal, fasilitas MCK dan tempat pembuangan sampah. Jumlah penduduk di kelurahan ini adalah 9.850 jiwa dan 2010 KK.

Dengan pelaksanaan kegiatan PLBPM, masyarakat secara langsung menikmati hasil kegiatan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat dapat memelihara dengan rasa memiliki sehingga hasil kegiatan ini dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. ●



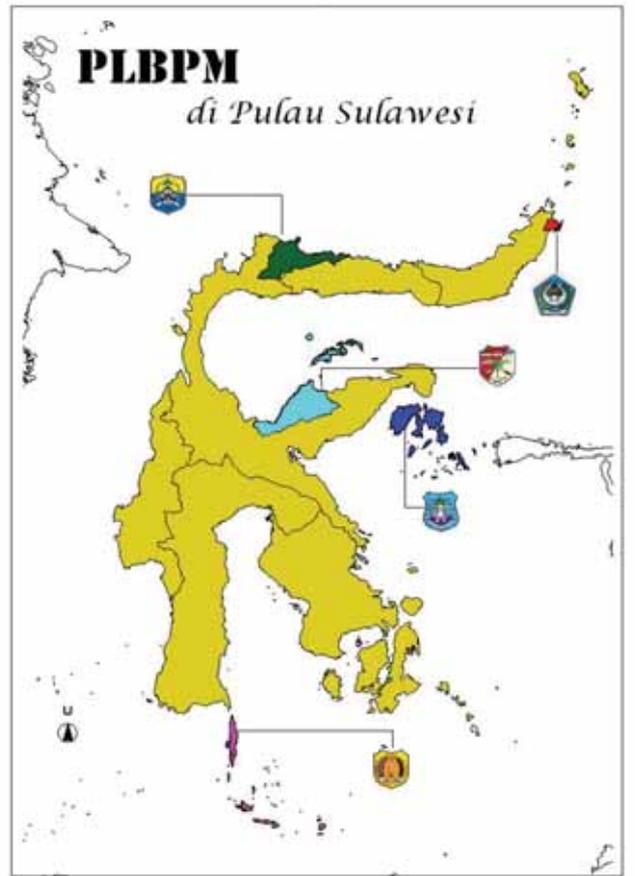
Biografi

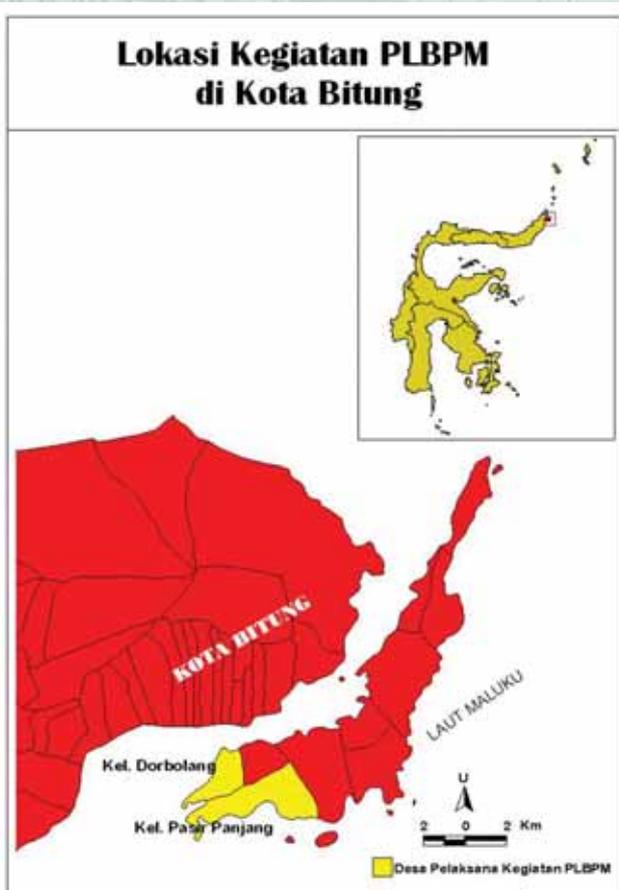
Sekilas Mengenai Penulis

Muhammad Yusuf, dilahirkan di Balikpapan 24 Februari 1981, lulusan S1 Arsitektur. Telah ikut dalam kegiatan PLBPM di Penajam Paser Utara sejak tahun 2006. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan langsung ke masyarakat menjadi motivasi untuk terlibat dalam kegiatan ini. Dan ada kepuasan batin yang tak ternilai ketika keinginan ini telah tercapai. ●

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kegiatan	2006			2007	
	Desa Api-Api	Kel. Penajam	Desa Babulu Laut	Kel. Penajam	Desa Api-Api
Pembangunan Jembatan Kayu	-	-	130 m	-	-
Pembangunan Tambatan Perahu	-	-	130 m	-	-
Pembuatan Sand Trap	-	-	10 unit	-	-
Pembuatan Jalan Lingkungan	400 m	-	-	-	-
Pembuatan Drainase	-	-	-	-	1.000 m
Pembangunan Instalasi Air Bersih	-	-	-	-	1 unit
Pembangunan Rumah Nelayan	15 unit	-	-	-	-
Penanaman Mangrove	-	13 ha	-	4 ha	-
Penyulaman Penanaman Mangrove	-	-	-	13 ha	-





KOTA Bitung



Pelaksanaan PLBPM di Kota Bitung



Kota Bitung merupakan salah satu Kota yang masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Jarak Kota Bitung dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) adalah 50 km dengan menempuh jalur darat, atau kurang lebih 45 menit waktu perjalanan. Kota Bitung, terletak pada $1^{\circ} 24' - 1^{\circ} 36' LU$ dan $125^{\circ} 06' - 125^{\circ} 17' BT$ dengan luas wilayah 30.400 ha. Panjang garis pantai Kota Bitung 143,2 km terdiri dari 13 pulau besar dan kecil, berpenghuni dan yang tidak berpenghuni. Luas Wilayah Darat 30.400 Km², serta jumlah penduduk 173.000 jiwa. Kota Bitung terbagi dalam 8 kecamatan dan 69 kelurahan. Secara umum, wilayah Kota Bitung memanjang dari timur ke barat, dan terdapat Selat lembeh yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Lembah yang memanjang dari timur laut ke barat daya, selat Lembah ini sangat potensial untuk di jadikan sebagai kawasan wisata bahari. Hal ini di dukung luas terumbu karang 10,7 Ha serta potensi keindahan alam pantai serta keanekaragaman ikan hias yang terdapat pada 42

poin penyelaman pada daerah ini.

Penangkapan adalah merupakan kegiatan yang paling menonjol di sektor perikanan dan kelautan Kota Bitung. Menjadikan Kota Bitung sebagai salah satu ujung tombak produksi perikanan di Indonesia, khususnya produksi andalan perikanan tangkap Kota Bitung yaitu tuna, cakalang dan layang. Tidak heran Kota Bitung terkenal juga sebagai Kota Cakalang.

Di tahun 2009 ini, Kota Bitung menjadi salah satu Kota tempat dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang merupakan program Departemen Kelautan dan Perikanan. Kegiatan PLBPM di Kota Bitung adalah bentuk pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada skala kelurahan yang bertumpu pada proses perencanaan dari bawah (bottom up planning) dan pemberdayaan masyarakat.

PLBPM tahun 2009 di Kota Bitung ini merupakan yang pertama kali, dengan 2 (dua) lokasi Kelurahan sasaran target group yaitu Kelurahan Dorbolaang dan Kelurahan Pasir Panjang, yang merupakan wilayah Kecamatan Lembeh Selatan. Kedua Kelurahan tersebut adalah Kelurahan yang terletak di Pulau Lembeh, dan memiliki permasalahan lingkungan yang kompleks dengan minimnya fasilitas hidup yang ada. Dilain pihak, besarnya potensi sumberdaya pesisir yang ada akan terancam oleh lemahnya kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pedoman umum PLBPM dalam menetapkan kelurahan target group, Kota Bitung melaksanakan dengan mengacu pada

aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidupnya yang terus terdegradasi. Hal ini tertuang dalam suatu pertemuan Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) dan Camat Lembeh Selatan yang merupakan pimpinan bakal calon target group.

Kelurahan Dorbolaang adalah suatu wilayah dengan luas 350 ha dan memiliki garis pantai sepanjang 4 km. Daerah ini merupakan wilayah kelurahan pesisir yang memiliki ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang yang baik. Dimana daerah pemukiman penduduk seluas 17 ha sebagian besar berada di perbukitan dengan fasilitas jalan setapak sepanjang 1,8 km yang memprihatinkan. Sebagian besar penduduk tinggal di rumah semi permanen, namun tidak sedikit juga yang tidak memiliki rumah. Dengan luas areal pertanian sebesar 236 ha, tidak menutup kemungkinan penduduk Kelurahan Dorbolaang beralih status pekerjaan sebagai petani dikala kondisi laut tidak bersahabat. Diketahui lokasi Kelurahan Dorbolaang yang menghadap langsung ke laut lepas, menjadikan semakin sulitnya masyarakat ke laut dikala musim selatan. Hal ini juga berdampak terhadap kondisi pantai yang mengalami abrasi pantai, bahkan rusaknya 3 ha areal hutan bakau di Kelurahan tersebut.

Sulitnya akses darat dari ibukota Kecamatan lembeh Selatan, membuat terhambatnya masyarakat Dorbolaang dalam mendapatkan kualitas hidup yang baik. Jarak Kelurahan ini dengan Kecamatan adalah 8 km sedangkan jarak ke Kota Bitung adalah 12 km, dan menghabiskan

70 menit perjalanan dengan transportasi laut. Masyarakat Dorbolaang yang berjumlah 1.084 jiwa dan tersebar di daerah pesisir yang panjang hanya difasilitasi oleh sebuah tambatan perahu yang cukup memprihatinkan.

Kegiatan PLBPM di Kelurahan Dorbolaang adalah suatu kegiatan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Dorbolaang, hal ini tercermin dengan antusiasnya masyarakat mengikuti kegiatan rebus desa untuk menentukan sendiri jenis kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. Akhirnya, setelah melalui proses musyawarah dan diskusi oleh masyarakat dan ditambah penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan PLBPM maka ditentukanlah jenis kegiatan yang akan dilakukan yaitu : Tambatan perahu, jalan setapak dan drainase dan talud.

Kelurahan Pasir Panjang merupakan kelurahan yang memiliki potensi sumberdaya pesisir

karena memiliki hamparan garis pantai dengan pasir putih yang indah, namun seiring dengan terdegradasinya hutan mangrove akibat badai dan gelombang maka kejadian alam membentuk suatu hamparan pasir yang terdapat di depan pantai yang disebut delta. Daerah pemukiman di Kelurahan ini terpisahkan oleh jarak yang cukup jauh, dengan kondisi jalan yang berbukit-bukit dan rusak berat. Keadaan ini disebabkan oleh buruknya sistem drainase yang ada sehingga merusak fasilitas jalan bahkan perumahan penduduk. Kondisi ini memicu masyarakat untuk membangun tambatan perahu yang dekat dengan lokasi masing-masing. Sebagai informasi satu-satunya alat transportasi yang ada saat ini adalah sepeda motor.

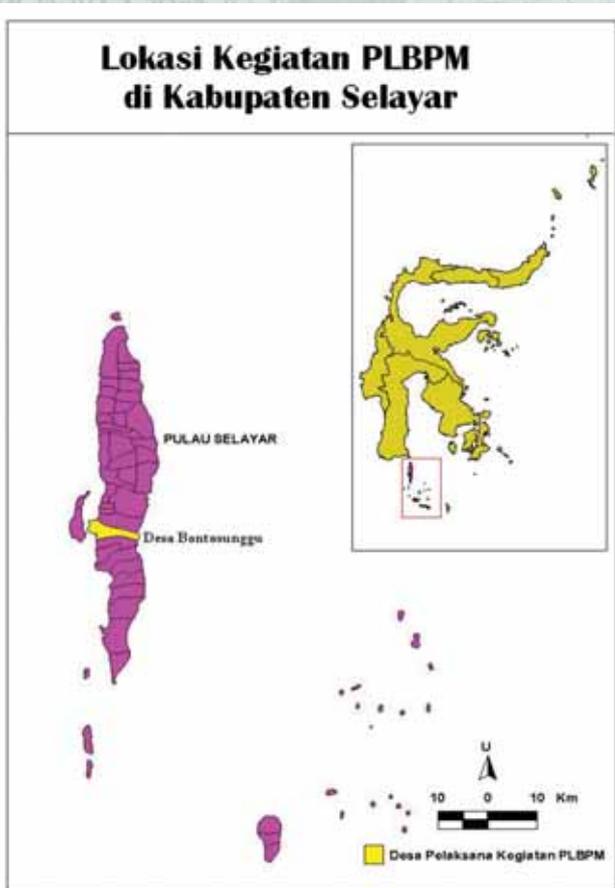
Lewat kegiatan PLBPM masyarakat Pasir Panjang mengusulkan kegiatan tambatan perahu beserta koridornya, drainase dan talud.



yang besar dan juga potensi pariwisata pantai yang indah. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan tempat hidupnya tidak sejalan dengan baiknya fasilitas hidup yang didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Pasir Panjang. Hal ini dipersulit dengan seringnya bencana gelombang pasang yang tinggi dikala musim selatan. Kelurahan Pasir Panjang adalah kelurahan yang tergolong luas (500 ha) dengan jumlah penduduk sebanyak 590 jiwa saja. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Dorbolaang yang juga adalah lokasi target group PLBPM, memiliki garis pantai sepanjang 3,5 km. Dikenal sebagai Pasir Panjang

Tidak adanya pembangunan jalan setapak walaupun diketahui kondisi jalan di Kelurahan ini parah adalah karena status jalan yang dipakai adalah jalan Kecamatan yang ongkos perbaikannya sangat besar. Walaupun sulit dan memerlukan keahlian khusus, masyarakat cenderung bepergian dengan menggunakan sepeda motor ke Ibukota kecamatan yang berjarak 3 km. Tetapi angkutan laut jelas ditutamakan dalam hal mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan. Jauhnya lokasi dan sulitnya medan laut disaat gelombang dan ombak besar membuat wilayah ini seakan terisolir. ●





Selayar

K A B U P A T E N



Belajar Menata Desa Bontusunggu melalui Kegiatan PLBPM

Oleh: Syarif Hidayat



Kabupaten Kepulauan Selayar bagian dari Propinsi Sulawesi Selatan, namun letaknya terpisah dari Pulau Sulawesi. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 670 km dengan luas wilayahnya adalah 10.503,69 km². Jumlah pulau yang tersebar di perairan ini adalah 130 pulau, dimana 23 pulau berpenghuni dan 107 pulau tidak berpenghuni. Kabupaten ini meliputi 11 kecamatan yaitu 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan tersebar di beberapa pulau kecil. Untuk menuju kabupaten ini, dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat yang hanya beroperasi 2 (dua) kali dalam seminggu. Waktu tempuh 45 menit dari Kota Makassar.

Pada tahun 2009, Kabupaten Kepulauan Selayar baru mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Tahap awal dari program ini adalah penentuan desa target group. Tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) mengusulkan 4 (empat) desa pelaksana yaitu Desa Bontoborusu, Desa Bontosunggu, Desa Kahu-Kahu, dan Desa Parak. Selanjutnya Tenaga Ahli Pendamping (TAP) bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) melakukan survey lokasi ke desa tersebut. Setelah itu kami mengusulkan Desa Bontosunggu sebagai salah satu desa pelaksana kegiatan, dengan pertimbangan desa ini merupakan desa pesisir yang mengalami keterpurukan infrastruktur lingkungan dan mengalami degradasi lingkungan pesisir. Akhirnya dalam rapat Tim FKTD ditetapkanlah Desa Bontosunggu sebagai lokasi target group.

Desa Bontosunggu adalah salah satu desa dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Bontoharu dengan luas wilayah 12,88 km². Topografi desa ini berupa dataran rendah dengan ketinggian 10 m diatas permukaan laut. Untuk mencapai desa ini, anda bisa menggunakan kendaraan bermotor selama 15 menit dari ibukota kabupaten. Pemukiman masyarakat di desa ini tersebar di kawasan pesisir dengan taraf ekonomi relatif miskin, dicirikan oleh kondisi lingkungan pemukiman yang buruk dan terletak pada kawasan yang mengalami permasalahan degradasi lingkungan pesisir. Berdasarkan hasil pengamatan, di desa ini terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang cukup serius antara lain: (1) penataan kawasan pemukiman belum tertata dengan baik; (2) sistem Saluran Pembuangan Akhir Limbah (SPAL) belum dikelola dengan maksimal; (3) sarana standar kebersihan belum tersedia seperti tempat pembuangan sampah dan sarana pengangkut sampah; (4) kurangnya sarana air bersih; (5) kawasan mangrove sebagai daerah

penyangga belum dikelola dengan baik; (6) partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk menggambarkan rencana pembangunan desa 2-3 tahun ke depan. Masyarakat yang mendiami desa ini berjumlah 1.699 jiwa atau terdiri dari 442 KK, dan 214 KK tergolong rumah tangga miskin. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa ini bekerja sebagai nelayan, selain itu ada juga yang bekerja sebagai petani, PNS, pedagang dan petani tambak. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa ikan kakap, ikan kerapu / sunu dan cumi-cumi.

Sosialisasi program di Desa Bontosunggu dihadiri oleh aparat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, tokoh adat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan agenda pemilihan ketua Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator Desa. Namun pelaksanaan rebug desa dalam penentuan kegiatan prioritas, terlebih dahulu dilakukan kegiatan FGD (Focus Group Discussion). Adapun kegiatan prioritas yang disepakati antara lain penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir 1 paket, pembuatan saluran induk 3 unit, pembuatan drainase 3 unit, pembuatan jalan setapak 8 unit, pembuatan MCK 47 unit serta penanaman mangrove 7.500 batang.

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini berupa pengawasan dan monitoring. Sejauh ini PLBPM sudah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap masyarakat Desa Bontosunggu. Program PLBPM ini dapat dijadikan sebagai kegiatan percontohan dalam memberikan pembelajaran sederhana kepada masyarakat pesisir dalam menata ruang kawasan pemukiman dan lingkungannya. Pembelajaran ini dimulai dari proses perencanaan, penentuan kegiatan, prioritas dan pengambilan keputusan, melalui rebug atau musyawarah. ●

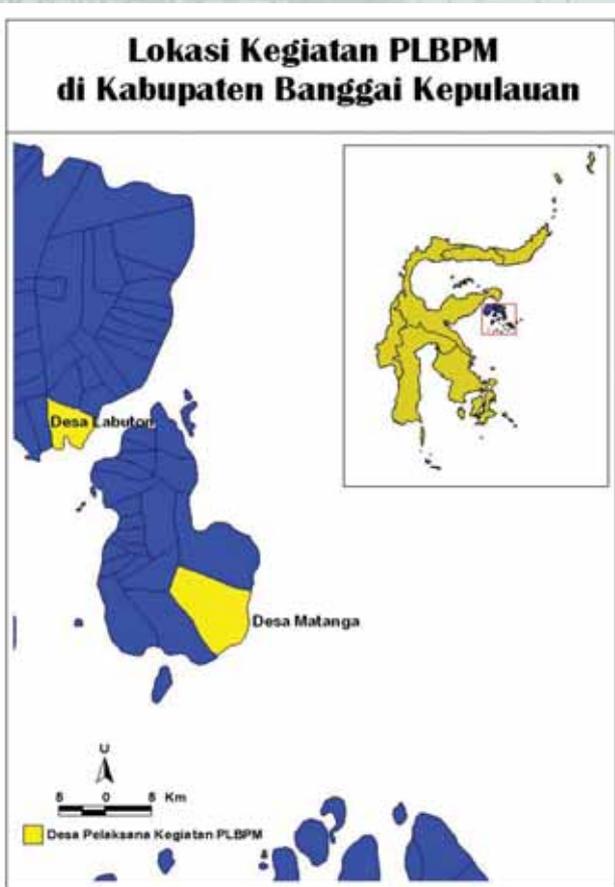
Biografi

Sekilas Mengenai Penulis

Ir. Syarif Hidayat, dilahirkan di Selayar Benteng Jampea tanggal 18 Juni 1978. Sejak kecil, hidup bersama masyarakat nelayan. Berorganisasi dan mengikuti kegiatan Pramuka, PMI mewarnai hidupnya dimasa sekolah SD,SMP dan SMA. Mempuh pendidikan tinggi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fakultas Teknik urusan Arsitektur. Mengabdikan dirinya dilingkungan Non Government Organization (NGO) dan kelompok-kelompok pemuda pecinta lingkungan. Walaupun demikian disiplin ilmu sebagai seorang Arsitek tidak dilupakan. Berawal dari amanah yang diberikan oleh PLAN Internasional cabang Selayar untuk menagani kegiatan-kegiatan sosial dan teknis dilapangan, berbagai peran dan tanggung jawabpun berhasil dilaksanakannya. Di dunia konstruksi banyak bangunan gedung dan jalan berhasil direncanakan dan diawasinya. Sampai kemudian bisa mendirikan perusahaan Konsultan. Di dunia pemberdayaan mulai dari PLAN, Coremap, PNPB dan PLBPM pun dijalannya dengan tulus dan sungguh hati. Karena prinsip hidupnya adalah memberikan pelayanan terbaik demi keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. ●

Jenis Kegiatan yang Dilakukan melalui Program PLBPM di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kegiatan	Desa Bontosunggu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket
Pembuatan Saluran Induk	3 Unit
Pembuatan Saluran Drainase	3 Unit
Pembuatan Jalan Setapak	8 Unit
Pembuatan MCK	47 Unit
Penanaman Mangrove	7.500 btg



BANGGAI KEPULAUAN



Pelaksanaan PLBPM di Kabupaten Banggai Kepulauan

Oleh: Yusrin J. Sinaling dan Awal Y. Alepu



Kabupaten Banggai Kepulauan terletak disebelah timur Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sekitar 1.714,218 km, 342 pulau dan 167 desa pesisir. Potensi unggulannya adalah kopra, cengekeh, coklat, ikan dan rumput laut. Untuk mencapai kabupaten ini, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Luwuk yang dilanjutkan dengan perjalanan laut selama 4 jam.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di Banggai Kepulauan berlangsung sejak tahun 2008.

Memasukkan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Pada tahun tersebut lokasi pelaksanaan terdapat di dua desa yaitu Desa Lobuton-Kecamatan Totikum Selatan dan Desa Matanga-Kecamatan Banggai Selatan. Karena pada tahun ini kegiatan PLBPM adalah kegiatan tindak lanjut maka hanya satu desa saja yang dipilih sebagai pelaksana. Penentuan desa pelaksana kegiatan pada tahun 2009 ini berbeda dengan tahun 2008. Tahun 2008 penentuan didasarkan pada kondisi desa yang mengalami degradasi lingkungan serta kondisi infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai. Sedangkan pada tahun 2009 pemilihan desa berdasarkan hasil kegiatan pada tahun 2008. Penentuan dilakukan berdasarkan pada petunjuk umum PLBPM. Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam penentuan lokasi pelaksanaan

daerah pesisir pantai dengan bangunan rumah pada umumnya terbuat dari kayu. Kondisi infrastruktur desa masih sangat minim. Sarana dan prasarana penunjang permukiman seperti jalan lingkungan dan lahan untuk permukiman belum memadai. Jumlah penduduk desa ini adalah 624 jiwa, terdiri dari 160 KK. Mata pencaharian masyarakat di desa ini sebagian besar adalah nelayan yaitu sekitar 97 % dari jumlah penduduk. Potensi unggulan di desa ini adalah Budidaya Rumput Laut.

Sosialisasi PLBPM di desa pelaksana dilakukan mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan apa dan bagaimana program PLBPM itu serta tujuannya. Berbagai tanggapan muncul terhadap pelaksanaan program PLBPM ini dan



kegiatan. Namun dengan melakukan rebug desa dan koordinasi dengan pihak terkait permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Desa yang dipilih untuk pelaksanaan PLBPM tahun 2009 adalah desa Lobuton.

Desa Lobuton termasuk wilayah Kecamatan Totikum Selatan, dengan luas sekitar 7.450 m², dan terletak pada ketinggian 2 m diatas permukaan laut. Untuk menemph desa ini, anda dapat menggunakan jalur darat selama 2 jam dari ibukota kabupaten. Permukiman masyarakat di desa ini umumnya menyebar di

respon masyarakat cukup besar sebab kegiatannya langsung ditangani oleh masyarakat desa sendiri. Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan penunjukan Motivator Desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat di lokasi desa target group. Beberapa permasalahan saat melakukan kegiatan sosialisasi, pembentukan LK dan penunjukan Motivator Desa adalah keinginan masyarakat agar anggota LK dan motivator yang diangkat tidak mempunyai jabatan di desa, sehingga mereka konsentrasi pada satu tugas

saja. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak setuju. Menurut mereka motivator desa dan LK ada yang menjabat di desa. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan ini kemudian dimusyawarahkan kembali. Akhirnya disepakati bahwa LK dan motivator desa sebaiknya bukan orang yang punya jabatan di desa. Hal ini agar lebih independen dan tidak ada tekanan dari pihak perangkat desa. Sedangkan penunjukan dilaksanakan dengan pemilihan langsung.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di desa ini, andil atau partisipasi masyarakat juga cukup banyak. Pada saat penentuan kegiatan prioritas masyarakat banyak memberikan masukan atau ide dalam penentuannya. Motivator desa juga bekerja dengan baik



dan bisa menyuarakan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Permasalahan yang terangkat dalam penentuan kegiatan prioritas ini adalah banyaknya usulan masyarakat menyangkut kegiatan yang diprioritaskan namun dibatasi anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kami menempuhnya dengan cara disepakati secara bersama-sama kegiatan apa yang sangat dibutuhkan di desa untuk saat ini. Ada 3 rencana kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat yaitu pembangunan kantor desa, pengadaan pipanisasi dan jembatan titian (jeti).

Memasukkan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Untuk mendukung program PLBPM, pemerintah daerah menyiapkan program penanganan kawasan konservasi sebagai pendukung kegiatan PLBPM. Peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM ini berupa swadaya sekaligus mengawasi langsung jalannya kegiatan PLBPM ini. Motivator desa menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara ikut kerja bersama-sama pada saat kegiatan dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program PLBPM ini adalah sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman baru bagi masyarakat pesisir. Masyarakat sangat berterima kasih dan sangat senang dengan terbangunnya berbagai fasilitas / infrastruktur desa seperti MCK, pipanisasi, jalan lingkungan dan lain-lain. Hanya saja keberadaan infrastruktur ini perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat, sehingga jika berakhirnya program PLBPM ini semua infrastruktur bisa dijaga dan dirawat dengan baik. ●



Sekilas Mengenai Penulis

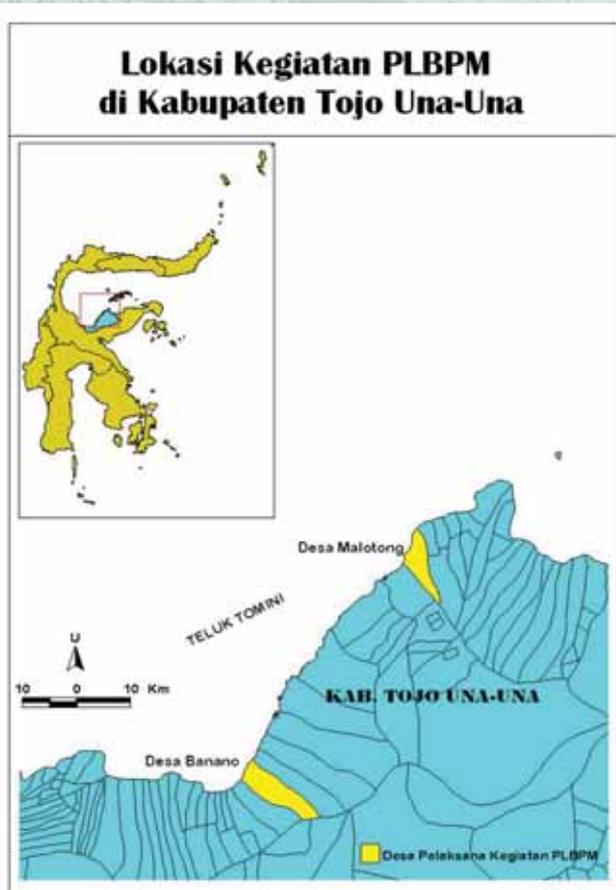


Yusrin J. Sinaling, ST, lahir di desa pesisir Balayon tanggal 09 Nopember 1976, pendidikan terakhir S1 Teknik Bangunan, beberapa pengalaman kerja yang pernah dilakukan, 1). Sebagai penanggung jawab fisik SATAP Popisi 2007 2). Sebagai penanggung jawab fisik SATAP Bone Baru 2008, 3). Tenaga Dosen Statistika UNTIKA Luwuk Kampus Banggai 2005-2008, 4). Tenaga Ahli Pendamping PLBPM Diskanlut Bangkep 2008. 5). Tenaga Ahli Pendamping PLBPM Diskanlut Bangkep 2009. 6). Tenaga pengajar SMK Negeri I. Keinginan menja-

di TAP karena ingin terlibat secara langsung dalam memberdayakan masyarakat pesisir.



Awal Y. Alepu, S.Pi, lahir kota kecil Batui di Kabupaten Banggai pada tanggal 19 Desember 1981, dan berhasil menyelesaikan program S1 Perikanan. Alasan menjadi TAP adalah untuk mencari pengalaman kerja. Kesan selama menjadi TAP sangat senang dengan adanya program PLBPM ini karena mengangkat, mudah-mudahan program ini kedepan lebih baik dan berkelanjutan.



Tojo Una-Una

KABUPATEN



Menata Desa Pesisir melalui Program PLBPM di Kabupaten Tojo Una Una

Oleh: Kurniayu



Kabupaten Tojo Una-una adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Poso. Wilayah Kabupaten Tojo Una-una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5751,51 km² dan luas laut 3566,21 km² dengan panjang pantai 951,115 km. Wilayah daratan Tojo Una Una mencapai 8,41% dari keseluruhan luas daratan provinsi Sulawesi Tengah. Untuk berkunjung ke Kab. Tojo Una Una dapat menggunakan pesawat terbang dari Jakarta menuju kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah) kemudian disambung perjalanan darat selama 8 jam dari Kota Palu.

Merencanakan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Sepanjang perjalanan anda akan menikmati pemandangan yang indah, pepohonan hijau dan lautan biru.

Pada tahun 2008, Kabupaten Tojo Una-Una baru mendapatkan kesempatan untuk menata desa pesisir melalui kegiatan PLBPM atau Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan PLBPM dilakukan di dua desa pesisir. Penentuan lokasi dilakukan oleh tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) melalui rapat forum. Pemilihan desa lokasi pelaksanaan berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu desa pesisir yang wilayahnya rawan terhadap abrasi pantai, kondisi permukiman yang kurang layak, sarana dan infrastruktur yang tidak memadai serta degradasi lingkungan pesisir. Berdasarkan hal tersebut terpilihlah dua desa



pada dua kecamatan yaitu Desa/Kelurahan Malotong pada Kecamatan Ampana Kota dan Desa Banano pada Kecamatan Tojo. Kondisi kedua desa tersebut disamping rawan terhadap abrasi juga mengalami keterpurukan sarana dan infrastruktur lingkungan dan mengalami degradasi lingkungan pesisir.

Kelurahan Malotong merupakan bagian dari Kecamatan Ampana Kota. Topografi kelurahan ini berupa dataran rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Perjalanan menuju Kelurahan ini tepatnya RT 07 RW 03 dapat dilakukan dengan menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 5 km atau dengan waktu

tempuh 15 menit dari Ibu Kota Kabupaten. Permukiman masyarakat di kelurahan ini terpusat dipinggiran pantai dengan kondisi bangunan rumah masyarakat yang masih sangat sederhana dan juga ada beberapa rumah yang tidak layak huni. Jalan lingkungan rusak, belum tersedia balai pertemuan, serta sanitasi lingkungan yang buruk dikarenakan limbah masyarakat serta belum tersedianya MCK. Masyarakat yang tinggal di desa ini terdiri dari 53 KK. Hampir 90% penduduk desa bekerja sebagai nelayan tangkap dengan hasil tangkapan berupa ikan pelagis seperti ikan cakalang atau sejenisnya, juga sebagai nelayan pembudidaya rumput laut, sisanya bekerja sebagai pegawai dan pedagang.

Desa Banano termasuk dalam wilayah kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Tojo.



Untuk berkunjung ke desa ini dapat menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 3 jam dari Ibu Kota Kabupaten, namun kondisi jalannya agak rusak. Masyarakat di Desa Banano ini bermukim di pinggir jalan trans dengan kondisi bangunan rumah baik tapi ada beberapa rumah yang tidak layak huni. Desa ini terdiri dari 70 KK (222 jiwa) yang dalam kesehariannya masyarakat sebagian besar bekerja sebagai petani kebun, nelayan pembudidaya ikan kolam, ada juga yang bekerja sebagai nelayan tangkap, sisanya pegawai, pedagang dan jasa bengkel. Hasil budidaya ikan berupa ikan air tawar seperti ikan nila yang

merupakan hasil dari perikanan kolam dan ikan mas untuk budidaya ikan di danau.

Pendampingan kepada masyarakat kami lakukan berbekal ilmu pelatihan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) di Jakarta, kami telah mengikuti pelatihan sebanyak dua kali di tahun 2008 dan tahun 2009 untuk program tindak lanjut PLBPM. Tahun 2008 kami melakukan pendampingan di dua Desa yaitu Desa/Kelurahan Malotong tepatnya RT 07 RW 03, sedangkan di tahun 2009 ini kami hanya melakukan pendampingan di satu desa target yaitu desa yang mendapatkan tindak lanjut PLBPM yaitu Desa Banano Kecamatan Tojo. Tindak lanjut ini merupakan upaya untuk melanjutkan pembangunan fisik PLBPM yang belum terselesaikan di tahun 2008.

Selama mendampingi masyarakat desa lokasi



pelaksanaan, kami mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda dari kedua desa tersebut. Partisipasi masyarakat Kelurahan Malotong untuk program PLBPM ini sangat bagus dan mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat sedangkan di Desa Banano, awal kedatangan program ini disambut dengan kehadiran banyak masyarakat, tapi lama kelamaan respon yang hangat dari masyarakat menjadi berkurang ditandai dengan kurangnya masyarakat yang hadir dalam rembung desa. Pelaksanaan rembung desa untuk kedua desa lokasi pelaksanaan umumnya sama yaitu diawali dengan pemilihan Lembaga Kemasyarakatan

Merencanakan Dari Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

(LK) dengan memilih beberapa pengurus atau wakil masyarakat yang tinggal menetap di desa target dan sanggup bertanggung jawab untuk kelancaran program PLBPM, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan motivator yang merupakan tauladan atau penggerak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprioritaskan dalam program. Semua pengurus yang terpilih adalah berdasarkan hasil keputusan suara terbanyak dari masyarakat dalam rembung desa yang diketahui dan disetujui oleh Tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) dan Tokoh Masyarakat desa pelaksanaan kegiatan. Rembug Desa selanjutnya membahas tentang penentuan kegiatan prioritas yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Masyarakat terpilih. Masyarakat Kelurahan Malotong memprioritaskan untuk kegiatan peningkatan/perbaikan ekosistem



pesisir dengan pembangunan talud dan penanaman pohon pelindung pantai (katapang dan sejenisnya). Hal ini diupayakan untuk mengatasi masalah pada saat musim gelombang tinggi yang mana air laut akan naik dan masuk ke perumahan masyarakat. Penanaman mangrove diganti dengan penanaman katapang karena lokasi kurang cocok untuk penanaman mangrove. Prioritas lainnya adalah pembangunan MCK dan jaringan air bersih yang belum tersedia, memperbaiki sanitasi lingkungan pesisir menjadi lebih baik, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan lampu jalan dan pembangunan plat deker, yang

mana jalan lingkungan yang ada telah rusak akibat hempasan gelombang tinggi dan perlu diperbaiki. Penyediaan sarana dengan pembangunan balai pertemuan dikarenakan belum tersedianya tempat untuk melaksanakan pertemuan/rapat di desa ini. Pembangunan perumahan type I diperuntukkan untuk beberapa masyarakat yang belum memiliki rumah atau yang memiliki rumah tidak layak huni dan perbaikan rumah diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki kerusakan pada bagian rumah mereka.

Setelah penentuan prioritas kegiatan, kami melanjutkan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bersama masyarakat sebagai proposal atau usulan yang disertai dengan rincian harga bahan dan desain teknis yang kemudian akan di ajukan untuk pencairan dana. Sementara menunggu pencairan dana, kami melakukan identifikasi perumahan masyarakat sampai pada pelaksanaan kegiatan, disamping itu juga membantu melakukan pengawasan kegiatan fisik dan mencatat bobot pekerjaan.

Selesai pelaksanaan rebug desa di Kelurahan Malotong, selanjutnya kami menuju Kecamatan Tojo tepatnya di desa target yaitu Desa Banano. Dalam rebug, prioritas kegiatan yang dipilih oleh masyarakat adalah pembangunan talud, penanaman mangrove, dan penimbunan untuk peningkatan/perbaikan ekosistem pesisir, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat memprioritaskan pembangunan MCK dan jaringan air bersih, serta pembangunan jembatan kayu menuju danau potensi perikanan di Desa Banano. Untuk perbaikan/pembangunan rumah, masyarakat memprioritaskan pembangunan balai pertemuan, perumahan type I dan type II (rumah panggung) dan rehabilitasi perumahan

Seiring dengan berjalannya waktu tahun 2008, pekerjaan pembangunan fisik pun diupayakan untuk selesai dan mencapai target yang diinginkan dan akhirnya berkat kerjasama masyarakat Kelurahan Malotong, pekerjaan pembangunan selesai dengan hasil yang baik bahkan melebihi target yang akan dicapai sedangkan di Desa Banano terdapat sedikit masalah

dan keterlambatan sehingga pembangunan fisik tidak dapat terselesaikan (baru mencapai 55%) dan sesuai ketentuan dana harus dikembalikan ke kas Negara dan menunggu tindak lanjut program PLBPM tahun 2009. Hasil pelaksanaan kegiatan di Desa Banano tidak sesuai target yang diinginkan TAP, Dinas Kelautan dan Perikanan dan masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena kelalaian dalam kepengurusan LK Desa Banano itu sendiri dalam pengadaan bahan baku pembangunan fisik (terutama kayu) dan kerjasama masyarakat yang kurang efektif dalam melaksanakan program, sehingga mengalami keterlambatan yang dapat menghambat pencairan dana pembangunan selanjutnya karena belum mencapai persentase yang telah ditentukan.

Dari hal tersebut, TAP dapat mengetahui perbedaan karakteristik kedua desa. Ini terlihat dan tergambar dari kepengurusan yang telah menjadi kepercayaan masyarakat dalam mengelola program serta keaktifan dari masyarakat itu sendiri. Menyikapi kelalaian yang telah terjadi, dalam tindak lanjut program kami mengupayakan untuk mengganti kepengurusan lembaga kemasyarakatan dengan pengurus yang baru dan bisa bertanggung jawab dalam mengkoordinir jalannya kegiatan PLBPM dengan baik.

Seusai pelatihan PLBPM pada bulan April 2009 kami menerapkan ilmu tersebut dalam pendampingan masyarakat. Ada tambahan kegiatan pada PLBPM T.A 2009 yaitu penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir. Sebelum pembangunan tindak lanjut berlangsung (setelah pencairan dana), selain melakukan pemilihan Lembaga Kemasyarakatan yang baru, kami juga mengadakan rebug desa membahas tentang perencanaan tata ruang. Kami membagi tugas pada masyarakat mulai dari pengukuran hingga pembuatan sketsa peta sesuai dengan pedoman umum PLBPM dan dilakukan bersama dengan masyarakat desa pelaksana PLBPM. Disamping itu, prioritas kegiatan juga kami bahas pelaksanaan pembangunan fisiknya dan disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

Kegiatan PLBPM yang dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2008 dan rencana tindak lanjut 2009 dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut :

Peran serta pemerintah daerah pada kegiatan PLBPM ini berupa dukungan, pendampingan dan pengawasan untuk kesuksesan program. Seiring dengan berjalannya program, tingkat persentase pelaksanaan kegiatan kami beritahukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten dalam bentuk laporan bulanan/berkala. Hasil yang kami laporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan (desa pelaksana) baik kelancaran program ataupun hambatan yang terjadi. Adanya masalah ringan hingga masalah paling berat, untuk segera disikapi dan dicarikan jalan keluar terbaik.

Dalam membahas masalah tersebut, kami berupaya menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beserta tim Teknis pengendali Daerah (TPD), yang membangkitkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya program PLBPM ini demi kesejahteraan masyarakat desa target. Sebagai upaya pelestarian terhadap apa yang telah ada serta menjaga bangunan fisik yang telah dibangun bersama, masyarakat desa target menggalakkan peraturan pengutatan kelembagaan, melakukan perawatan serta pemeliharaan. ●

Tabel 2. Kegiatan PLBPM tahun 2008 di Desa Banano

Kegiatan	Volume	Keterangan
1. Pembangunan talud	37 meter	Selesai
2. Penanaman mangrove	6000 pohon	Selesai
3. Penimbunan	15 meter	Selesai
4. Pembangunan MCK	2 Unit	Belum selesai
5. Pembangunan jembatan kayu	1 Unit	Belum selesai
6. Pengadaan jaringan air bersih	2 titik	Belum selesai
7. Pembangunan balai pertemuan	1 unit	Belum selesai
8. Pembangunan rumah type 1	6 unit	Belum selesai
9. Pembangunan rumah type 2	3 unit	Belum selesai

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan PLBPM tahun 2009 di Desa Banano

Kegiatan	Volume	Keterangan
1. Penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir	1 Paket	Kegiatan tambahan
2. Pembangunan MCK	2 Unit	Tindak lanjut
3. Pembangunan jembatan kayu	1 Unit	Tindak lanjut
4. Pengadaan jaringan air bersih	2 titik	Tindak lanjut
5. Pembangunan balai pertemuan	1 unit	Tindak lanjut
6. Pembangunan rumah type 1	6 unit	Tindak lanjut
7. Pembangunan rumah type 2	3 unit	Tindak lanjut

Biografi

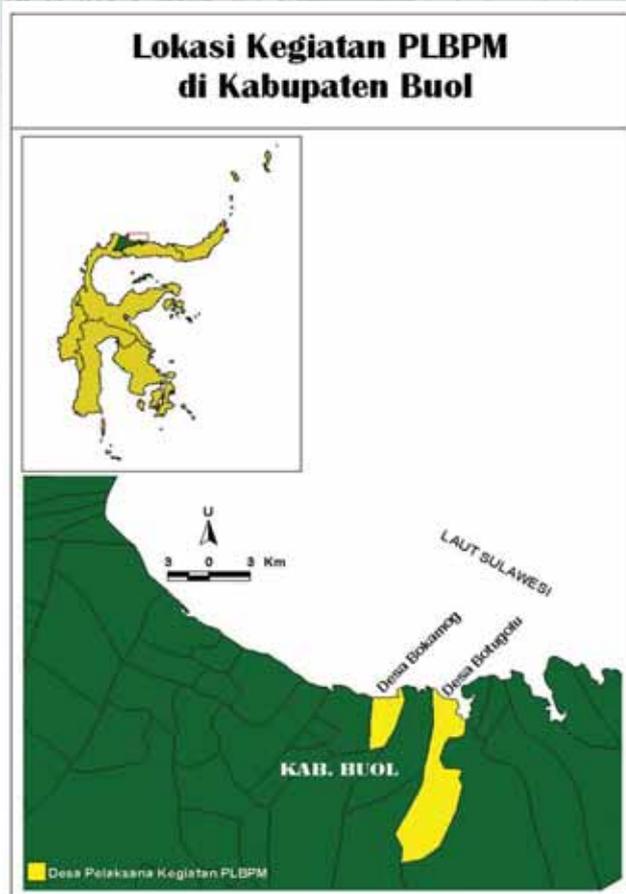
Sekilas Mengenai Penulis



Kurniayu, S.St.Pi dilahirkan di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Nopember 1985. Pendidikan terakhir di STP Jakarta. Setelah lulus (tahun 2007) mencoba melamar pekerjaan sebagai pengajar (guru honorer) di SMK Negeri 2 Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una. Pada tahun 2008, sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) untuk program PLBPM Kabupaten Tojo Una Una, dengan mencoba mendalaminya dengan mengikuti pelatihan TAP di Jakarta bersama rekan-rekan TAP lainnya. Selama melakukan pendampingan, pengalaman berharga dan pembelajaran didapat dalam

menghadapi kehidupan masyarakat di desa pesisir. Sebagai TAP kegiatan pendampingan dalam rembug desa, penyusunan RAB, pengawasan terhadap pembangunan fisik untuk kegiatan perbaikan ekosistem pesisir, perbaikan infrastruktur dan perbaikan perumahan selalu dilakukan. Hasilnya masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan PLBPM tersebut dengan terciptanya kemajuan lingkungan permukiman serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. ●





Buol
KABUPATEN



Menata Desa Botugolu dan Desa Bukamog di Kabupaten Buol

oleh: Fiterfeyn, Nahda dan Rahmat Hidayat



BERKAH...merupakan motto dari Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan panjang garis pantai sekitar 167 Km, kabupaten ini memiliki 8 kecamatan yang berada pada kawasan pesisir. Nama "Buol" sebagai sebuah kabupaten mungkin masih asing di telinga Anda. Kabupaten ini adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toli-toli sekitar 10 tahun yang lalu. Jika Anda ingin berkunjung ke kabupaten

ini, Anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Palu sekitar 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pesawat kecil ke Kabupaten Buol dengan waktu tempuh 45 menit.

Pada tahun 2009, Kabupaten Buol mendapat program dari pemerintah pusat untuk menata lingkungan wilayah pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Dalam penentuan desa lokasi, dilakukan survey ke



desa-desa pesisir. Setelah mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM, maka Tim Tenaga Ahli Pendamping (TAP) mengusulkan beberapa desa sebagai bahan pertimbangan yang diantaranya adalah desa Botugolu, Bukamog, Lamakan, Bukaan, Diapati dan Monano. Dari bahan pertimbangan tersebut, Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD)

harus menentukan dua desa untuk melaksanakan kegiatan PLBPM. Rapat FKTD penentuan desa lokasi yang dilakukan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan menentukan Desa Botugolu - Kecamatan Bunobogu dan Desa Bukamog - Kecamatan Bokat sebagai pelaksana kegiatan.

Desa Botugolu termasuk wilayah kecamatan Bunobogu dengan panjang garis pantai 2 km dan berada pada ketinggian ± 5 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk desa ini adalah



1.065 jiwa dan terdiri dari 244 KK. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 66 KK merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM). Lokasi pelaksanaan di Desa Botugolu terdapat di Dusun II yang memiliki masalah keterpurukan infrastruktur pemukiman diantaranya tidak tersedianya air bersih dan listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, perumahan masyarakat yang sangat memprihatinkan serta

belum tertatanya permukiman masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan di Desa Botugolu, kami menemukan adanya 24 KK yang hidup bersama dalam satu rumah, MCK belum tersedia dan pada musim tertentu air pasang selalu menggenangi permukiman masyarakat yang berdekatan dengan muara sungai. Sampah yang berserakan merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat setempat akibat tidak tersedianya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sehingga permukiman masyarakat yang berdekatan dengan muara sungai. Sampah yang berserakan merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat setempat akibat tidak tersedianya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sehingga permukiman masyarakat yang berdekatan dengan muara sungai.

Masyarakat Dusun II harus menempuh 50 Km untuk mendapatkan air bersih dan terletak di bagian hulu sungai yang jauh. Meskipun desa ini masih sangat minim dengan infrastruktur permukiman yang ada, namun desa ini menyimpan potensi yang cukup besar. Potensi budi daya air payau sekitar 25 Ha, potensi wisata bahari, potensi hutan mangrove dan potensi ikan yang berasal dari Laut Sulawesi adalah contohnya. Separuh dari penduduk desa bekerja sebagai nelayan dan sisanya menjadi petani, peternak, PNS dan ada pula yang pengangguran. Untuk mencapai desa ini, anda dapat membutuhkan waktu sekitar 40 menit dari Ibukota Kabupaten Boul melalui jalur darat.

Desa Bukamog termasuk wilayah Kecamatan Bokat, memiliki Luas wilayah sekitar 936,5 Ha dengan panjang garis pantai sekitar 2 Km. Penduduk yang mendiami desa ini terdiri dari 1.041 orang yang terbagi atas 227 KK dimana sekitar 100 KK merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM). Mata pencaharian masyarakat setempat sebagian besar adalah nelayan tradisional dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai petani. Kegiatan PLBPM di Desa Bukamog dilakukan di Dusun II. Dari hasil survey yang dilakukan oleh TAP, permukiman masyarakat di desa ini belum tertata dengan baik, rumah penduduk masih dikategorikan sebagai rumah sangat sederhana dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan rata-rata memiliki warung-warung kecil di depan rumah mereka, warung ini berfungsi sebagai tempat menjual ikan hasil tangkapan mereka secara tradisional, hal ini

dikarenakan belum tersedianya sarana tempat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. Selain itu, sarana air bersih, MCK, TPS, dan saluran drainase yang masih minim juga menjadi permasalahan bagi masyarakat setempat.

Jika anda ingin melihat-lihat desa ini, anda dapat menggunakan kendaraan bermotor dari Ibukota Kabupaten Boul dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Setelah terpilihnya dua desa target group tersebut, maka Tim TAP yang didampingi PPK dan FKTD melakukan sosialisasi PLBPM di kedua desa yang dilanjutkan dengan pembentukan pengurus LK (Lembaga Kemasyarakatan) di balai pertemuan pada masing-masing desa target.

Sosialisasi di Desa Botugolu berjalan dengan baik walaupun terdapat sedikit perbedaan pendapat antar anggota masyarakat. Hal ini terutama terlihat pada saat pemilihan anggota LK, sebagian masyarakat tidak menyetujui calon pengurus LK yang telah ditetapkan lebih awal oleh aparat desa, sehingga TAP memberi usulan untuk melakukan pemilihan kembali calon Pengurus LK sehingga sesuai dengan pilihan masyarakat dengan melakukan voting. Suara terbanyak dicalonkan sebagai Ketua, suara terbanyak kedua sebagai Sekertaris, suara terbanyak ketiga sebagai bendahara. Sedangkan pemilihan motivator desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat Dusun II bersama aparat desa yang ada. Setelah terbentuknya kepengurusan LK dan motivator desa, kemudian dilakukan penentuan kegiatan di lokasi target. TAP mengusulkan kegiatan sesuai dengan survey yang telah dilakukan yaitu kegiatan pengadaan MCK, sumur, bak sampah, dan pembangunan rumah sangat sederhana serta rehabilitasi rumah masyarakat yang masih layak huni. Melalui musyawarah yang berlangsung dengan baik maka kegiatan yang di tawarkan oleh TAP disetujui oleh masyarakat Desa Botugolu. Pada saat sosialisasi, kehadiran masyarakat sangat banyak dan antusias untuk mengetahui dengan jelas apa sih PLBPM itu?.. dari sini kami kami dapat melihat bahwa masyarakat setempat menyambut kegiatan PLBPM yang akan dilaksanakan di desa mereka.

Rincian Kegiatan PLBPM di Kabupaten Buol

Jenis Kegiatan	Botugolu	Bukamog
Pembangunan Rumah sangat sederhana	7 unit	-
Pembangunan Tempat Penjualan Ikan (TPI)	-	1 unit
Pembangunan MCK	2 unit	1 unit
Pembuatan Sumur	2 unit	1 unit
Pembangunan Bak Sampah	1 unit	-
Pembuatan Drainase	-	175 meter
Rehabilitasi Rumah	√	-

Pelaksanaan sosialisasi di Desa Bukamog yang dilanjutkan dengan pemilihan pengurus LK berjalan dengan baik. Masyarakat setempat menyambut baik kegiatan PLBPM dengan harapan keadaan desa mereka sedikit berubah kearah yang lebih baik. Namun target TAP untuk dalam satu hari melakukan sosialisasi beserta pemilihan pengurus LK tidak tercapai, hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran masyarakat karena banyaknya kegiatan masyarakat pada awal bulan puasa. Sehingga TAP, PPK, FKTD, aparat desa serta masyarakat yang hadir pada pertemuan pertama memutuskan untuk melakukan pertemuan sosialisasi sekaligus pembentukan pengurus LK pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya masyarakat yang hadir lebih banyak dibanding



ingan pada hari pertama. Selama sosialisasi berlangsung, masyarakat tampak antusias untuk mengetahui jenis kegiatan PLBPM yang baru pertama kali dilaksanakan di desa ini. Pada penentuan kegiatan prioritas, masyarakat menyampaikan ide-ide yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa ini, seperti pembangunan Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga mereka mempunyai tempat yang tertata dengan baik untuk hasil tangkapannya. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan untuk pembangunan sarana air bersih, pembangunan drainase, dan MCK, serta betonisasi jalan sekitar 1,5 km. Dari beberapa usulan tersebut,

kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk diajukan kepada FKTD. Adapun kegiatan yang disetujui oleh Tim FKTD adalah Pembangunan Tempat Penjualan Ikan (TPI), pembangunan MCK, pembangunan drainase, serta penyediaan sumber air bersih termasuk pembuatan sumur yang rencananya akan dibuat di dekat lokasi TPI. Kemudian dilakukan pemilihan pengurus LK dan motivator yang bertugas menangani kegiatan PLBPM di desa. Dalam pemilihan pengurus LK (Ketua, Sekretaris, Bendahara) berjalan dengan baik tanpa ada kecemburuan sosial pada masing-masing individu masyarakat, sehingga pada hari itu juga sosialisasi PLBPM dapat terlaksana yang kemudian dirangkai dengan pembentukan pengurus LK, pemilihan motivator desa dan penen-



tuhan jenis kegiatan prioritas.

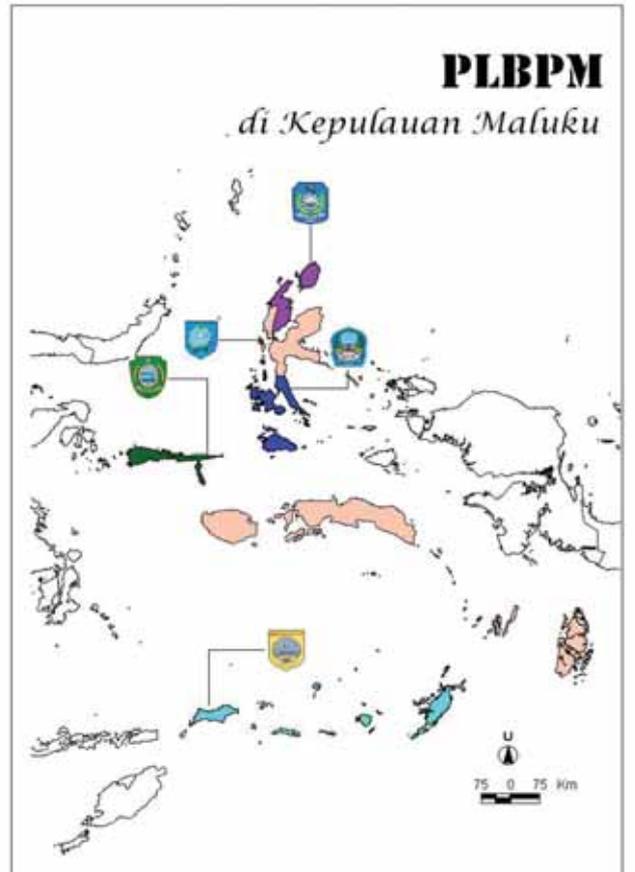
Setelah adanya kegiatan prioritas, maka kami selaku TAP bersama LK di masing-masing desa melakukan penyusunan proposal dan RAB kegiatan untuk pencairan anggaran Termin I (10%) kegiatan PLBPM. Besar harapan kiranya kegiatan PLBPM di dua desa target group berjalan dengan baik, tentunya keberhasilan yang kita inginkan bersama tidak lepas dari dukungan masyarakat serta sumbangsih dari TAP, PPK, TPD, FKTD, dan Pemerintah daerah Kabupaten Buol yang berperan membantu masyarakat pesisir dalam hal menata lingkungan pesisir tempat mereka bermukim. ●

Biografi

Fiterfeyn Makulubi, S.Si., dilahirkan di Leok, Kabupaten Buol, pada tanggal 10 Februari 1985. Masa SD-SMU dihabiskan di Kabupaten Buol dan pada tahun 2002 melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Manado dan menyelesaikan studi pada tahun 2007. Pada Tahun 2009 menjadi TAP pada program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang diadakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Nahda, Amd. Tek. Lahir di Labean, Kabupaten Donggala pada tanggal 3 maret 1981. Sejak lahir sampai SMP di Labean, dan penulis melanjutkan ke SMUN 4 di Palu. Kemudian melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi pada Jurusan Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu pada tahun 2000. Pada tahun 2009 menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Penulis tertarik sebagai TAP karena kegiatan ini merupakan proses pendampingan masyarakat dan pembelajaran kepada masyarakat, dimana Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan ini. Sehingga dengan sendirinya mereka dapat menata lingkungan pesisir tempat mereka bermukim. Kegiatan ini bias menjadi contoh dan memberikan dampak positif bagi penataan kawasan-kawasan permukiman masyarakat pesisir lainnya.

Rahmat Hidayat, Amd.Pl. Dilahirkan di Labuan Tobelo pada tanggal 30 mei 1983. Sejak SD sampai SLTP di kota Pure, dan pada tahun 1998 melanjutkan sekolah di SMUN 7 Makasar dan tamat pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke Politeknik Pertanian Negeri PANGKEP, program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Kemudian mengikuti pendidikan pelayaran sejak tahun 2005-2006, dan pada tahun 2007-2008 mengikuti pelayaran ke luar negeri keliling beberapa negara di Asia, dengan Jabatan Second Officer kembali ke Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2008. Pada Tahun 2009 bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) yang bertugas mendampingi masyarakat dalam program PLBPM di Kabupaten Buol. ●





KABUPATEN Maluku Tenggara Barat



Menata Lingkungan Desa Pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

oleh: Yulius Londar, Wendy MD Lekransy dan Alip



Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Kabupaten bahari yang terkenal dengan potensi kelautan yang sangat indah dan eksotik. Ungkapan kabupaten bahari memperlihatkan bahwa potensi perikanan yang sangat mendominasi kekayaan alam di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga menunjang pembangunan di semua bidang. Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan panjang garis pantai 1623,27 km dan 174 desa pesisir. Kabupaten ini memiliki 85 pulau, dimana ada 47 pulau yang sudah dihuni dan 28 pulau yang belum dihuni. Akses transportasi ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat relatif mudah baik dari jalur udara maupun jalur laut. Apabila menggunakan jalur udara, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju ke Kota Ambon, selanjutnya menggunakan pesawat dengan tujuan

Saumlaki. Waktu tempuh dari Ambon ke Saumlaki selama 2 jam. Sedangkan transportasi melalui laut menggunakan Kapal penumpang milik PT.PELNI maupun pihak swasta selama 38 jam. Disepanjang perjalanan menuju kota Saumlaki, anda dapat menikmati keindahan pulau-pulau dan laut yang terbentang luas.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat termasuk dalam kabupaten baru dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) tahun 2009. Kegiatan PLBPM rencananya akan dilaksanakan pada 2 (dua) desa pesisir di Kecamatan Wermaktian. Dalam penentuan desa lokasi pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan identifikasi awal terhadap beberapa desa pesisir antara lain Desa Batuputih Kecamatan Wermaktian, Desa Wermatang Kecamatan Wermaktian, Desa Romlus Kecamatan Wuarlabobar dan Desa Namralan Kecamatan Wuarlabobar. Setelah proses identifikasi awal, kami juga kembali melakukan identifikasi ulang dalam rangka persiapan rebug dengan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan PLBPM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



Bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Tim Pengendali Daerah dilaksanakan rebug penentuan lokasi lokasi pelaksanaan. Dalam rebug ini, Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) belum terlibat, karena SK Bupati mengenai FKTD masih mengalami perubahan dan belum ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Proses penentuan lokasi pelaksanaan berjalan cukup lancar karena semua pihak yang terlibat mengetahui dengan pasti kondisi beberapa desa yang diajukan. Untuk penentuan lokasi pelaksanaan secara musyawarah ditentukan 2 (dua) desa yaitu Desa Batuputih dan Desa Wermatang yang masuk wilayah Kecamatan Wermaktian, karena mudah dijangkau baik ketika musim barat maupun timur dengan menggunakan sarana transportasi laut atau

darat. Penentuan desa lokasi pelaksanaan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan faktor transportasi juga menjadi pertimbangan bagi semua pihak.

Desa Batuputih Kecamatan Wermaktian memiliki luas wilayah pemukiman ± 3000 m², terletak pada ketinggian 5-15 meter dari

permukaan laut. Perjalanan menuju Desa Batuputih dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi laut maupun darat. Perjalanan dengan menggunakan mobil dapat ditempuh selama 2 jam dari ibukota kabupaten, sedangkan dengan motor laut selama 4 jam dari ibukota kabupaten. Pemukiman masyarakat menyebar dipinggir pantai, dengan tata ruang pemukiman yang kurang teratur dan bangunan rumah yang layak dihuni. Struktur tanah pada Desa Batuputih adalah tanah liat sehingga pada musim hujan maka jalan sangat licin sehingga dibutuhkan rabat jalan dari pantai ke jalan utama. Infrastruktur sarana penunjang keberadaan kehidupan masyarakat desa belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai desa nelayan dengan surut air laut sangat jauh dan kondisi pantai yang berlumpur membuat masyarakat nelayan sulit untuk menambatkan perahu. Tingkat pengetahuan masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan di Desa Batuputih masih kurang. Terlihat dari penggunaan pantai sebagai tempat pembuangan



kotoran manusia bukan menggunakan MCK umum yang telah ada. Pemanfaatan sarana air bersih yang merupakan bantuan Pemerintah Propinsi Maluku tahun 2007 berupa bak penampung air dan saluran air ke rumah masyarakat tidak dapat digunakan karena aliran air tidak mampu menjangkau rumah masyarakat.

Infrastruktur umum yang dimiliki Desa Batuputih adalah Balai Desa, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Gereja belum dimanfaatkan secara maksimal, karena belum adanya fasilitas listrik. Penduduk desa ini 60 % adalah nelayan dari jumlah penduduk sebanyak 1.141 jiwa atau 255 KK. Belum terhitung masyarakat lain yang berprofesi sebagai petani dengan pekerjaan sampingan sebagai nelayan. Sebagai desa pesisir dan penunjang ekonomi di kota Saumlaki maka potensi unggulan desa ini adalah ikan pelagis, udang, lola, teripang dan hasil perkebunan. Hasil perikanan seperti lola dan teripang biasanya dilarang untuk dipanen sampai pada jangka waktu tertentu diatur dalam hukum adat (Sasi).

Desa Wermatang dan Desa Batuputih merupakan bagian dari Kecamatan Wermaktian namun dipisahkan oleh sungai. Luas wilayah pemukiman Desa Wermatang adalah 1.125 m² dengan ketinggian 5 - 25 meter dari permukaan laut. Untuk mencapai Desa Wermatang dapat ditempuh dengan menggunakan motor laut selama 5 jam. Pemukiman penduduk menyebar di pinggir pantai, sanitasi dan kebersihan lingkungan cukup teratur namun pemanfaatan sarana dan prasarana umum desa belum maksimal. Air bersih yang masih jauh dari jangkauan masyarakat sehingga masyarakat masih harus mengambil di sumber air yang jauh dari pemukiman. Seperti halnya Desa Batuputih, masyarakat di Desa Wermatang belum memanfaatkan sarana MCK umum sehingga masih ada masyarakat yang memanfaatkan pantai sebagai MCK. Sarana umum milik desa juga belum dilengkapi fasilitas listrik, dengan demikian pemanfaatannya pun menjadi tidak maksimal. Masyarakat Desa Wermatang sebanyak 758 jiwa atau 164 KK dan mayoritas bekerja sebagai nelayan Potensi unggulan pada desa ini adalah hasil perikanan

Jenis-jenis kegiatan PLBPM TA 2009 di Desa Batuputih dan Desa Wermatang Kecamatan Wermaktian dapat dilihat pada tabel berikut :

KEGIATAN PLBPM	DESA BATUPUTIH	DESA WERMATANG
1. Penyusunan rencana tata ruang desa dan rencana zonasi kawasan pesisir	1 paket	1 paket
2. Perbaikan saluran sarana air bersih.	800 meter	----
3. Pembangunan MCK	4 unit	4 unit
4. Pemasangan PLTS	4 unit	3 unit
5. Pembangunan jembatan tambatan Perahu (jetty)	250 meter	----

dan pertanian.

Sebagai desa lokasi pelaksanaan maka masyarakat di Desa Batuputih dan Desa Wermatang perlu mengetahui dan mengerti arti serta arah PLBPM, untuk itu maka dilakukan kegiatan sosialisasi PLBPM di tingkat desa. Dalam kegiatan ini diundang pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat desa setempat untuk melakukan diskusi sehingga masyarakat lebih mengerti dan memahami dengan jelas. Masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan kegiatan PLBPM ini. Pada kegiatan sosialisasi, kami langsung melakukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan penunjukan motivator, namun sedikit mengalami masalah karena masing-masing RT mengajukan calonnya dan bersikeras untuk mempertahankan calonnya. Namun setelah dijelaskan tujuan kegiatan PLBPM ini dan memanfaatkan peranan pemerintah desa serta tokoh adat, masalah ini dapat diselesaikan sehingga terbentuk LK dan motivator.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di Desa Batuputih, masyarakat sangat antusias dalam menunjang pembangunan desa ke depan, terutama dalam pembangunan di bidang perikanan. Dimana sebelumnya sudah dilakukan rembung awal antara masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sehingga yang banyak berbicara pada rembung desa adalah tokoh masyarakat dan motivator. Dalam rembung masyarakat Desa Batuputih, mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat, antara lain pembuatan jembatan tambatan perahu (jetty) sepanjang 250 m dari titik surut terjauh ke arah pantai, pemasangan PLTS sebanyak 4 unit, pembangunan 4 unit MCK umum yang rusak dan perbaikan saluran air bersih dari bak penampungan sepanjang 800 m. Keempat kegiatan ini disepakati oleh masyarakat dan bersama-sama membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan kegiatan fisik. Masyarakat Desa Wermatang bersepakat dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan di desa antara lain pembangunan 4 unit MCK umum dan pemasangan PLTS sebanyak 3 unit pada fasilitas umum milik Desa Wermatang. Kami pun bersama masyarakat

Desa Wermatang membuat RAB kegiatan.

Maluku Tenggara Barat sebagai kabupaten yang baru melaksanakan kegiatan PLBPM, mendapat kunjungan dari Tim Pengendali Pusat untuk melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan turun langsung ke Desa Batuputih dan Desa Wermatang. Hal ini bertujuan untuk meninjau dan memverifikasi lokasi pelaksanaan. Dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PLBPM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengetahui dengan jelas kondisi di lokasi pelaksanaan. Pemerintah Daerah sangat berperan serta dalam menunjang keberhasilan kegiatan PLBPM yang menga-



lokasikan dana yang bersumber dari pos APBD TA 2009 untuk kegiatan pendampingan.

Semua kegiatan fisik di kedua desa dapat dilaksanakan. Namun yang masih menjadi kendala dalam pembangunan jembatan tambatan perahu/kapal (jetty) adalah larangan penebangan beberapa jenis kayu. Hal tersebut masih dalam proses penyelesaian dengan menghubungi pihak-pihak terkait. Keterlibatan semua pihak terkait yang merupakan ujung tombak kesuksesan kegiatan ini sangat penting. Dengan dibangunnya jembatan tambatan perahu/kapal (jetty) maka diharapkan Desa Batuputih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batuputih dan desa-desa disekitarnya. ●

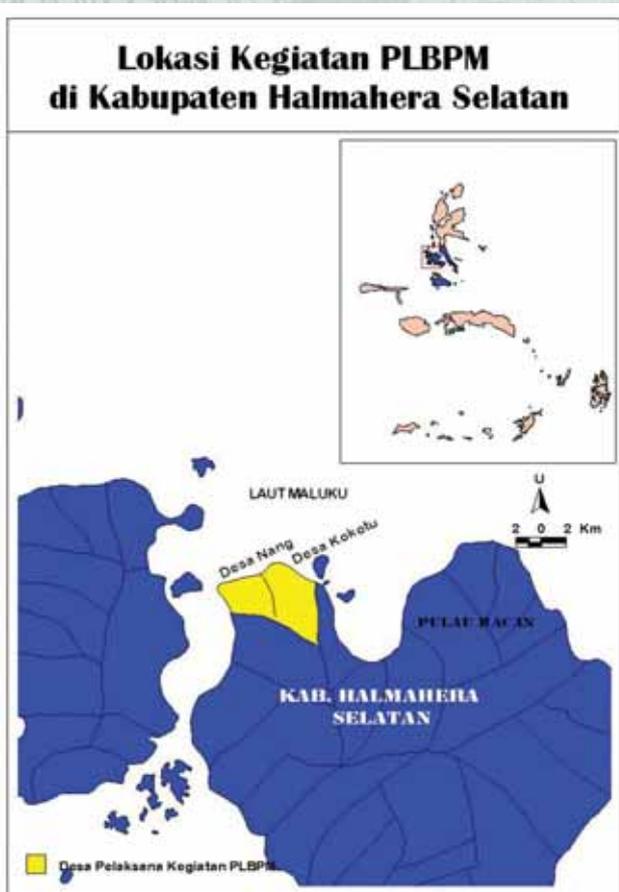
Biografi

Biodata Penulis

YULIUS LONDAR, S.Pi dilahirkan tanggal 5 Mei 1976 di Saumlaki - Maluku Tenggara Barat. Sejak dilahirkan, Sekolah Dasar hingga menamatkan SMA di kota Saumlaki. Setelah tamat SMA, melanjutkan studi di Universitas Pattimura Fakultas Perikanan dan Kelautan Kegiatan Studi Teknologi Hasil Perikanan. Gelar diraih pada tahun 2004. Tahun 2006 berkecimpung langsung di dunia perikanan sebagai Tenaga Pendamping Teknik dan Manajemen Rumput laut Kab. MTB, Tahun 2007 dan 2008 sebagai Tenaga Pendamping Desa Kegiatan PEMP dan Tahun 2009 sebagai Tenaga Ahli Pendamping Kegiatan PLBPM. Kegiatan PLBPM mendorong penulis untuk lebih mengarahkan masyarakat sebagai masyarakat mandiri yang mampu mengatur dan menata lingkungan desa serta mengajak masyarakat lokasi pelaksanaan group dalam pendampingan dan terampil dalam berbagai bidang.

WENDY, M. D. LEKRANSY, S.Pi dilahirkan di Ambon pada tanggal 23 Juli 1978. Sepanjang hidup dibesarkan di Ambon sampai SMU kelas 2. Lulus SMU di kota Larat - Maluku Tenggara Barat. Setelah menamatkan SMU, kemudian melanjutkan studi di Kegiatan Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura. Akhirnya mendapat gelar sarjana pada tahun 2003. Setelah tamat, mulai bekerja sebagai Enumerator di PT Telkom Ambon dengan system kontrak. Setelah kontrak selesai, berpindah ke kota Saumlaki Kab MTB dan bekerja sebagai konsultan manajemen pada Kegiatan PEMP pada tahun 2004 dan 2007. Dan pada tahun 2009 direkrut sebagai Tenaga Ahli Pendamping Kegiatan PLBPM TA 2009. Sebagai TAP, penulis ditantang untuk hidup dan berkecimpung secara langsung dengan masyarakat desa khususnya desa nelayan. Kegiatan ini menambah pengalaman pembelajaran kepada masyarakat dalam penataan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Sebagai TAP diharapkan melakukan pendampingan bagi masyarakat dalam penyusunan RAB, dan pembuatan desain masing-masing kegiatan. Dengan kegiatan ini masyarakat lebih memahami banyak hal mengenai penataan lingkungan.

ALIP, ST dilahirkan tanggal 09 Juni 1973 di Ambon. Dilahirkan dan dibesarkan di Ambon, sejak duduk SD sampai dengan Perguruan Tinggi di kota Ambon. Universitas Pattimura Fakultas Teknik Kegiatan Studi Teknik Bangunan merupakan pilihan untuk menentukan masa depan ke depan. Gelar sarjana teknik diraih pada tahun 2000. Setelah selesai studi bekerja menjadi konsultan pada CV Chandra Raya pada tahun 2002 dan pada tahun 2005 menjadi teknisi PT Nusantara Fishery. Pada tahun 2009 direkrut sebagai TAP kegiatan PLBPM, dan antusias sekali menjadi TAP karena keinginan mengembangkan dan meningkatkan potensi dan kualitas masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. ●



Halmahera Selatan

K A B U P A T E N



Menata Desa Pesisir Menuju Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan

Oleh: Iksan Kalesaran Dan Rudi Siwasiwan



Anda mungkin bertanya apa dan dimanakah Kabupaten Halmahera Selatan itu. Kabupaten Halmahera Selatan adalah daerah kepulauan dengan ibu kota di Labuha. Kabupaten ini merupakan daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara. Luas wilayah kabupaten ini sekitar 40.236,72 km² dan kurang lebih 78 % wilayahnya adalah laut. Sebagai daerah kepulauan, kabupaten ini mempunyai potensi pantai dan laut yang cukup besar, dengan panjang garis pantai sekitar 2.394.612 meter dan hampir 95,98 % dari total desa berada di tepi pantai, sehingga cocok untuk dijadikan contoh Pengembangan Desa Pesisir. Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Halmahera Selatan mendapatkan

Morosesales Duri Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

kembali dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) setelah tahun 2008. Desa yang menjadi lokasi kegiatan adalah desa yang pada tahun sebelumnya dianggap berhasil dalam pelaksanaan program ini yaitu desa Nang. Pada tahun ini PLBPM di desa Nang ini merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan pembangunan desa tersebut.

Desa Nang adalah desa nelayan yang terletak di Kecamatan Bacan Barat. Topografi desa ini berupa dataran rendah dan berbukit yang mengelilingi desa bagaikan garis lengkung yang berfungsi sebagai tapal batas. Perjalanan menuju desa ini dapat ditempuh melalui laut dengan menggunakan speed boat bermesin 40 PK yang ditempuh dalam waktu 2 jam dari ibukota kabupaten. Sesampainya di desa Nang suasananya begitu sejuk dan teduh, bisingnya kendaraan bermotor tidak kita dapati di sini, karena jalur darat menuju tempat ini tidak ada.

Permukiman di desa ini terletak di sepanjang pesisir pantai. Mata pencaharian utama masyarakat desa adalah nelayan tradisional, dengan alat tangkap yang masih sangat sederhana. Hal inipun berimbas pada hasil yang didapatkan yang hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saja. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa jenis ikan demersal diantaranya ikan kakap, kuwe, dan cumi-cumi. Adapun bukit dibelakang desa ini biasanya dijadikan sebagai kebun masyarakat,

yang ditanami tanaman ubi-ubian, sayuran serta tanaman berumur panjang seperti kelapa, kenari, pala maupun cengekeh.

Awalnya desa ini bisa dikatakan sebagai desa tertinggal. Hal ini ditandai dengan minimnya infrastruktur desa seperti listrik desa, jalan desa, sarana mandi cuci kakus (MCK) yang memadai, pasar yang prefentif serta tempat pertemuan masyarakat yang layak. Tetapi setelah banyaknya program pemerintah yang masuk diantaranya PLBPM ini, sedikit demi sedikit sudah terjadi perubahan kondisi desa menjadi lebih baik dan terarah. Jumlah penduduk desa yang memiliki luas wilayah sekitar 787,5 Ha ini, kurang lebih 418 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 218 jiwa dan jumlah perempuan 219 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 78 orang

Setelah pembekalan yang dilakukan pada pelatihan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) di Jakarta, serta berpegang pada buku pedoman pelaksanaan PLBPM ini, maka kami mulai melakukan kegiatan di lapangan. Sebagai kegiatan awal kami mengadakan rembung desa dengan masyarakat setempat. Antusias masyarakat sangatlah baik, ini terlihat dengan banyaknya peserta rembung yang hadir pada saat itu. Sebelumnya kami telah melakukan pembentukan Lembaga kemasyarakatan (LK) serta Motivator Desa (MD) yang nantinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Dalam pemilihan LK dan MD berlangsung tidak terlalu lama, serta tidak



Morosesales Duri Desa: Pembelajaran dari Program PLBPM

Masyarakat desa bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan fisik. Sehingga tidaklah mengherankan dalam waktu yang relatif singkat hampir semua program dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terdapat kendala yang berarti.

Sekarang masyarakat Desa Nang sudah dapat menikmati hasil yang telah dilakukan, dan terjadi perbedaan yang signifikan dari keadaan masyarakat sebelumnya. Dahulu jika musim hujan tiba terdapat banyak genangan di sekitar rumah mereka, bahkan banjir. Tetapi sekarang hampir sudah tidak terjadi lagi. Sarana MCK pun sudah dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Masyarakat menyadari betapa berartinya



terjadi perdebatan tentang siapa yang akan dipilih. Ini karena kandidatnya sudah diajukan dari masyarakat desa sendiri sebelumnya.

Setelah masuk pada acara penentuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, banyak masukan dari peserta rembung. Sempat terjadi pula perdebatan di antara sesama peserta, namun akhirnya dapat diredam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah prioritas pembangunan desa sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang telah disepakati adalah pembuatan konstruksi penahan ombak dari pasak kayu, drainase desa, jalan desa, sarana MCK, perbaikan rumah. Dan yang paling menjadi fokus pada PLBPM tahun 2009 adalah penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir.

Dalam pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan sangat nampak suasana gotong royong.

kegiatan ini. Dan mereka berharap pada tahun 2010, mereka masih merasakan program PLBPM ini di desanya, agar Nang menjadi lebih baik, serta tingkat kesejahteraan nelayan di desa ini meningkat. ●

Tabel Kegiatan PLBPM Tahun 2009 di Desa Nang

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN
1	Penyusunan rencana tata ruang desa dan zonasi kawasan pesisir	1 Unit
2	Pembuatan konstuksi penahan ombak dari pasak kayu	420 Meter
3	Drainase desa	30 Meter
4	Jalan Desa	30 Meter
5	Sarana MCK	3 Unit
6	Perbaikan Perumahan	8 Unit

Biografi

Sekilas Tentang Penulis



IKSAN KALESARAN, ST. Dilahirkan di Ternate propinsi Maluku Utara, tanggal 27 Oktober 1981. Merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara dari pasangan orang tua Arman Kalesaran dan Rahma Husain. Menyelesaikan pendidikan formal di kota Ternate dari TK sampai SMK N 2 jurusan Bangunan gedung. Setelah lulus melanjutkan kuliah di Universitas 45 Makasar jurusan Teknik Sipil pada tahun 2000 dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik (ST) pada Desember tahun 2004. Selama kuliah aktif juga pada beberapa

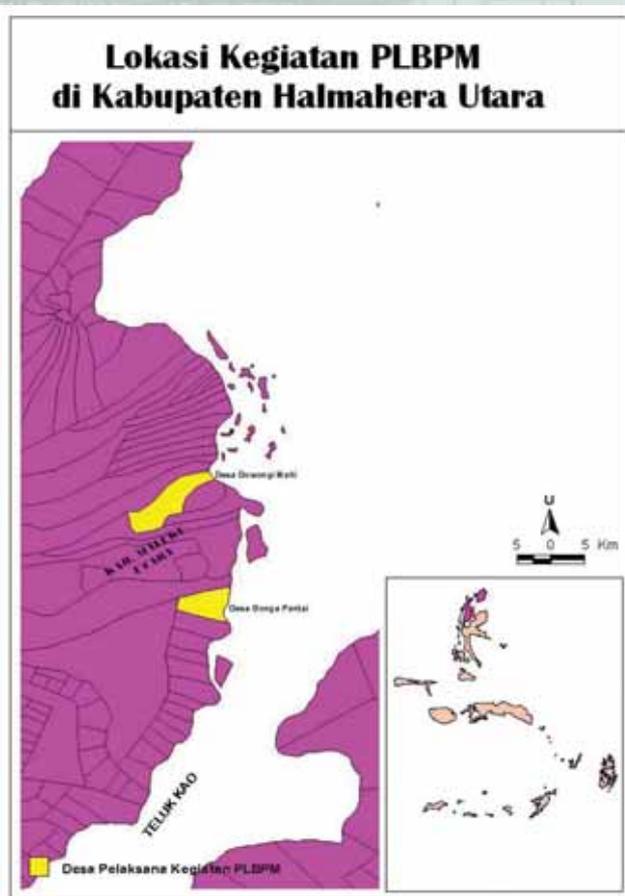
Organisasi Kemahasiswaan diantaranya, Ketua bidang Kajian dan Strategis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat, Ketua Bidang Pengkaderan pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Setelah selesai kuliah bekerja di PT. Arsi Wastuadi Cabang Ternate, dan di tempatkan sebagai Tenaga Teknis. Selama kurang lebih 1 tahun dari Tahun 2004 sampai 2005 dan pada tahun 2006 bekerja sebagai Staf pada Divisi Perencanaan Konstruksi selama kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 2009 bekerja sebagai TAP kegiatan PLBPM di Kabupaten Halmahera Selatan.



RUDI SIWASIWAN, S.Pi. dilahirkan pada tanggal 19 januari 1983, di Kabupaten Halmahera Selatan. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan orang tua. Ali Siwasawan dan Surtilla Kamarullah. Meyelesaikan sekolah Tingkat Dasar dan SMP di Kabupaten Halmahera Selatan, dan melanjutkan ke sekolah SMK Negeri 2 Ambon Maluku, mengambil Jurusan Mesin Produksi. Namun tidak sempat menyelesaikan disekolah SMK Negeri 2 Ambon karena terjadi kerusuhan karena unsur SARA pada

tahun 1999 yang pada akhirnya pindah ke SMK Negeri 2 Ternate untuk melanjutkan studi sampai selesai. Setelah lulus SMK tahun 2001, melanjutkan kuliah di Universitas Khairun Ternate Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP). Selama kuliah bekerja di CV. Taliabo sebagai tenaga administrasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2002 sampai 2004. Gelar Sarjana Perikanan (S.Pi) diperoleh pada tahun 2005. Tahun 2007 menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Halmahera Selatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai Tenaga Pengawas Lapangan selama setahun, dan tahun 2009 ini menjadi Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada program PLBPM . ●





Halmahera Utara

KABUPATEN



Bedah Desa Pesisir di Kabupaten Halmahera Utara

oleh: Junis T. Kojoba dan Andris Sadaro



Anda mungkin bertanya dimanakah Kabupaten Halmahera Utara? Kabupaten ini adalah pemekaran Kabupaten Maluku Utara yang sekarang menjadi Provinsi Maluku Utara. Ibukota kabupaten ini adalah Kota Tobelo yang terkenal dengan produksi kelapanya. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sekitar 516 km dan 178 desa pesisir. Jika Anda mau berkunjung ke kabupaten ini, Anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju kota Ternate, yang dilanjutkan dengan

perjalanan laut selama 1,5 jam menuju Sofifi, kemudian menempuh perjalanan darat selama 4 jam hingga sampai di Kota Tobelo. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan dari pegunungan hingga indahnyanya pantai.

Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Halmahera Utara baru mendapatkan kesempatan untuk menata desa pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Pemerintah kabupaten khususnya tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD) harus memilih dua desa pesisir yang akan ditetapkan menjadi desa pelaksana kegiatan. Namun demikian, tim FKTD agak kesulitan dalam penentuan desa tersebut, sehingga dilakukan skoring terhadap 4 (empat) desa pesisir yang menjadi prioritas. Dari hasil skoring tersebut kemudian dilakukan survey lokasi ke calon desa pelaksana kegiatan bersama tim Teknis Pengendali Daerah (TPD). Sesuai dengan kriteria dalam Pedoman Pelaksanaan PLBPM maka dipilihlah *Dusun Gongga Pante – Desa Gongga dan Desa Dowongi Maiti*, karena mengalami keterpurukan infrastruktur lingkungan dan masih minimnya fasilitas umum dalam menunjang kebutuhan masyarakat pesisir.

Desa Gongga merupakan bagian dari Kecamatan Tobelo Timur yang luasnya sekitar 37,5 km². Topografi desa ini berupa daratan rendah dengan ketinggian 4 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini ditempuh melalui jalur laut dengan lama perjalanan 2,5

jam dari Tobelo. Pemukiman masyarakat desa ini terpusat di pinggir pantai. Mayoritas bangunan rumah terdiri dari dinding kayu dengan atap daun sagu dan lantainya masih tanah. Sarana dan prasarana penunjang pemukiman di desa ini masih sangat kurang seperti sarana pendidikan, penerangan, air bersih, MCK, jalan lingkungan dan sistem drainase.

Sedangkan Desa Dowongi Maiti termasuk dalam kecamatan Kao Utara dengan luas sekitar 80 km². Topografi desa berupa daratan rendah dengan ketinggian 2 m dari permukaan laut. Perjalanan menuju desa ini ditempuh dengan perjalanan laut selama kurang lebih 3 jam dari Tobelo. Pemukiman masyarakat desa ini terpusat di daerah pesisir. Kondisi infrastruktur dan rumah penduduk hampir sama dengan desa Gongga Pante.

Sosialisasi PLBPM dilakukan dengan penjelasan dan pendekatan secara formal maupun non-formal dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa. Masyarakat menerima kegiatan PLBPM dengan penuh semangat dan berharap agar kegiatan yang dilaksanakan dapat merubah wajah desa ke arah yang lebih baik. Saat sosialisasi tersebut, ada seorang masyarakat yang bertanya: "Apa ada upah bagi yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan?" Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan kegiatan PLBPM, sehingga masyarakat dapat mengerti dan menerima. Setelah itu, dilakukan pembentukan Lembaga

ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih payahnya sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sadar betapa pentingnya penataan lingkungan pemukiman, yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Penyusunan rencana kegiatan dalam rembug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong mampu menumbuhkan kebersamaan masyarakat desa. ●



Tabel Jenis Kegiatan yang dilaksanakan melalui PLBPM di Kab. Halmahera Utara

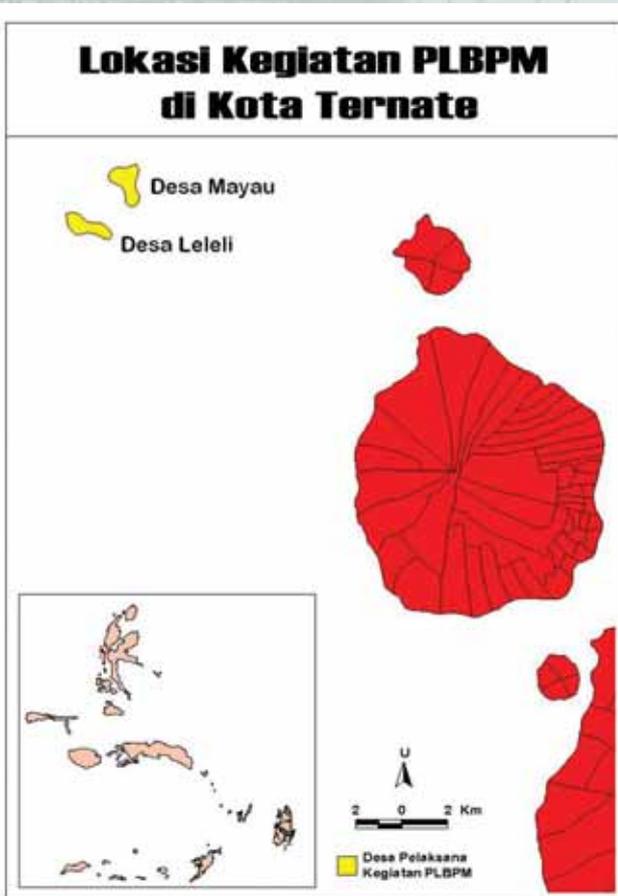
Kegiatan PLBPM	Desa Gongga	Desa Dowongi Maiti
Perencanaan Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembangunan Drainase	411 m	1.640 m
Pembangunan Jalan Setapak	185 m	96 m
Pembangunan Jembatan	1 unit	-
Penyediaan Sarana Air Bersih	1 unit	-
Pembuatan Gapura	1 unit	-
Pembangunan MCK	2 unit	2 unit
Pembangunan Pagar Desa	-	360 m
Perbaikan Rumah	-	38 unit

Kemasyarakatan (LK) dan penunjukkan motivator untuk kedua desa tersebut.

Dalam penentuan kegiatan prioritas di kedua desa ini, masyarakat sangat aktif, hal ini dapat dilihat dengan kehadiran seluruh masyarakat dalam acara rembug desa dan mereka berlomba-lomba menyampaikan isu permasalahan yang dihadapi. Usulan-usulan masyarakat dalam membangun desanya berupa pembangunan jalan setapak, drainase, penyediaan air bersih, MCK, jembatan penyeberangan dan pintu gerbang / gapura.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM





Menata Kelurahan Terdepan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Oleh: Sugyono Wally, Rizal Ibrahim dan Muhammad Irwan Abdullah



Kota Ternate merupakan salah satu kota kepulauan, yang sangat terkenal dengan adanya sejarah kerajaan Ternate dan Tidore sebagai kerajaan Islam yang besar di Indonesia. Kota ini juga terkenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya seperti rempah-rempah pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Luas wilayah kota ini sekitar 5.795 km² yang terdiri dari 8 pulau kecil yaitu Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Gurida, Pulau Maka dan Pulau Mano. Jika anda ingin berkunjung ke Kota ini, anda dapat menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Ternate selama kurang lebih 3,5 jam.

Pada tahun 2009 ini, Kota Ternate mendapatkan kesempatan untuk menata dua kelurahan pesisir di Kecamatan Pulau Batang Dua melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM).

Kecamatan Pulau Batang Dua merupakan Kecamatan baru dengan infrastruktur dan permukiman yang masih memprihatinkan. Dua kelurahan pesisir tersebut adalah Kelurahan Mayau dan Kelurahan Lelewi.

Kelurahan Mayau dan Kelurahan Lelewi mempunyai luas wilayah sekitar 3.625 Km². Perjalanan menuju kedua kelurahan ini, dilakukan dengan menggunakan jalur laut den-



gan jarak tempuh sekitar 80 mil dari Kota Ternate dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam. Permukiman masyarakat terpusat di pinggir pantai, dengan kondisi yang relatif sederhana. Serta minimnya kondisi infrastruktur permukiman seperti jalan yang masih tanah, belum ada bangunan pengaman pantai, belum tersedia Tempat Pendaratan Ikan (TPI) serta sarana infrastruktur pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan yang belum memadai. Bahkan ketika musim hujan, jalan penghubung antara pelabuhan ferry di kedua kelurahan ini tergenang dan sangat licin sehingga sulit dilalui.

Pada tahun 2008, jumlah penduduk di Kelurahan Mayau adalah 1.354 orang yang terdiri dari 285 KK. Sedangkan penduduk Kelurahan Lelewi sebanyak 520 orang dengan 173 KK. Mata pencaharian pokok masyarakat kedua kelurahan ini adalah sebagai nelayan dan petani, yang selebihnya bekerja sebagai pedagang, PNS dan TNI/POLRI. Semua masyarakat Kelurahan Lelewi beragama kristen protestan, sedangkan untuk Kelurahan Mayau 90%



masyarakatnya beragama kristen protestan dan 10% beragama islam. Potensi unggulan di kedua Kelurahan ini adalah pertanian dan perikanan. Hasil produksi pertaniannya berupa kelapa, pisang dan cengek. Untuk hasil tangkapan nelayan biasanya dijual kepada tengkulak. Hal ini karena sulitnya transportasi antara Kota Ternate dan Kecamatan Batang Dua atau sebaliknya yang hanya ada satu kali

dalam seminggu. Sehingga potensi kedua kelurahan ini, sering dimanfaatkan oleh masyarakat lain terutama yang berasal dari Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara).

Dalam sosialisasi PLBPM, dilakukan pemaparan materi dan diskusi mengenai kegiatan PLBPM yang dilakukan di Aula Kecamatan Pulau Batang Dua, dimana aula tersebut terletak di antara Kelurahan Mayau dan Kelurahan Lelewi. Masyarakat sangat antusias sehingga diskusi terasa hangat, karakteristik masyarakat yang hadir cukup ramah, sehingga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar.

Mekanisme pembentukan LK dan penunjukkan motivator, dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan setelah pelaksanaan Sosialisasi PLBPM, sehingga arah pembicaraan dan kinerja kegiatan sudah diketahui oleh masyarakat. Musyawarah ini oleh segenap masyarakat, aparat pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama. Kurangnya kesiapan pemateri dan sarana prasarana kegiatan, menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam musyawarah tersebut. Hal ini disebabkan karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Namun dapat teratasi dengan adanya kerjasama yang baik antar tim yang datang.

Kegiatan rebug yang dilakukan oleh LK dan didampingi oleh Tenaga Ahli Pendamping (TAP) dalam menentukan kegiatan prioritas mengalami sedikit ketegangan, mengingat banyaknya usulan kegiatan yang diajukan untuk kegiatan PLBPM tahun 2009. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, masyarakat sepakat untuk ditetapkan skala prioritas berdasarkan hasil voting. Setelah penetapan kegiatan prioritas, kemudian disusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Kelurahan Mayau dilakukan dengan pembangunan saluran air, pembangunan / perbaikan jalan setapak dan penanaman pohon mangrove. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Lelewi adalah pembangunan saluran air, pembangunan / perbaikan jalan setapak dan pembangunan bronjong. Dalam kegiatan ini, motivator dan LK berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat dengan memberikan

aspirasi tentang pembangunan Kelurahan.

Pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan kegiatan PLBPM seperti alokasi dana penunjang kegiatan. Selain itu, sharing pemerintah terhadap kegiatan PLBPM adalah kegiatan Tentara Masuk Desa (TMD) yang dipelopori oleh Korem 732 Kota Ternate.

Dalam pelaksanaan program PLBPM, masyarakat dilatih untuk bertindak dan berpikir dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sendiri. Ini terlihat dengan adanya kebebasan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengatur pembangunan. Sehingga kualitas, kerapihan serta keteraturan pembangunan dapat diwujudkan dan dinikmati oleh segenap masyarakat, yang merasa memiliki hasil dari pembangunan tersebut. Olehnya itu, masyarakat berharap agar kegiatan semacam ini dapat berlanjut pada tahun mendatang, sehingga memberikan hasil yang lebih baik. ●



Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui Kegiatan PLBPM di Kota Ternate

Kegiatan	Kel. Mayau	Kel. Lelewi
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembangunan Jalan Setapak	1.334 m	825,7 m
Pembangunan Saluran drainase	310 m	145,2
Penanaman mangrove	4.050 btg	-
Pembangunan Bronjong	-	58 m

Sekilas Tentang Penulis



Suyono Wally, ST. dilahirkan di Ambon pada tanggal 25 Mei 1970, dan dibesarkan di Ambon hingga menyelesaikan Sekolah Teknik Menengah (STM) pada tahun 1989. Bekerja pada bidang jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan di Kota Ternate: PT. ROULLAH TIARA FAMILY (tahun 1990), CV. TIARA KARYA (tahun 1994-2000) dan PT. GALIH KARSA UTAMA (tahun 2001) sambil melanjutkan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Gelar sarjana teknik didapat pada tahun 2007. Pada tahun 2009, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) Program PLBPM di Kota Ternate. TAP, bagi saya merupakan suatu kenikmatan tersendiri, dimana saya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat pelaksana kegiatan. Program PLBPM banyak menyentuh masyarakat, karena semua aspirasi masyarakat ditampung dalam suatu program kerja dan masyarakat sendirilah yang melaksanakannya.

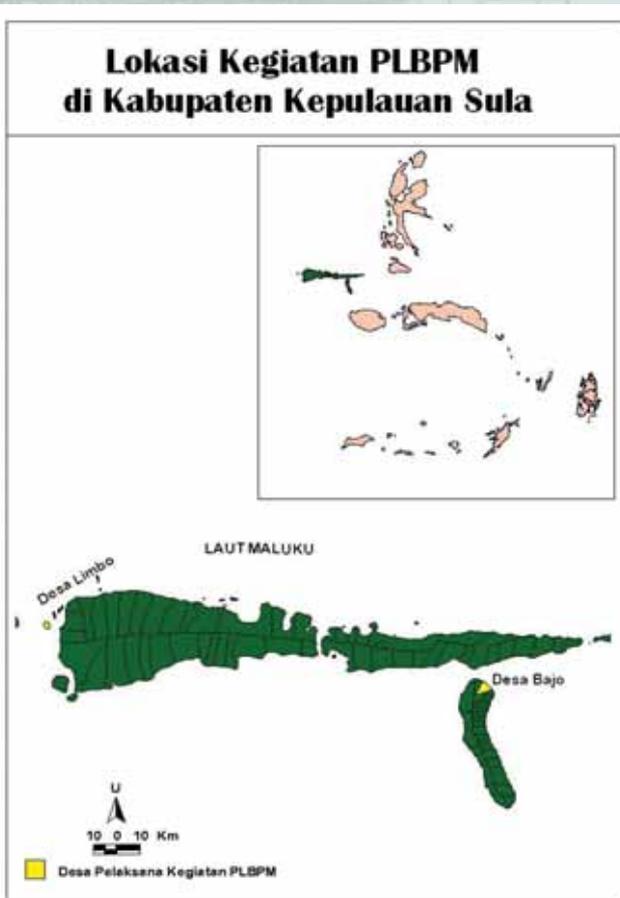


Rizal Ibrahim, S.Pi dilahirkan di Kota Ternate pada tanggal 18 Juli 1977. Setelah tamat Sekolah Dasar di Ternate kemudian jenjang SMP dan SMU dilanjutkan di Pondok Pesantren Moderen IMMIM yang selesai pada tahun 1996 dan kembali ke Kota Ternate. Pada tahun tersebut, bekerja di perusahaan MTC yang bergerak dibidang hasil laut yaitu mutiara di Bacan (Maluku Utara). Pada tahun 1998, melanjutkan pendidikan di Universitas Khairun Ternate sebagai mahasiswa Perikanan. Tahun 2002, mengikuti program magang ke Jepang. Setelah kembali, melanjutkan kuliah hingga selesai pada tahun 2009 dan bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM di Kota Ternate. Saya tertarik pada program PLBPM ini, karena sangat menyentuh masyarakat dengan menata desa dengan usulan dari masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.



Muhammad Irwan Abdullah, SP lahir pada tanggal 11 Juni 1976 di Kota Ternate. Setelah tamat Sekolah Dasar Islamiyah 5 di Kota Ternate kemudian melanjutkan SMP dan SMA ke Pondok Pesantren Moderen IMMIM yang selesai pada tahun 1995 dan kembali ke Kota Ternate, untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Budidaya Fakultas Pertanian Universitas Khairun Kota Ternate yang lulus pada tahun 2000. Tahun 2002, mengikuti usaha dalam Jasa Kontruksi hingga tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009, bekerja sebagai Tenaga Ahli Pendamping (TAP) PLBPM Kota Ternate. Pembelajaran dari program PLBPM sangat menyentuh masyarakat sehingga pembelajaran tersebut dapat berlanjut demi kesejahteraan masyarakat di masa akan datang.





Kepulauan Sula

KABUPATEN



Mewujudkan Impian dan Harapan Desa Pesisir Kabupaten Kepulauan Sula

Oleh : Sugeng Wahyudi



Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibukota Sanana terletak paling selatan dan barat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate yang merupakan ibukota provinsi sekitar 284 Km dan dapat ditempuh melalui penerbangan udara atau pelayaran laut. Luas wilayah kabupaten ini sekitar 24.082,30 Km² yang terdiri dari 19 kecamatan dan 130 desa. Berdasarkan data P4B tahun 2004, jumlah penduduk kabupaten ini sekitar 124.784 jiwa. Potensi unggulan pada saat ini bertumpu pada sektor kehutanan dan perikanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Konsentrasi aktifitas penduduk sebagian besar berada pada daerah pesisir yang lebih datar, dibandingkan dengan pulau yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan (gunung). Pada umumnya wilayah Kepulauan Sula berada pada ketinggian 0 -

100 meter di atas permukaan air laut. Usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula masih bersifat perikanan rakyat. Produksinya sangat beragam namun pemanfaatan untuk kedua komoditas ini belum maksimal.

Kegiatan PLBPM di Kabupaten Kepulauan Sula baru dilaksanakan pada tahun 2009. Fokus kegiatan di dua desa yaitu Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara dan Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat. Kegiatan difokuskan untuk memperbaiki kualitas lingkungan fisik permukiman penduduk dan pembangunan sarana air bersih di kedua desa yang menjadi

hingga mencapai Desa Bajo. Sedangkan perjalanan laut dapat ditempuh dari Pelabuhan Sanana hingga menuju ke Pelabuhan Desa Bajo. Masyarakat desa Bajo terdiri dari suku Buton, Bugis, Jawa dan Manado. Mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai nelayan, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, petani, ABRI/Polisi dan swasta lainnya. Desa Bajo yang terletak di utara kota Sanana mempunyai jumlah penduduk 1150 jiwa, 258 KK, dengan luas desa sekitar 1424 M² yang berada pada dataran rendah dengan potensi perikanan yang cukup beragam.

Sedangkan untuk Desa Limbo dapat dicapai melalui perjalanan laut saja karena merupakan pulau tersendiri yang merupakan bagian dari Kecamatan Taliabu Barat dengan ibukota di Bobong. Dari Pelabuhan Sanana menuju Pulau Limbo bisa melalui pelabuhan Kecamatan Gela, pelabuhan Kecamatan Lede dan Nggele, kemudian langsung ke pelabuhan Limbo.

lokasi pelaksanaan, mengingat kondisi fasilitas yang ada masih sangat minim.

Desa Bajo dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur laut. Dengan jalur darat, desa ini dapat ditempuh melalui kota Sanana menuju Kecamatan Sanana Utara yang melewati Desa Waifaara, Desa Kampung Baru

Penduduk Desa Limbo sebagian besar beretnis Buton. Dengan kehidupan sehari-hari adalah nelayan dan swasta. Desa Limbo yang terletak di Taliabu bagian selatan Kabupaten Kepulauan Sula, mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.100 jiwa dengan 230 KK. Luas desa ini mencapai 5.500 M² dengan bentuk topografinya berupa dataran rendah. Kegiatan usaha perikanan di desa Limbo meliputi bidang penangkapan ikan laut dan perairan umum, serta budidaya rumput laut yang mempunyai potensi cukup besar.

Masyarakat di kedua desa pelaksana tersebut, menyambut baik kegiatan ini. Salah satu

buktinya adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan rebug desa dengan menyampaikan ide-ide untuk perbaikan lingkungan dan bersama TAP menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Manfaat kegiatan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, dimana desa terlihat lebih rapi dan bersih dan masyarakat bisa menikmati air bersih untuk kehidupan sehari-hari dengan dibangunnya fasilitas air minum. Semua ini diharapkan berimplikasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembelajaran singkat dari kegiatan PLBPM ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat telah berupaya untuk merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasil dari jerih

upaya sendiri. Masyarakat sadar betapa pentingnya arti penataan lingkungan permukiman, dimana hal ini dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rebug desa serta kegiatan gotong royong pembangunan fisik telah menumbuhkan kembali kebersamaan masyarakat desa. Dengan terbangunnya sarana air bersih, dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh air bersih untuk mandi dan minum sehingga masyarakat desa bisa hidup dengan layak dan sehat. ●

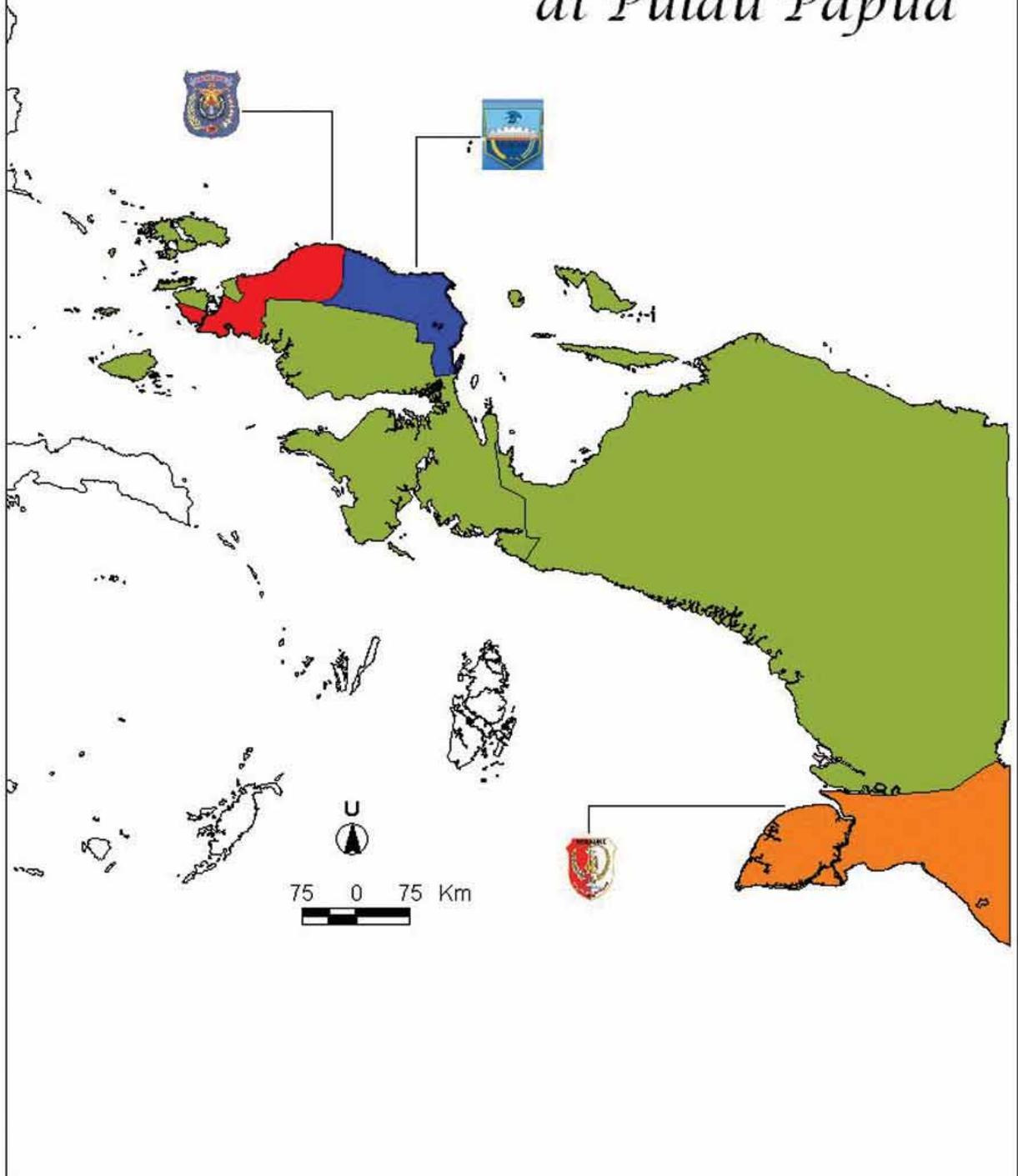
Kegiatan PLBPM Tahun 2009 di Kepulauan Sula

Kegiatan PLBPM	Desa Bajo	Desa Limbo
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 unit	1 unit
- Rehab perumahan Nelayan	15 Unit	13 Unit
- Pembangunan Sarana Air Bersih	1 Paket	1 Paket

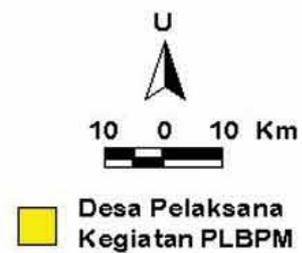
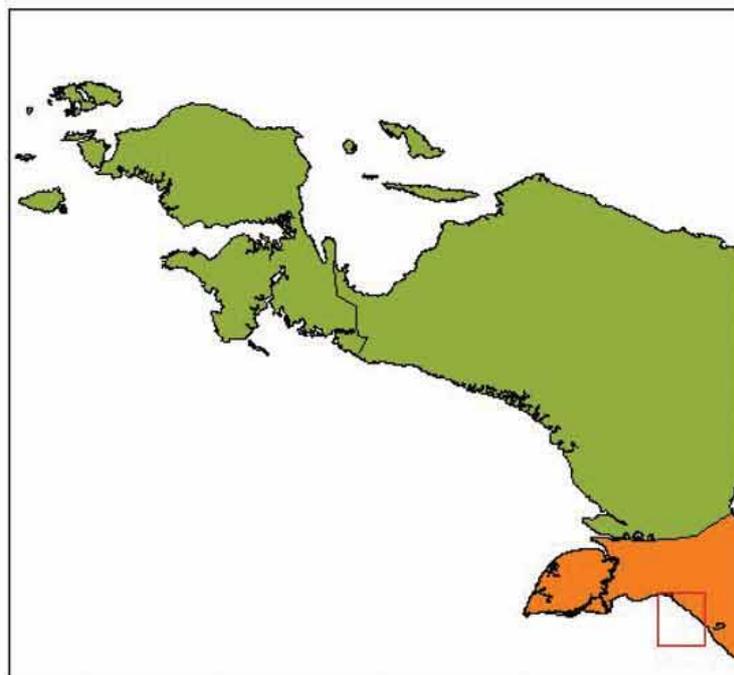
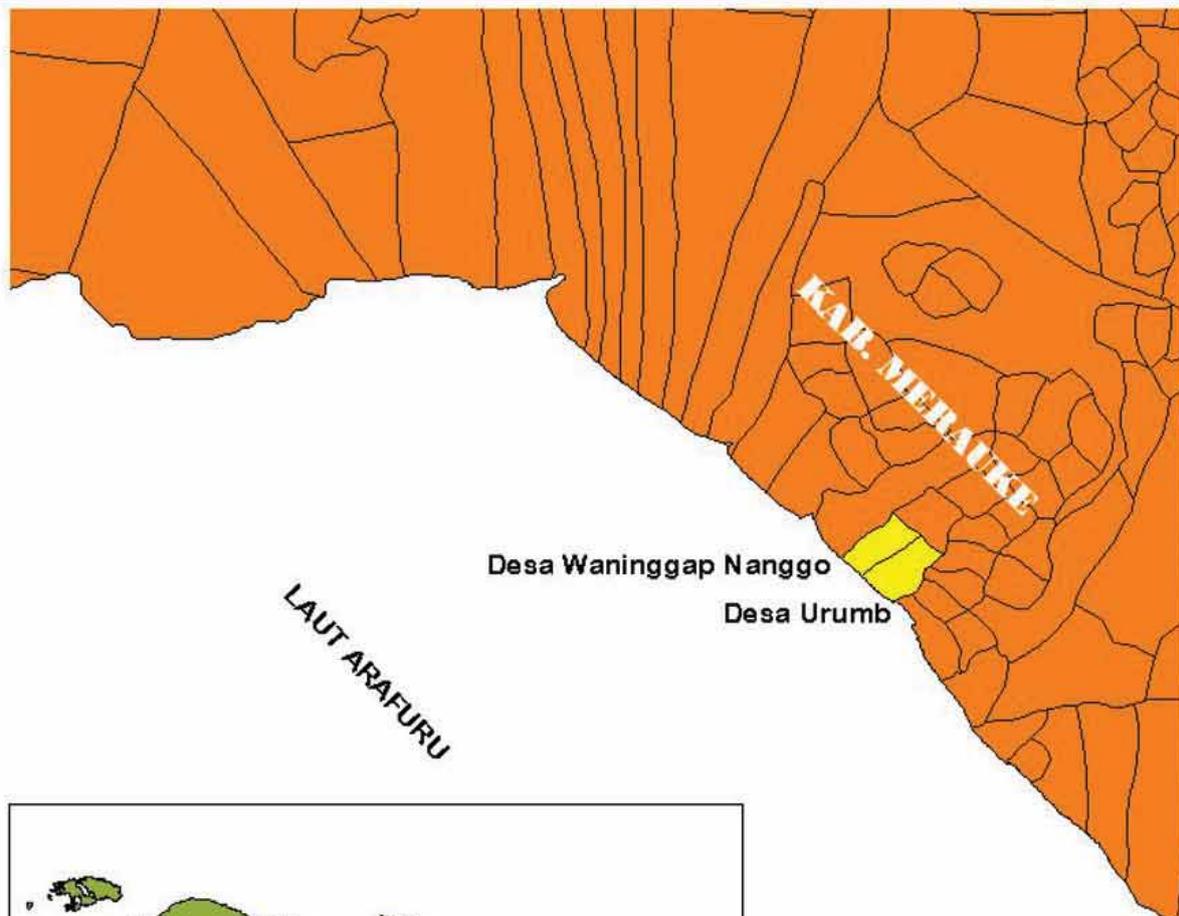


PLBPM

di Pulau Papua



Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM di Kabupaten Merauke





Penataan Kawasan Pesisir Pantai Urumb dan Wanningap Nanggo Distrik Semangga Kabupaten Merauke

oleh: Yoseph P Seralarat, Donal R.E Sihombing dan Ardin A Randan Sau



Wilayah laut Kabupaten Merauke memiliki sumberdaya yang berlimpah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan sebagai sumber ekonomi. Namun karena tidak didukung kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut, serta kurangnya sarana-prasarana infrastruktur dan modal yang memadai maka pemanfaatannya belum optimal. Usaha penangkapan yang dilakukan nelayan lokal terbatas pada penangkapan secara tradisional sehingga hasilnya kurang mencukupi kebutuhan hidup. Untuk meningkatkan produktifitas, umumnya masyarakat bergantung pada pihak luar dan dimanfaatkan sebagai asset pendukung produksi. Ketidakberdayaan nelayan lokal juga diakibatkan belum berpihaknya jaringan kemitraan terutama dalam aspek pemberdayaan sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat pesisir semakin memprihatinkan.

Pada tahun 2009 Kabupaten Merauke diberikan kesempatan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K) untuk melakukan penataan kawasan pesisir melalui program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Sesuai dengan visinya, PLBPM dikembangkan untuk meningkatkan



kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara lestari, hal ini sangat tepat diterapkan di Pulau Papua khususnya di Kabupaten Merauke.

Pelaksanaan program PLBPM di Kabupaten Merauke diawali dengan menentukan kampung yang menjadi pelaksana kegiatan, melalui Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD). Program PLBPM di Kabupaten Merauke

dilaksanakan di dua Kampung yaitu Kampung Urumb dan Kampung Wanninggap Nanggo. Kedua kampung ini dipilih oleh FKTD yang dianggap memenuhi kriteria sebagai Kampung pelaksana kegiatan karena letak kampung yang berada di kawasan pesisir dengan infrastruktur kampung yang cukup memperhatikan.

Kampung Urumb dan Wanninggap Nanggo merupakan kampung yang terletak di bagian selatan Pulau Papua. Kedua Kampung ini merupakan daerah pesisir dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Penghuni kedua kampung ini 80 % merupakan penduduk lokal atau penduduk asli Papua tepatnya Suku Marind. Kampung Urumb merupakan bagian dari Distrik Semangga dengan luas wilayah sekitar 40 km². Kampung ini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Serapu, Urumb dan Notif yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Kampung ini dapat dijangkau melalui perjalanan darat menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit dari kota Kabupaten Merauke. Kawasan permukiman masyarakatnya berada di sepanjang jalan yang dekat dengan pantai. Kondisi bangunan rumah di kampung ini 70% terbuat dari bahan papan. Jumlah masyarakat yang berdomisili di kampung ini mencapai 1.000 jiwa yang terdiri dari 200 KK. Dari jumlah tersebut, 80% bekerja sebagai petani dan nelayan. Hasil pertanian di daerah ini berupa pisang, kelapa dan tanaman pangan lainnya. Sedangkan hasil tangkapan nelayan lokal berupa udang dan ikan pelagis kecil.

Kampung Wanninggap Nanggo terletak di

Tabel Kegiatan PLBPM di Kabupaten Merauke

JENIS KEGIATAN	Kampung Urumb	Kampung Wanninggap Nanggo
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 paket	1 paket
Pemasangan jaringan dan instalasi listrik	290 Unit	290 Unit
Pembangunan Sumur air bersih	3 Unit	3 Unit
Pembangunan MCK	2 Unit	2 Unit

dekat Kampung Urumb yang hanya berjarak 50 meter. Luas Kampung Waningsap Nanggo kurang lebih 30 km². Kampung ini juga terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Yatom, Dusun Bahor dan Dusun Wendu. Jumlah penduduk kampung ini adalah 800 jiwa dan terdiri atas 125 KK. Mata pencaharian masyarakat di kampung ini juga 80 % bekerja sebagai petani dan nelayan.

Tahap awal kegiatan PLBPM adalah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Visi dan Misi PLBPM serta tujuan yang hendak dicapai dalam proram ini. Acara ini dihadiri oleh Aparat Kampung, tokoh adat dan tokoh agama yang dilaksanakan di Balai Kampung Waningsap Nanggo. Sosialisasi untuk kedua kampung tersebut dilaksanakan di satu tempat karena mengingat letak kedua kampung yang berdekatan. Pada kesempatan yang sama, kami pun membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan menunjuk motivator yang berasal dari kedua Kampung tersebut.

Masyarakat Kampung Urumb dan masyarakat Kampung Waningsap Nanggo

sangat antusias dan bahagia dengan adanya program PLBPM tahun 2009. Masyarakat kedua kampung tersebut sangat mengharapkan adanya suatu perubahan fisik pada kampung mereka. Salah satu harapan masyarakat adalah adanya sarana penerangan, hal ini karena belum adanya listrik yang bisa dimanfaatkan. Harapan masyarakat kedua Kampung untuk memperoleh fasilitas penerangan terlihat dari hasil keputusan dalam rembug kampung dimana dari beberapa isu yang ada di dalam kedua kampung tersebut fasilitas penerangan menjadi prioritas utama. Isu lain yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah kurangnya air bersih dan MCK. Kedua isu tersebut akan dilaksanakan setelah isu prioritas utama dan itu pun dilaksanakan jika masih tersisa dana yang mencukupi untuk pembuatan sumur dan MCK.

Setelah rembug kampung dan menghasilkan suatu keputusan bersama yang menjadi isu prioritas utama dan beberapa isu lainnya, dilanjutkan dengan membuat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Kemudian dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir untuk kedua kampung.

Masyarakat ke dua Kampung turut berpartisipasi dalam pemasangan instalasi listrik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat dalam mempersiapkan dan membersihkan rumah dari kotoran dan debu yang dapat mengganggu pemasangan instalasi listrik. Setelah pemasangan instalasi listrik di setiap rumah kegiatan selanjutnya adalah pemberian 1 unit mesin genset dengan daya 1.000 watt kepada setiap rumah.

jangka waktu yang lama maka aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh semua warga yang menerima mesin genset. Isi surat pernyataan tersebut adalah bahwa semua fasilitas yang diberikan kepada masyarakat oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Program PLBPM Tahun Anggaran 2009 tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan / dijual kepada pihak lain serta semua sarana



Dalam setiap kegiatan motivator selalu semangat dalam memberikan pengarahan dan ikut berpartisipasi dalam membangun dan menata kawasan pesisir tersebut. Adanya sarana penerangan dan sarana air bersih serta pembangunan MCK bagi ke dua Kampung yang difasilitasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui program PLBPM berawal dari suatu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik oleh masyarakat sehingga hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Untuk menjaga sarana infrastruktur yang telah dibangun terutama sarana penerangan agar tetap berlanjut dan dapat dinikmati dalam

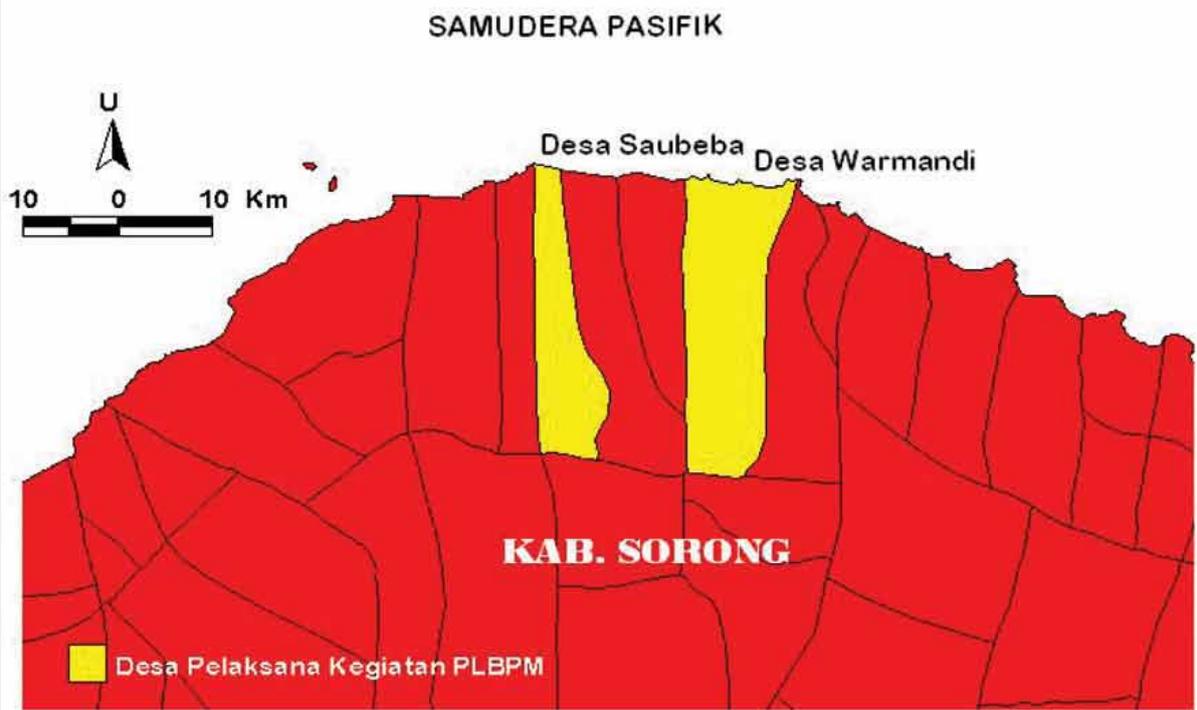
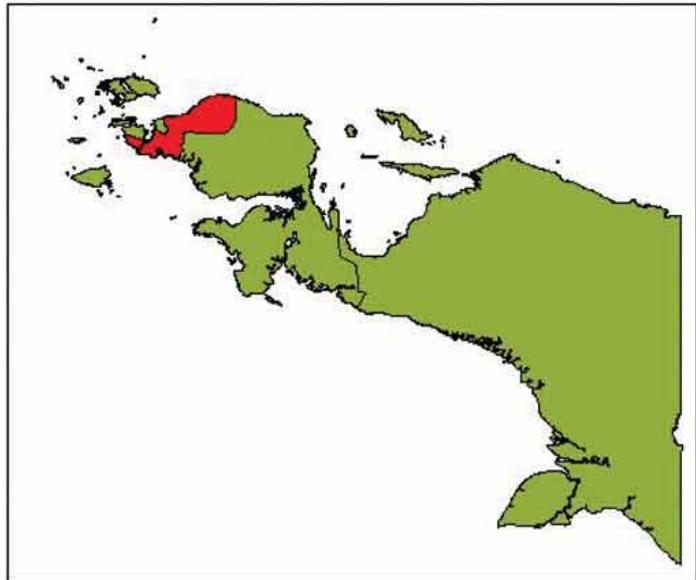
seperti MCK dan Sumur Air Bersih harus dirawat agar dapat digunakan dan dinikmati oleh semua masyarakat.

Pembinaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan selama tahun berjalannya program PLBPM untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh TAP bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat tidak tergantung pada pihak luar, tetapi dapat bekerja sama dalam hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. ●



2008/08/02 14:16

Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM di Kabupaten Sorong





Menata Lingkungan Desa Pesisir Kabupaten Sorong

Oleh: Yanti Sriani iji dan Fermince naa



Kabupaten Sorong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian Utara Pulau Papua. Kabupaten Sorong yang terkenal dengan sebutan Kota Minyak ini, memiliki pesisir yang cukup luas. Secara administratif kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sebelah timur, sebelah utara dengan Samudera Pasifik, sebelah barat dengan Kabupaten Raja Ampat dan sebelah selatan dengan Kabupaten Sorong Selatan.

Pada tahun 2009, Kabupaten Sorong mendapat kesempatan untuk menata desa pesisirnya melalui kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Fokus kegiatan akan dilakukan di 2 desa pesisir yaitu Desa Saubeba dan Desa Warmandi.

Desa Saubeba merupakan bagian dari Distrik Abun yang luasnya 184 km². Topografi desa ini berupa dataran rendah dengan ketinggian 50 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk yang menghuni desa ini adalah 140 jiwa dan terdiri dari 34 KK. Tingkat pendidikan masyarakat terdiri dari 10 orang lulusan SD, 2 orang lulusan SMP dan 2 orang lulusan SMA. Permukiman masyarakat desa ini umumnya terpusat di pinggiran pantai, dengan mayoritas bangunan rumah masyarakat yang sangat sederhana dan hanya sebagian kecil yang mempunyai rumah semi permanen. Kondisi infrastruktur permukiman di desa ini masih minim, dimana kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti jalan lingkungan yang tidak tertata rapi, jalan desa ditutupi dengan rumput ilalang dan belum adanya pagar di tiap rumah.

Sedangkan Desa Warmandi juga merupakan bagian dari Distrik Abun dengan luas 140 km². Topografi desa ini berupa dataran rendah dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk di desa ini adalah 111 jiwa dan terdiri dari 20 KK. Tingkat pendidikan masyarakat di desa ini adalah 5 orang lulusan SD, 3 orang lulusan SMP, 5 orang lulusan SMA dan 1 orang lulusan sarjana. Permukiman di desa ini, terpusat di pinggiran pantai dan mayoritas bangunan rumah masyarakat yang permanen dan semi

permanen.

Karena tingkat pendidikan masyarakat desa Saubeba dan Warmandi relatif rendah, maka tingkat pemahaman mereka juga rendah. Minimnya sumber daya manusia di desa ini merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana Tenaga Ahli Pendamping (TAP) agak kesulitan dalam melakukan pendampingan masyarakat seperti saat pelaksanaan rebug desa. Mata pencaharian utama penduduk di kedua desa ini adalah berkebun. Dengan tanaman pokok yaitu kelapa, coklat dan pisang. Potensi laut yang dimiliki oleh kedua desa ini sangat besar. Hasil perikanannya berupa udang, lobster dan ikan bawal. Namun sayangnya potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh



Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Kegiatan PLBPM

Kegiatan	Desa Saubeba	Desa Warmandi
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir	1 paket	1 paket
Pembangunan sistem penerangan untuk seluruh rumah warga desa	1 unit	
Pembangunan MCK	3 unit	2 unit
Pembangunan rumah guru	1 unit	
Pengadaan meja dan bangku sekolah	-	60 unit
Pengadaan mesin babat rumput	2 unit	2 unit
Penanaman pohon kasuari	1 paket	1 paket
Pembangunan balai desa	-	1 unit



PLBPM berupa bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan fisik. Dalam pelaksanaan kegiatan PLBPM, motivator desa memberikan pengarahan-pengarahan untuk memacu semangat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Manfaat kegiatan PLBPM banyak dirasakan oleh masyarakat desa lokasi pelaksanaan. Kondisi masyarakat desa menjadi lebih nyaman dengan dibangunnya kebutuhan utama seperti jalan, MCK dan air bersih. Dengan adanya fasilitas fisik berupa infrastruktur dan sarana yang dibangun, lingkungan desa menjadi tertata dan tampak bersih. Penanaman pohon kasuari membuat lingkungan pesisir menjadi tampak hijau dan diharapkan perbaikan ekosistem pesisir dapat menjaga pantai dari abrasi. Untuk menjaga dan memelihara semua hasil kegiatan PLBPM, masyarakat sepakat membuat peraturan desa mengenai lingkungan dan sanggup bergotong royong setiap bulan untuk menjaga semua sarana dan prasarana yang dilakukan dalam program di desa mereka. ●

masyarakat setempat.

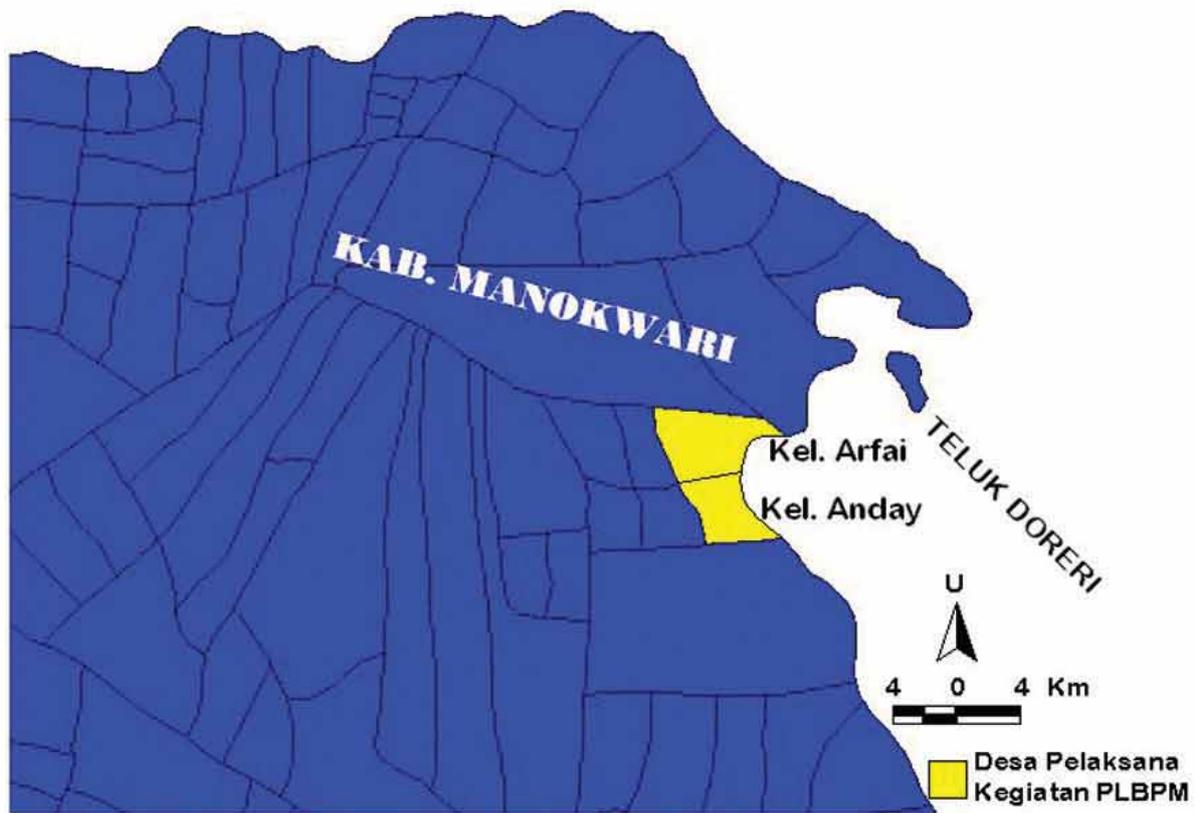
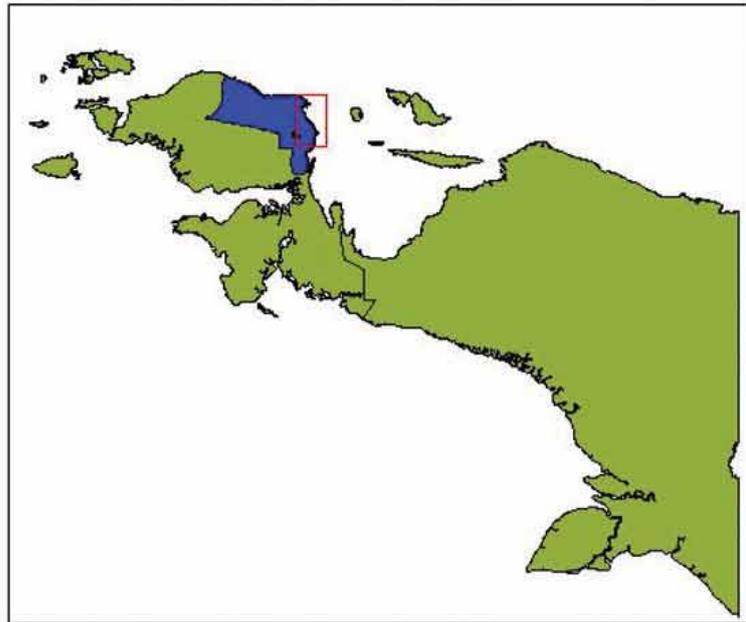
Aksesibilitas Desa Warmandi dan Desa Saubeba hanya dapat dijangkau dengan angkutan laut, yang biasanya menggunakan *speedboat*. Sarana transportasi laut yang melayani mobilitas penduduk dari Kota dan Kabupaten Sorong menuju pusat-pusat permukiman adalah kapal perintis, yang hanya ada satu kali dalam sebulan. Sedangkan armada lainnya belum ada, dan jika ingin pergi ke desa tersebut harus menyewa *speedboat*. Waktu yang diperlukan untuk menuju desa ini sekitar 7 jam dari Kota atau Kabupaten Sorong.

Sosialisasi kegiatan PLBPM dilakukan oleh tim pengelola dari Kabupaten Sorong TAP, Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan motivator desa, dalam melakukan rembug desa. Masyarakat desa sangat senang dengan adanya kegiatan PLBPM. Kegiatan ini membuka wawasan masyarakat untuk membangun dan menata lingkungan desa sendiri. Hanya saja kami mengalami kesulitan dalam melakukan rembug desa ini karena hampir sebagian besar masyarakat belum bisa baca tulis.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan



Desa Pelaksana Kegiatan PLBPM di Kabupaten Manokwari





Menata Desa Andai dan Desa Arfai di Kabupaten Manokwari

Oleh: Jhonal Thio



Kabupaten Manokwari merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan pada tahun 2000. Luas wilayah kabupaten ini sekitar 14.448,50 Km² dengan panjang garis pantainya mencapai 200 km yang terdiri dari 100 desa pesisir. Untuk menuju kabupaten ini dapat menggunakan pesawat udara dari Jakarta dan membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam.

Langkah pertama dalam kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah survey lokasi pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh tim Forum Koordinasi Teknis Daerah (FKTD), tim Teknis Pengendali Daerah (TPD) dan Tenaga Ahli Pendamping (TAP) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PLBPM. Dari hasil survey tersebut, terdapat 3 calon lokasi yaitu Desa Sowi, Desa Arfai dan Desa Anday. Tim FKTD harus menentukan 2 lokasi yang tepat untuk dijadikan pelaksana kegiatan PLBPM. Tim FKTD sepakat agar kegiatan PLBPM tahun 2009 dilaksanakan di Desa Andai dan Desa Arfai. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah adanya degradasi lingkungan, kurangnya sarana permukiman berupa sulitnya jalan penghubung antara lokasi pemukiman menuju pantai, kurangnya sarana air bersih, sanitasi yang buruk dan belum tersedianya jaringan listrik.

Desa Arfai termasuk wilayah administrasi distrik Manokwari Selatan, dengan luas wilayah ± 30 Km², topografi desa ini berupa dataran rendah hingga sedang dengan ketinggian 1-50 m diatas permukaan laut. Untuk menempuh desa ini hanya memerlukan waktu 20 menit dari pusat kota dengan jalur darat. Pemukiman di desa ini tersebar sepanjang bibir pantai dengan kondisi lingkungan pemukiman yang buruk. Mayoritas bangunan rumah di desa ini setengah permanen dengan kondisi infrastruktur yang tidak teratur. Masyarakat desanya 60 % bekerja sebagai nelayan tangkap,



sisanya bekerja sebagai pedagang, PNS, wiraswasta.

Desa Anday yang mempunyai luas wilayah 5 km² terletak pada kecamatan yang sama dengan Desa Arfai dan terletak pada ketinggian 2-5 m diatas permukaan laut. Jumlah penduduk di desa ini sekitar 250 jiwa dan terdiri dari 69 KK

Jenis Kegiatan yang dilakukan melalui Kegiatan PLBPM di Kabupaten Manokwari

Kegiatan PLBPM	Desa Andai	Desa Arfai
Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir	1 Paket	1 Paket
Pembuatan Infastruktur jalan dan jembatan kayu	250 m	-
Pembuatan jalan Paving Block	-	400 m ²
Pembangunan Menara air bersih dan profil tank	4 unit	4 unit
Pembangunan MCK	-	10 unit
Pembangunan TPS	2 Unit	2 Unit
Perbaikan Rumah	-	1 Unit
Pembuatan Lantai sumur Cor	32 unit	-



yang bekerja sebagai nelayan. Tipe perumahan di desa ini adalah semi permanen yang telah tertata rapi, karena desa ini merupakan relokasi desa untuk korban gempa dan kebakaran. Sebagai permukiman baru, masih terdapat permasalahan seperti tidak adanya jalan menuju bibir pantai untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan, tidak ada tambatan perahu, tidak tersedianya sarana air bersih, serta belum ada jaringan listrik. Hasil tangkapan nelayan di desa ini berupa ikan pelagis seperti tuna dan tongkol. Desa ini merupakan pemasok utama

kebutuhan masyarakat Kota Manokwari. Untuk menuju desa ini, dapat ditempuh jalur darat sekitar 30 menit dari pusat kota.

Pada awalnya, masyarakat Desa Arfai beranggapan bahwa kegiatan PLBPM hanya proyek yang menguntungkan pihak tertentu. Hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran masyarakat saat diadakan rembug desa yang pertama. Akan tetapi, rembug desa dapat berjalan dengan lancar sehingga terbentuk Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan Motivator. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Desa Arfai adalah pembangunan jalan paving block sepanjang 200 m yang terbagi dalam 7 ruas jalan kampung, penyediaan sarana air bersih berupa 4 tower air minum, 10 unit WC umum dan 2 unit kamar mandi umum, merehabilitasi 1 unit rumah salah satu anak adat (tokoh masyarakat asli Desa Arfai), serta penyusunan rencana tata ruang dan zonasi desa.

Pelaksanaan kegiatan PLBPM di Desa Anday mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat saat rembug desa semua masyarakat menyampaikan kebutuhannya. Kegiatan prioritas yang dilakukan di desa ini, berupa pembangunan sarana penyedia air bersih sebanyak 4 unit yang dilengkapi dengan 2 unit genset sebagai penggerak pompa air, pembangunan jembatan kayu sepanjang 250 m diatas rawa tanpa harus menebang hutan mangrove yang dimaksudkan untuk membuka akses desa menuju pantai serta penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir untuk 10 tahun yang akan datang. ●

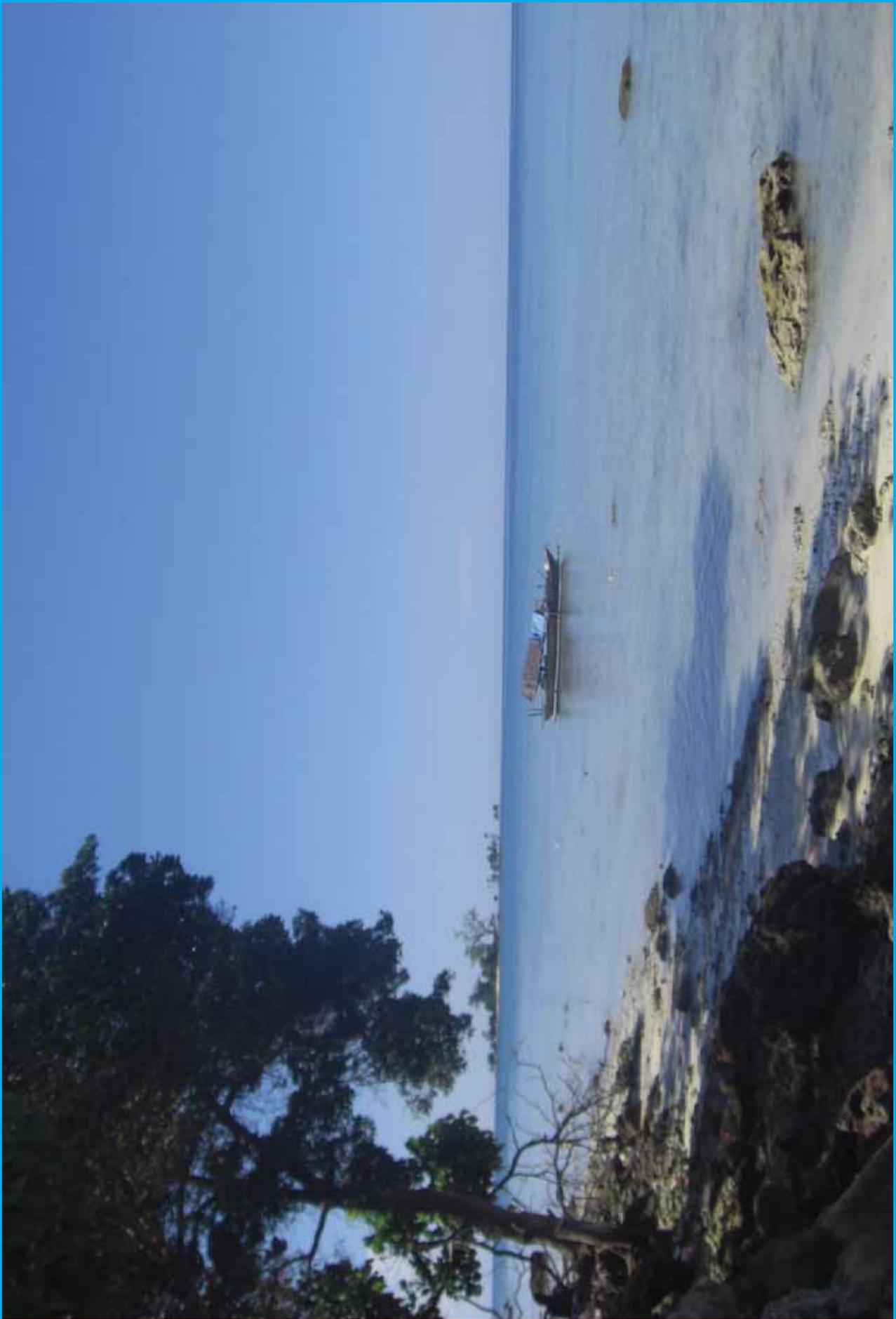


Biografi

Sekilas Tentang Penulis



Jhonal Thio, S.Pi, lahir di Manokwari pada Tanggal 27 Maret 1985, menghabiskan masa kecil dan menamatkan seluruh pendidikan formal di Tanah Papua Tercinta. Pada tahun 2002 diterima di Universitas Negeri Papua (UNIPA) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan meraih gelar S.Pi pada tahun 2007. Selama kuliah aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan dan beberapa LSM lokal dan internasional, sehingga pada akhir perkuliahan mendapat biaya penelitian Conservation Intenational (CI). Hobi berpetualang, membuat penulis mengenal berbagai karakteristik masyarakat wilayah pesisir di pulau Papua. Hal tersebut menjadi modal sebagai seorang TAP yang tangguh, dengan membantu masyarakat dalam menata dan mengelola seluruh potensi yang dimiliki masyarakat pesisir, dengan motto “KALAU BUKAN SEKARANG SIAPA LAGI, KALAU BUKAN KITORANG SIAPA LAGI” yang akan menata kehidupan kita. ●



Senutup



Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) sepanjang pelaksanaannya tentunya menghadapi siklus tumbuh dan berkembang dan mengalami pengujian sejumlah kendala struktural dan institutional yang dihadapinya. Isi **Buku Profil Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat** ini diharapkan mampu memberikan gambaran ringkas mengenai hal tersebut dan memberikan wawasan yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan PLBPM T.A 2009 telah mencapai tahap akhirnya. Di masa mendatang, program ini akan diintegrasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan. Melalui pengintegrasian ini diharapkan dihasilkannya sebuah program pemberdayaan masyarakat yang aplikatif dan adaptif terhadap perubahan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Setelah melalui rangkaian diskusi dan input tulisan dari para Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada masing-masing Kabupaten / Kota pelaksana PLBPM, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, telah terselesaikan sebuah Buku Profil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Tersusunnya buku ini tentunya merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak baik di Pusat maupun Pemerintah Daerah. Atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama pelaksanaan program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan penyusunan buku profil ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Bupati Serdang Berdagai beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Labuhan Batu beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Tapanuli Tengah beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Pesisir Selatan beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Padang Pariaman beserta jajaran dinas teknis terkait
- Walikota Pariaman beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Pasaman Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Bengkalis beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Tanjung Jabung Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Bengkulu Utara beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Musi Banyuasin beserta jajaran dinas teknis terkait
- Walikota Palembang beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Bangka Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Lampung Selatan beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Lampung Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Tangerang beserta jajaran dinas teknis terkait
- Bupati Pandeglang beserta jajaran dinas teknis terkait



- Walikota Jakarta Utara beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Kepulauan Seribu beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Ciamis beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Cirebon beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Indramayu beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Tegal beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Jepara beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Demak beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Batang beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Brebes beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Walikota Pekalongan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Gresik beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Trenggalek beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Walikota Surabaya beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Sampang beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Sumenep beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Pamekasan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Malang beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Pacitan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Pasuruan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Tabanan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Pontianak beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Pulang Pisau beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Kotawaringin Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Penajam Paser Utara beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Nunukan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Bengkayang beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Katingan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Walikota Bitung beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Selayar beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Boul beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Banggai Kepulauan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Tojo Una-Una beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Walikota Bima beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Nagakeo beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Ende beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Maluku Tenggara Barat beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Halmahera Utara beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Walikota Ternate beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Kepulauan Sula beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Merauke beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Sorong beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Bupati Manokwari beserta jajaran dinas teknis terkait
 - Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Sesditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktur Prasarana Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 - Direktur Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mengawal pelaksanaan program PLBPM sejak awal diinisiasinya program ini hingga saat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan buku ini. Pada kesempatan ini juga diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu, atas upaya dan kontribusinya dalam rangka penyusunan buku ini.
- Semoga buku ini dapat menjadi materi pembelajaran bagi kita semua dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, Desember 2009

**Plh. Direktur Jenderal
Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan
Perikanan**

M. Syamsul Maarif

